



DOKUMENTASI
BADAN ANALISA FISKAL
DEPARTEMEN KEUANGAN RI

NOTA KEUANGAN
DAN
RANTJANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANDJA NEGARA
TAHUN 1971/1972

353.007 22

IND

N

REPUBLIK INDONESIA

PERPENTATAN
BADAN ANALISA FISKAL DAN MONETER
DEPARTEMEN KEUANGAN RI



REPUBLIK INDONESIA

02683

MENTERI KEUANGAN

DIJAKARTA, 4 Januari 1971.

No. R-01/MK/7/1/1971.

Lampiran : 425 (Empat ratus dua puluh lima) eks.

Perihal : Nota Keuangan R.A.P.B.N. 1971/1972.

KEPADA

Jth. Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Gotong Royong
di

D J A K A R T A.

Bersama ini kami sampaikan 425 (Empat ratus dua puluh lima) eksemplar Nota Keuangan R.A.P.B.N. 1971/1972 dengan disertai permohonan, kiranya dengan perantaraan Saudara dapat disampaikan kepada para Anggota yang terhormat, untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Atas perhatian serta bantuan Saudara, terlebih dahulu kami utjapkan terima kasih.-



MENTERI KEUANGAN,

Ali Wardhana
ALI WARDHANA.

TEMBUSAN :

1. Jth. Bapak Menteri Negara EKUIN.
2. Jth. Bapak Menteri Negara Penghubung Antar Pemerintah dengan MPRS/DPRGR/DPA.
3. Jth. Sekretaris Kabinet.
4. Jth. Sekretaris Jenderal Dep. Keuangan.
5. Jth. Kepala Biro Hukum.
6. Jth. Kepala Biro Umum.

ERRATA

NOTA KEUANGAN DAN R.A.P.B.N. TAHUN 1971/1972

	Letaknja	Tertjetak	Seharusnja
1.	Halaman 42, alinea terakhir	... Pemerintah selalu mengusahakan tahap demi tahap ...	... Pemerintah selalu mengusahakan agar ta- hap demi tahap ...
2.	Halaman 44, baris ke - 3 dari atas	... Pemerintah selalu memperlihatkan agar...	... Pemerintah selalu memperhatikan agar...
3.	Halaman 106, pada Tabel III.3.	1970/1971 167,2 1971/1972 228,6 <u>Angka A.P.B.N.</u>	1970/1971 167,2 ^{1/} 1971/1972 228,6 ^{1/} <u>1/ Angka A.P.B.N.</u>
4.	Halaman 113, pada Tabel III.10.	1. Hutang 37,0 14,0 lama (sebelum 1966) 2. Hutang 35,2 13,3 baru (sesudah 1966)	1. Hutang 35,2 13,3 lama (sebelum 1966) 2. Hutang 37,0 14,0 baru (sesudah 1966)
5.	Halaman 198, pada Tabel V.6.	Tanpa Minjak 270 Modal Netto 576	Tanpa Minjak ~ 270 Pemasukan Modal Netto 576 +p.m
6.	Lampiran 1, hala- man 15, baris ke-7 dari bawah	841,5 djuta x 31% x Rp.378,- = Rp.99.607 djuta.	841,5 djuta x 31% x Rp.378,- = Rp.98.607 djuta.

DAFTAR ISI :

HALAMAN

DAFTAR TABEL	1
DAFTAR GRAFIK/DIAGRAM	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
B a b I PERKEMBANGAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN	1
1.1. Pembangunan dengan stabilisasi	1
1.2. Perkembangan harga, gaji dan upah	24
1.2.1. Perkembangan harga	24
a. Indeks biaya hidup	25
b. Indeks harga 9 bahan pokok	30
c. Indeks harga beras	31
d. Indeks harga emas dan valuta asing	32
e. Harga hasil bumi ekspor golongan A	36
1.2.2. Perkembangan gaji dan upah	41
1.3. Perkembangan jumlah uang yang beredar	44
1.4. Perkembangan A.P.B.N.	45
1.4.1. Perkembangan penerimaan	46
1.4.2. Perkembangan pengeluaran	49
1.5. Pengawasan keuangan	52
1.6. Perkembangan perbankan	59
1.6.1. Dana perkreditan bank	59
1.6.2. Perkembangan perkreditan bank	60
1.6.3. Perkembangan kredit investasi	61
1.7. Perkembangan hubungan ekonomi luar negeri	62
1.7.1. Perkembangan ekspor dan impor	62
1.7.2. Perkembangan lalu lintas devisa	63
1.7.3. Perkembangan bantuan luar negeri dan pembayaran kembali hutang	64

1.8. Perencanaan produksi dan penanaman modal	65
B a b II PELAKSANAAN A.P.B.N. 1970/1971	69
2.1. Pendahuluan	69
2.2. Penerimaan routine	72
2.2.1. Pajak langsung	73
2.2.2. Pajak tidak langsung	78
2.2.3. Penerimaan non tax	83
2.3. Pengeluaran routine	83
2.3.1. Belanja pegawai/pensiun	84
2.3.2. Belanja barang	86
2.3.3. Subsidi daerah otonom	86
2.3.4. Bunga/tjittjilan hutang	87
2.3.5. Pengeluaran untuk PEMILU dan lain2	88
2.4. Tabungan pemerintah	90
2.5. Penerimaan pembangunan	90
2.5.1. Bantuan program	92
2.5.2. Bantuan proyek	93
2.6. Pengeluaran pembangunan	93
B a b III RENTJANA A.P.B.N. 1971/1972	95
3.1. Pendahuluan	95
3.2. Peningkatan penerimaan dalam negeri	97
3.2.1. Peningkatan pemasukan pajak langsung	101
3.2.2. Peningkatan penerimaan pajak tidak langsung	105
3.2.3. Peningkatan penerimaan minyak	108
3.2.4. Penertiban penerimaan non-tax	109
3.3. Peningkatan penerimaan pembangunan	111
3.3.1. Bantuan program	111

3.3.2. Bantuan proyek	112
3.4. Pengeluaran routine	114
3.4.1. Perbaikan atas tingkat kesedjahteraan pegawai serta pemeliharaan atas aparat Pemerintahan	116
3.4.2. Subsidi daerah otonom dan pembayaran kembali hutang beserta bunga	119
3.4.3. Pengeluaran untuk pemilihan umum dan lain2 pengeluaran routine	120
3.5. Peningkatan tabungan pemerintah	121
3.6. Pengeluaran pembangunan	122
3.6.1. Bidang ekonomi	126
3.6.2. Bidang sosial	127
3.6.3. Bidang umum	127
3.6.4. Bantuan proyek	128
3.7. Perbandingan R.A.P.R.N. 1971/1972 dengan REPALITA I	128
B a b IV PERKEMBANGAN MONETER DAN PERKREDITAN	132
4.1. Perkembangan jumlah uang beredar dan sebab2 perubahannya	132
4.2. Perkembangan dana perkreditan	138
4.3. Perkembangan kredit perbankan	145
4.3.1. Perkembangan pemberian kredit menurut sektor perbankan	145
4.3.2. Perkembangan pemberian kredit menurut sektor kegiatan usaha Pemerintah dan Swasta ..	150
4.3.3. Perkembangan pemberian kredit menurut sektor ekonomi	153

4.3.4.	Perkembangan pemberian kredit bank? pemerintah menurut Daswati I	154
4.3.5.	Kebidjaksanaan suku bunga perkreditan bank	160
4.4.	Perkembangan kredit investasi	162
4.5.	Perkiraan jumlah uang yang beredar dan perkreditan 1971/1972	164
B a b V	PERKEMBANGAN NERATJA PEMBAJARAN DAN LAIR LINTAS DEWISA	167
5.1.	Pendahuluan	167
5.2.	Perkembangan neratja pembajaran	170
5.3.	Realisasi perkembangan ekspor	173
5.4.	Realisasi perkembangan impor	182
5.5.	Perkembangan bantuan luar negeri	189
5.6.	Pembayaran kembali hutang	193
5.7.	Perkiraan neratja pembajaran, 1971/1972	194
5.7.1.	Perkiraan ekspor	194
5.7.2.	Perkiraan impor	196
B a b VI	PERKEMBANGAN PRODUKSI	199
6.1.	Perkembangan pendapatan nasional	199
6.2.	Produksi sektor pangan	203
6.3.	Produksi sektor pertanian lainnya	208
6.3.1.	Perkebunan	208
6.3.2.	Kehutanan	210
6.3.3.	Perikanan	212
6.3.4.	Peternakan	213

6.4.	Produksi sektor industri dan pertambangan	214
6.4.1.	Industri	214
6.4.2.	Pertambangan	220
6.5.	Produksi sektor prasarana	223
6.5.1.	Irigasi	223
6.5.2.	Perhubungan	223
6.6.	Penanaman modal	231
6.6.1.	Perkembangan penanaman modal dalam negeri ..	231
6.6.2.	Perkembangan penanaman modal asing	233
LAMPIRAN 1.	DASAR PERHITUNGAN UNTUK PERHITUNGAN PERHITUNGAN NEGARA R. A. P. B. K. 1971/1972	
LAMPIRAN 2.	RANTJANA ANGGARAN BELANDJA RUTIN 1971/1972	
LAMPIRAN 3a.	PERHITUNGAN ANGGARAN BELANDJA PEMBANGUNAN 1971/1972 DARI SEKTOR SAMPAI PADA DEPARTEMEN / LEMBAGA	
LAMPIRAN 3b.	BIDANG EKONOMI	
LAMPIRAN 3c.	BIDANG SOSIAL	
LAMPIRAN 3d.	BIDANG UTM	
LAMPIRAN 4.	ANGGARAN PEMBANGUNAN BANTUAN PROJEK/BANTUAN TEKNIS 1971 / 1972.	
LAMPIRAN 5.	RANTJANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO TAHUN 1971 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1971/1972	

Tabel I.	1. Prosentase kenaikan indeks biaya hidup di Djakarta, 1969-1970 (Oktober = 100)	24
Tabel I.	2. Indeks biaya hidup, indeks 9 matjam bahan pokok dan indeks beras di Djakarta	26
Tabel I.	3. Indeks biaya hidup berdasarkan 62 matjam barang di Djakarta (Oktober = 100)	28
Tabel I.	4. Harga dan indeks 9 bahan pokok tahun 1970	29
Tabel I.	5. Harga rata2 dan indeks beberapa valuta asing di Djakarta (harga rata2 Oktober 1966 = 100)	33
Tabel I.	6. Harga rata2 dan indeks emas serta kurs dan indeks rata2 BE dan DP di Djakarta (dasar indeks dan harga rata2 Oktober 1966 = 100)	34
Tabel I.	7. Perkembangan harga lokal beberapa hasil bumi golongan A di Indonesia (dalam rupiah per kg)	37
Tabel I.	8. Perkembangan harga beberapa hasil bumi golongan A dipasar internasional	38
Tabel I.	9. Prosentase perubahan upah dan gaji rata2 minimum dan maximum, Djuli 1969 Djuli 1970	42
Tabel I.	10. Perkembangan upah rata2 dan upah nyata untuk berba- gai-bagai sektor, Djuli 1969 - Djuli 1970	43
Tabel I.	11. Perkiraan realisasi A.P.B.N. 1970/1971 (dalam milyar rupiah)	46
Tabel I.	12. Realisasi penerimaan negara, semester I-1970/1971 (dalam milyar rupiah)	47
Tabel I.	13. Realisasi anggaran pengeluaran, semester I-1970/1971 (dalam milyar rupiah)	50

Tabel II.	1. Ringkasan realisasi A.P.B.N., 1968- semester I-1970/1971 (dalam miliar rupiah)	70
Tabel II.	2. Perkembangan jumlah realisasi A.P.B.N., 1968- 1970/1971 (dalam miliar rupiah)	71
Tabel II.	3. Realisasi penerimaan routine semester I-1970/1971 dibandingkan dengan realisasi penerimaan routine semester I-1969/1970 (dalam miliar rupiah)	74
Tabel II.	4. Pajak langsung, 1970/1971 (dalam miliar rupiah)	75
Tabel II.	5. Pajak tidak langsung, 1970/1971 (dalam miliar rupiah)	79
Tabel II.	6. Pengeluaran routine, 1970/1971 (dalam miliar rupiah)	84
Tabel II.	7. Belanja pegawai dan pensiun, 1970/1971 (dalam miliar rupiah)	85
Tabel III.	1. Perkembangan penerimaan dalam negeri, 1966-1971/1972 (dalam miliar rupiah)	98
Tabel III.	2. Perkembangan pemasukan pajak langsung, 1966-1971/1972 (dalam miliar rupiah)	102
Tabel III.	3. Perkembangan penerimaan pajak tidak langsung, 1966-1971/1972 (dalam miliar rupiah)	106
Tabel III.	4. Perkembangan penerimaan minyak, 1966-1971/1972 (dalam miliar rupiah)	109
Tabel III.	5. Perkembangan penerimaan nontax, 1966-1971/1972 (dalam miliar rupiah)	110

Tabel	III.	6. Perkembangan penerimaan pembangunan, 1966- 1971/1972 (dalam milyar rupiah)	112
Tabel	III.	7. Perkembangan penerimaan bantuan proyek, 1969/1970 - 1971/1972 (dalam milyar rupiah)	114
Tabel	III.	8. Perkembangan pengeluaran routine, 1966-1971/1972 (dalam milyar rupiah)	116
Tabel	III.	9. Perintjian belandja pegawai/pensiun, 1971/1972 (dalam milyar rupiah)	118
Tabel	III.	10. Pembayaran kembali hutang-hutang luar negeri 1971/1972	120
Tabel	III.	11. Perkembangan tabungan pemerintah, 1969/1970 - 1971/1972 (dalam milyar rupiah)	121
Tabel	III.	12. Perkembangan pengeluaran pembangunan, 1969/1970 - 1971/1972 (dalam milyar rupiah)	122
Tabel	III.	13. Perbandingan A.P.B.N. 1971/1972 dengan REPELITA I (dalam milyar rupiah)	130
Tabel	III.	14. Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara, 1971/1972 (dalam milyar rupiah)	131
Tabel	IV.	1. Perkembangan jumlah uang yang beredar (dalam milyar rupiah)	134
Tabel	IV.	2. Sebab2 perubahan jumlah uang yang beredar (dalam milyar rupiah)	135
Tabel	IV.	3. Perkembangan jumlah uang yang beredar dan depo- sito dalam arti riil (dalam milyar rupiah)	136
Tabel	IV.	4. Perkembangan dana perkreditan bank (dalam milyar rupiah)	140

Tabel	IV.	5. Perkembangan deposito berjangka bank-bank pemerintah dan tabungan berhadiah 1969	143
Tabel	IV.	6. Perkembangan perkreditan bank menurut sektor ekonomi (dalam miliar rupiah)	148
Tabel	IV.	7. Perkembangan perkreditan bank menurut sektor pemerintah dan sektor swasta (dalam miliar rupiah)	152
Tabel	IV.	8. Perkembangan pemberian kredit menurut Daswadi I tidak termasuk kredit langsung B.I. (dalam djutaan rupiah)	157
Tabel	IV.	8. Lanjutan	158
Tabel	IV.	8. Perkembangan pemberian kredit menurut Daswadi I tidak termasuk kredit langsung B.I. (dalam djutaan rupiah)	159
Tabel	IV.	9. Perkembangan kredit investasi (dalam miliar rupiah)	163
Tabel	IV.	10. Prognosa jumlah uang yang beredar dan perkreditan bank seluruhnya (dalam miliar rupiah)	166
Tabel	V.	1. Perkembangan neratja pembayaran (dalam djutaan US \$)	174
Tabel	V.	2. Realisasi perkembangan nilai ekspor barang2 utama dan barang2 lainnya (dalam djutaan US \$)....	183
Tabel	V.	3. Impor menurut golongan ekonomi (dalam djutaan US \$)	186
Tabel	V.	4. Bantuan luar negeri, per 31 Oktober 1970 (dalam ribuan US \$)	191

Tabel V.	5. Bantuan luar negeri, 1969 - 1970 (dalam ribuan US \$)	192
Tabel V.	6. Perkiraan neratja pembajaran, 1971/1972 (dalam djutaan US \$)	198
Tabel VI.	1A. Pengeluaran atas produk dalam negeri bruto menurut harga pasar (dalam miljar rupiah)	200
Tabel VI.	1B. Pengeluaran atas produk dalam negeri bruto dengan harga pasar 1960 (dalam miljar rupiah) ...	201
Tabel VI.	2. Produksi pertanian, 1967 - 1969 (dalam ribuan ton)	204
Tabel VI.	3. Prognosa produksi bahan pangan penting, 1970 (dalam ribuan ton)	205
Tabel VI.	4. Rentjana realisasi luas pertanaman, hasil padi dan kenaikan hasil padi per hektar BIMAS & INMAS, 1965 - 1970	207
Tabel VI.	5. Produksi beberapa budidaja penting PNP, 1969	210
Tabel VI.	7. Produksi hasil hutan	211
Tabel VI.	8. Perkembangan produksi kayu, semester I-1967 s/d semester I-1969 (dalam ribuan m3)	211
Tabel VI.	9. Perkembangan produksi perikanan, 1968-1970	212
Tabel VI.	10. Perkembangan produksi hasil ternak, 1967-1969 ...	213
Tabel VI.	11. Perkiraan produksi hasil industri, 1968-1970	215
Tabel VI.	12. Indeks harga pasar bebas di Djakarta, Djanuari s/d September 1970	216
Tabel VI.	13. Perkembangan produksi beberapa hasil pertambangan 1968/1969 - 1970/1971	220
Tabel VI.	14. Realisasi produksi pertambangan, 1968/1969 - 1970/1971	221

Tabel	VI.	15. Produksi minyak mentah Indonesia (dalam jutaan barrels)	222
Tabel	VI.	16. Perkembangan alat2 angkutan jalan raya, 1965 - 1969	224
Tabel	VI.	17. Perkembangan angkutan penumpang kereta api seluruh Indonesia, 1965 - 1969	225
Tabel	VI.	18. Volume yang diangkut oleh P.N. Pelni, P.N. Djakarta Lloyd dan P.N. Adhiguna, 1968 - 1970	226
Tabel	VI.	19. Produksi dan jasa maritim, 1968-1970	227
Tabel	VI.	20. Perkembangan produksi angkutan udara, 1967 semester I-1970	227
Tabel	VI.	21. Perkembangan telekomunikasi, 1968-1970	229
Tabel	VI.	22. Rekapitulasi perkembangan proyek penanaman modal dalam negeri dari tahun 1968 s/d Agustus 1970 (dalam jutaan rupiah)	232
Tabel	VI.	23. Proyek penanaman modal asing yang telah disetujui Pemerintah menurut sektor usaha, sifat modal dan realisasi impor, 1967 s/d Agustus 1970 (dalam jutaan US \$)	234
Tabel	VI.	24. Proyek2 penanaman modal asing yang telah disetujui Pemerintah Djambi s/d Agustus 1970 (dalam ribuan US \$)	236
Tabel	VI.	25. Proyek2 penanaman modal asing yang telah disetujui Pemerintah berdasarkan negara investor, 1967 s/d bulan Agustus 1970 (dalam jutaan US \$)	237

DAFTAR GRAFIK / DIAGRAM :

	HALAMAN
I. 1. Beberapa indikator ekonomi	23
I. 2. Perkembangan indeks beberapa barang	27
I. 3. Perkembangan harga emas, valuta asing dan devisa	35
I. 4. Perkembangan harga barang ekspor.....	39
II. 1. Penerimaan negara, 1966 - 1970/1971	82
II. 2. Pengeluaran negara, 1966 - 1970/1971	89
III. 1. Penerimaan dalam negeri, 1966 - 1971/1972	99
III. 2. Penerimaan pembangunan, 1967 - 1971/1972	113
III. 3. Pengeluaran routine, 1966 - 1971/1972	117
III. 4. Pengeluaran pembangunan, 1967 - 1971/1972	123
IV. 1. Perkreditan bank, uang yang beredar dan dana2 perkreditan bank	137
IV. 2. Dana perkreditan bank menurut sumber	141
IV. 3. Deposito berjangka menurut waktu	144
IV. 4. Perkreditan bank menurut sektor ekonomi	149
V. 1. Ekspor tanpa minyak dan minyak	184
V. 2. Impor tanpa minyak	187
V. 3. Impor minyak	188
VI. 1. Pendapatan nasional	202

III. 1. Penerimaan dalam negeri, 1966 - 1971/1972	100
III. 2. Pengeluaran rutin, 1971/1972	117
III. 3. Pengeluaran pembangunan, 1969 - 1971/1972	124

PERKEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN1.1. Pembangunan dengan stabilisasi

PELITA I tengah mendjelang tahun ketiga pelaksanaannya. Penjusunannya dilakukan setjara pragmatis terarah berdasarkan kondisi dan kebutuhan perkembangan masyarakat Indonesia menuju kemakmuran negara serta peningkatan taraf hidup rakyat yang merata. Pelaksanaannya tiap tahun mendapatkan manifestasinya didalam rentjana tahunan PELITA serta tertjermin didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah diselenggarakan sedjak 1 April 1969 berdasarkan sedjauh mungkin atas prinsip planing, programming dan budgeting serta berpegang teguh kepada tertib kerja yang telah ditetapkan.

Pada sepercdua djalan menuju penyelesaian PELITA I ini, perlu diingat kembali bahwa dimasa lampau politik ekonomi yang diabdikan kepada kepentingan politik telah membawa negara dan rakyat Indonesia ke djurang kehantjuran. Kemantapan suasana yang kini dinikmati masyarakat telah memperteguh keyakinan, bahwa tidak terdapat alasan untuk merubah haluan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Tegasnya, bahwa tidak ada alternatif lain selain daripada melaksanakan pembangunan sambil tetap mempertahankan stabilisasi.

Pengalaman sedjak kemerdekaan menunjukkan, bahwa penyelenggaraan kehidupan bangsa dan rakyat yang tidak berpegang teguh kepada ketentuan yang telah disepakati bersama serta bekerdja tanpa berpegang teguh kepada rentjana, telah menyebabkan pertumbuhan yang liar yang tidak memberikan arti yang positif bagi perkembangan dalam arti pembangunan. Kebijaksanaan yang tidak diarahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat

seperti...

seperti yang lebih jelas nampak pada periode sebelum 1965 telah menimbulkan konsentrasi kegiatan yang menjimpang dari amanat penderitaan rakyat. Maka bersamaan dengan ketiadaan tertib kerja yang menjadi pertanda pula dari periode tersebut, lengkaplah sudah syarat2 bagi timbulnya penjebar daripada inflasi tanpa kendali. Inflasi seperti itu jelas merupakan hambatan utama bagi terse-lenggaranya pembangunan.

Telah diketahui, bahwa penjebar utama dari hyper inflasi yang pada tahun 1966 menjapai tingkat 650%, suatu tingkat inflasi yang tertinggi dalam sedjarah ekonomi modern, terletak disektor anggaran belanja negara. Dalam sektor ini, defisit anggaran memainkan peranan terpenting. Dalam periode antara 1960-1965 pengeluaran pemerintah bertambah dengan 60 kali sedangkan penerimaan negara hanya naik 17 kali. Pada tahun 1965 defisit anggaran adalah sebesar 160% dari penerimaan. Defisit anggaran sebesar itu sudah tentu mendorong-naikkan harga. Selandjutnya harga lebih menanjak tinggi karena diprovosir oleh arah dan besarnya pengeluaran yang tidak menguntungkan sektor ekonomi. Sedjenak menjelusuri kembali angka2 anggaran dalam periode itu akan menunjukkan bahwa sebahagian besar anggaran digunakan untuk pengeluaran anggaran khusus dan subsidi kepada berbagai matjam kegiatan yang tanpa rentjana serta pengeluaran untuk hal2 yang tidak jelas tujuan atau programnya. Sebaliknya pengeluaran2 yang menundjang kegiatan ekonomi seperti irigasi, jalan2, tenaga listrik, perhubungan, telekomunikasi, dan sebagainya, hanya merupakan bagian yang kecil sekali dari jumlah seluruh pengeluaran anggaran.

Seiring dengan defisit anggaran, ekspansi kredit yang tanpa batas dan tidak berentjana telah mendorong tingkatkan pula laju inflasi. Dalam periode yang sama (1960-1965) volume kredit telah bertambah dengan 60 kali. Disamping

pertambahan ...

pertambahan kredit yang sedemikian besar, penggunaannya pun tidak untuk kepentingan ekonomi, sehingga dapatlah dibayangkan betapa inflasi tambah mendjurang tinggi.

Sudah jelas bahwa suatu keadaan ekonomi dimana kenaikan harga makin lama makin bertambah tajam sudah tentu tidak menguntungkan produksi. Dalam hubungan ini perlu sepintas lalu diteronong kembali apa yang dialami perusahaan negara dalam masa tersebut. Kekurangan dalam ketampanan dibidang management dan keahlian teknis telah mengurangi kesanggupan perusahaan-perusahaan tersebut untuk mempertahankan produksi seperti yang pernah ditjapai sebelumnya. Keadaannya menjadi lebih parah oleh karena adanya usurpasi wewenang yang dilakukan setjara ber-lebih2an oleh pemerintah, sehingga perusahaan tersebut menjelma menjadi semata-mata djawatan dari departemen yang membawahinja. Usaha mereka lebih dipersulit lagi dengan kenaikan ongkos buruh yang terus menerus dalam ekonomi yang telah terganggu inflasi. Di pihak lain inflasi yang berge-rak tjepat itu telah pula mengkurus nilai nilai gaji dan upah. Untuk mentjegah hal itu, maka gaji dan upah dalam uang ditambah dengan tundjangan dalam natura, terutama beras. Yang terakhir ini telah menjejatkan bertambahnya ongkos produksi perusahaan2 tersebut dan juga menambah beban anggaran belanja negara. Kenyataan menunjukkan, bahwa dalam masa 1960-1965 harga beras telah naik dengan hampir 400 kali. Sementara itu harga dollar dipasaran bebas telah meningkat dengan lebih dari 200 kali. Prosentase tahunan kenaikan indeks biaya hidup di berbagai kota besar Indonesia meningkat dari 19% setahun ditahun 1960 menjadi 661% setahun ditahun 1965. Keadaan ini telah memaksa pemerintah mengendalikan harga dari berbagai macam barang dan kurs dari berbagai macam valuta asing melalui sistem djatah yang tidak wajar dan terbentur oleh peraturan-peraturan yang ber-belit2 yang tidak realistis dan tidak mentjerminkan kekuatan2 pasar. Akibat dari kebijaksanaan ini adalah timbulnya distorsi harga yang telah menjuburkan berkembang biaknya pasar gelap bagi barang2 dan

valuta ...

valuta asing tersebut.

Sedjalan dengan itu, inflasi jang telah berkembang begitu tjepat, telah pula memukul sektor ekspor. Nilai ekspor pada tahun 1965 telah berkurang dengan 25% dibandingkan dengan tahun 1960, sehingga menjebakkan nilai ekspor menjadi setengah dari nilai ekspor tertinggi jang ditjapai dalam tahun 1951. Ekspor jang turun terus menerus itu telah menjebakkan negara mengalami kelangkaan devisa jang amat gawat. Dalam pada itu kebijaksanaan impor telah ditadjuken kepada barang2 jang tidak menundjang pembangunan, sehingga terdjadilah "gap" jang amat besar dalam neratja pembayaran. Penggunaan devisa jang tidak terarah tadi terpaksa ditutup dengan hutang jang terus menumpuk, sehingga dalam tahun 1966 hutang tersebut telah mentjapai djumlah lebih dari US \$ 2 milyar.

Sementara itu, pertambahan penduduk Indonesia tidak berkurang, sedangkan lapangan kerdja tidak bertambah. Akibatnja telah pula djelas, yakni makin bertambahnja pengangguran.

Seperti jang telah diungkapkan kembali diatas, sektor pemerintah adalah penjebab utama dari inflasi. Kenjataan telah menundjukkan, bahwa keadaan administrasi negara jang belum lagi terbina, telah pula dikalutkan oleh inflasi. Disamping itu, aparatur penerimaan negara diabaikan, karena kebutuhan keuangan sebahagian besar diperoleh melalui pentjetakan uang. Akibatnja nampak djelas pada prosedur jang berliku-liku, peraturan jang berorientasi kepada inflasi dan birokratisasi jang melampaui kewadjaran.

Djika dikadji setjara menjeluruh akibat dari inflasi jang menekan ekonomi Indonesia sedjak tahun limapuluhan untuk kemudian meledak dalam periode tengah enampuluhan, maka pendjelmaannja dapat dilihat dalam pertumbuhan jang

rendah...

rendah daripada tingkat kenaikan pendapatan nasional. Diperkirakan, bahwa antara tahun 1960-1964, untuk seluruh periode tersebut pendapatan nasional hanya naik dengan 6%, sedangkan jumlah penduduk untuk periode tersebut bertambah dengan 9,6%. Dengan demikian terdapat penurunan rata-rata pendapatan per capita sebesar kurang lebih 1,6%. Tetapi selanjutnya inflasi juga telah merubah pola distribusi pendapatan yang konsekuensinya telah mempertajam perbedaan antara golongan yang berpendapatan rendah dengan golongan yang berpendapatan tinggi.

Djelaslah sudah, bahwa keadaan seperti itu tidak memungkinkan diselenggarakan pembanguan. Untuk dapat membangun diperlukan suatu suasana yang stabil, politik dan ekonomi. Dari segi moneter, stabilisasi itu harus tertjamin dalam perkembangan tingkat harga yang relatif mantap.

Dihadapkan kepada keadaan ekonomi seperti yang telah diwariskan tersebut, maka pada tahun 1966 Majelis Permusjawaratan Rakyat Sementara menetapkan kebijaksanaan ekonomi dan pembangunan seperti yang tersurat dalam Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966. Berpengkal tolak dari ketetapan tersebut, Pemerintah telah mengambil langkah-langkah penjelajatan sambil menentukan strategi pelaksanaan yang tersimpul dalam tahap-tahap stabilisasi/rehabilitasi dan pembangunan.

Seandainya bulan Oktober 1966 telah dilantarkan serangkaian kebijaksanaan yang ditujukan untuk meniadakan hal-hal yang telah menjadi sebab utama dari kekalutan ekonomi dan membendung keganasan inflasi. Tindakan penertiban dan pengarahannya kembali telah dilakukan di bidang keuangan negara, disektor per kreditan, perdagangan luar negeri dan perusahaan negara. Melalui kebijaksanaan anggaran berimbang, pengeluaran hanya diperuntukkan bagi kebutuhan yang diprioritaskan dan dianggarkan dengan sedjauh mungkin menggantungkannya pada penerimaan negara.

Penerimaan ...

Penerimaan negara terus menerus ditingkatkan dan sedjalan dengan itu pembinaan aparaturnja mulai dileksanakan. Dengan penataan kembali APBN setjara sadar dan terarah serta pengelolaan berkala jang berorientasi kepada pentjiptaan kestabilan moneter, maka dimulailah pendisiplinan didalam pengelolaan keuangan negara baik dibidang penerimaan dan pengeluaran maupun dibidang pengawasan. Disiplin keuangan ini tidak hanya terhadap sektor aparaturn pemerintah tetapi djuga terhadap bank2 pemerintah dan perusahaan2 negara.

Usaha untuk meningkatkan penerimaan negara djelas lebih maju daripada tahun2 sebelumnya jaitu dimana penerimaan telah dapat ditingkatkan dari 1,5% dari pendapatan nasional dalam tahun 1965 mendjadi sekitar 10% dalam tahun 1969. Maka dengan pengendalian jang ketat dibidang pengeluaran dimungkinkanlah hilangnya defisit anggaran routine, bahkan dapat disisihkan tabungan pemerintah guna pembiayaan pengeluaran pembangunan.

Dalam pada itu, kebidjaksanaan dilantjarkan untuk mengarahkan kembali penggunaan kredit dan sedjalan dengan itu dilakukan kebidjaksanaan deposito berdjangka guna pengendalian inflasi dan pengarahannya dana2 masjarakat. Maka sangatlah menarik untuk mengkonstatir, bahwa dalam waktu hanya beberapa bulan sedjak dikeluarkan pada bulan Oktober 1968, deposito berdjangka telah naik dari Rp.1,8 milyar mendjadi Rp.16,3 milyar pada akhir bulan Maret 1969. Kenjataan menundjukkan, bahwa kebidjaksanaan dibidang perkreditan, bersama dengan kebidjaksanaan lainnya, telah membantu membawa kestapen pada perkembangan tingkat harga dan nilai uang rupiah jang pada dirinja mendorong-tingkatkan pula hasrat masjarakat untuk memegang uang. Disamping tindakan2 operasionil dibidang perkreditan, maka telah diadakan pula penataan kembali bank2 pemerintah setjara struktural; dan jang terpenting adalah ditegakkanja kembali bank sentral kepada fungsinya jang sebenarnya.

Dibidang...

Dibidang perdagangan luar negeri tindakan2 dilakukan dengan tujuan mengurangi tjampur tangan pemerintah dan memungkinkan penggunaan devisa setjara lebih efisien. Hal ini tidak berarti bahwa pemerintah tidak dapat setjara aktif mempengaruhi pasaran bila mana dipandang perlu, baik setjara operasionil maupun setjara institusionil. Pemerintah memberi arti jang penting kepada peranan kekuatan pasar guna memberikan keleluasaan dan inisiatif kepada masyarakat; tetapi sebaliknya pemerintah tidak akan menjerahkan diri kepada permainan bebas dari kekuatan2 pasar itu. Pemerintah memikul tanggung-djawab untuk terus menerus mengawasi dan mengendalikan faktor2 dan keadaan jang mempengaruhi kekuatan pasar itu. Pemerintah tetap lebih mengutamakan kepentingan masyarakat setjara keseluruhan daripada kepentingan perseorangan ataupun golongan.

Disektor ekspor, kebidjaksanaan tersebut mendapatkan kristalisasi di dalam pemberian kepastian usaha, perbaikan produksi barang2 ekspor baik kwalitatip maupun kwantitatip serta perubahan setjara institusionil (kelembagaan) dimana pengananan kebidjaksanaan memerlukanja. Disektor impor, penggunaan devisa ditentukan berdasarkan suatu rentjana tertentu jang bertudjuan sedjauh mungkin mendjamin penguasaan untuk produksi pangan dan sandang serta lain2 kebutuhan jang dianggap strategis. Dengan demikian, maka pengarahannya perdagangan impor dilakukan antara lain melalui penjusunan suatu rentjana dan program operasionil untuk bahan2 pokok jang masih perlu dimasukkan dari luar negeri seperti : tepung terigu, kapas kasar, benang tenun, pupuk dan insektisida. Sedangkan penjusunan dan penggolongan barang2 impor didasarkan pada pertimbangan essensial-tidaknja sesuatu barang bagi pemenuhan kebutuhan rakyat banjak setjara langsung ataupun tidak langsung, serta fungsi sesuatu barang sebagai penunjang aktif (termasuk proteksi jang sehat/wadjar) bagi industri dan kegiatan2 ekonomi dalam negeri lainja.

Sebagaimana...

Sebagaimana diketahui, pemulihan kembali kekuatan pasaran dalam sistim ekonomi Indonesia adalah merupakan salah satu tulang punggung dari pada kebijaksanaan ekonomi yang baru.

Sedjalan dengan kebidjaksanaan tersebut, maka segala kegiatan pemerintah terutama perusahaan negara diharuskan bekerja berdasarkan azas2 ekonomi perusahaan. Untuk memungkinkan hal ini, maka pengurusan setjara aktif diserahkan kembali kepada pimpinan perusahaan negara, tindakan mana kemudian dikenal sebagai policy "dekontrol" dan "debirokratisasi".

Dengan berbagai kebidjaksanaan yang saling berkaitan diatas yang implementasinya terutama terletak dalam sektor pemerintah, maka pada akhir tahun 1968 keracikan harga yang tidak terkendalikan telah dapat dibendung. Dengan demikian berakhirilah setjara formil tahap stabilisasi/rehabilitasi, namun sebagai unsur dalam strategi kebidjaksanaan seperti yang terungkap dalam Ketetapan Majelis Permusjawaratan Rakyat Sementara No.XXIII/MPRS/1966, maka dalam atjuan kebidjaksanaan tahap pembangunan, stabilisasi harus dipertahankan dan rehabilitasi disempurnakan.

Kenjataan menunjukkan bahwa sasaran stabilisasi telah dapat ditjapai. Laju inflasi yang pada tahun 1966 mentjapai 650% telah turun menjadi 85% pada akhir tahun 1968 dan kemudian menjadi 9,9% dalam tahun 1969. Perkembangan harga yang stabil itu telah dapat ditjapai sekalipun peredaran uang dalam tahun 1968 naik sebesar 122% dan dalam tahun 1969 mentjapai Rp.180 miliar.

Dengan terwujudnja stabilisasi ekonomi, maka sedjak 1 April 1969 telah dapat dimulai Pembangunan Lima Tahun I (1969-1974). Strategi pokok yang diambil didalam hal ini adalah melaksanakan pembangunan dengan tetap mempertahankan stabilisasi.

Pengalaman ...

Pengalaman menunjukkan, bahwa pembangunan harus disiapkan dan dilaksanakan setjara berentjana, teratur dan berpegang teguh kepada tertib kerdja jang telah ditetapkan.

Sebagai penterdjemah dari kondisi ekonomi dan situasi masyarakat Indonesia, REPELITA I adalah suatu rentjana jang menundjak kearah mana sumber jang terbatas sejogianja diarahkan, faktor2 apa jang membatasi ruang gerak dan ketjepatan perkembangan proses pembangunan.

Sebagaimana diketahui, sektor pertanian telah dipilih sebagai titik sentral pembangunan. Pemilihan ini didasarkan, bahwa sektor pertanian memberi sumbangan terbesar baik kepada pendapatan nasional maupun kepada penerimaan devisa. Disamping itu sektor pertanianpun masih memiliki kapasita lebih jang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Oleh sebab itu amatlah perlu untuk mendjuruskan sumber-sumber jang dimiliki kesektor tersebut, chususnja kearah produksi pangan dan ekspor. Melalui pertautan kegiatan ekonomi, maka sektor pertanian akan menarik dan mendorong kegiatan ekonomi lainnya.

Disadari dan terungkap dalam REPELITA, bahwa potensi ekonomi Indonesia sungguh menjukupi, namun modal dan ketjakepan adalah faktor2 jang menghambat pemanfaatannja. Oleh sebab itu, maka sebagai pelengkap modal dalam negeri diberi kesempatan bagi masuknja modal dan keahlian dari luar negeri sepanjang tidak merugikan kepentingan nasional.

Djelaslah, bahwa bagi Indonesia jang mulai membangun, devisa adalah faktor jang sangat strategis, sehingga segala usaha harus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dibidang tersebut agar ruang lingkup ekonomi Indonesia menjadi lebih luas dan dengan itu mempartjepat perkembangan pembangunan. Sebagaimana diungkapkan diatas, REPELITA mengharuskan adanja rentjana tahunan.

Agar...

Agar setjara njata dan katagoris rentjana tahunan tersebut dapat tertjermin dalam anggaran, maka sedjak tahun anggaran 1969/1970 Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara telah disusun sedjauh mungkin berdasarkan prinsip : planning, programming dan budgeting. Kenyataan ini menundjukkan betapa keuangan negara, chususanja anggaran pembangunan, telah berorientasi kepada program, sekalipun pertanggungjawabanja masih dilakukan setjara departamental. Semendjak politik bukan lagi panglima seperti jang telah ditetapkan oleh lembaga pemegang kedaulatan rakjat pada tahun 1966, maka kesadaran telah ditanam bahwa uang rakjat tidak boleh digunakan tanpa anggaran. Sedjak itu telah pula dirintis keharusan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan uang negara. Maka pada permulaan pelaksanaan FELITA I, kesadaran dan keharusan itu telah mendapatkan manifestasinja dalam pelaksanaan anggaran, terutama anggaran pembangunan, yakni antara lain dengan di-introduksinja prosedur DIP (Daftar Isian Proyek) dalam seperangkain tata-kerdja jang djuga bertujuan untuk menjeharkan pertimbangan ekonomi dikalangan pedjabat dan masjarakat.

Dalam pada itu, perubahan tatakerdja dan terselenggaranja disiplin dibidang keuangan negara telah dimungkinkan oleh kethidjaksanaan anggaran berimbang.

Sebagaimana diketahui, sedjak tahun 1966 pemerintah telah berpegang pada prinsip anggaran berimbang sesuai dengan petundjuk MPRS dalam ketetapanja No. XXIII/MPRS/1966. Dengan prinsip anggaran berimbang dimaksudkan, bahwa pengeluaran-pengeluaran negara disesuaikan dengan penerimaan negara dari berbagai sumber setjara riil, sehingga dalam arti ekonomis tidak akan menimbulkan tekanan-tekanan harga atau ketegangan2 moneter didalam negeri. Dalam hubungan ini perlu dikemukakan, bahwa dalam pelaksanaannya mungkin terdjadi pelampauan penerimaan dan pengeluaran karena asumsi2 jang telah ditetapkan semula tidak

terdjadi...

terjadi, suatu hal yang dapat dimengerti, karena APBN disusun oleh Pemerintah jauh sebelum anggaran itu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sehubungan dengan itu maka pengertian anggaran berimbang mendapatkan aksentuasi pada arti "berimbang" dan bukan pada "tingkat" pada mana anggaran itu berimbang.

Sedjenak menelaah kembali pelaksanaan anggaran berimbang, maka akan dijumpai, bahwa pada APBN 1967 terdapat sedikit defisit. Pada tahun 1968, APBN berimbang dibidang routine, sehingga bantuan luar negeri dapat sepenuhnya dipakai untuk anggaran pembangunan. Sementara itu, kesadaran nasional mengharuskan sedapat mungkin dibiajainja pembangunan dari penerimaan yang berasal dari sumber-sumber dalam negeri sendiri; dan pembangunan memerlukan biaya yang besar.

Untuk memperoleh dana yang cukup bagi pembiajaan pembangunan maka Pemerintah telah menggiatkan peningkatan penerimaan negara, baik dari sektor pajak langsung maupun dari sektor pajak tidak langsung.

Dalam tahun anggaran 1969/1970 penerimaan dalam negeri berjumlah Rp.243,7 miliar sedangkan untuk tahun anggaran 1970/1971 diperkirakan sebesar Rp.320,5 miliar, suatu jumlah penerimaan yang hampir sama dengan target REPELITA tahun ketiga sebesar Rp.324 miliar. Untuk tahun anggaran 1971/1972 penerimaan dalam negeri direntjanakan sebesar Rp.415,9 miliar, jumlah mana telah mendekati target penerimaan dalam akhir REPELITA yang berjumlah Rp.428 miliar.

Untuk mentjapai jumlah penerimaan yang begitu besar diperlukan beberapa persjajaran. Pertama, adanya suatu kesadaran pajak (tax consciousness) masyarakat yang semakin meningkat. Lebih2 dimana Pemerintah telah memberikan berbagai matjam fasilitas dan keringanan perpajakan dalam rangka menggairahkan

investasi ...

investasi dan produksi. Kedua, penjemputan efisiensi kerja yang meliputi personalia dan sarana daripada aparatur penerimaan negara.

Adalah merupakan kebijaksanaan umum dan jangka panjang bahwa penerimaan negara akan bersumber pada pajak langsung. Harus diakui, bahwa pemungutan pajak langsung memang sukar sekali dilaksanakan apalagi bagi negara2 yang sedang membangun. Hal ini erat hubungannya dengan sifat pajak langsung itu sendiri yang mendjalin hubungan langsung antara aparatur perpajakan dengan wajib pajak. Oleh sebab itu kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak adalah sangat penting, karena pajak adalah keharusan nasional. Kesadaran dimaksud dirasa lampau kurang mendapat pembinaan yang wajar, sebab kebutuhan pengeluaran negara yang sangat tinggi dan bertudjuan tertentu itu diperoleh melalui pencetakan uang. Jika diketahui bahwa cetak uang adalah tjara penadjakan yang sangat kasar, maka dapatlah dimengerti betapa dalam keadaan seperti itu rakyat sangat menderita. Itulah sebabnya mengapa kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sangat penting untuk dibina, baik setjara langsung dalam hubungan dengan kewadjiannya sebagai warga negara maupun setjara tidak langsung melalui penjelasan tentang tudjuan penggunaan daripada uang pajak itu. Kerelaan membayar pajak akan tergugah, jika diketahui, bahwa hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan kegiatan negara setjara umum maupun untuk membiayai kegiatan2 seperti rehabilitasi djalan2 raja dan ekonomi, pelabuhan, listrik dan tenaga, pengairan dan sarana produksi pangan lainnya, projek2 sosial dan pendidikan dan sebagainya. Dipihak lain aparatur negara dan khususnya aparat pajak itu sendiri masih memerlukan pembinaan/pembangunan agar dapat berfungsi dengan baik dalam pelaksanaan tugasnya.

Sekedar gambaran akan ditunjukkan betapa dalam waktu 3 tahun sedjak 1967 ruang lingkup yang harus dikerdjakan oleh aparatur negara telah berkembang

dengan ...

dengan tjepat. Dalam tahun 1967 pengeluaran negara berdjumlah Rp.87,5 milyar sedangkan pada tahun anggaran 1970/1971 pengeluaran tersebut telah dianggarkan sebesar Rp.444,9 milyar. Naiknja pengeluaran jang begitu besar telah merupakan manifestasi kegiatan negara jang berkembang dengan pesat, sekalipun keadsan itu belum merupakan petundjuk final dari apa jang harus dan bisa dikerdjakan oleh Pemerintah. Meningkatkan kegiatan memang dibatasi oleh kesanggupan penerimaan. Sekalipun semendjak tahun 1967 sampai dengan tahun 1971 penerimaan telah meningkat dengan lebih dari 5 kali, namun dirasakan bahwa sedjak tahun anggaran 1969/1970 usaha untuk meningkatkan penerimaan itu mendjadi semakin sulit.

Selandjutnja penerimaan negara akan mendjadi lebih sulit, oleh karena Pemerintah telah menemouh suatu kebidjaksanaan fiskal jang harus menundjang usaha pembangunan dengan stabilisasi. Djika dalam tahap stabilisasi, kebidjaksanaan fiskal ditudjukan untuk mempengaruhi djumlah uang dalam peredaran, maka dalam tahap pembangunan, kebidjaksanaan tersebut ditudjukan untuk mentjiptakan suasana jang menggairahkan produksi dan investasi.

Diturunkannja padjak ekspor, diberikannja fasilitas padjak bagi penanam modal asing dan dalam negeri dan diturunkannja tarif padjak dan bea masuk adalah tindakan2 jang merupakan realisasi dari kebidjaksanaan dimaksud. Sementara itu penerimaan jang berasal dari padjak tidak langsung masih merupakan bagian terbesar dari keseluruhan penerimaan dalam negeri. Untuk masa2 mendatang, bidang ini masih memungkinkan penggarapan jang dapat meningkatkan penerimaan negara sambil memperhatikan kepentingan produsen dan konsumen.

Dalam pada itu, prinsip bahwa pembangunan harus dibiayai sedjauh mungkin dari penerimaan dalam negeri, telah mendorong Pemerintah untuk mengadakan tabungan pemerintah (public savings) jang dimulai dalam tahun anggaran 1969/1970.

Seperti ...

Seperti diketahui, tabungan pemerintah adalah penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran routine. Dalam rangka itu, tabungan pemerintah yang dianggarkan sebesar Rp.24 miliar dalam tahun anggaran tersebut ternyata telah dilampaui, karena realisasinya adalah sebesar Rp.27,2 miliar. Meskipun tabungan pemerintah telah dipupuk agar dapat membiayai pembangunan dengan kekuatan sendiri, namun karena kebutuhan pembangunan adalah demikian besar, maka masih diperlukan tambahan biaya, yang dewasa ini diperoleh dari bantuan luar negeri.

Seperti telah diutarakan sebelumnya, pembiayaan pembangunan selogianja dilakukan dengan dana yang diperoleh dari dalam negeri. Oleh sebab itu harus diusahakan pemupukan tabungan pemerintah sedemikian rupa hingga pada akhirnya dapat menggantikan bantuan luar negeri. Namun pemupukan tabungan pemerintah belum dapat bertambah dengan tjepet, karena adanya kebutuhan-kebutuhan yang mendesak yang harus dibiayai, misalja : pemilihan umum (PEMILU), perbaikan penghasilan pegawai negeri dan ABRI dan lain sebagainya.

Seperti yang telah diketengahkan diatas, uang rakyat yang telah dihimpun dengan susah payah oleh aparaturnegara selogianja tidak boleh di-hambur2kan. Oleh sebab itu telah ditempuh tata-tjara untuk mengamankan pengeluaran.

Sedjak dimulainya pembangunan dalam tahun 1969/1970 pengamanan dan pengendalian telah dilakukan untuk pengeluaran pembangunan, yakni dengan prosedur DIP beserta tata-tjara pengawasan fisik dan keuangannya. Baik penjielenggaraan prinsip planning, programming, dan budgeting, maupun pelaksanaan prosedur DIP serta tata-tjara pengawasannya tentunya memerlukan waktu penyelesaian untuk menjadi biasa dengan tjara baru tersebut.

Dalam pada itu, pola pengeluaran pembangunan untuk sebahagian besar diarahkan kepada prasarana ekonomi, sehingga sukarlah untuk dimungkiri bahwa

tidak ...

tidak terdapat kemajuan dalam rehabilitasi dan pembangunan jalan-djalan, jembatan, bendungan dan irigasi, tenaga listrik, angkutan darat, laut dan udara serta telekomunikasi.

Disamping mendorong pembangunan melalui investasi dibidang infrastruktur, proyek pertanian, tambang atau industri, maka anggaran pembangunanpun diarahkan untuk membantu meningkatkan kegiatan pembangunan di-daerah2.

Dalam tahun anggaran 1969/1970 kepada setiap desa diberikan subsidi sebesar Rp.100.000,- Bantuan ini dimaksudkan sebagai sumbangan terarah dalam membantu desa menggerakkan pembangunan ekonominya setjara gorong rojong. Dengan bantuan tersebut diharapkan bahwa masyarakat desa mendapat sekedar insentip untuk memikirkan pemanfaatannya setjara maksimal. Hasil penjelidikan menunjukkan, bahwa efek dari pada bantuan tersebut sangat menguntungkan kegiatan desa, sehingga usaha jang baik ini dilandjutkan dalam tahun anggaran 1970/1971 dan akan dilandjutkan pula dalam tahun anggaran 1971/1972.

Sedjalan dengan itu, maka perluasan bantuan untuk menggerakkan pembangunan di-daerah2 telah dilaksanakan melalui bantuan kepada tiap kabupaten sebesar Rp.50,- per capita dengan minimal Rp.5 djuta per kabupaten. Pengamatan menunjukkan bahwa pada tingkat kabupaten terdapat banjak proyek jang setjara ekonomis dapat dipertanggung djawabkan seperti dalam bidang irigasi, pengerukan sungai, pentjegahan bandjir, perbaikan djalan daerah dan sebagainya. Dengan bantuan kepada kabupaten seperti itu, maka kegiatan jang telah dilakukan oleh kabupaten di-bidang2 tersebut akan berkembang lebih tjepat. Sumbangan pembangunan kepada kabupaten sekaligus djuga ditudjukan untuk meringankan tekanan pengangguran tidak kentara jang dialami didaerah pertanian.

Hasil ...

Hasil penjelidikan yang dilakukan di Djawa dan Sumatera telah memundjukkan, bahwa bantuan kepada kabupaten telah dimanfaatkan dengan baik. Selain dari pada itu djuga ternjata bahwa bantuan tersebut telah dapat mengurangi pengangguran didaerah serta mentjiptakan projek2 yang tjepat menghasilkan. Ternjata bahwa aparat pemerintah didaerah dapat bekerdja setjara baik dalam memilih alternatif projek mana yang harus didahulukan, sambil berpegang teguh kepada petunjuk bahwa projek tersebut haruslah sekaligus produktif dan menggunakan banyak tenaga kerdja. Dengan demikian akan terasalah, bahwa dalam tahap pembangunan sekarang ini setiap orang turut membangun. Dengan penampakan, bahwa rakyat didaerah djuga turut berperanan dalam pembangunan, maka bantuan desa dan kabupaten telah menggerakkan kesadaran rakyat banyak untuk berpartisipasi dalam pembangunan seperti yang telah digariskan dalam REPSELITA. Direrentjanakan bahwa untuk tahun anggaran 1971/1972 bantuan untuk kabupaten ini dinaikkan menjadi Rp.75,- per capita.

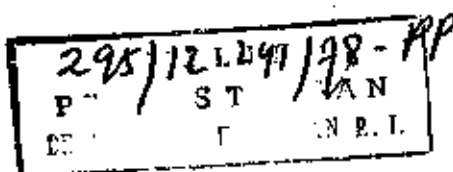
Selanjutnya perhatian Pemerintah djuga ditudjukan kepada perbaikan nasib pegawai negeri dan ABRI. Sebagaimana diketahui, penghasilan pegawai negeri dan ABRI dalam arti riil telah sangat berkurang karena ketinggalan djauh dengan kenaikan2 harga. Oleh sebab itu, maka sedjak semula Pemerintah telah mentjari pemertjahan kesulitan pegawai negeri dan ABRI ini terutama melalui pembangunan ekonomi, disamping kenaikan gaji. Usaha Pemerintah seperti itu telah membawa hasil yang menggugah harapan. Kenaikan gaji dalam tahun anggaran 1970/1971 adalah suatu kenaikan riil, karena tingkat inflasi dalam tahun anggaran 1970/1971 diperkirakan akan djauh berada dibawah tingkat kenaikan gaji. Dalam tahun anggaran 1971/1972 akan diusahakan lagi perbaikan penghasilan pegawai negeri dan ABRI sebesar $33\frac{1}{3}\%$ dari tahun anggaran 1970/1971 sehingga djika hal ini dibandingkan dengan gaji dalam tahun anggaran 1969/1970 maka hal ini merupakan kenaikan gaji sebesar 100%.

Tidak...

Tidak berkelebihan kiranya djika ditambahkan disini, bahwa pembajaran kembali hutang2 jang diwariskan oleh rezim lama merupakan beban jang sangat berat. Dalam suatu negara berkembang jang baru membangun seperti Indonesia, pembajaran hutang seperti itu tidak boleh melampaui prosentase tertentu jang kiranya dapat didukung oleh kekuatan ekonominya. Oleh sebab itu, persetudjuan pelunasan hutang Indonesia akhir2 ini telah membawa perpektif jang lebih baik bagi perkembangan ekonomi Indonesia dimasa datang.

Terselenggaranya disiplin anggaran belandja negara, telah memungkinkan diperluasnja kredit perbankan. Sedjak permulaan tahap pembangunan, kredit telah berkembang dengan tjepat. Dimulai dengan Rp.136,6 milyar pada akhir bulan Maret 1969, djumlah kredit telah berkembang mendjadi Rp.262 milyar pada akhir Maret 1970. Sekalipun djumlahnja besar, namun perputarannja belum sebagaimana direntjanakan karena seretnja pengembalian oleh para pemindjam. Djumlah kredit pada akhir September 1970 telah mentjapai Rp.342,6 milyar. Bersaka dengan usaha jang terus-menerus untuk memperliantjar sirkulasi kredit, volume kredit sebesar itu djelas mentjakup banjak bidang kegiatan ekonomi.

Dalam rangka perkembangan pembangunan, akan sangatlah menarik untuk mengkonstatir perkembangan jang tjepat dari volume kredit investasi. Pada akhir bulan April 1969 plafond kredit investasi hanya berdjumlah Rp.4,6 milyar. Djumlah ini telah meningkat mendjadi Rp.31,6 milyar pada akhir Maret 1970 dimana se-djumlah Rp.16,6 milyar telah direalisir. Hingga bulan September 1970, plafond kredit investasi mentjapai djumlah Rp.50,2 milyar dan realisasinja adalah sebesar Rp.33,1 milyar.



Pada...

Pada akhir bulan Maret 1969 deposito berjangka adalah sebesar Rp. 16,4 miliar sedangkan pada akhir Maret 1970 telah berkembang menjadi Rp. 34,8 miliar. Pada akhir bulan Oktober 1970, posisi deposito berjangka telah menjadi Rp. 45,8 miliar. Perkembangan deposito berjangka ini ditjapai, sekalipun tingkat bunganya diturunkan terus menerus. Pola perkembangan sedemikian itu terdapat pula pada tabungan berhadiah yang telah dimulai pada tanggal 1 Februari 1969. Semua ini menunjukkan, betapa kepertjajaan masyarakat terhadap rupiah terus meningkat. Disamping itu, bank sentralpun menjediakan kredit likuiditas bagi bank2 pemerintah untuk memenuhi kebutuhan kredit dari sektor2 yang diprioritaskan, seperti untuk produksi dan distribusi pangan, sandang dan sebagainya.

Kebidjaksanaan kredit selektif terarah djuga tetap didjalankan pada kredit djangka pendek. Bagi kebutuhan peningkatan ekspor, kredit disediakan dengan bunga yang lebih rendah daripada untuk kredit djangka pendek lainnya.

Dalam pada itu, bagi negara yang mulai membangun seperti Republik Indonesia ini, peranan devisa adalah sangat penting. Oleh sebab itu dilakukanlah usaha-usaha untuk mendorong-tingkatkan penerimaan devisa serta mengkolongarahkan penggunaannya. Peningkatan penerimaan devisa digiatkan melalui usaha menaikkan ekspor hasil2 tradisionil yang berasal dari sektor2 pertanian dan pertambangan.

Disamping itu diusahakan pula ekspor barang2 kerajinan rakyat serta digiatkan ekspor kayu, ikan dan sebagainya. Peningkatan mutu, kelangsungan produksi serta djaminan pendapatan yang lajak bagi petani adalah kebijaksanaan yang terus dikembangkan agar hasil ekspor dapat terus ditingkatkan. Nilai ekspor termasuk minyak bumi mentjapai djumlah US \$ 1.039 djuta dalam tahun 1969/1970,

suatu jumlah yang 9,1% lebih tinggi daripada target yang ditentukan dalam REPELITA yakni sebesar US \$ 953 juta dan mendekati angka tertinggi yang pernah ditjapai oleh ekspor Indonesia, yakni sebesar US \$ 1.291,6 juta. Dibandingkan dengan angka ekspor dalam tahun 1968 sebesar US \$ 963 juta, ekspor dalam tahun 1969/1970 telah naik dengan 16,2%. Untuk tahun 1970/1971 angka ekspor tsb. diperkirakan akan mentjapai US \$ 1.160 juta, sedangkan rentjana untuk tahun 1971/1972 adalah sebesar US \$ 1.300 juta, suatu jumlah yang akan melampaui target dalam REPELITA dan lebih tinggi dari angka ekspor tertinggi yang terdjadi dalam tahun 1951.

Dibidang impor, kebijaksanaan ditudjukan untuk mendorong produksi dalam negeri yang berarti pula mendorong para produsen untuk mengembangkan produksinya. Peranan kebijaksanaan tarif, penggolongan barang, pembatasan maupun pelarangan impor dan sebagainya adalah ditudjukan untuk itu. Impor termasuk minyak dalam tahun 1969/1970 adalah sebesar US \$ 1.071 juta suatu jumlah yang lebih besar dari impor tahun 1968. Komposisi barang2 impor telah lebih positif, yakni makin besarnya pemasukan bahan2 untuk peningkatan produksi dalam negeri.

Kiranya dapat dimengerti, bahwa meningkatnya ekspor dan impor adalah petunjuk yang nyata tentang madjunya perkembangan ekonomi dan adanya peningkatan dalam hasil produksi.

Seperti yang telah dikemukakan diatas, perkembangan produksi memperlihatkan suatu kenaikan, malahan beberapa diantaranya ada yang melampaui target.

Sedjenak menjinggung masalah pendapatan nasional akan membawa kejelasan yang diperlukan. Sebagaimana diketahui, perjusutan pendapatan nasional memerlukan tersedianya data statistik yang lengkap. Kekurangan dibidang ini menjulitkan terlaksananya perkiraan yang terat.

Namun terlepas daripada tidak sempurnanya data2 statistik, penjurusan perkiraan pendapatan nasional akan bermanfaat untuk mengetahui gerak meningkat daripada perkembangan ekonomi Indonesia.

Penelaahan dalam pendapatan nasional menundukkan bahwa sektor pertanian, perikanan dan kehutanan adalah sektor2 terpenting yang memberi sumbangan 50% lebih kepada pendapatan nasional Indonesia dewasa ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 60% berasal dari produksi bahan makanan, sehingga jika perhitungan dalam sektor ini dapat dilakukan setjara tjermat, maka perkiraan pendapatan nasional akan menjadi lebih sempurna. Oleh sebab itu sangatlah menarik untuk diketahui, bahwa tingkat pertumbuhan dalam tahun 1968 diperkirakan sebesar 6,6% jika dibandingkan dengan 8% untuk periode 1960 - 1964. Kenaikan sebesar itu ditjapai karena meningkatnya produksi pertanian, khususnya beras. Hal ini jelas menundukkan betapa pentingnya peningkatan produksi beras yang merupakan bahan makanan pokok rakyat Indonesia. Produksi beras dalam tahun 1969/1970 adalah sebesar 10,8 djuta. ton, suatu jumlah yang menunjukkan kenaikan sebesar 2,8% dari target tahun tersebut yang berdjumlah 10,5 djuta ton. Dalam tahun 1970/1971 produksi beras ini lebih ditingkatkan lagi. Sambil beladjar dari pengalaman, maka dalam tahun 1970/1971 telah diadakan perombakan dalam sistim BIMAS Gotong Rojong yang bertujuan untuk disatu pihak mengurangi subsidi dan dilain pihak merangsang usaha dalam lingkungan petani sendiri. Pemerintah dalam hal ini akan melaksanakan fungsi utamanja, yakni : penjurusan. Adalah menjadi tudjuan pokok Pemerintah, bahwa peningkatan produksi beras sejogianja dilakukan melalui program INMAS-intensifikasi masal. Berbeda dengan program BIMAS dimana disediakan kredit bagi petani untuk membeli pupuk dan alat produksi

lainnya ...

lainnya, maka program INMAS tidak memerlukan; yang diperlukan adalah sarana produksi yang lebih sempurna. Oleh karena penjemputan sarana produksi memerlukan waktu, maka perkembangan INMAS akan memakan waktu pula.

Selain daripada iktiar BIKAS dan INMAS, maka Pemerintahpun berusaha agar harga beras berada pada satu tingkat tertentu dimana petani terangsang untuk tetap berproduksi dan konsumen terjamin kebutuhannya.

Sebagaimana telah diutarakan didalam REPILITA, bidang pertanian telah ditetapkan sebagai titik sentral pembangunan. Penentuan prioritas ini sudah tentu meminta pengorbanan dari bidang2 lainnya yang bukan merupakan prioritas. Telah dimaklumi kiranya bahwa industri memerlukan pasaran dan pertumbuhan serta kelangsungannya tergantung pula dari tersedianya bahan baku. Pertumbuhan yang tcepat disektor pertanian akan meningkatkan pendapatan sebagian besar rakyat Indonesia, sehingga dengan tcepat pula tumbuh pasaran yang diperlukan bagi hasil2 industri. Disamping itu, pertumbuhan disektor pertanian akan memungkinkan tersedianya bahan baku bagi industri serta bahan pangan bagi pekerdja khususnya dan rakyat Indonesia umumnya. Kiranya telah pula djelas, bahwa sektor pertanian sebagai titik sentral pembangunan harus pula dilengkapi dengan industri yang merundjangnya.

Dalam pada itu, dengan bertambah baiknya infrastruktur serta mantanja perkembangan harga, maka sektor industri telah dapat berkembang dengan lebih positif. Djika diperhatikan angka2 realisasi semester I tahun 1970 dimana terlihat bahwa sebagian besar telah melampaui setengah dari target tahun ke 2 PELITA I, maka dapatlah diperkirakan, kiranya target tahun ke dua PELITA I akan dapat dilempai.

Produksi...

Produksi tekstil naik dengan 30% sehingga mentjapai 44,9 djuta meter dalam tahun 1969. Produksi tekstil semester I - 1970 berdjumlah 217.300.000 meter dan merupakan 52,3% dari produksi tahun 1969. Produksi banang tenun naik dari 129,719 bal tahun 1968 mendjadi 160 ribu bal dalam tahun 1969. Dalam semester I-1970 produksi banang tenun telah mentjapai 95,269 bal, yakni 59% dari produksi tahun 1969. Nampaknja proteksi jang diberiken oleh Pemerintah dibidang sandang telah merupakan perangsang jang kuat bagi berkembangnja produksi sandang dalam negeri. Disamping itu produksi semen, ban mobil, sabun, minyak goreng dan hasil2 industri lainnja, ketjuali produksi pupuk dan rokok jang sedikit turun, mengalami kenaikan2 jang berarti. Gambaran dibidang pertambangan djuga memundjukkan keadaan jang sama, yakni adanya kenaikan dalam produksi timah, nikel dan bauksit berkat adanya rehabilitasi dan perluasan usaha. Kiranja dapat dimengerti, bahwa kenaikan jang pada umumnya dialami dibidang produksi, telah dimungkinkan oleh berhasilnja Pemerintah dibidang rehabilitasi dan pembangunan.

Semua ini telah dapat terlaksana berkat kebijaksanaan pembangunan dengan stabilisasi. Kemantapan harga dalam waktu jang agak panjang telah memungkinkan diadakannya perhitungan2 ekonomis dan meningkatnja kepertjajaan masjarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pada gilirannya perhitungan ekonomis serta kepertjajaan masjarakat akan memperkokoh stabilisasi ekonomi dan mempertjepat perkembangan pembangunan.

1.2. Perkembangan ...

Grafik I.1.

GRAFIK
BEBERAPA INDIKATOR EKONOMI

Y1
32

380 950

360 900

340 850

320 800

300 750

280 700

260 650

240 600

220 550

200 500

180 450

160 400

140 350

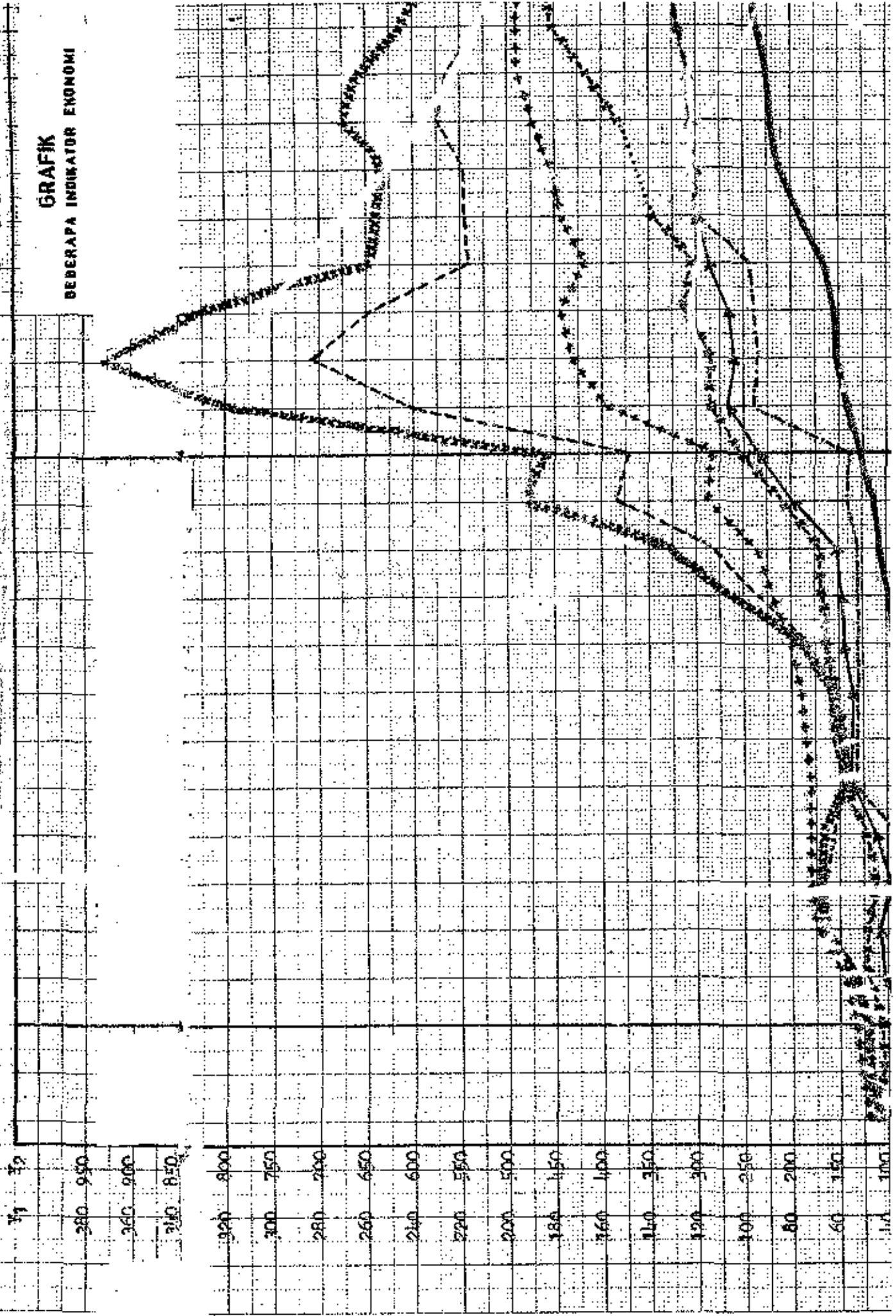
120 300

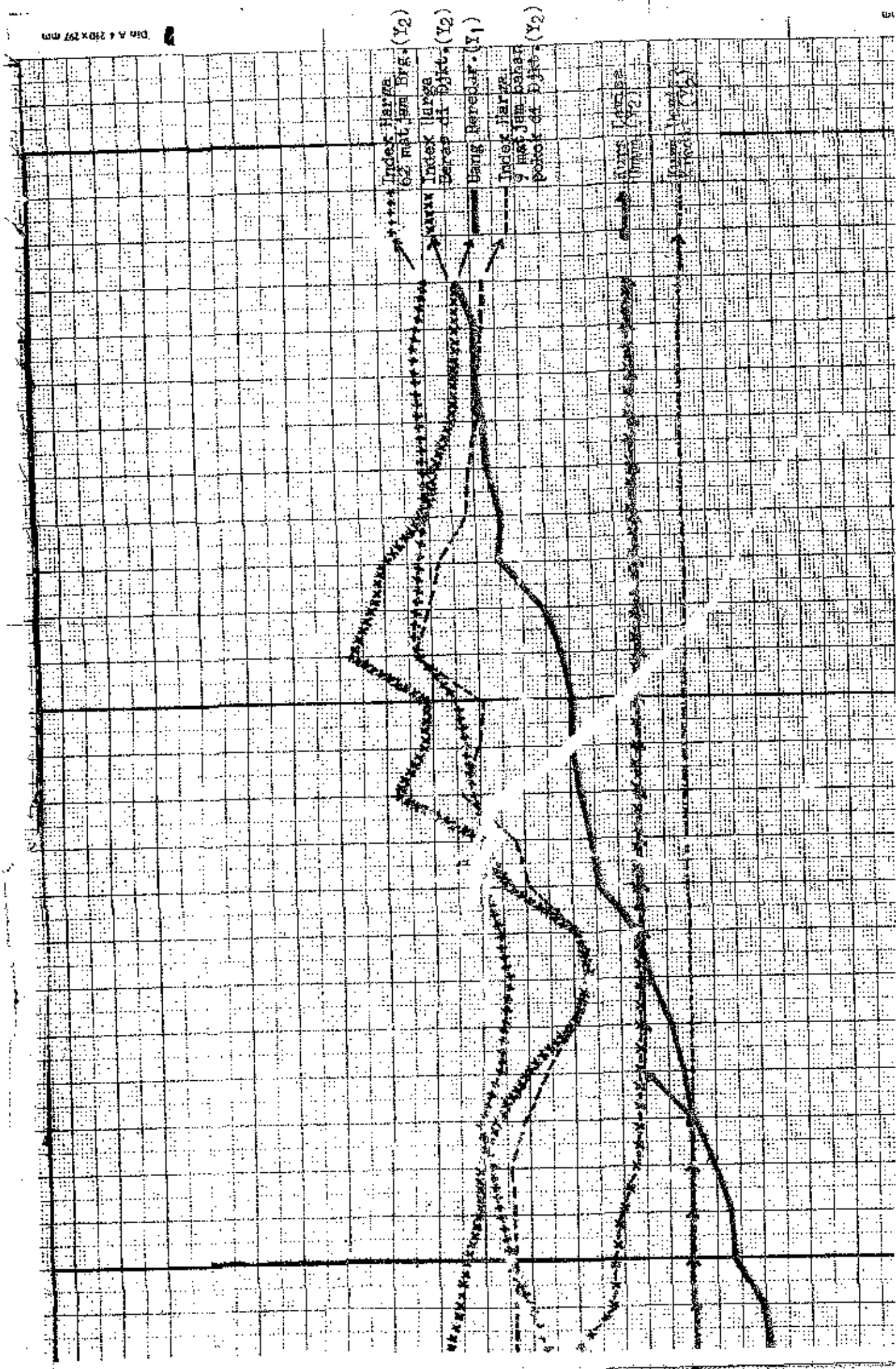
100 250

80 200

60 150

40 100





1.2. Perkembangan harga, gaji dan upah

1.2.1. Perkembangan harga

Tahun anggaran 1970/1971 adalah merupakan tahun kelima dari pelaksanaan kebijaksanaan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi yang sudah dimulai sedjak bulan Oktober 1966. Hasil dari kebijaksanaan tersebut dapat dilihat dengan mengikuti perkembangan indeks biaya hidup di Djakarta (62 matjan barang) yang biasanja digunakan sebagai pengukur laju inflasi. Gambaran perkembangannya adalah sebagai berikut :

T a b e l I.1.

PRESENTASE KENAIKAN INDEKS BIAJA HIDUP

DI DJAKARTA 1969 - 1970

(OKTOBER 1966 = 100)

T a h u n	Presentase kenaikan
1966	650%
1967	120%
1968	85%
1969/1970	10%
1970/1971 s/d Oktober	- 2,5%

Tabel diatas memundjukkan perkembangan indeks biaya hidup di Djakarta sedjak tahun 1966 sampai dengan bulan Oktober 1970. Selama tahun 1966 indeks biaya hidup naik dengan 650%, kemudian pada tahun2 berikutnya presentase kenaikan semakin berkurang

hingga ...

hingga menjadi 10% dalam tahun anggaran 1969/1970. Keadaan ini memperlihatkan hasil nyata dari kebijaksanaan tersebut diatas. Terlebih lagi jika diingat bahwa sejak tahun anggaran 1969/1970 telah dijalankan kebijaksanaan pembangunan lima tahun pertama. Hal ini berarti bahwa ruang lingkup kebijaksanaan Pemerintah bertambah luas, yaitu disamping menjalankan kebijaksanaan stabilisasi juga menjalankan kebijaksanaan2 pembangunan. Biasanya suatu kebijaksanaan pembangunan yang tidak terarah akan mengganggu kestabilan ekonomi. Namun demikian perkembangan data2 indeks biaya hidup diatas, selama dua tahun anggaran terakhir ini memperlihatkan bahwa kebijaksanaan pembangunan yang serasi dapat dijalankan tanpa mengganggu kestabilan ekonomi.

Perkembangan harga2 dalam semester pertama dari masa pelaksanaan PELITA tahun kedua, dapat dilihat pada perkembangan angka2 indeks biaya hidup, indeks harga 9 bahan pokok dan indeks harga beras di Djakarta.

a. Indeks biaya hidup

Selama periode akhir Maret 1970 sampai dengan akhir Oktober 1970 indeks biaya hidup menunjukkan penurunan sebesar - 2,51%. Penurunan ini merupakan perjumlahan dari penurunan angka indeks tersebut yang terjadi pada triwulan I - 1970/1971 dan pada triwulan II - 1970/1971 masing-masing sebesar - 0,53% dan - 1,76%. Dilihat dari sudut sektornya maka penurunan sebesar - 2,51% tersebut diatas adalah berasal dari perubahan2 angka indeks yang

terjadi ...

T a b e l I.2.

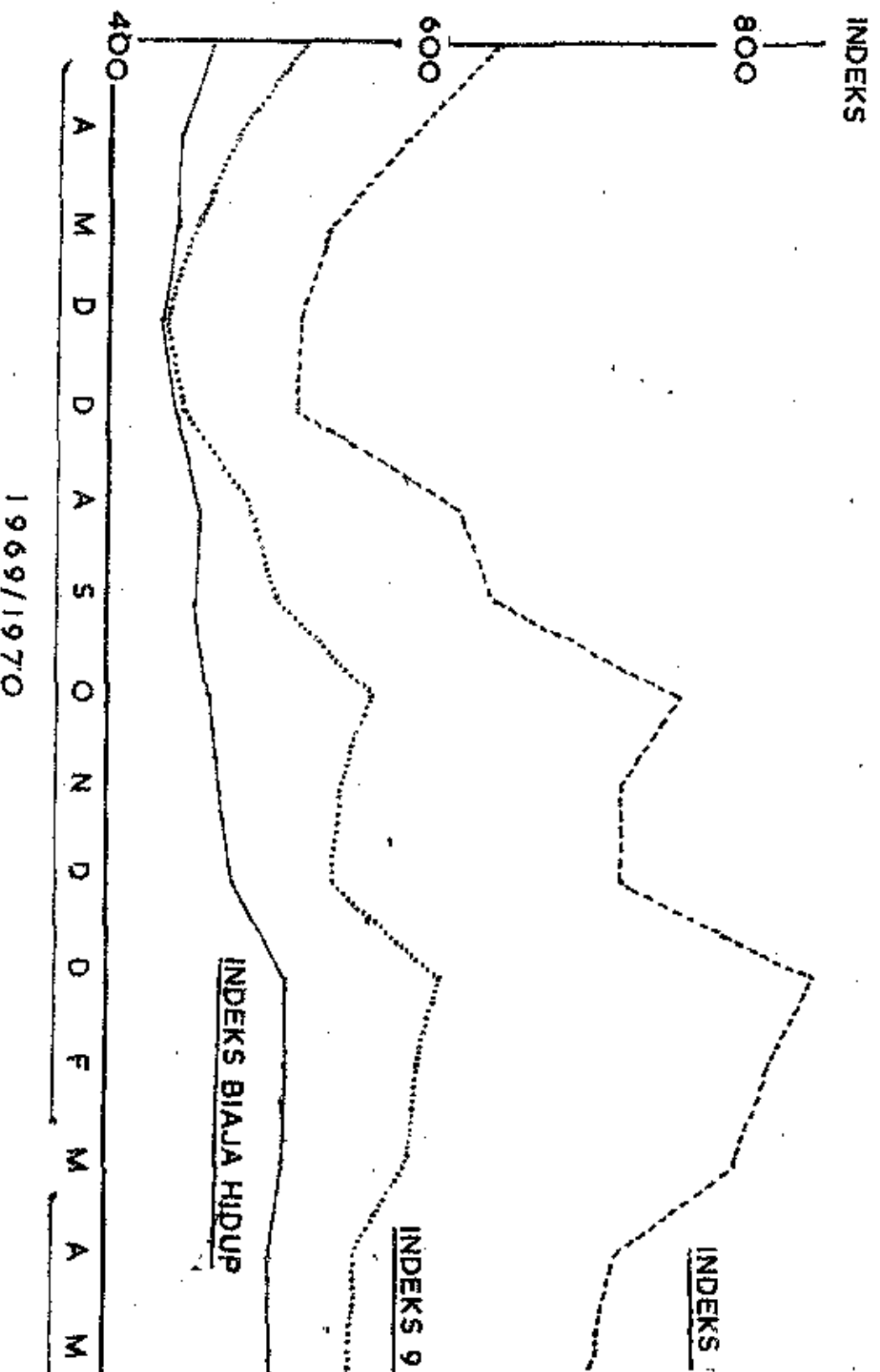
INDEKS BIAYA HIDUP INDEKS 9 MATJAM BAHANPOKOK DAN INDEKS BERAS DI JAKARTA

ACHTER MASA		Indeks Biaya Hidup Oktober '66 = 100	Indeks 9 Bahan Pokok Oktober '66 = 100	Indeks Beras Rata2 '66=100
1968	Maret	374,23	646,70	996,94
	Djuni	382,59	547,85	775,57
	September	414,80	534,29	734,59
	Desember	439,89	518,27	692,61
1969	Maret	466,83	506,70	650,63
	Djuni	438,42	436,10	524,70
	September	458,52	509,38	652,27
	Desember	483,39	549,24	704,59
1970	Djanuari	518,62	618,81	857,37
	Februari	518,84	602,57	828,61
	Maret	516,56	592,58	807,41
	April	508,68	561,57	727,66
	M e i	509,92	557,86	716,75
	D j u n i	513,79	548,34	691,25
	D j u l i	515,24	546,85	690,30
	Agustus	514,02	542,61	692,60
	September	504,76	536,70	684,21
	Oktober	503,57	534,07	676,87

Sumber : Biro Pusat Statistik.

GRAFIK:1.2.

PERKEMBANGAN INDEKS BEBERAPA BAR



T a b e l 1.3.

INDEKS BIAJA HIDUP BERDASAR KAN 62 MATJAM BARANG DI DJAKARTA

(OKTOBER 1966 = 100)

AKHIR MASA		Indeks Makanan (63%)	Indeks Perumahan (11%)	Indeks Pakaian (9%)	Indeks Lain-2 (17%)	Indeks Umum (100%)
1968	M a r e t	467,60	286,19	166,29	293,76	374,25
	D j u n i	441,27	391,30	221,03	332,93	382,59
	September	465,80	367,29	264,45	398,70	414,80
	Desember	463,47	449,52	323,10	457,39	439,89
1969	M a r e t	484,99	486,02	325,98	515,10	466,83
	D j u n i	434,13	473,00	325,62	524,82	426,40
	September	447,88	517,61	332,57	547,39	458,52
	Desember	503,05	504,69	328,25	537,41	483,39
1970	Djanuari	535,28	668,85	330,65	560,94	518,62
	Februari	528,90	660,64	344,76	572,64	518,84
	M a r e t	524,39	662,89	346,68	572,06	516,56
	A p r i l	509,34	662,89	346,68	576,14	508,68
	M e i	509,03	662,89	352,10	579,09	509,92
	D j u n i	501,72	722,14	360,05	592,70	513,79
	D j u l i	503,62	733,75	360,59	589,97	515,24
	Agustus	500,79	719,27	362,36	595,78	514,02
	September	485,29	702,90	362,36	600,07	504,76
	Oktober	484,07	702,90	362,36	597,65	503,57

Sumber : Biro Pusat Statistik.

Tabel 1.4.

HARGA DAN INDEKS 9 BAHAN POKOK TAHUN 1970

HARGA RATA - RATA

MALAM BARANG	UNIT	OKTUBER	SEPTEMBER	AGUSTUS	JULI	JUNI	MAY	APRIL	MARET	PEBRUARI	OKTUBER
1. BERAS	Liter	32,25	32,60	33,--	32,68	33,--	34,13	34,12	37,40	38,21	39,61
2. IKAN	Kg.	72,77	70,--	71,16	77,41	79,72	82,14	82,14	82,14	82,50	162,14
3. MINJAK GORENG	Batol	75,00	72,93	69,29	69,29	67,08	68,39	65,79	63,29	65,--	64,64
4. GULA PASIR	Kg.	15,--	15,--	15,--	15,--	15,--	15,--	15,--	15,--	15,--	15,--
5. GARAM BAHAN	Batang	8,75	8,75	8,35	10,50	10,50	9,19	8,75	8,75	8,80	9,33
6. MINJAK TANAH	Batol	45,--	45,--	45,--	45,--	45,--	45,--	45,--	45,--	45,--	43,06
7. SABUN TUBUJI	Batang	105,71	105,71	105,71	105,71	105,71	105,71	105,71	105,71	105,71	105,36
8. TENSTIL	Metar	435,70	435,70	435,70	435,70	435,70	435,70	435,70	435,70	435,70	435,70
9. BATIK	Lambar	580,87	566,96	573,91	571,83	573,91	593,57	602,26	650,43	665,57	688,87
1. B E K A S	Liter	698,69	698,69	698,69	698,69	698,69	698,69	698,69	698,69	704,95	704,95
2. I K A N	Kg.	519,78	500,00	508,28	552,92	500,42	586,71	586,71	586,71	588,28	591,64
3. MINJAK GORENG	Batol	750,00	729,30	692,90	692,90	670,80	883,90	807,90	652,70	650,00	645,40
4. GULA PASIR	Kg.	993,38	993,38	993,38	993,38	993,38	993,38	993,38	993,38	993,38	993,38
5. GARAM BAHAN	Batang	625,00	625,00	667,86	750,00	750,00	658,43	623,00	623,00	628,57	686,43
6. MINJAK TANAH	Batol	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	436,60
7. SABUN TUBUJI	Batang	352,36	352,36	352,36	352,36	352,36	352,36	352,36	352,36	352,36	351,20
8. TENSTIL	Metar	193,63	193,63	193,63	193,63	193,63	193,63	193,63	193,63	193,63	193,63
9. BATIK	Lambar	534,07	538,70	542,61	546,85	546,84	567,66	561,67	592,58	602,57	618,81
INDEKS KESELURUHAN		534,07	538,70	542,61	546,85	546,84	567,66	561,67	592,58	602,57	618,81
KEMAIKAN INDEKS (%)		0,49	1,09	0,78	0,28	1,71	9,88	5,22	1,67	2,61	12,67

Sumber : Biro Pusat Statistik.

terjadi pada makanan, perumahan, pakaian dan lain2 selama periode itu.

Indeks makanan selama periode tersebut turun dengan - 7,69% yaitu dari indeks 524,39 pada akhir Maret 1970 menjadi indeks 484,07 pada akhir Oktober 1970. Sebaliknya indeks perumahan, pakaian dan lain2 masing-masing selama periode tersebut memperlihatkan kenaikan sebesar + 6,03% + 4,52% dan + 4,47%. Walaupun demikian hasil akhir dari perubahan keempat komponen2 ini selama periode tersebut memperlihatkan penurunan angka indeks biaya hidup dengan - 2,51%.

Jika dibandingkan antara perubahan indeks biaya hidup yang terjadi pada periode akhir Maret 1969 - Oktober 1969 (+ 0,5%) dengan periode akhir Maret 1970 - Oktober 1970, maka perubahan yang terjadi periode terakhir ini sedikit lebih besar dari periode yang terdahulu. Namun demikian dilihat dari sudut komponen2nya, terdapat pola yang sama antara kedua periode itu, yaitu masing2 berupa penurunan pada indeks makanan, sedangkan indeks perumahan, pakaian dan lain2 masing2 memperlihatkan sedikit kenaikan.

b. Indeks harga 9 bahan pokok

Perkembangan indeks dari harga 9 bahan pokok di Jakarta, pada awal semester II dari pelaksanaan PELITA tahun kedua (akhir Oktober 1970) menunjukkan angka 534,07, dibandingkan dengan angka yang terdapat pada akhir pelaksanaan REPPELITA tahun pertama (Maret 1970) sebesar 592,8, berarti selama periode itu telah terjadi penurunan sebesar 9,87%.

Fluktuasinya masing-masing triwulan selama periode itu adalah sebagai berikut :

Triwulan I ...

Triwulan I - 1970/1971 turun dengan - 7,47% triwulan II - 1970/1971 turun dengan - 2,13%, dan triwulan III - 1970/1971 sampai dengan bulan Oktober turun dengan - 0,49%.

Kondisi ini sedikit berbeda dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 1969/1970 dimana angka indeks harga 9 bahan pokok pada masa itu naik dengan + 12,6%.

Penurunan angka indeks harga 9 bahan pokok sebesar - 9,87% selama periode Maret - Oktober dari pelaksanaan PELITA tahun kedua, adalah disebabkan antara lain, turunnja harga beras dari Rp.37,40 per kg pada akhir Maret 1970 menjadi Rp.32,25 per kg pada akhir Oktober 1970, turunnja harga minyak goreng dari Rp.82,14 per botol menjadi Rp.72,72 per botol pada periode yang sama. Di lain pihak harga barang2 lain seperti ikan, garam, minyak tanah, sabun tjetji, tekstil dan batik selama periode tersebut memperlihatkan harga yang relatif mantap, ketjuali harga gula pasir kelihatannya sedikit agak naik yaitu dari Rp.65,29 per kg pada akhir Maret 1970 menjadi Rp.75,00 pada akhir Oktober 1970.

c. Indeks harga beras

Pada akhir Maret 1970 indeks harga beras adalah sebesar 807,11, kemudian pada akhir Oktober 1970 indeks ini menjadi 676,87, berarti selama periode itu telah terjadi penurunan sebesar - 16,17%. Pola ini sedikit agak berbeda jika dibandingkan dengan periode yang sama ditahun 1969 dimana telah terjadi kenaikan sebesar + 18,3%. Penurunan yang berarti selama periode Maret - Oktober dari pelaksanaan PELITA tahun kedua terjadi pada bulan April 1970 sebesar - 9,88% dan pada bulan Djuni 1970 sebesar 3,55%.

Pada ...

Pada triwulan I - 1970/1971 terjadi penurunan indeks harga beras sebesar 14,38% sedangkan pada triwulan II - 1970/1971 penurunan indeks ini adalah sebesar - 1,04%.

Masalah dan kebijaksanaan harga beras tetap mendapat perhatian dari Pemerintah, terutama dalam rangka menghadapi hari raya pada akhir tahun 1970, dimana diusahakan agar fluktuasi dalam harga beras tidak mempengaruhi kestabilan harga pada umumnya.

d. Indeks harga emas dan valuta asing

Harga rata2 valuta asing (Tabel 1.5.) selama periode Maret - Oktober dari pelaksanaan PELITA tahun kedua menunjukkan kenaikan sebesar rata2 Rp.3,83 per satu valuta asing atau naik dengan + 1,33% yaitu dari angka indeks rata2 441,25 pada akhir Maret 1970 menjadi 447,13 pada akhir Oktober 1970. Kenaikan baik dalam harga dan indeks rata2 dari valuta asing ini selama periode itu, terutama sekali disebabkan oleh kenaikan dalam harga maupun indeks dari poundsterling Inggris dan dollar Australia. Sedangkan dollar Amerika dan dollar Singapura memperlihatkan penurunan baik dalam harga maupun indeks. Keadaan ini sedikit berbeda jika dibandingkan dengan periode yang sama pada pelaksanaan PELITA tahun pertama dimana terdapat penurunan sebesar rata2 Rp.10,57 per satu valuta asing atau -2,31%.

Indeks dan harga emas (Tabel 1.6.) selama periode Maret 1970 - Oktober 1970 memperlihatkan fluktuasi sebagai berikut. Emas 24 karat naik dengan Rp.10,- per gram atau dengan + 2,04% yaitu dari indeks 245 pada akhir Maret 1970 menjadi indeks 250 pada akhir Oktober 1970. Sebaliknya penurunan terjadi pada emas 23 karat yaitu turun dengan Rp. 10,-, per gram

atau ...

HARGA RATA2 DAN INDEX BEBERAPA VALUTA ASING DI D J A K A R T A

(HARGA RATA2 OKTOBER 1956 - 100)

AGAR KAS	U S \$			E N G L I S H			A U S T R A L I A \$			R A T A - R A T A		
	Harga	Index	Harga	Index	Harga	Index	Harga	Index	Harga	Index	Harga	Index
1956 M A R E T	280,--	269,00	80,00	260,00	600,00	200,00	270,00	200,00	307,50	200,00		
D J U N I	330,--	235,71	102,30	755,30	775,50	258,50	355,70	266,44	391,88	254,88		
S E P T E M B E R	430,--	387,14	140,00	250,00	931,00	310,00	436,50	323,03	584,68	315,24		
D E S E M B E R	416,25	207,32	126,13	320,31	834,30	298,30	430,20	313,19	457,40	364,00		
1959 M A R E T	333,50	273,93	122,40	306,00	887,44	205,82	413,92	306,81	451,82	233,87		
D J U N I	376,00	215,00	122,50	305,25	964,50	288,17	401,50	294,03	442,38	287,73		
S E P T E M B E R	376,00	215,00	122,50	305,25	964,50	288,17	401,50	294,03	442,38	287,73		
D E S E M B E R	376,00	215,00	122,50	305,25	964,50	288,17	401,50	294,03	442,38	287,73		
1976 D I A N S A R I	360,00	271,43	122,00	307,50	858,50	286,17	401,50	294,03	442,38	287,73		
P E R A G A R I	380,00	271,43	122,00	307,50	858,50	286,17	401,50	294,03	442,38	287,73		
M A R E T	379,00	270,71	123,00	307,50	858,50	286,17	401,50	294,03	442,38	287,73		
A P R I L	379,00	270,71	123,00	307,50	858,50	286,17	401,50	294,03	442,38	287,73		
M E I	380,00	271,43	123,00	307,50	858,50	286,17	401,50	294,03	442,38	287,73		
D J U N I	380,00	271,43	123,00	307,50	858,50	286,17	401,50	294,03	442,38	287,73		
D J U L I	379,00	270,71	123,00	307,50	858,50	286,17	401,50	294,03	442,38	287,73		
A G U S T U S	379,00	270,71	123,00	307,50	858,50	286,17	401,50	294,03	442,38	287,73		
S E P T E M B E R	379,00	270,71	123,00	307,50	858,50	286,17	401,50	294,03	442,38	287,73		
O K T O B E R	378,00	269,90	122,50	306,25	878,--	292,67	410,--	303,71	447,13	290,82		

HARGA RATA2 DAN INDEKS EMAS SERTA KURS DAN INDEKS RATA2 BE & DP DI JAKARTA
(DASAR INDEKS & HARGA RATA2 OKTOBER 1966 = 100)

ACHIR MASA	E N A S 24			E N A S 23			E N A S 22			B.	E.	D.	P. *)
	Harga	Indeks	Harga	Indeks	Harga	Indeks	Harga	Indeks					
1968 M A R E T	361,--	191,00	363,--	208,57	345,--	262,94	265,00	312,00	290,00	305,00			
D J U N I	508,--	254,00	488,--	278,36	470,--	276,47	303,00	357,00	320,00	337,00			
SEPTENBER	625,--	312,50	605,--	315,71	587,50	315,50	318,10	374,00	441,30	465,00			
DESEMBER	687,40	333,70	647,50	370,00	630,--	379,50	326,00	384,00	414,00	436,00			
1969 M A R E T	629,--	314,50	629,--	359,43	588,00	345,88	326,00	384,00	382,75	402,89			
D J U N I	800,--	340,00	586,--	331,43	560,--	329,41	326,00	384,00	379,00	399,00			
SEPTENBER	599,--	295,00	570,--	325,71	550,--	323,53	325,00	384,00	379,00	399,00			
DESEMBER	540,--	270,00	520,--	297,14	500,--	294,12	326,00	384,00	378,30	398,21			
1970 JANUARI	565,--	282,56	545,--	311,43	525,--	308,62	326,00	384,00	378,80	398,21			
PEBRUARI	520,--	260,--	500,--	295,71	486,--	282,35	326,00	384,00	378,45	398,37			
M A R E T	490,--	245,--	470,--	288,57	459,--	254,71	326,00	384,00	378,50	398,42			
A P R I L	510,--	255,--	490,--	260,--	470,--	276,47	326,00	384,00	378,35	398,26			
M E I	510,--	255,--	490,--	280,--	470,--	276,47	326,00	384,00	378,00	397,89			
D J U N I	500,--	250,--	480,--	274,28	460,--	270,59	326,00	384,00	378,00	397,89			
D J U L I	500,--	250,--	480,--	274,28	460,--	270,59	326,00	384,00	378,00	397,89			
AUGUSTUS	500,--	250,--	480,--	274,28	460,--	270,59	326,00	384,00	378,00	397,89			
SEPTENBER	480,--	240,--	460,--	262,85	440,--	258,83	326,00	384,00	378,00	397,89			
OKTOBER	500,--	250,--	460,--	262,85	440,--	258,83	326,00	384,00	378,00	397,89			

Sumber : Biro Pusat Statistik.

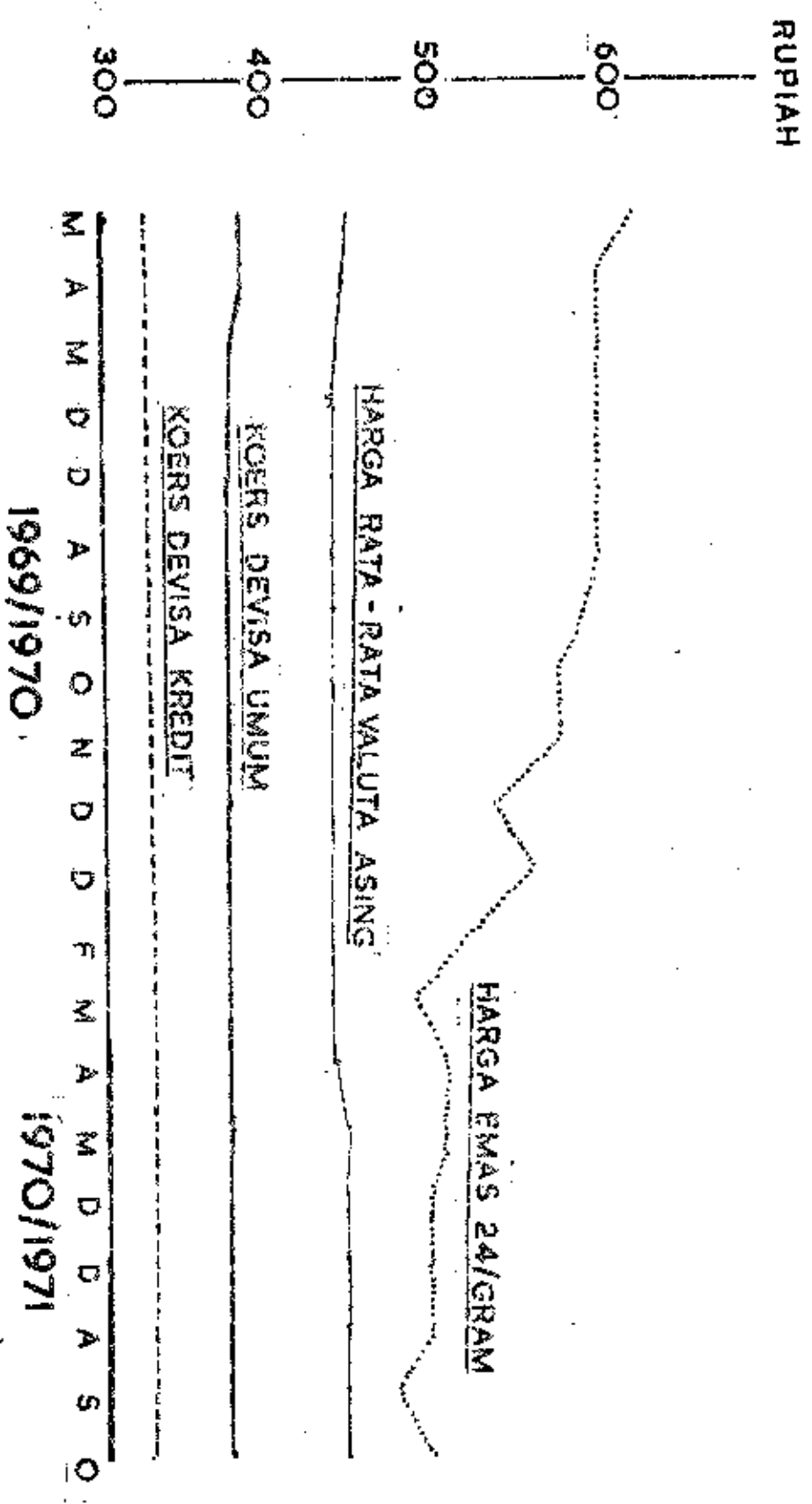
*) Dengan keluarja P.P. No. 16 tgl. 17 April 1970.

BE dikawal dengan Isitiah Devisa Kredit sedangkan DP menjadi Devisa Umum.

GRAFIK 1.3.

35

PERKEMBANGAN HARGA EMAS, VALUTA ASING DAN DEVISA



atau dengan - 2,13% yakni dari indeks 268,57 pada akhir Maret 1970 menjadi indeks 262,85 pada akhir Oktober 1970. Demikian pula dengan emas 22 karat, pada periode tersebut telah turun dengan Rp.10,- per gram atau dengan - 2,23% yaitu dari indeks 264,71 pada akhir Maret 1970 menjadi indeks 258,83 pada akhir Oktober 1970. Pola ini kelihatannya sama dengan pola yang terjadi selama semester I dari pelaksanaan PELITA tahun pertama, dimana terdapat penurunan baik harga maupun indeks untuk ketiga macam emas tersebut diatas.

Dengan keluarnya P.P.No.16 tanggal 17 April 1970 maka istilah Bonus Ekspor (BE) dan Devisa Pelengkap (DP) ditiadakan. Mulai saat itu hanya dikenal istilah devisa umum yaitu devisa yang berasal dari penerimaan ekspor barang, penjualan jasa dan transfer, sedangkan devisa kredit adalah devisa yang diperoleh berdasarkan bantuan kredit dari luar negeri. Selama periode Maret - Oktober dari pelaksanaan PELITA tahun kedua, baik harga maupun indeks dari devisa kredit memperlihatkan kemantapan yang meyakinkan, yaitu dengan harga Rp.326,00 per 1 dollar Amerika atau dengan indeks 384.

Demikian pula halnya dengan koers devisa umum, selama periode tersebut berada sekitar Rp.378,00 per 1 dollar Amerika. Semuanya ini menunjukkan adanya ketenangan dalam harga2 dalam negeri dan valuta asing.

e. Harga hasil bumi ekspor golongan A

Selama periode Maret - Oktober dari pelaksanaan PELITA tahun kedua, harga beberapa jenis barang hasil bumi ekspor golongan A di Djakarta memperlihatkan penurunan, seperti karet R.S.S. I, kopra dan lada putih.

Dilain ...

Tabel 1.7.

PERKEMBANGAN HARGA LUKA BEBERAPA HASIL BUNTI GUNONGAN A DI INDONESIA
(dalam rupiah per Kg)

ACARA MASAK	R. S. S. I		KORRI (SULAWESI)		LADA PUTIH		KORI ROBUSTA	
	Harga	Indeks	Harga	Indeks	Harga	Indeks	Harga	Indeks
1968 MARET	62,44	270,54	36,75	306,90	131,30	309,31	125,03	310,10
JUJUN	87,44	378,85	46,00	634,48	132,50	313,02	118,39	291,39
SEPTEMBER	108,08	472,62	38,00	524,14	167,50	253,96	160,00	246,12
DESEMBER	125,06	545,93	40,00	551,72	166,25	382,75	110,00	270,74
1969 MARET	155,54	673,02	50,38	594,90	151,56	358,04	175,00	283,04
JUJUN	150,82	653,41	51,00	703,45	159,82	350,32	75,40	158,98
SEPTEMBER	161,34	689,05	47,06	640,10	240,62	508,44	111,50	274,65
DESEMBER	130,13	563,82	87,00	924,14	330,--	779,56	145,--	356,86
1970 JANUARI	147,46	638,31	54,43	751,45	301,--	711,06	149,17	367,14
PEBUEARI	139,98	606,31	52,31	716,86	290,--	685,09	117,53	289,27
MARET	129,66	543,58	50,18	682,14	295,--	686,41	126,57	311,52
APRIL	124,74	523,14	50,80	700,89	286,50	681,55	149,17	367,14
M E I	129,27	542,77	49,88	687,73	281,50	676,19	126,57	311,52
JUJUN	126,10	540,02	47,76	657,55	283,13	680,84	131,08	322,84
AGUSTUS	119,89	517,28	42,13	580,76	285,04	675,82	140,13	344,60
SEPTENBER	112,96	510,91	45,55	627,90	236,88	612,74	149,17	392,45
OKTOBER	110,42	478,34	40,11	635,80	251,88	345,89	174,86	489,02
	107,24	464,83	46,57	639,21	247,00	329,92	171,77	451,82

Sumber : Biro Pusat Statistik

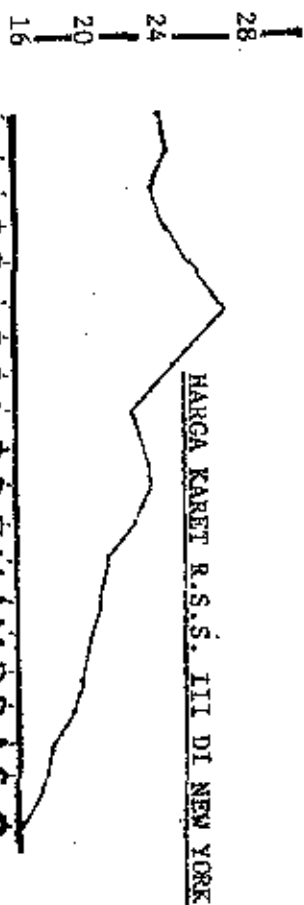
PEMENGANGAN HARGA BEBERAPA HASIL BUNTI EKSPOR GOL. A DIPASAR INTERNASIONAL

ACHER HASA	K A R E T R.S.S. III			K O P I R A		K O P I R O S U S I A			L A D A		T I N A H M I L I A R S A N I T		B I D I A S A N I T	
	US \$ St/Lb (New York)	Br P/Lb (London)	Str \$/Lt (Singapore)	US \$ Alt (Haville)	US \$/Lt (London)	Str \$/Lt (Singapore)	US \$ /Lb Pelebangan (New York)	Br P/Lb (London)	US \$/Lt (New York)	E \$/Lt (London)	E \$/Lt (London)	ex Sumatra	E \$/Lt (London)	ex Myneria
1968 M A R E T	16,02	18,09	45,30	264,94	-	91,35	-	37,44	33,63	1,320,52	79,70	87,00		
D J U N I	18,31	18,93	34,15	259,19	-	98,06	-	33,41	33,50	1,304,75	75,13	86,91		
SEPTEMBER	18,27	18,90	53,72	198,53	-	91,00	29,80	32,36	35,25	1,282,11	57,58	85,66		
DESEMBER	20,06	20,23	57,57	199,38	205,65	91,65	28,72	34,32	35,00	1,381,56	57,00	70,40		
1969 M A R E T	24,35	24,40	69,04	198,72	200,26	39,13	28,94	32,50	29,91	1,872,00	174,60	67,30		
D J U N I	24,47	24,47	70,04	187,94	180,10	75,72	25,15	34,56	34,02	1,435,00	180,27	59,46		
SEPTEMBER	26,35	25,55	74,50	204,14	205,57	76,95	28,99	51,40	90,17	1,470,83	-	60,65		
DESEMBER	22,93	22,28	64,37	242,07	245,38	92,40	32,85	52,15	55,33	1,617,38	-	75,28		
1970 J A N U A R I	23,93	23,79	68,03	226,00	235,84	97,09	34,55	62,75	57,35	1,599,29	198,08	74,93		
P E B R U A R I	22,99	22,95	65,64	203,44	227,40	89,26	33,45	54,79	57,44	1,562,60	198,50	72,85		
M A R E T	20,88	20,65	59,36	205,06	240,53	82,38	33,95	49,77	57,72	1,578,94	109,58	73,86		
A P R I L	20,25	19,20	56,72	-	242,57	85,00	34,45	41,40	50,40	1,804,80	113,40	74,12		
M E I	19,89	18,43	55,83	192,87	225,59	97,51	38,47	42,58	49,48	1,583,41	118,00	71,32		
D J U N I	19,54	19,47	55,44	187,11	218,10	99,79	36,24	47,01	50,66	1,472,05	118,85	69,50		
D J U L I	18,48	18,26	51,82	183,94	222,95	102,11	35,09	52,29	62,55	1,354,45	112,75	68,00		
A G U S T U S	17,94	17,43	40,26	171,03	204,71	110,46	38,31	49,55	61,90	1,503,77	102,56	64,77		
SEPTEMBER	17,35	16,89	47,36	157,27	207,22	113,25	38,69	48,96	63,85	1,517,15	97,30	64,49		
O K T O B E R	16,11	15,88	44,48	174,49	215,23	114,46	39,00	46,23	64,00	1,528,50	104,25	65,50		

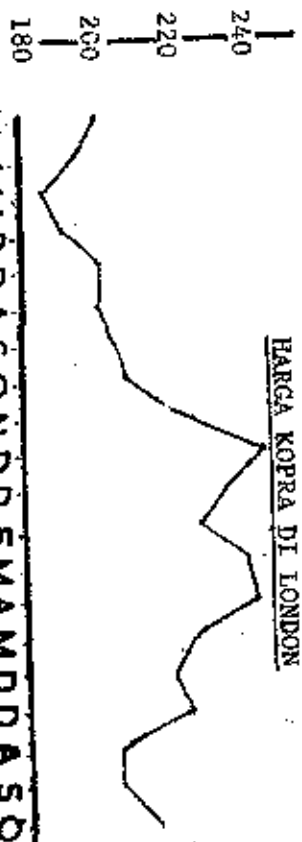
Sumber : Departemen Perdagangan R.I.

PERKEMBANGAN HARGA BARANG2 EKSPOR

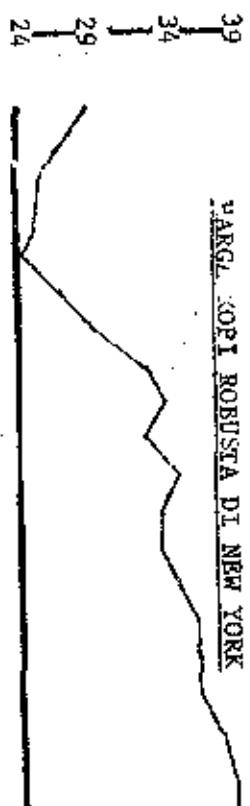
U.S.\$ Ct/lb



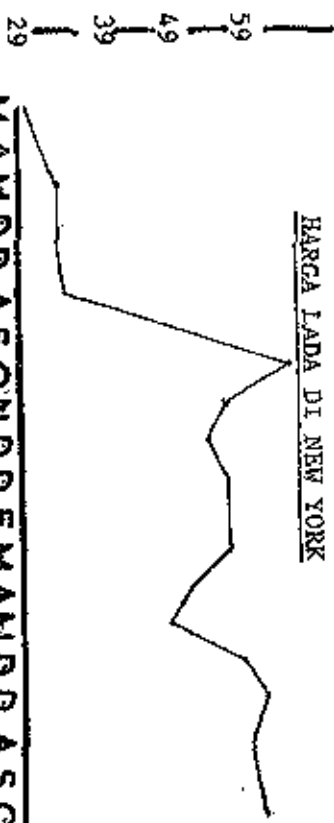
U.S.\$/L.t



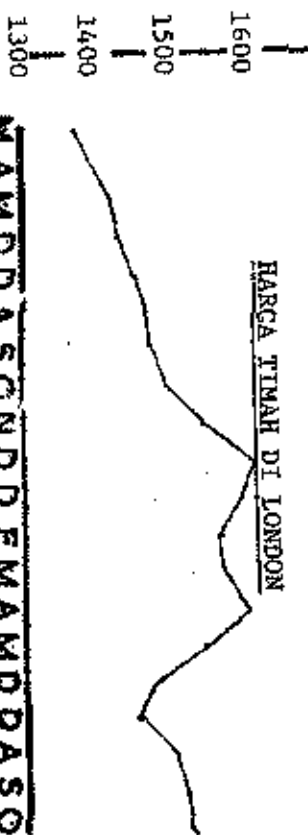
U.S.\$/l.b



U.S.\$ Ct/l.b



E.£/L.t



Dilain pihak harga dari pada barang seperti kopi robusta memperlihatkan kenaikan.

Harga karet djenis R.S.S. I di Djakarta selama periode tersebut diatas turun dengan Rp.16,42 per kg atau dengan - 15,22%. Penurunan ini adalah kelanjutan dari penurunan yang sudah dimulai sedjak bulan Desember 1969. Demikian pula halnya dengan harga dan indeks kopra di Djakarta, dimana harganya telah turun dengan Rp.3,81 per kg atau dengan - 7,65%. Keadaan yang sama terjdjadi pula pada lada putih di Djakarta yaitu turun sebesar Rp.58,00 per kg atau dengan - 19,66%. Lain halnya dengan harga dan indeks kopi robusta. Pada periode ini harga kopi robusta di Djakarta naik dengan Rp.45,20 per kg atau dengan + 45,07%.

Selama periode Maret 1970 - Oktober 1970 harga karet djenis R.S.S. III pada umumnya mengalami penurunan. Di New York karet djenis ini turun dengan US \$ ct 4,77/lb (-23,84%) yaitu dari harga US \$ ct 20,88/lb pada akhir Maret 1970 menjadi US \$ ct 16,11/lb. Di London karet djenis yang sama pada periode tersebut telah turun dengan Rrp P 4,77/lb (-23,10%). Sedangkan di Singapura karet djenis ini pada periode tersebut diatas turun dengan Str \$ ct 14,87/lb (-25,05%). Penurunan ini sebenarnya adalah kelanjutan dari penurunan yang telah terjdjadi pada akhir tahun yang lalu. Satu dan lain hal keadaan ini disebabkan adanya pelepasan stock pile yang dilakukan oleh Amerika Serikat.

Pada periode yang sama harga kopra di Manila telah turun dengan US \$ - 30,51/Lt, demikian pula halnya dengan di London, harga kopra inipun turun dengan US \$ 25,30/Lt.

Keadaan ...

Kedua yang sama terjadi pula dengan harga timah, harga minyak sawit, semuanya dipasar London, mengalami penurunan masing2 dengan £ £ 49,64/Lt untuk timah, sebesar - £ £ 5,33/Lt untuk minyak sawit ex Sumatera dan sebesar - £ £ 8,36/Lt untuk biji sawit ex Nigeria. Perkembangan harga lada putih di London dan harga lada hitam di New-York, boleh dikatakan memperlihatkan perubahan yang tidak berarti, yaitu masing2 berubah dengan - Br P 3,54/lb untuk lada putih dan + US \$ 6,28/lb untuk lada hitam di New York. Lain halnya dengan harga kopi robusta, selama periode ini telah mengalami kenaikan masing2 sebesar + Str \$ 32,08/Pic untuk kopi robusta ex Lampung dipasar Singapore dan sebesar + US \$ 5,35/lb untuk kopi robusta ex Palembang dipasar New York.

1.2.2. Perkembangan gaji dan upah

Selama periode Djuli 1969 - Djuli 1970 pada umumnya gaji dan upah (dalam hal ini upah yang ditambah tajaan seperti beras, gula dan sebagainya ditambah lagi lain2 tunjangan untuk satu orang buruh dengan seorang isteri dan dua orang anak) mengalami kenaikan, baik dalam bentuk uang maupun dalam arti nyata. Rata2 upah dan gaji minimum naik dengan Rp. 2.597,24 (+45,53%) untuk setiap buruh, sedangkan upah maksimum rata2 untuk seluruh sektor naik dengan Rp. 15.464,81 (+ 62,76%) untuk setiap buruh pada periode tersebut diatas. Perkembangan kenaikan upah baik dalam rupiah maupun dalam arti nyata dapat diikuti pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.9. ...

T a b e l I.9.

PROSENTASE PERUBAHAN UPAH DAN GADJI RATA2
MINIMUM DAN MAKSIMUM, DJULI 1969 - DJULI 1970

S e k t o r	Prosentase Perubahan Upah dan Gadji Minimum.		Prosentase Perubahan Upah dan Gadji Maksimum.	
	Nominal (%)	Njata (%)	Nominal (%)	Njata (%)
1. Perkebunan	+ 14,42	- 0,81	+ 72,59	+ 49,51
2. Pertambangan	+ 39,92	+ 21,21	+ 34,30	+ 16,34
3. Industri	+ 54,01	+ 33,40	+ 50,90	+ 30,00
4. Bangunan	+ 67,99	+ 45,40	+112,01	+ 83,66
5. Listrik	+ 21,22	+ 5,02	+222,97	+179,73
6. Perdagangan	+ 50,45	+ 30,28	+ 76,13	+ 50,37
7. Perhubungan	+ 54,56	+ 33,98	+ 50,28	+ 27,75
8. Djasa-Djasa	+ 61,00	+ 39,45	+100,15	+ 73,38
9. Lain2/Pegawai Negeri	+ 31,50	+ 14,00	+ 77,39	+ 53,61.

Sumber: Departemen Tenaga Kerja R.I., diolah kembali oleh
 Departemen Keuangan.

Pada umumnya hampir seluruh sektor memperlihatkan prosentase kenaikan-
 nya baik arti nominal maupun dalam arti njata, hanya sektor perkebunan
 memperlihatkan sedikit prosentase penurunan (- 0,81 %) untuk upah dan
 gadji njata.

Dalam politik gadji dan upah ini Pemerintah selalu mengusahakan
 tahap demi tahap suatu tingkat upah yang cukup bagi buruh/pekerja

daerah ...

PERKEMBANGAN UPAH RATA-RATA DAN UPAH MINIMAL UNTUK BERBAGAI SEKTOR

JULI 1969 DAN JULI 1970

S e k t o r	Upah Rata2 Minimum		Upah Njata Minimum		Upah Rata2 Maksimum		Upah Njata Maksimum	
	(Rupiah)		(Rupiah)		(Rupiah)		(Rupiah)	
	Djul'69	Djul'70	Djul'69	Djul'70	Djul'69	Djul'70	Djul'69	Djul'70
1. Perkebunan	3.801,--	4.349,25	716	710	28.462,66	49.125,75	5.360	8.014
2. Pertambangan	16.743,25	23.427,33	3.153	3.822	80.438,25	108.035,--	15.148	17.624
3. Industri	5.245,66	8.079,--	988	1.318	27.479,77	41.244,43	5.175	6.728
4. Bangunan	3.913,--	6.573,67	737	1.072	10.924,00	23.160,--	2.057	3.778
5. Listrik	5.707,--	6.918,50	1.075	1.129	8.436,--	27.246,50	1.589	4.445
6. Perdagangan	5.171,40	7.780,75	974	1.269	22.527,60	39.214,--	4.242	6.397
7. Pertubuhan	5.674,00	8.770,--	1.068	1.431	22.726,75	33.516,67	4.290	5.468
8. Djasa-Djasa	4.708,--	7.580,--	887	1.237	11.354,50	22.726,50	2.138	3.707
9. lain2/Peg.Negeri	2.730,--	3.590,--	514	586	9.386,--	16.650,--	1.768	2.716

Sumber : Departemen Tenaga Kerja R.I.

dapat ditjapai. Sehubungan dengan ini pada tahun lalu Pemerintah telah menaikkan gaji pegawai negeri dan ABRI dengan 50 %. Walaupun demikian dalam usaha untuk menaikkan gaji dan upah ini Pemerintah selalu memperhatikan agar kenaikan itu tidak akan mempengaruhi tingkat kestabilan harga yang telah ditjapai.

1.3. Perkembangan jumlah uang yang beredar

Selama tahun anggaran 1969/1970 jumlah uang yang beredar bertambah dengan Rp. 80,1 miliar atau kenaikan sebesar 61,2 %, yaitu dari posisi Rp.130,9 miliar pada akhir Maret 1969 menjadi Rp.211,0 miliar pada akhir Maret 1970. Dari jumlah Rp.211,0 miliar ini, sebesar Rp.126,7 miliar berwujud uang kartal sedangkan sebesar Rp.84,3 miliar berwujud uang giral. Selama periode itu juga faktor2 penyebab perubahan uang yang beredar yang memegang peranan adalah kegiatan perusahaan, sedangkan peranan Pemerintah kelihatannya semakin tidak begitu berarti.

Dilain pihak, tingkat pertambahan jumlah uang yang beredar dibandingkan dengan tingkat kenaikan harga maka terlihatlah bahwa perkembangan jumlah uang yang beredar setiap tahunnya menunjukkan pertambahan yang relatif lebih besar dari tingkat kenaikan harga. Pada tahun 1966 jumlah uang yang beredar bertambah dengan + 763,5 %, sedangkan tingkat kenaikan harga + 650 %. Kemudian pada tahun 1967 dan tahun 1968 tingkat pertambahan jumlah uang yang beredar masing2 + 131,8 % dan + 121,3 %, sedangkan tingkat kenaikan harga pada waktu yang sama masing2 + 120 % dan 85 %. Akhirnya pada tahun anggaran 1969/1970 jumlah uang yang beredar bertambah dengan + 61,2 % sedang-

kan ...

kan tingkat kenaikan harga pada waktu itu + 10 %. Kenyataan ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah uang yang beredar selalu bertambah setiap tahunnya, namun pengaruhnya terhadap perkembangan tingkat harga lebih kecil dibandingkan dengan tingkat pertambahan jumlah uang yang beredar, seperti halnya dimasa-masa inflasi. Keadaan ini berarti bahwa masyarakat lebih suka memegang uang dari pada barang. Dengan perkataan lain tingkat ketepatan perputaran uang (velocity of money) telah menurun sebagai akibat bertambahnya kepercayaan masyarakat terhadap rupiah.

Sampai dengan akhir Oktober 1970 jumlah uang yang beredar mencapai jumlah Rp.231,1 milyar, dimana dari jumlah ini sebesar Rp.140,1 milyar adalah uang kartal, sedangkan sisanya Rp. 91,0 milyar adalah uang giral.

1.4. Perkembangan A.P.B.N.

Kebidjaksanaan stabilisasi dan rehabilitasi yang dijalankan Pemerintah sebagai usaha jangka pendek dan kebijaksanaan pembangunan ekonomi sebagai usaha jangka panjang terutama dilaksanakan melalui A.P.B.N. Dengan kebijaksanaan anggaran berimbang yang dilaksanakan sejak tahun 1968, Pemerintah telah berhasil menghilangkan kedudukan A.P.B.N. sebagai sumber inflasi yang utama, dan dengan dibantu oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan dibidang lainnya, tingkat inflasi sebesar + 85% dalam tahun 1968 telah dapat ditekan menjadi + 10 % dalam tahun 1969 dan dalam tahun 1970 diperkirakan lebih kecil dari tahun 1969.

Meskipun ...

Meskipun sampai dengan saat ini kebidaksanaan anggaran berimbang tetap didjalankan Pemerintah, akan tetapi didalamnja tetap terkandung unsur dinamis jaitu bahwa A.P.B.N. tersebut berkembang terus, baik dalam segi penerimaan maupun segi pengeluaran serta menjokong dan membijai program2 pembangunan ekonomi.

Dalam semester I-1970/1971, realisasi anggaran penerimaan adalah sebesar Rp. 191,4 miliar dan anggaran pengeluaran mentjapai djumlah Rp. 178,0 miliar yang berarti masing2 sebesar 47,9 % dan 44,6 % dari pada rentjana A.P.B.N. Dalam djumlah tersebut tidak termasuk nilai bantuan projek.

T a b e l I.11.

PERKEMBANGAN REALISASI A.P.B.N., 1970/1971 ¹⁾

(dalam miliar rupiah)

	<u>A.P.B.N.</u>	<u>REALISASI</u> <u>SEMESTER I</u>
Penerimaan Routine	320,6	156,1
Penerimaan Pembangunan	78,7	35,3
DJUMLAH PENERIMAAN	399,3	191,4
Pengeluaran Routine	283,5	144,7
Pengeluaran Pembangunan	115,5	33,3
DJUMLAH PENGELUARAN	399,3	178,0

1) Diluar bantuan projek.

1.4.1. Perkembangan penerimaan

Dalam semester I-1970/1971, realisasi anggaran penerimaan mentjapai djumlah ...

padj djumlah Rp. 191,4 milyar jang terdiri dari penerimaan routine sebesar Rp. 156,1 milyar dan penerimaan pembangunan sebesar Rp. 35,3 milyar (tidak termasuk nilai bantuan proyek sebesar Rp. 10,2 milyar).

T a b e l I.12.

REALISASI PENERIMAAN NEGARA, SEMESTER I-1970/1971

(dalam milyar rupiah)

1. <u>Penerimaan Routine</u>	<u>156,1</u>
a. Padjak Langsung	55,8
b. Padjak Tidak Langsung	99,1
c. Non - tax	1,2
2. <u>Penerimaan Pembangunan</u>	<u>35,3</u>
(nilai lawan bantuan program)	
3. <u>Bantuan Proyek</u>	<u>10,2</u>

Dalam usaha meningkatkan penerimaan negara, Pemerintah dalam tahun anggaran 1970/1971 antara lain telah melakukan usaha2 sebagai berikut :

- (1) Penjempurnaan perundang-undangan dengan mengeluarkan 5 Undang2 Padjak jaitu mengenai padjak pendapatan, padjak perseroan, padjak dividen, penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Dalam Undang2 tersebut antara lain disempurnakan tarip2 padjak pendapatan dan padjak perseroan, ketentuan-ketentuan mengenai penanaman modal, dan dasar perhitungan kembali nilai modal.
- (2) Usaha2 ekstensifikasi pemungutan padjak jaitu perluasan djumlah wajib padjak dan usaha2 intensifikasi pemungutan padjak jaitu

usaha2 ...

usaha2 pemagihan pajak dan tunggakan pajak.

- (3) Perbaikan administrasi penerimaan negara baik dalam bidang organisasi, prosedur maupun keahlian personil.

Kebidjaksanaan2 tersebut bertudjuan mendorong kegiatan perekonomian yang berarti meningkatkan pendapatan nasional dan langsung atau tidak langsung akan memperbesar djumlah penerimaan negara.

Penerimaan pajak2 langsung masih belum merupakan penerimaan yang utama dan perkembangannjapun belum seperti yang diharapkan. Hal tersebut antara lain karena diturunkannya tarip2 pajak pendapatan dan pajak perseroan, sedang akibat2 positif dari pada penurunan tarip tersebut baru akan terlihat dimasa-masa mendatang. Pajak perseroan minjak merupakan satu-satunya djenis pajak langsung yang memberikan penerimaan terbesar (54,5% dari penerimaan pajak langsung dan 19,5 % dari seluruh penerimaan routine).

Dalam hal penerimaan pajak2 tidak langsung, yang memberikan penerimaan-penerimaan besar adalah bea masuk, tjukai dan penerimaan minjak lainnja. Djuga dalam pajak2 tidak langsung, Pemerintah telah mengadakan penjempurnaan-penjempurnaan tarip dan prosedur yang telah memberikan hasil baik. Bea masuk berhubungan erat dengan kebidjaksanaan impor yang didjelaskan Pemerintah baik untuk stabilisasi maupun untuk menundjang program pembangunan ekonomi. Walaupun komposisi impor makin mengarah kepada impor barang modal dan bahan baku, akan tetapi penerimaan bea masuk tetap menundjukkan peningkatan2.

Penerimaan pembangunan adalah penerimaan bantuan kredit luar

negeri ...

negeri berupa B.E. kredit, bantuan pangan dan bantuan bukan pangan. Realisasi penerimaan pembangunan berkembang terus, mengikuti perkembangan dan dipengaruhi oleh permintaan importir dan perkembangan impor.

Bantuan proyek merupakan pula salah satu penerimaan pembangunan yang mempunyai tjiri tersendiri. Bantuan tersebut adalah berupa peralatan proyek yang dalam anggaran hanyalah tertjatat sadja dalam anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran dalam jumlah yang sama. Realisasi dari pada bantuan proyek berangsur-angsur semakin lambat, walaupun masih terdapat keterlambatan-keterlambatan.

1.4.2. Perkembangan pengeluaran

A.P.B.N., khususnya anggaran pengeluaran, adalah merupakan pelaksanaan tahunan daripada pembangunan lima tahun. Oleh karena itu disamping bersangkutan-paut dengan kebijaksanaan anggaran berimbang, anggaran pengeluaran berhubungan pula dengan masalah pelaksanaan proyek2 PELITA baik dalam bidang ekonomi, sosial atau umum.

Jumlah pengeluaran routine masih merupakan bagian terbesar dari pada seluruh jumlah pengeluaran yaitu dalam semester I-1970/1971 mentjapai jumlah Rp. 144,7 miliar, sedang jumlah pengeluaran pembangunan mentjapai jumlah Rp. 33,3 miliar (tidak termasuk bantuan proyek sebesar Rp. 10,2 miliar).

T a b e l 1.13.

REALISASI ANGGARAN PENGELUARAN, SEMESTER I-1970/1971
(dalam miliar rupiah)

<u>1. Pengeluaran Routine</u>	<u>144,7</u>
a. Belanja Pegawai/Pensiun	64,4
b. Belanja Barang	25,4
c. Subsidi Daerah Otonom	37,5
d. Bunga/Tjittjilan Hutang	10,0
e. P e m i l u	7,4
<u>2. Pengeluaran Pembangunan</u>	<u>33,3</u>
a. Melalui K.B.N.	20,1
b. Untuk Hankam	2,5
c. Melalui Perbankan	3,5
d. Subsidi Desa/Kabupaten	5,8
e. Irian - Barat	0,5
f. Lain - lain	0,9
<u>3. Bantuan Proyek</u>	<u>20,2</u>

Daripada pengeluaran routine, sebesar Rp.64,4 miliar merupakan pengeluaran untuk gaji pegawai, tunjangan beras dan lain2 pengeluaran pegawai. Taraf kesedjahteraan pegawai negeri selalu disebabkan peningkatan2nya sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Kenaikan dalam jumlah yang agak besar terjdadi dalam pengeluaran untuk subsidi daerah otonom oleh karena diberikannya pengganti A.D.O. Program penghematan yang dilaksanakan Pemerintah dalam pengeluaran routine telah memberikan hasil2 baik,

akan tetapi ...

akan tetapi dengan meningkatnya kegiatan aparat Pemerintah dalam tahun2 PZLITA, maka harus pula disertai dengan peningkatan dalam pengeluaran untuk peralatan kerja.

Dalam semester I - 1970/1971 telah dikeluarkan juga pengeluaran khusus untuk PEMILU sebesar Rp. 7,4 miliar. Diperkirakan semester mendatang masih diperlukan tambahan pengeluaran untuk pelaksanaan PEMILU yang direntjanakan sebesar Rp.10,- miliar dalam A.P.B.N. 1970/1971.

Pengeluaran pembangunan dalam semester I - 1970/1971 mentjapai jumlah Rp.33,3 miliar yang kalau melihat dari sudut pembidangannya, maka sejumlah Rp.24,3 miliar (73,0%) ditujukan kepada bidang ekonomi, Rp.5,2 miliar (15,6%) kepada bidang sosial dan Rp.3,8 miliar (11,4%) kepada bidang umum.

Bantuan proyek dalam semester I - 1970/1971 mentjapai jumlah Rp.10,2 miliar. Bantuan proyek diharapkan akan menjadi bantuan luar negeri yang utama di-masa2 mendatang; berhubung dengan itu maka rentjana dan persiapan pelaksanaan yang lebih matang dan lebih serasi dengan derap langkah pembangunan pada umumnya terus menerus disempurnakan. Berdasarkan realisasi penerimaan routine dan pengeluaran routine dalam semester I - 1970/1971, maka dapat dibentuk public savings sebesar Rp.11,4 miliar, sedangkan rentjana untuk seluruh tahun anggaran 1970/1971 adalah sebesar Rp.37,1 miliar.

1.5. Pengawasan ...

1.5. Pengawasan keuangan

Adalah merupakan suatu kenjataan bahwa kekatjaan dibidang keuangan negara dimasa yang lampau telah diakibatkan karena tidak adanya atau kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. Dengan dilaksanakannya pengawasan ini maka tata kerja, prosedur dan disiplin keuangan menjadi teratur dan hilang tenggelam didalam kekatjaan keuangan negara. Kebidaksanaan yang demikian jelas mempunyai akibat yang jauh, tidak saja terhadap keuangan Pemerintah tetapi juga terhadap perekonomian sebagai keseluruhan.

Sedjak tahun 1966 setjara berangsur-angsur telah dilakukan berbagai usaha penertiban untuk keluar daripada kekatjaan keuangan negara tsb. Salah satu usaha yang merupakan unsur yang vital dalam penertiban tersebut adalah masalah pengawasan.

Disadari bahwa untuk dapat melaksanakan pengawasan yang efektif diperlukan administrasi yang baik dengan pelaksanaannya yang ahli dan berpengalaman. Dengan demikian pengawasan yang dilakukan selama ini terutama dimulai dengan mengarahkan kepada pemberian bimbingan para pelaksana agar mereka membiasakan diri untuk mengadakan administrasi keuangan yang tertib, sambil mentaati peraturan keuangan yang berlaku. Ini tidak berarti bahwa pengusutan terhadap sesuatu tindakan yang telah atau dapat merugikan keuangan negara tidak mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari Pemerintah. Pada hakekatnya setiap tindakan yang menuju kepada perbaikan administrasi dan memaksakan ditaatinja peraturan keuangan, mempunyai arti pula penjagaan terhadap kemungkinan yang merugikan negara dan

pada ...

pada gilirannya berarti pula pengusutan terhadap kerugian2 yang mungkin telah terjadi.

Dalam pelaksanaannya maka pengawasan dilakukan baik setjara preventif maupun setjara represif. Kedua jenis pengawasan ini satu sama lain saling mengisi serta saling pengaruh mempengaruhi, sehingga kedua-duanya merupakan rangkaian yang tidak boleh diabaikan. Pengawasan preventif biasanya tertjermin dalam tata-tjara yang harus ditempuh dalam melakukan suatu tindakan, yang pada dasarnya merupakan pemisahan dari serangkaian fungsi2 yang ada yang berhubungan dengan tindakan tersebut. Bentuknya yang nyata adalah berbagai ketentuan atau peraturan2 yang harus ditaati.

Didalam rangka ini Pemerintah telah memulai mengadakan tindakan2 sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan anggaran pembangunan dengan menggunakan Daftar Isian Proyek (DIP). Sebelum sistim ini dipergunakan Pemerintah tidak mempunyai alat untuk mengawasi agar pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rentjana semula. Pada waktu itu pelaksana dapat saja membangun proyek yang tidak direntjanakan sebelumnya. Misalnja bisa untuk membangun jalan dipakai membeli inventaris kantor. Dengan sistim DIP hal2 semacam ini dapat ditjegah.
- b. Pedoman mengenai penata-usahaan, pengawasan dan pemeriksaan kas. Dengan adanya pedoman ini, setiap atasan bendaharawan diwajibkan untuk mengadakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap bendaharawan yang bersangkutan. Dengan adanya ketentuan ini pekerjaan bendaharawan dapat diawasi oleh atasannya.

c. Ketentuan ...

- c. Ketentuan mengenai keharusan bendaharawan menjelenggarakan buku kas umum dan tjara2 mengerjakannya. Dengan adanya ketentuan ini semua uang anggaran akan harus tertjatat, baik penerimaannya maupun penggunaannya.
- d. Penegasan kembali tentang kewadajiban untuk mempergunakan kantor lelang negara dalam pendjualan/pemindah-tanganan barang2 jang dimiliki negara. Adanya ketentuan ini dimaksudkan untuk menjegah pendjualan2 dibawah tangan jang sering2 merugikan negara.
- e. Larangan membajarkan langsung djasa giro kepada bendaharawan terhadap bank2 jang memberikan djasa giro. Sebelum adanya larangan ini Pamarintah tidak dapat mengawasi penggunaan djasa giro jang diterima oleh para bendaharawan. Dengan adanya larangan tersebut maka semua djasa giro harus disetorkan kepada rekening kas negara.
- f. Disamping ketentuan2 diatas, setiap tahun dikeluarkan pedoman pelaksanaan A.P.B.N. dimana ditentukan tata-tjara penguasaan dan pelaksanaan A.P.B.N. Dalam pedoman ini diatur antara lain tjara2 pembelian/pemborongan, penjetoran penerimaan negara, pengeluaran uang dari kas negara, tjara mempertanggung-djawabkannya dan lain-lain.
- g. Ketentuan mengenai standarisasi kendaraan bermotor dan perumahan serta ruangan kantor. Ketentuan ini bermaksud untuk membatasi pembelian kendaraan dan pembangunan perumahan/kantor jang berlebihan atau jang sifatnja mewah.

Disamping ketentuan2 tersebut diatas jang sebagian terbesar menjangkut pelaksanaan, perbaikan dan pengerdjaan administrasi jang perlu untuk pembuatan

perhitungan anggaran mendapat perhatian Pemerintah. Hasil dari usaha ini ialah diselesaikannya Perhitungan Anggaran tahun 1967, sedang pada saat ini telah pula selesai dipersiapkan Perhitungan Anggaran 1968 dan Perhitungan Anggaran Triwulan I-1969.

Dengan berhasil disusunnya Perhitungan Anggaran tahun 1968 dan Triwulan I tahun 1969 yang relatif lebih dapat didjamin kelengkapan dan kebenaran angkanya, usaha peningkatan mutu administrasi keuangan terus ditingkatkan karena Pemerintah yakin bahwa mutu administrasi yang ada sekarang ini masih banyak yang harus disempurnakan. Pada saat ini sedang diadakan usaha untuk mengadakan pusat pembukuan keuangan yang daripadanya diharapkan dapat diperoleh data yang lebih baik yang akan menjamin kelengkapan dan kebenaran angka perhitungan anggaran pada waktu yang akan datang.

Pengawasan preventif terhadap kekayaan negara yang dipisahkan dilaksanakan dengan mengadakan pembagian fungsi didalam unit masing-masing. Hal ini disebabkan karena perbedaan sifat dari kekayaan negara itu sendiri serta tjara dan bidang usaha setiap unit yang mempunyai akibat terhadap susunan organisasinya.

Dengan disahkannya Undang No. 9 tahun 1969 yang pada intinya membagi usaha negara menjadi tiga jenis usaha, yaitu Perusahaan Djawatan, Perusahaan Umum dan Perusahaan Perseroan, terbukalah kesempatan bagi kebanyakan perusahaan negara untuk mengalihkan bentuknya menjadi Persero atau Perdjan. Keputusan Presiden No. 64 tahun 1969 menentukan tata-tjara yang harus diikuti dalam pengalihan bentuk perusahaan negara menjadi Persero.

Penentuan tata-tjara pengalihan bentuk ini merupakan tindakan pengawasan preventif, yaitu menjaga agar hanya perusahaan yang benar-benar mempunyai prospek

yang baik ...

jang baik dan jang memberikan keuntungan jang dijdadikan Persero.

Disamping itu dengan tata-tjara tersebut diatas, akan dapat ditetapkan berapa besarnya kekajaan negara jang ditanam didalamnya. Hal ini akan menghindarkan terulangnya kejadian dimana modal Pemerintah dalam suatu perusahaan tidak dapat ditentukan karena modal permulaannya tidak diketahui.

Dibidang pengawasan represif, dimana pengawasan dilakukan setelah suatu tindakan dilaksanakan untuk mengetahui apakah suatu ketentuan atau peraturan ditaati, pada umumnya dilaksanakan dengan mengadakan pemeriksaan on the spot pada objek2 jang diperiksa. Dalam hal ini Pemerintah misalny telah melakukan pemeriksaan terhadap projek2 PELITA jang meliputi hal2 sebagai berikut :

- a. Menilai kelantjaran penjaluran uang.
- b. Membimbing agar para bendaharawan/kepala projek menjelenggarakan tata-usaha uang dan barang setjara tertib sesuai dengan peraturan jang berlaku.
- c. Menilai kebeneran realisasi fisik dibandingkan dengan realisasi anggarannya.
- d. Menilai apakah bendaharawan dan kepala projek melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan peraturan jang berlaku.

Demikian pula dilakukan pemeriksaan terhadap anggaran rutin. Dalam hal ini pemeriksaan tersebut diarahkan kepada :

- a. Membimbing agar administrasi keuangan dari bendaharawan2 dilakukan setjara tertib sesuai dengan ketentuan jang berlaku.
- b. Mendorong agar penjetoran penerimaan negara oleh bendaharawan khusus

(penerima) ...

(penerima) kepada kas negara dilakukan setjara teratur, tepat pada waktunya dan tidak dipergunakan langeung.

- c. Menjtek apakah atasari langeung dari bendaharawan jang bersangkutan mengadakan pemeriksaan kas setjara teratur.
- d. Menilai apakah departemen? mengerdjakan pembukuan? setjara tertib dan benar dari realisasi anggarannya, sehingga perhitungan anggaran dapat disusun setjara baik dan tepat pada waktunya.
- e. Menilai apakah bendaharawan melaksanakan pekerdjaannya sesuai dengan ketentuan jang berlaku.

Dalam periode Ejanuari sampai September 1970 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1070 buah projek2 PELITA dan 1100 bendaharawan rutin jang tersebar diseluruh Indonesia.

Dalam pemeriksaan djuga penting diperhatikan saat2 dilakukan pemeriksaan sendiri. Menjadari pentingnya hal tersebut, maka pada bulan Maret dan April 1970 jaitu pada akhir/pemulaan tahun anggaran diadakan pemeriksaan mengenai saldo uang terhadap bendaharawan2. Pada saat itu telah diperiksa sebanyak 728 bendaharawan di Djakarta, Bandung, Semarang, Djakjakarta, Surabaya, Medan, Palembang dan Manado.

Pemeriksaan jang dilakukan pada waktu itu, dirasakan oleh para bendaharawan sebagai pemeriksaan jang mengedjutkan, karena baru pertama kali itulah tepat pada akhir tahun Anggaran dilakukan pemeriksaan.

Dari pemeriksaan2 jang makin hari makin meningkat itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa para bendaharawan telah mulai sadar akan keharusan melakukan pekerdjaannya setjara tertib dan mengikuti ketentuan2 jang berlaku.

Pemeriksaan yang dilakukan sekarang ini belum bersifat menyeluruh berhubungan dengan masih sangat kurangnya tenaga pemeriksa yang dimiliki oleh Pemerintah. Untuk menjaampurnakan hasil2 yang telah ditjapai ini, pemeriksaan terhadap proyek-proyek PELITA dan bendaharawan2 tetap akan diteruskan dan ditingkatkan.

Dilain pihak upgrading bendaharawan2 yang diharapkan akan makin meningkatkan mutu administrasi keuangan terus dilakukan. Sampai saat ini telah 7000 orang bendaharawan lulus dari upgrading ini. Pendidikan dalam administrasi keuangan ini telah pula diperluas, yaitu dengan diadakanja upgrading untuk tenaga tata-usaha keuangan. Tenaga ini sangat diperlukan untuk tenaga pembuahan anggaran didepartemen2. Saat ini baru 50 orang lulus dari upgrading ini.

Pemeriksaan terhadap badan-badan usaha negara relatif lebih sulit, sehingga hanya tenaga2 yang mempunyai keahlian tertentu saja yang dapat melakukan pemeriksaan itu.

Sistim administrasi yang beraneka ragam sesuai dengan bidang usahanya masing2 yang pada umumnya lebih kompleks, disertai masalah-masalah yang terlotak dalam bidang ekonomi perusahaan, menyebabkan hanya tenaga2 tertentu yang dapat ditugaskan untuk melakukan pemeriksaannya. Walaupun demikian dalam tahun 1970 ini (sampai dengan September 1970) telah dapat diusahakan pemeriksaan atas 800 buah objek pemeriksaan dan dikeluarkan laporannya.

Seperti telah diuraikan diatas, administrasi perusahaan2 negerapun menunjukkan kemajuan, terutama perusahaan2 yang akan dialihkan bentuknja menjadi Persero.

1.6. Perkembangan perkreditan

1.6.1. Dana perkreditan bank

Perkembangan dana perkreditan bank selama tahun anggaran 1969/1970 memperlihatkan kenaikan sebesar Rp. 71,2 miliar. Sampai akhir Maret 1970 posisi dana perkreditan bank mentjapai Rp. 145,5 miliar. Posisi ini diakhir Djuni 1970 menjadi Rp. 151,0 miliar, yakni sebesar Rp. 91,5 miliar berupa giro, Rp. 55,7 miliar berupa deposito dan Rp. 3,8 berupa dana lain². Diperkirakan pula bahwa posisi dana perkreditan bank diakhir Maret 1971 menjadi Rp. 182,5 miliar, ini berarti selama tahun anggaran 1970/1971 diperkirakan dana tersebut diatas akan bertambah dengan Rp. 37,0 miliar. Perlu pula diketahui bahwa disamping pengumpulan dana dengan tjara biasa, lembaga perbankan djuga mengadakan pengerahan dana melalui gerakan tabungan berhadiah dan deposito berjangka.

Sampai dengan bulan September 1970 posisi dana perkreditan bank mentjapai jumlah Rp. 174,1 miliar dimana sebesar Rp. 130,6 miliar berupa dana perkreditan bank-bank pemerintah dan sisanya sebesar Rp. 43,5 miliar adalah dana perkreditan bank-bank swasta. Dari jumlah tersebut diatas sebesar Rp. 105,4 miliar berupa giro, Rp. 60,4 miliar berupa deposito dan Rp. 8,3 miliar adalah dana lain-lain.

1.6.2. Perkembangan ...

1.6.2. Perkembangan perkreditan bank

Sampai dengan bulan September 1970 posisi total perkreditan bank menijapai djumlah Rp. 342,5 milyar. Dari djumlah ini, sebesar Rp. 202,9 milyar berupa kredit Bank Indonesia, Rp. 109,0 milyar kredit bank-bank pemerintah dengan likwiditas sendiri, Rp. 23,8 milyar adalah kredit bank-bank swasta dan akhirnya Rp. 6,8 milyar adalah kredit dari tjabang bank-bank asing. Kalau dilihat menurut sektor ekonomi, maka dari kredit tersebut diatas sebesar Rp. 152,5 milyar diarahkan kesektor produksi, Rp. 162,9 milyar kesektor lain-lain dan Rp. 27,1 milyar kesektor ekspor. Sedangkan dilihat menurut kegiatan usaha Pemerintah dan swasta, maka sebahagian besar dari volume kredit itu, berasal dari kegiatan usaha swasta jaitu Rp. 179,6 milyar dan jang berasal dari sektor Pemerintah adalah Rp. 162,9 milyar.

Selama tahun anggaran 1969/1970 volume perkreditan bank mengalami kenaikan sebesar Rp. 125,3 milyar atau 93,7 %. Dari djumlah kenaikan pada masa itu, sebesar Rp. 75,1 milyar berasal dari kenaikan volume kredit Bank Indonesia, Rp. 36,9 milyar berasal dari kenaikan kredit bank-bank pemerintah sedang sisanya adalah berupa kenaikan kredit dari bank-bank swasta serta tjabang bank-bank asing. Dilihat dari sektor ekonomi, maka dari kenaikan kredit pada masa tersebut, sebesar Rp. 48,0 milyar adalah berupa kenaikan jang terdjadi disektor produksi, Rp. 65,8 milyar

berupa ...

berupa kenaikan disektor lain-lain dan Rp. 11,5 milyar berupa kenaikan disektor ekspor. Begitu pula dilihat dari sektor kegiatan usaha pemerintah dan swasta, maka dari seluruh kenaikan yang terjadi pada periode ini sebagian besar dari kenaikan volume kredit disektor usaha swasta sebesar Rp. 78,9 milyar, sedang sisanya Rp. 46,4 milyar adalah kenaikan kredit disektor usaha pemerintah.

Kenaikan volume kredit Bank Indonesia sebesar Rp. 35,4 milyar dalam tahun anggaran 1970/1971 sampai dengan bulan September 1970, sebesar Rp. 29,1 milyar berupa kenaikan kredit langsung dan sebesar Rp. 6,3 milyar berupa kenaikan kredit likuiditas. Pada periode itu juga volume kredit bank-bank pemerintah telah bertambah dengan Rp. 38,7 milyar sedangkan volume kredit bank-bank swasta dan cabang bank-bank asing untuk periode yang sama, masing bertambah dengan Rp. 3,1 milyar dan Rp. 3,3 milyar.

Selama tahun anggaran 1970/1971 volume perkreditan bank seluruhnya diperkirakan bertambah dengan Rp. 101,2 milyar, berarti posisi perkreditan bank seluruhnya pada akhir Maret 1971 diperkirakan menjadi Rp. 363,3 milyar.

1.6.3. Perkembangan kredit investasi

Program kredit investasi terutama diadakan, dalam rangka melaksanakan Pembangunan Lima Tahun yang pertama (REPELITA). Program ini dimulai sedjak tanggal 1 April 1969, dengan demikian sudah berdjalan lima belas bulan lebih. Sampai akhir Maret 1970

batas ...

batas penediaan kredit investasi mentjapai djumlah Rp.31,6 miliar, sedangkan realisasinja adalah Rp.16,6 miliar. Baik batas penediaan maupun realisasi dari kredit tersebut pada periode ini terutama diarahkan ke sektor perhubungan dan pariwisata, industri dan pertanian yakni sektor2 yang memundjangan pembangunan ekonomi Indonesia.

Sampai bulan September 1970 batas penediaan kredit investasi mentjapai djumlah Rp.50,2 miliar, sedangkan realisasinja adalah Rp.33,1 miliar. Ketiga sektor yang tersebut diatas djuga memperlihatkan djumlah yang terbesar baik dalam batas penediaan maupun realisasinja. Uraian yang terperinci daripada kredit ini dapat diikuti pada Bab IV.h.

1.7. Perkembangan hubungan ekonomi luar negeri

1.7.1. Perkembangan ekspor dan impor

Nilai ekspor didalam tahun anggaran 1970/1971 ini diperkirakan sebesar US\$ 1.160 djuta, yaitu terdiri dari ekspor tanpa minyak sebesar US \$ 720 djuta dan ekspor minyak sebesar US \$ 440 djuta.

Bila dibandingkan dengan nilai ekspor pada tahun anggaran 1969/1970 yang berdjumlah US \$ 1.039 djuta, dimana ekspor tanpa minyak dan minyak, masing2 adalah US \$ 659 djuta dan US \$ - 380,- djuta, maka nilai ekspor pada tahun anggaran 1970/1971 ini memundjukkan US \$ 121,- djuta atau 11,6% diatas nilai

ekspor ...

ekspor tahun 1969/1970 (Tabel V.2.).

Nilai impor didalam tahun anggaran 1970/1971 ini diperkirakan sebesar US \$ 1184 djuta, jaitu terdiri dari impor tanpa minyak dan minyak, masing2 sebesar US \$ 1084 djuta dan US \$ 100,- djuta.

Bila dibandingkan dengan nilai impor tahun anggaran 1969/1970 yang berdjumlah US \$ 1.071 djuta dimana impor tanpa minyak dan minyak, masing2 sebesar US \$ 980 djuta dan US \$ 91 djuta, maka nilai impor (minyak dan tanpa minyak) untuk tahun anggaran 1970/1971 ini adalah US \$ 113 djuta atau 10,5% diatas nilai impor tahun 1969/1970 (Tabel V.3.).

1.7.2. Perkembangan lalu lintas devisa

Neratja perdagangan pada tahun anggaran 1969/1970 menundjukkan defisit sebesar US \$ 32 djuta sedangkan pada tahun anggaran 1970/- 1971 ini neratja perdagangan diperkirakan akan mengalami defisit sebesar US \$ 24 djuta.

Transaksi berdjalan pada tahun anggaran 1969/1970 menundjukkan defisit sebesar US \$ 449 djuta, sedang pada tahun anggaran 1970/1971 ini transaksi berdjalan diperkirakan defisit sebesar US \$ 477 djuta. Dengan demikian maka defisit pada transaksi berdjalan tahun 1970/- 1971 adalah US \$ 26 djuta atau 6,2% diatas defisit tahun 1969/1970. Defisit transaksi berdjalan 1970/1971 yang lebih besar ini disebabkan karena naiknya impor tanpa minyak serta pengeluaran jasa2 periode 1970/1971.

Defisit ...

Defisit transaksi berdjalan tersebut ditutup dengan pemasukan modal netto, yang diperkirakan mentjapai djumlah US \$ 529 djuta dalam tahun 1970/1971. Sedangkan pemasukan modal netto ini tahun 1969/1970 sebesar US \$ 367 djuta. Pemasukan modal sektor swasta dan pemerintah masing2 adalah US \$ 116 djuta dan US \$ 494 djuta tahun 1970/1971 sedang tahun 1969/1970 masing2 sebesar US \$ 17 djuta dan US \$ 359 djuta. Djumlah ini masih harus dikurangi dengan pembajaran kembali hutang, dimana untuk tahun anggaran 1970/1971 diperkirakan sebesar US \$ 81 djuta dan US \$ 44 djuta untuk tahun 1969/1970, sehingga didapat djumlah pemasukan modal netto.

Neratifia pembajaran tahun anggaran 1970/1971 mengalami surplus US \$ 15 djuta dan tahun 1969/1970 defisit sebesar US \$ 43 djuta (Tabel V.1).

1.7.3. Perkembangan bantuan luar negeri dan pembajaran kembali hutang

Djumlah commitment dalam tahun 1970 sampai dengan bulan Oktober berdjumlah US \$ 438 djuta, sedang dalam tahun 1969 sampai dengan bulan yang sama berdjumlah US \$ 547,9 djuta.

Dari commitment yang sebesar US \$ 438,3 djuta telah disetujui sebesar US \$ 433,3 djuta atau 98,7%, sedang dari djumlah ini yang telah tersedia untuk digunakan sebesar US \$ 387,7 djuta atau 89,1%.

Sedang commitment yang dibuat dalam tahun 1969 sampai dengan bulan Oktober telah disetujui sebesar US \$ 537,1 djuta atau 98,0%, dimana yang telah tersedia untuk digunakan berdjumlah US \$ 263,1 djuta atau 48,9%.

Dalam ...

Dalam pada itu pembayaran kembali hutang untuk tahun 1969/1970 berdjumlah US \$ 14 djuta.

1.8. Perkembangan produksi dan penanaman modal

Perkembangan produksi setjara ringkas adalah sebagai berikut :
(untuk djelasnja lihat Bab VIII.).

Pada umumnja terdapat kenaikan pada sektor produksi dan prasarana. Menurut perkiraan bulan September 1970 produksi beras dalam tahun 1970 akan mentjapai 11,7 djuta ton jang berarti 103% dari target 1970/1971 sebesar 11,4 djuta ton. Hal ini mungkin disebabkan iklim jang baik serta pelaksanaan teknois pertanian jang makin sempurna keadaannya. Disamping itu harga beras selama semester I-1970 dapat dikatakan mantap jang berarti makin dapat terpenuhinja kebutuhan beras.

Produksi djagung djuga menunjukkan kenaikan sebesar 6,4% bila dibandingkan dengan hasil produksi dalam tahun 1969. Hal ini disebabkan karena keadaan iklim jang memuaskan dan harga jang baik karena meningkatnja permintaan luar negeri.

Sebaliknya produksi ubi2an menunjukkan penurunan. Hal ini erat sekali hubungannya dengan pasaran jang kurang baik sehingga tidak mendorong kenaikan produksi.

Sedangkan produksi hasil2 pertanian termasuk bahan2 ekspor menunjukkan kenaikan dalam produksinya misalnja karet dan kelapa sawit realisasinja sampai bulan Agustus 1970 masing2 naik dengan 6,7% dan 6% bila dibandingkan dengan target sampai Agustus 1970. Dalam pada itu produksi teh realisasinja sampai bulan Agustus 1970 mengalami kemunduran

sebesar ...

sebesar 2% bila dibandingkan dengan target sampai Agustus 1970.

Selain usaha peningkatan produksi juga selalu diusahakan peningkatan mutu dan perbaikan pada sistim pemasaran sehingga dengan naiknya produksi dan meningkatnya mutu dari hasil2 bumi yang diekspor, maka penerimaan devisa dapat naik pula.

Sektor kehutanan diharapkan sumbangannya akan lebih meningkatkan penerimaan negara mengingat kontrak2 yang diadakan sudah mulai berdjalan.

Tertjapainya stabilisasi harga yang semakin mantap mempunyai perangsang yang besar pada produksi industri dan menunjukkan perkembangan kearah yang memuaskan. Produksi benang temun dalam tahun 1969 naik dengan 23% dibandingkan dengan tahun 1968. Demikian pula produksi tekstil naik dengan 30% dalam tahun 1969 bila dibandingkan dengan tahun 1968, sedang realisasi produksi tekstil ini pada semester I-1970 telah mantjapai 217.300.000 meter (145% dari semester I-1969) Demikian pula produksi bahan2 penting lainnya seperti pupuk, semen, ban mobil, sabun, korek api, kertas, plat seng menunjukkan kenaikan yang meyakinkan. Contoh mengenai produksi pupuk dalam semester I-1970 mantjapai 46.198 ton yang berarti 54,6% dari produksi tahun 1969.

Pada sektor pertambangan terdapat pula kenaikan produksi, dimana hasil produksi semester I pada tiga tahun berturut2 sedjak tahun 1968 memperlihatkan kenaikan yang terus menerus. Hanya produksi emas, perak dan batu bara menunjukkan penurunan didalam semester I-1970 bila dibandingkan dengan semester I-1969.

Produksi minyak terus menunjukkan kenaikan dimana produksi semester I-1970 adalah 18,06% lebih besar kalau dibandingkan dengan produksi semester I-1969.

Dalam ...

Dalam hal produksi prasarana, usaha perbaikan terus dijalankan. Sehubungan dengan hal tersebut, titik berat ditekankan pada rehabilitasi dan ekstensifikasi dalam pembangunan irigasi. Pada tahun 1969/1970 akibat rehabilitasi irigasi, maka areal sawah seluas 200.000 ha dapat diairi sedang dengan usaha ekstensifikasi telah menghasilkan perluasan areal yang dapat diairi seluas 66.000 ha. Perbaikan jalan2 dan jembatan2 juga selalu diusahakan antara lain 2.500 km jalan telah direhabilitir dan 15.530 m jembatan pada tahun 1969/1970, sehingga diharapkan keadaan perhubungan akan lebih baik.

Dalam hal pendapatan nasional maka salah satu tujunya ialah bahwa sektor pertanian, perikanan dan kehutanan merupakan sektor terpenting dan memberikan sumbangan terbesar yaitu lebih dari 50% dari pendapatan nasional. Bila dilihat perkembangannya sedjak tahun 1960 sampai dengan tahun 1967, adalah sangat lambat dimana hanya merunjukkan rata-rata kenaikan $\pm 2\%$. Mulai tahun 1968 baru terlihat adanya kemajuan2 dalam produksi kotor dalam negeri (GDP) dimana kalau diinjatakan dalam nilai riil dalam tahun 1968 merunjukkan kenaikan sebesar 6,8% dibandingkan dengan tahun 1967.

Permohonan penanaman modal dalam negeri sedjak berlakunya Peraturan Penanaman Modal Dalam Negeri tahun 1968 sampai Agustus 1970 untuk dua belas bidang usaha berdjumlah 546 projek dengan nilai Rp.203.201,3 djuta. Untuk itu telah diberikan rekomendasi oleh Sub-panitia penanaman modal dalam negeri sebanyak 369 projek dengan nilai Rp.110.641,5 djuta atau 67,58% dari seluruh djumlah nilai modal yang akan ditanam. Diantara projek2 yang telah direkomendasikan oleh Sub-panitia penanaman modal dalam negeri maka sebanyak 230 projek telah diberi fasilitas oleh Direktorat Djendral Pajak dan Direktorat Djendral Bea dan Tjukai atau kira2 62,3%.

Sedang ...

Sedangkan mengenai modal asing, maka sedjak mulai berlakunya Undang2 No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing tanggal 10 Djanuari 1967 telah ada permohonan masuk sebanyak 281 proyek dengan djumlah modal jang akan ditanam sebesar US \$ 1.192.534.000, dimana sedjumlah 71 proyek merupakan modal asing langsung jang diperkirakan akan menanamkan modalnja sebesar US \$ 883.872.000. Sedang sedjumlah 210 proyek dalam bentuk kerdjasama antara modal asing dengan swasta nasional atau perusahaan negara dimana diperkirakan besar modal jang akan ditanam sedjumlah US \$ 308.662.000. Dengan melihat djumlah modal asing jang akan masuk dibandingkan dengan modal nasional jang akan ditanam maka terlihat bahwa modal asing jang akan masuk diperkirakan sebesar US \$ 1.106.143.000 (92,75%) dan modal nasional sebesar US \$ 86.391.000.

PELAKSANAAN A.P.B.N. 1970/19712.1. Pendahuluan

Dalam tahun anggaran 1970/1971, yang merupakan tahun kedua PELITA, pelaksanaan A.P.B.N. makin bertambah penting. Pengeluaran² untuk pembangunan yang tjukup besar dan teratur diperlukan baik sebagai kelanjutan pembangunan proyek² dalam tahun pertama PELITA 1969/1970 maupun untuk mendirikan proyek² baru sesuai dengan rentjana yang telah dibuat.

Kebidjaksanaan anggaran berimbang tetap dilaksanakan, yaitu jumlah pengeluaran sama dengan jumlah penerimaan. Kebidjaksanaan tersebut mulai dilaksanakan pada tahun 1967. Dalam rangka kebidjaksanaan A.P.B.N. berimbang tersebut, sedjak tahun anggaran 1969/1970 diusahakan menghasilkan "public savings" yaitu selisih antara penerimaan routine dan pengeluaran routine. Diharapkan public savings tersebut akan terus meningkat dari tahun-ketahun sehingga penerimaan routine akan dapat menutupi baik pengeluaran routine maupun pengeluaran pembangunan. Dengan demikian penerimaan yang berasal dari bantuan luar negeri hanya akan merupakan sumber tambahan saja bagi pembangunan.

Didalam rangka usaha meningkatkan "public savings" tersebut, penerimaan routine (dalam negeri) harus dapat ditingkatkan terus melebihi pengeluaran routine. Karena pengeluaran routine juga jumlahnya terus meningkat, sesuai dengan makin meningkatnya aktivitas² pemerintah dalam suasana pembangunan, dapat dimengerti betapa beratnya tugas yang dipikul Pemerintah untuk meningkatkan penerimaan routine dan public savings tsb.

Tabel II.1....

Tabel II.1.

RINGKASAN REALISASI A.P.B.N., 1968-SEMESTER I-1970/1971 ¹⁾
(dalam milyar rupiah)

	1968	<u>Djan-Mas</u> 1969	1969/1970	<u>1970/1971</u> A.P.B.N.	<u>Realisasi</u> Semester I
Penerimaan routine	119,7	145,9	213,7	320,6	156,1
Pengeluaran routine	119,7	145,9	216,5	282,5	144,7
Public savings	-	-	+ 27,2	+ 37,1	+ 11,4
Penerimaan pembangunan	35,5	12,9	65,7	78,7	35,3
Pengeluaran pembangunan	35,5	12,7	92,8	115,8	33,3
Surplus/defisit	-	+ 0,2	- 27,1	- 37,1	+ 2,0
Djumlah surplus/defisit	-	+ 0,2	+ 0,1	-	+ 13,4

1) Tanpa bantuan proyek.

Dari Tabel II.1. terlihat bahwa keseimbangan daripada A.P.B.N. tetap terjaga walaupun terjadi peningkatan dalam penerimaan dan pengeluaran negara. Realisasi dalam semester I-1970/1971 tidak menunjukkan keseimbangan oleh karena penerimaan dan pengeluaran tidak sama perkembangan perhitungannya, akan tetapi untuk seluruh tahun anggaran diharapkan akan seimbang juga. Perkembangan daripada besarnya A.P.B.N. sedjak 1967 dengan prosentasi kenaikannya dapat dilihat dalam Tabel II.2. berikut.

Tabel II.2....

T a b e l II.2.

PERKEMBANGAN DJUMLAH REALISASI A.P.B.N., 1968-1970/1971 1)
(dalam milyar rupiah)

	<u>1967</u>	<u>1 9 6 8</u>		<u>1969/1970</u>		<u>1970/1971</u>	
		Realisasi	% naik	Realisasi	% naik	A.P.B.N.	% naik
Penerimaan	84,9	185,3	118,2	309,5	67,0	399,3	29,0
Pengeluaran	87,6	185,3	111,5	309,4	67,0	399,3	29,1

1) Tanpa bantuan proyek.

Djumlah pengeluaran dalam A.P.B.N. 1970/1971 sebesar Rp.399,3 milyar tersebut adalah terdiri dari pengeluaran routine sebesar Rp. 283,5 milyar dan pengeluaran pembangunan sebesar Rp.115,8 milyar (diluar bantuan proyek). Dalam tahun anggaran 1970/1971, telah terjadi beberapa perkembangan ataupun perubahan yang kiranya dapat mempengaruhi pelaksanaan A.P.B.N. 1970/1971 :

- (a) Peraturan Pemerintah No. 16 tanggal 17 April 1970 tentang perubahan dan penjemputan dibidang ekspor, impor dan devisa, termasuk kurs devisa.
- (b) Beberapa ketentuan didalam Peraturan Pemerintah No. 16 tanggal 17 April 1970 yang menyebabkan harus diadakan perhitungan kembali dalam bidang pengeluaran dalam negeri dan khususnya di Irian Barat.
- (c) Dimasukkannya pengganti ADO baik sebagai penerimaan maupun sebagai pengeluaran didalam pelaksanaan A.P.B.N. 1970/1971.
- (d) Hal2 yang lain yang timbul selama tahun anggaran 1970/1971.

2.2. penerimaan routine

Realisasi penerimaan routine dalam semester I-1970/1971 mentjaapai jumlah Rp.156,1 milyar yang terdiri dari :

- (a) penerimaan pajak2 langsung sebesar Rp.55,8 milyar (35,7%)
- (b) penerimaan pajak2 tidak langsung sebesar Rp.89,1 milyar (63,5%)
- (c) penerimaan non-tax sebesar Rp.1,2 milyar (0,8%)

Seerti diketahui, melalui penerimaan routine Pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan negara sehingga diharapkan akan dapat menutupi baik pengeluaran routine maupun pengeluaran pembangunan. Oleh karena itu Pemerintah senantiasa melakukan penjemputan2 dalam kebijaksanaan penerimaan negara. Usaha2 yang telah dijalankan dalam tahun anggaran 1970/1971 antara lain berupa :

- (1) Penjemputan Undang-Undang Pajak dan peraturan2 pelaksanaannya.

Dalam bidang ini antara lain telah dikeluarkan 5 buah Undang-Undang mengenai pajak pendapatan, pajak perorangan, pajak dividen, penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Diharapkan ke- lima Undang-Undang Pajak tersebut akan membantu setjara langsung pelaksanaan pemungutan pajak, disamping membantu perkembangan perekonomian.

- (2) Peningkatan efisiensi aparat pemungutan pajak. Dalam batas2 yang dimungkinkan oleh kemampuan Pemerintah baik dari segi anggaran pengeluaran maupun dari segi pembinaan keahlian, antara lain telah diusahakan peningkatan efisiensi aparat pemungut pajak berupa perbaikan organisasi, peningkatan keahlian personil pajak, peningkatan kesejahteraan personil pajak dan penerangan kepada masyarakat mengenai perpajakan.

- (3) Peningkatan ...

- (3) Peningkatan ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak yang tidak terlepas daripada kedua pokok diatas (ad (1) dan (2)). Tertakup dalam usaha ini antara lain adalah perluasan jumlah wajib pajak sejalan dengan perkembangan ekonomi, pengketatan pengukuhan dan penagihan pajak serta tinggakan2 pajak, penggunaan tjara pembayaran dimuka setjara "lumpsum" untuk pajak2 langsung dan memberikan petunjuk2 didalam pengisian formulir-formulir pajak ("return guidance").

Walaupun ketiga pokok usaha diatas dijalankan Pemerintah sebagai usaha untuk meningkatkan penerimaan negara, akan tetapi kebidjaksanaan-kebidjaksanaan tersebut tertakup dalam rangka kebidjaksanaan yang lebih luas yaitu mendorong kegiatan-kegiatan perekonomian baik sektoral maupun keseluruhan. Akibat daripada suatu kebidjaksanaan Pemerintah dalam bidang penerimaan dapat menyebabkan turunnja beberapa jenis penerimaan dalam jangka waktu tertentu, akan tetapi diharapkan dengan meningkatnja kegiatan perekonomian, maka pendapatan masyarakat akan meningkat pula sehingga akhirnya akan memberikan penerimaan lebih banyak kepada negara. Kebidjaksanaan yang bersifat seperti itu antara lain berupa penurunan tarif pajak, pembebasan2 pajak (tax holiday) bagi penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dan dorongan2 kepada beberapa tjabang usaha melalui pajak tidak langsung.

2.2.1. Pajak Langsung

Penerimaan pajak langsung belum dapat diperkembangkan sebagai penerimaan yang utama. Kebidjaksanaan yang dijalankan Pemerintah dalam

Tabel II.3.

REALISASI PENERIMAAN ROUTINE SEMESTER I-1970/1971
DIBANDINGKAN DENGAN REALISASI PENERIMAAN ROUTINE SEMESTER I-1969/1970
 (dalam milyar rupiah)

	<u>Semester I</u> <u>1969/1970</u>	<u>Semester I</u> <u>1970/1971</u>	<u>Kenaikkan</u>	<u>(%)</u>
1. Pajak langsung	41,4	55,8	+ 14,4	(+34,8%)
2. Pajak tidak langsung	70,2	99,1	+ 28,9	(+41,2%)
3. Penerimaan non-tax	1,4	1,2	- 0,2	(-14,3%)
D J U N L A H :	113,0	156,1	+ 43,1	(+38,1%)

hal pajak langsung mempunyai sasaran yang lebih luas lagi yaitu tetap menjaga kemampuan memipok modal untuk dapat dipergunakan didalam investasi-investasi pembangunan serta berusaha mengurangi jurang2 perbedaan pendapatan dalam masyarakat.

Didalam pelaksanaan pemungutannya, harus diakui bahwa setjara teknis administratif pemungutan pajak2 langsung adalah lebih sulit daripada djenis2 pajak lainnya. Walaupun demikian tetap diusahakan agar didalam jangka panjang pajak2 langsung akan lebih besar hasilnya.

Dari Tabel II.4. disebelah ini terlihatlah bahwa dari penerimaan pajak2 langsung 1970/1971, penerimaan pajak perseroan minyak merupakan penerimaan yang terbesar (+ 55%). Pentingnya peranan pajak perseroan minyak ini sebenarnya telah terlihat sedjak tahun 1967 yang lalu dimana setjara rata2 dari

T a b e l II.4.

PADJAK LANGSUNG, 1970/1971

(dalam milyar rupiah)

	<u>A.P.D.N.</u>	<u>REALISASI SEMESTER I</u>
1. Pajak pendapatan	13,2	6,5
2. Pajak perseroan	21,2	10,0
3. Pajak perseroan minjak	61,5	30,4
4. M. P. O.	20,9	8,8
5. Lain2 pajak langsung	0,3	0,1
D J U M L A H :	117,1	55,8

tahun ketahun penerbitannya merupakan sekitar 50% dari seluruh hasil2 pajak langsung.

Dalam hal pajak pendapatan, telah dinaikkan batas pendapatan bebas pajak dengan lebih kurang 140%.

	<u>1969 (Rp./tahun)</u>	<u>1970 (Rp./tahun)</u>
S u a m i	24.000	48.000
I s t r i	18.000	42.000
3 a n a k	18.000	54.000
	<u>60.000</u>	<u>144.000</u>

Dengan demikian batas pendapatan terendah untuk kena pajak bagi seorang suami dengan isteri dan tiga orang anak, dari Rp. 5.000,-/bulan dinaikkan menjadi Rp. 12.000,-/bulan.

Sebenarnya ...

Sebenarnya menurut survey biaya hidup di Djakarta yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik dalam tahun 1968/1969, untuk satu keluarga yang terdiri dari suami, isteri dan 3 orang anak diperlukan pengeluaran sebulan sebesar rata-rata Rp. 9.273,-. Namun demikian Pemerintah menetapkan Rp. 12.000,- sebulan.

Salah satu akibatnya adalah penurunan dalam jumlah wajib pajak pendapatan tahun 1970/1971 yang diperkirakan akan berkurang dengan 60%. Akan tetapi penurunan tersebut diharapkan dapat diimbangi dengan perluasan jumlah wajib pajak (ekstensifikasi), penagihan tunggakan pajak dan intensifikasi pemungutan.

Selanjutnya dengan Undang-Undang No. 9 tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1964, telah ditetapkan tarif baru pajak pendapatan yaitu yang mula-tarif progressif antara 15% dan 50% diturunkan menjadi tarif progressif antara 10% dan 50%. Diperkirakan bahwa walaupun penurunan tarif tersebut mempunyai tujuan jangka panjang yang tepat yaitu untuk mendorong investasi dan meratakan pendapatan masyarakat, akan tetapi dalam jangka pendek dapat menurunkan penerimaan pajak pendapatan. Disamping itu juga ditetapkan untuk mentjabut ketentuan pembebasan pajak pendapatan atas laba yang diperoleh perusahaan pelajaran dan penerbangan asing dari dan kepelabuhan udara di Indonesia. Akhirnya juga ditetapkan untuk memperpanjang batas waktu kompensasi kerugian.

Penerimaan pajak perseroan dalam semester I-1970/1971 mengalami kesulitan-kesulitan untuk dapat mentjabut rentjana dalam A.P.B.N. 1970/1971. Akan tetapi jumlah realisasi tersebut masih lebih tinggi sebesar Rp. 1,6 miliar (19%) daripada realisasi pajak perseroan dalam semester I-1969/1970.

Didalam ...

Didalam bidang pajak perseroan, juga telah disahkan Undang-Undang No. 8 tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925. Perubahan dan Tambahan tersebut ditujukan kepada usaha2 yang dapat mendorong pembangunan, yaitu antara lain meningkatkan tabungan pemerintah (public savings) dan mendorong investasi dan produksi disegala lapangan usaha.

Facilitas2 pajak yang diberikan melalui Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Fasilitas2 yang berhubungan dengan penanaman modal.
 - a. diperkenankannya kompensasi kerugian tanpa batas waktu dari kerugian2 enam tahun pertama badan usaha.
 - b. diperkenankan dilakukan penghapusan dipertjapat.
 - c. diperkenankannya pengurangan jumlah laba yang dikenakan pajak laba, bila badan usaha bersedia melakukan penanaman baru (investment allowance).
- (2) Fasilitas2 dalam rangka mentjiptakan iklim fiskal yang baik.
 - a. penurunan tarif pajak perseroan setjara umum.
 - b. memperpanjang batas waktu kompensasi kerugian.
 - c. diperkenankan dilakukan penilaian kembali aktiva tetap badan usaha.
- (3) Fasilitas masa bebas pajak (tax holiday).
- (4) Lain2 dalam rangka perubahan2 tersebut.

Pajak perseroan minjak dalam semester I-1970/1971 menghasilkan penerimaan sebesar Rp. 30,4 miliar dan jika dibandingkan dengan realisasi semester I-1969/1970 yaitu sebesar Rp. 20,0 miliar, maka berarti terdapat kenaikan sebesar Rp. 10,4 miliar (52,0%).

Dari realisasi penerimaan M.P.O. dapatlah dikatakan bahwa sistim memungut pajak melalui M.P.O. berdjalan dengan baik. Kemajuan memang masih belum seperti yang diharapkan karena dalam pelaksanaan sistim M.P.S.-M.P.O. tersebut terbentur kepada kesulitan2 pokok dalam pemungutan pajak seperti kurangnya kesadaran wadajib pajak, kurang sempurnanya aparat dan peraturan pelaksanaan, dsb.

Undang-Undang No. 10 tentang Perubahan dan Tambahan Undang2 Pajak Dividen 1959 pada pokoknya memperluas objek pajak dividen sehingga mencakup dividen, bunga dan royalties. Djuga ditetapkan bahwa pajak dividen harus diperhitungkan sebagai pembayaran pendahuluan dari pajak pendapatan ketjualian untuk membayar pajak bukan warga negara. Diharapkan penerimaan pajak dividen sebagai salah satu djenis lain2 pajak langsung akan mendjadi penerimaan yang makin meningkat ditahun-tahun mendatang.

2.2.2. Pajak tidak langsung

Penerimaan negara dari pajak2 tidak langsung masih merupakan sumber penerimaan yang terbesar dan berkembang terus. Dibandingkan dengan penerimaan pajak2 tidak langsung dalam semester I-1969/1970 sebesar Rp. 70,2 milyar, maka dalam tahun 1970/1971 terdapat kenaikan sebesar Rp. 28,9 milyar (+ 41,2%). Dalam golongan penerimaan pajak tidak langsung, yang merupakan djenis2 penerimaan yang utama adalah bea masuk, tjualian dan penerimaan minyak lainnya.

Dengan diturunkannya tarif pajak pendjualan beberapa matjam barang, seperti antara lain margarine dan minyak goreng, tidaklah dapat

Tabel II.5. ...

T a b e l II.5.

PADJAK-PADJAK TIDAK LANGSUNG, 1970/1971
(dalam milyar rupiah)

	<u>A.P.B.N.</u>	<u>REALISASI SEMESTER I</u>
1. Pajak pendjualan	19,0	7,5
2. Pajak pendjualan impor	19,5	10,7
3. T j u k a i	39,5	17,6
4. Bea masuk	78,0	34,5
5. Pajak devisa ekspor	7,0	11,4
6. Penerimaan minjak lainnya	33,6	15,4
7. Lain2 pajak tidak langsung	4,3	2,0
D J U M L A H :	<u>200,9</u>	<u>99,1</u>

diharapkan peningkatan yang terlalu tjepat dalam penerimaan pajak pendjualan tahun anggaran 1970/1971. Akan tetapi untuk djangka pandjang penurunan tarif tersebut akan mendorong perkembangan perdagangan dan usaha masyarakat sehingga selanjutnja akan memberikan penerimaan yang lebih besar.

Pajak pendjualan impor merupakan penerimaan yang semakin berarti dibandingkan dengan tahun2 yang lalu. Perkembangan impor yang selalu meningkat memberikan penerimaan pajak pendjualan impor yang makin besar pula, walaupun komposisi impor makin memudju kearah impor bahan baku dan bahan mentah dengan tarif yang sangat rendah.

Dalam bidang tjukai djuga telah dilakukan penurunan tarif berupa pembebasan sebagian tjukai hasil2 tembakau sedjak tahun 1969. Kebidjaksanaan tersebut

telah ...

telah memberikan hasil2 positif berupa perkembangan produksi hasil2 tembakau tanpa menurunkan penerimaan tjukai. Seperti diketahui $+ 95\%$ daripada penerimaan tjukai adalah berupa tjukai tembakau.

Kebidjaksanaan dalam hal bea masuk sangatlah erat hubungannya dengan kebidjaksanaan impor Pemerintah pada khususnya dan kebidjaksanaan pembangunan ekonomi pada umumnya. Bea masuk jang merupakan salah satu djenis penerimaan terbesar harus diserasikan dengan kebidjaksanaan impor jang menundjang stabilisasi dan pembangunan ekonomi negara. Sedjak tahun 1966, kebidjaksanaan impor terutama ditudjukan kepada program stabilisasi, jaitu mengutamakan impor bahan kebutuhan pokok dan barang konsumsi, untuk menekan arus inflasi. Dengan makin berkurangnya tingkat inflasi (650% dalam tahun 1966 dan diperkirakan 9% dalam tahun 1970/1971), maka kebidjaksanaan impor ditudjukan kepada pemundjangan pembangunan ekonomi. Untuk merangsang kegiatan industri dan produksi dalam negeri maka setjara berangsur-angsur tarif bea masuk telah disesuaikan sedemikian rupa, sehingga impor akan lebih diarahkan kepada bahan mentah dan bahan baku serta barang modal untuk membantu perkembangan unit2 produksi baru. Kedua kebidjaksanaan jang djalin-mendjalin tersebut tertjakup dalam kebidjaksanaan tarif dan kebidjaksanaan impor lainnya. Sampai dengan semester I-1970/1971 penerimaan bea masuk masih tetap meningkat walaupun komposisi impor telah berubah.

Dari perkiraan realisasi impor 1970/1971 sebesar US \$ 1.078,0 djuta, diperkirakan US \$ 800,0 djuta (74,2%) merupakan impor jang dikenakan bea masuk.

Padjak devise ekspor dengan sendirinja berhubungan erat pula dengan kebidjaksanaan ekspor.

Pajak devisa ekspor tidak merupakan jenis penerimaan yang penting dan makin lama makin tidak berarti dengan diberikannya dorongan2 yang lebih besar kepada sektor ekspor yang merupakan salah satu kunci bagi pembangunan ekonomi dan mendapat perhatian utama dari Pemerintah. Dalam rangka tersebut, pada tanggal 17 April 1970 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Penjempurnaan Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa yang antara lain menetapkan penghapusan sistim Alokasi Devisa Otomatis (ADO), dan juga penghapusan pajak devisa ekspor yaitu 5% dari nilai ekspor golongan A. Oleh karena itu dalam tahun 1970/1971 sebenarnya tidak terdapat penerimaan pajak devisa ekspor yang dalam A.P.B.N. 1970/1971 direntjanskan sebesar Rp. 7,0 miliar. Akan tetapi ditetapkan juga pungutan Pemerintah terhadap ekspor dengan prosentase umum 10% yang diperhitungkan dari hasil devisa ekspor, terketjual devisa dari ekspor barang2 djadi (finished goods). Hasil pungutan tersebut diserahkan kembali kepada daerah dalam bentuk nilai lawan rupiah. Dengan demikian penerimaan pajak devisa ekspor dalam tahun anggaran 1970/1971 sebenarnya adalah pungutan Pemerintah yang dikeluarkan kembali berupa subsidi daerah otonom.

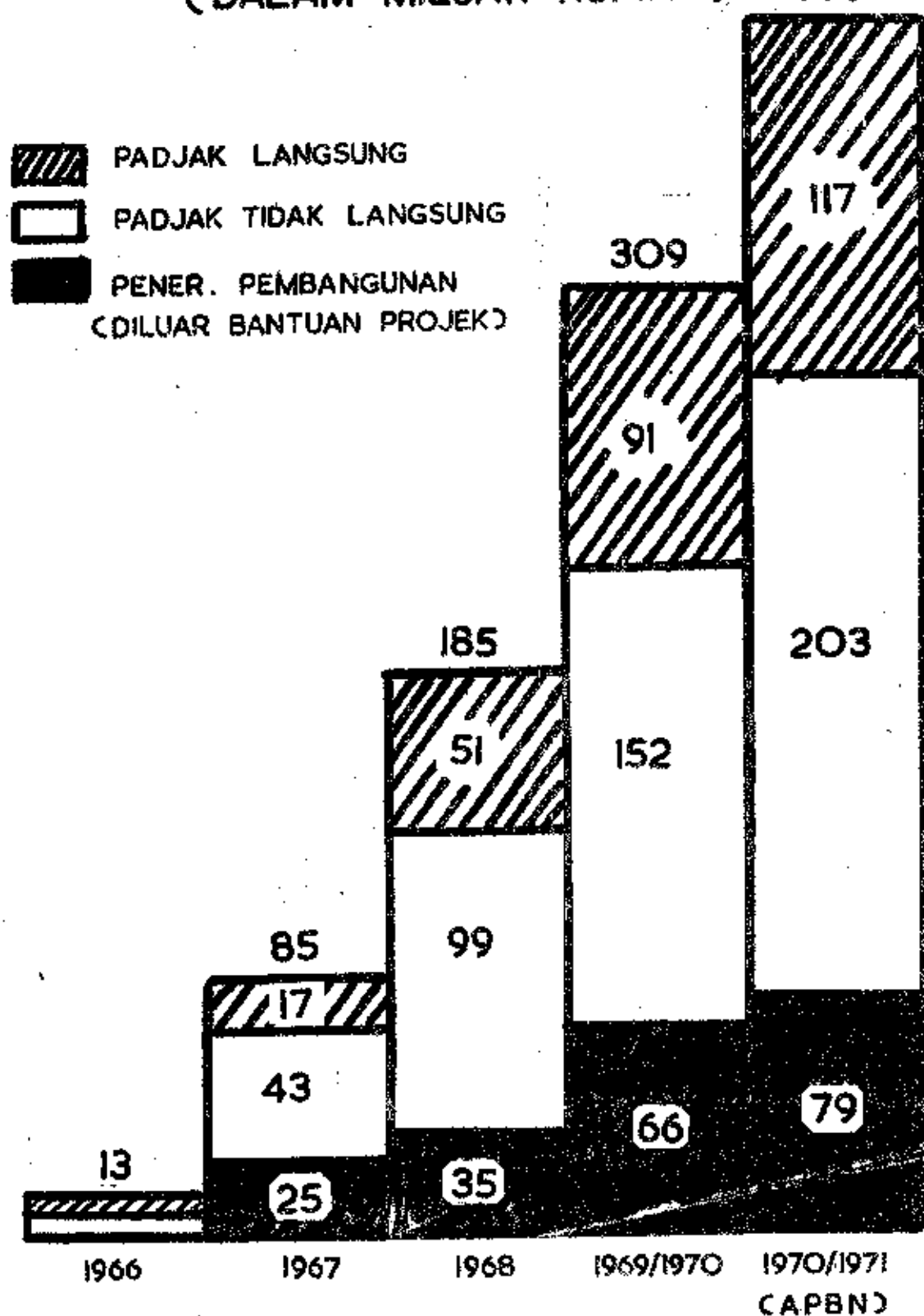
Penerimaan minyak lainnya dalam semester I-1970/1971 bardjwalah sebesar Rp. 15,4 miliar. Walaupun agak rendah, namun melampaui realisasi dalam semester I-1969/1970 sebesar Rp. 8,4 miliar (+ 120%). Dengan dirubahnja kurs devisa untuk perhitungan ongkos2 minyak, yaitu menyesuaikan diri dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 16 tanggal 17 April 1970, penerimaan minyak lainnya diperkirakan agak sukar untuk dapat mentjapai Rp. 33,6 miliar (A.P.B.N. 1970/1971).

Seperti diketahui penerimaan minyak lainnya diperoleh dari hasil pendj alan minyak dalam negeri.

2.2.3. Penerimaan ...

DIAGRAM II.1.

PENERIMAAN NEGARA 1966-1970/1971
(DALAM MILJAR RUPIAH)



2.2.3. Penerimaan non-tax

Penerimaan non-tax adalah penerimaan yang tidak bersifat sebagai pajak, yaitu antara lain berasal dari berbagai denda, penerimaan dari departemen dan penerimaan yang diakibatkan ikut sertanya Pemerintah dalam kegiatan usaha. Oleh karena itu penerimaan non-tax sukar diparkirakan perkembangannya. Disamping itu administrasi daripada penerimaan departemen belum dapat ditertibkan sepenuhnya sehingga hanya mempunyai arti ketjil sekali.

2.3. Pengeluaran routine

Pengeluaran routine merupakan bagian pengeluaran yang terbesar dari pada seluruh anggaran belanda pengeluaran dan mempunyai perkembangan yang terus meningkat, walaupun usaha penghematan tetap ditingkatkan.

Makin meningkatnya pengeluaran routine tersebut adalah sesuai dengan peningkatan pembangunan itu sendiri dimana sudah tentu diperlukan lebih besar pengeluaran untuk aparat pelaksana, yaitu merupakan biaya routine. Dalam pada itu didalam tahun 1970/1971 gaji pegawai telah dinaikkan pula sebesar 50,0% diatas keadaan tahun 1969/1970.

Dalam semester I-1970/1971 pengeluaran routine telah menjapai jumlah Rp. 144,7 milyar atau 51,0% dari jumlah anggaran belanda routine 1970/1971 sebesar Rp. 283,5 milyar.

Seperti telah disebutkan, dalam usaha membentuk public savings sebesar-besarnya, Pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan routine dan dilain pihak menekan se-dapatnya pengeluaran routine.

Tabel II.6. ...

T a b e l II.6.

PENGELUARAN ROUTINE, 1970/1971

(dalam milyar rupiah)

	<u>A.P.B.N.</u>	<u>REALISASI SEMESTER I</u>
1. Belandja pegawai/pensiun	132,3	64,4
2. Belandja barang	55,8	25,4
3. Subsidia daerah otonom	53,2	37,5
4. Bunga/tjittjilan hutang	31,4	10,0
5. Pengeluaran untuk PHILU dan lain2	10,8	7,4
D J U M L A H	283,5	144,7

Akan tetapi dalam segi pengeluaran routine Pemerintah tetap berpegang pada kelurusan agar penghematan2 yang dilakukan tidak boleh justru menghambat Isentjarnya roda Pemerintahan dan pembangunan.

2.3.1. Belandja pegawai/pensiun

Belandja pegawai/pensiun merupakan bagian terbesar daripada pengeluaran routine. Oleh karena jenis pengeluaran ini menjangkut masalah yang paling pokok dalam hal pegawai negeri, yaitu mengenai gaji dan kesedjahteraan pegawai, maka pengeluaran ini merupakan pengeluaran yang sangat penting dan banyak segit2 persoalannya.

Dapat dikatakan bahwa dalam pengeluaran untuk belandja pegawai/pensiun, sukar dilakukan penghematan2 yang terlalu drastis karena gaji daripada pegawai negeri sipil dan militer diperkirakan masih kurang dari

Tabel II.7. ...

T a b e l II.7.

BELANDJA PESEWAI DAN PENSUN, 1970/1971

(dalam milyar rupiah)

	<u>A.P.B.N.</u>	<u>SEMESTER I</u>
1. Tunjangan beras dalam natura	20,4	10,7
2. Tunjangan beras dalam uang kas	10,3	5,1
3. Gadjil/upah/pensiun	73,5	36,0
4. Biaya makan (lauk pauk)	12,9	6,1
5. Lain2 belandja pegawai dalam negeri	10,0	4,1
6. Lain2 belandja pegawai luar negeri	4,2	2,4
D J U M L A H :	132,3	64,4

pada mentjukupi. Sedjak 1 April 1970 telah diambil kebidjaksanaan untuk memberikan kenaikan gadjil sebesar 50% kepada pegawai negeri baik pusat maupun daerah otonom. Demikian djuga tunjangan beras sampai saat ini masih dirasakan perlunya untuk tetap diberikan. Program penghematan haruslah dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kelantjaran pelaksanaan tugas2 Pemerintah.

Dibandingkan dengan rentjana dalam A.P.B.N. 1970/1971, realisasi pengeluaran untuk belandja pegawai/pensiun semester I-1970/1971 masih agak rendah. Akan tetapi masih harus diperhitungkan adanya pengeluaran untuk honorarium dan vakasi para guru serta tambahan belandja pegawai luar negeri akibat kenaikan kurs devisa umum menjadi 378 per US \$ 1,- sedjak 17 April 1970.

2.3.2. Belandja ...

2.3.2. Belandja barang

Belandja barang merupakan sasaran yang utama daripada prognosa penghematan Pemerintah. Perbaikan administrasi dan pengawasannya telah dapat mengurangi pemborosan yang terjadi. Misalnya antara lain telah diadakan standarisasi di bidang kendaraan dinas dan perumahan dinas. Walaupun demikian, Pemerintah juga harus memperhatikan kebutuhan perlengkapan kerja yang makin meningkat sejalan dengan makin meningkatnya kegiatan aparat pemerintah, khususnya dengan meningkatnya kegiatan pelaksanaan pembangunan.

Pengeluaran untuk belandja barang dalam semester I-1970/1971 sebesar Rp. 25,4 miliar dapat dibagi atas :

- (a) belandja barang dalam negeri sebesar Rp. 21,5 miliar.
- (b) belandja barang luar negeri sebesar Rp. 3,9 miliar.

Belandja barang dalam negeri diartikan sebagai pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa keperluan aparat Pemerintah yang dilaksanakan didalam negeri dan belandja barang luar negeri adalah pengeluaran untuk membeli barang atau membayar jasa diluar negeri. Pengeluaran belandja barang yang mungkin akan mentjapai jumlah yang agak tinggi, adalah disebabkan antara lain oleh meningkatnya pengeluaran belandja barang luar negeri yang memakai devisa dengan naiknya kurs devisa umum menjadi Rp. 378,- per US \$ 1,- dan pengeluaran tambahan lainnya.

2.3.3. Subsidi daerah otonom

Jumlah pengeluaran untuk subsidi daerah otonom dalam semester I-1970/1971 mentjapai jumlah Rp. 37,5 miliar yang terbagi atas subsidi

kepada ...

kepada daerah Irian Barat sebesar Rp. 5,1 miliar dan subsidi kepada daerah otonom lainnya sebesar Rp. 32,4 miliar termasuk didalamnya penggantian ADO. Akibat daripada pengeluaran untuk penggantian ADO tersebut, pengeluaran untuk subsidi daerah otonom diperkirakan akan melampaui rentjana dalam A.P.B.N. 1970/1971.

Oleh karena terbatasnya sumber2 penerimaan Pemerintah Daerah guna memenuhi kebutuhannya, maka Pemerintah Pusat perlu memberikan bantuan berupa subsidi yang untuk sebagian besar masih dipergunakan untuk pengeluaran belanja pegawai Daerah Otonom.

Dengan dihapuskannya sistim ADO yang merupakan sumber penerimaan utama Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Pusat memberikan subsidi penggantian ADO kepada Pemerintah Daerah berupa nilai lawan dalam rupiah yang besarnya disesuaikan dengan jumlah ADO yang pernah diterima oleh masing-masing daerah dalam tahun 1969/1970 ditambah dengan kenaikan sebesar 5,0%.

Jumlah subsidi kepada daerah otonom Irian Barat agak besar oleh karena masalah Irian Barat mempunyai kekhususan dan merupakan daerah yang paling terkebelakang dibandingkan dengan daerah2 lainnya.

2.3.4. Bunga/tjittjilan hutang

Dalam semester I-1970/1971, pengeluaran untuk pembayaran bunga/tjittjilan hutang adalah sebesar Rp. 10,0 miliar yang terbagi dalam :

- a. pembayaran bunga/tjittjilan hutang dalam negeri sebesar Rp. 1,5 miliar.
- b. pembayaran bunga/tjittjilan hutang luar negeri sebesar Rp. 8,5 miliar.

Pembayaran ...

Pembayaran bunga/tjittjilan hutang dalam negeri berasal dari hutang-hutang Pemerintah kepada perusahaan atau pihak ketiga yang dilakukan di-masa2 lampau dan yang sisanya harus dilunasi. Oleh karena itu diharapkan hutang-hutang tersebut akan dapat habis dilunasi didalam beberapa waktu mendatang.

Mengenai pelunasan bunga/tjittjilan hutang2 luar negeri Indonesia yang berasal dari masa pra-1966, untuk tidak menghalangi dan memberatkan usaha2 permulaan pembangunan dewasa ini, Pemerintah telah berhasil mengusahakan penangguhan dan pengaturan kembali pelunasannya. Pembayaran kembali hutang2 lama tersebut dimulai dengan tahun anggaran 1970/1971 dimana dapat ditunda dan diatur kembali pelunasannya selama masa 30 tahun.

2.3.5. Pengeluaran untuk PEMILU dan lain2

Pengeluaran untuk PEMILU digolongkan dalam pengeluaran routine lain-lain karena pengeluaran ini bersifat insidensial yang tidak terjadi setiap tahun. Untuk tahun anggaran 1970/1971 pengeluaran untuk PEMILU diperkirakan mactjapai Rp. 10,0 miliar, yang telah dikeluarkan sebesar Rp. 7,3 miliar dalam semester I-1970/1971.

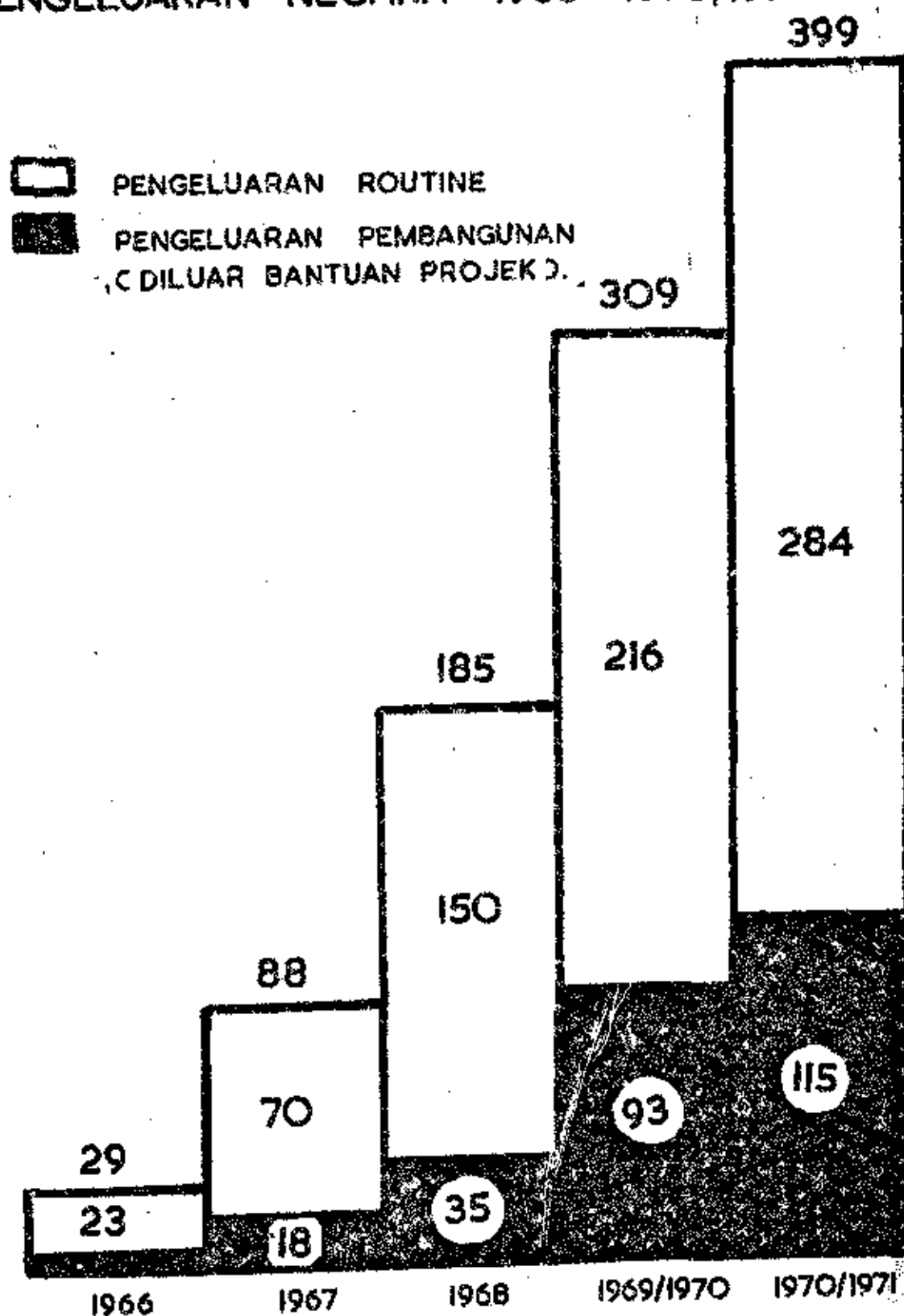
Pengeluaran untuk PEMILU tersebut terutama dipergunakan bagi persiapan pelaksanaan dan pembelian perlengkapan PEMILU, sedang pengeluaran untuk pengamanan PEMILU telah diperhitungkan dalam pengeluaran untuk belandja barang.

Pengeluaran routine lain2 banjalah merupakan pengeluaran tambahan

yang tidak ...

DIAGRAM 11.2.

PENGELUARAN NEGARA 1966 - 1970/1971



jang tidak direntjanakan dan antara lain termasuk pengeluaran dari tahun-tahun jang lalu jang harus diperhitungkan dalam tahun ini.

2.4. Tabungan pemerintah

Seperti telah disebutkan di muka, tabungan pemerintah atau public savings adalah kelebihan penerimaan routine; public savings tersebut dipergunakan untuk membiyai sebagian daripada anggaran pembangunan.

Dalam proses pembentukan public savings, tidaklah berarti bahwa public savings terbentuk dalam tiap triwulan setjara merata, oleh karena pola perkembangan daripada penerimaan routine dan pengeluaran routine tidaklah sama untuk tiap triwulan.

Public savings mulai berhasil direalisasi oleh Pemerintah pada tahun anggaran 1969/1970 jaitu sebesar Rp. 27,2 milyar. Dalam tahun anggaran 1970/1971 perkiraan public savings adalah sebesar Rp. 37,1 milyar jang berarti kenaikan sebesar + 36,4%. Dengan tetap mempertahankan A.P.B.N. berimbang walaupun dengan tingkat A.P.B.N. jang lebih tinggi, Pemerintah mempunyai tujuan untuk terus memperbesar public savings sehingga pembiayaan pembangunan sebagian besar nantinya dapat dibiayai oleh public savings. Dengan perkataan lain Pemerintah mempunyai tujuan agar sebagian besar pengeluaran baik routine maupun pembangunan dapat dibiayai oleh sumber2 penerimaan dalam negeri, sehingga penerimaan dari bantuan luar negeri hanyalah merupakan pelengkap saja.

2.5. Penerimaan pembangunan

Oleh karena sumber2 penerimaan dalam negeri masih belum tjukup, sedang pembangunan ekonomi Indonesia harus segera dilaksanakan, maka

diusahakan ...

diusahakan juga sumber2 penerimaan dari luar negeri. Penerimaan pembangunan tersebut terdiri dari :

- (a) bantuan program yaitu devisa kredit, bantuan pangan serta bantuan bukan pangan.
- (b) bantuan proyek yaitu berupa peralatan proyek (mesin2, dsb.).

Dalam A.P.B.N. 1970/1971 bantuan program diperkirakan montjapai jumlah Rp. 78,7 milyar dan bantuan proyek montjapai jumlah Rp. 45,6 milyar.

Devisa kredit yang diperoleh dari negara2 donor diterima dalam bentuk valuta asing, kemudian dijual oleh Pemerintah kepada importir melalui Bursa Valuta Asing.

Bantuan pangan dimaksudkan untuk menanggulangi kekurangan produksi bahan makanan pokok, khususnya beras. Hasil pendjualan bantuan bahan makanan tersebut didalam negeri berupa rupiah dipergunakan untuk membiayai pembangunan proyek2. Disamping bantuan pangan juga terdapat bantuan bukan pangan berupa benang tenun, kapas kasar dan pupuk.

Mengenai bantuan proyek, bantuan diterima dalam bentuk alat2 untuk rehabilitasi dan peluasan proyek2 yang ada serta untuk pembangunan proyek-proyek baru. Jumlah yang tertjatat dalam anggaran hanyalah milainya dalam rupiah daripada bantuan tersebut yang tertjatat sebagai penerimaan maupun sebagai pengeluaran dengan kurs perhitungan Rp.326,- per US \$ 1,- sebelum 17 April 1970 dan Rp.378,- per US \$ 1,- sesudah 17 April 1970.

2.5.1. Bantuan program

Realisasi nilai lawan bantuan program yang dipergunakan untuk membiayai pembangunan dalam semester I-1970/1971 mentjapai djumlah Rp.35,3 milyar yang terdiri dari :

- (a). Devisa kredit sebesar Rp. 29,8 milyar.
- (b). Bantuan pangan sebesar Rp. 2,5 milyar.
- (c). Bantuan bukan pangan sebesar Rp. 3,0 milyar.

Devisa kredit yang didjual melalui Bursa Valuta Asing tidaklah dapat terlepas daripada perkembangan impor. Usaha2 Pemerintah untuk meningkatkan pendjualannya antara lain berupa perbaikan administrasi pendjualannya, kebidjaksanaan dalam tarip bea masuk dan peraturan2 lalu lintas devisa lainnya.

Sebagian besar daripada bantuan pangan terdiri dari bantuan beras. Masalah beras hingga saat ini masih merupakan masalah yang sangat peka dan sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi keseluruhan. Sedjalan dengan peningkatan produksi beras dalam negeri, impor beras masih diperlukan untuk mengisi kekurangan konsumsi beras dan persediaan beras untuk menghadapi patjeklik sewaktu-waktu. Diharapkan dalam tahun2 mendatang, impor beras akan makin dikurangi sesuai dengan makin meningkatnja produksi beras dalam negeri.

Bantuan bukan pangan ditudjukan kepada pemenuhan kebutuhan sandang dengan memundjang perkembangan industri sandang dalam negeri yang sebagian berupa kapas kasar bagi industri pemintalan dalam negeri.

Disamping itu juga terdapat bantuan pupuk dalam rangka peningkatan produksi beras oleh karena produksi pupuk dalam negeri belum mentukupi.

2.5.2. Bantuan proyek

Bantuan proyek dalam semester I-1970/1971 mentjapai djumlah US \$ 27,0 djuta jang dengan kurs perhitungan Rp. 378,- per US \$ 1,- bernilai sebesar Rp. 10,2 miliar.

Dalam triwulan I dan triwulan II-1970/1971 realisasinja masing2 adalah Rp. 4,5 miliar dan Rp. 5,7 miliar.

2.6. Pengeluaran pembangunan

Dalam semester I-1970/1971 pengeluaran pembangunan (diluar bantuan proyek) diperkirakan mentjapai djumlah Rp. 33,3 miliar, jang berarti kenaikan sebesar Rp. 5,3 miliar (+ 18,9%) djika dibandingkan dengan realisasi pengeluaran pembangunan semester I-1969/1970.

Dengan meningkat kepada tahun kedua Pembangunan Lima Tahun, dalam tahun 1970/1971 ditetapkan urutan prioritas dalam pengeluaran pembangunan sebagai berikut :

- (a) Keperluan pembiayaan untuk pentjapaian target fisik 1969/1970 dari proyek2 jang direntjanakan dan tersedia anggarannya dalam tahun anggaran tersebut, jang karena berbagai sebab dalam pelaksanaannya tidak mentjapai target fisiknya pada akhir tahun anggaran 1969/1970 tersebut.
- (b) Keperluan pembiayaan dalam negeri (local cost) untuk pelaksanaan

bantuan projek dan bantuan teknis yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 1970/1971.

- (c) Keperluan pembiayaan untuk melanjutkan projek2 dalam tahun anggaran 1969/1970, yang dalam perentjanaan semula memerlukan kelanjutan atau penyelesaian dalam tahun anggaran 1970/1971.
- (d) Keperluan pembiayaan projek2 baru yang dimulai dalam tahun 1970/1971.

Kalau dilihat dari arah pengeluaran, maka Rp. 24,3 milyar (73,0%) ditudjukan kepada bidang ekonomi, Rp. 5,2 milyar (15,6%) diarahkan kepada bidang sosial dan Rp. 3,8 milyar (11,4%) dikeluarkan untuk bidang umum.

RENTJANA A.P.B.N. 1971/19723.1. Pendahuluan

Baik berdasarkan kepada sesuatu konsep dasar tertentu maupun melihat kepada pengalaman pembangunan dari negara2 lain yang lebih dahulu melaksanakan pembangunan dari Indonesia, dapat diketahui bahwa dari tahun ke tahun usaha2 pembangunan itu semakin meningkat dan semakin meluas. Telah diketahui pula bahwa suatu usaha pembangunan dapat mendorong-madju maupun menarik-keatas kegiatan2 pembangunan lainnya. Dengan perkataan lain, untuk menimbulkan dan kemudian meninggikan efektifitas serta efisiensi sesuatu aktivitas pembangunan maka aktivitas2 pembangunan lainnya haruslah pula dilaksanakan. Dengan demikian proses pembangunan merupakan suatu proses yang saling menundjang dan saling memperkuat kegiatan2 pembangunan lainnya. Itulah sebabnya mengapa dalam usaha pembangunan diperlukan pembiayaan yang makin lama makin besar.

Didalam merentjanakan usaha2 pembangunan yang hendak dilaksanakan didalam masa tahun anggaran 1971/1972, yang merupakan tahun ketiga dari PELITA I, pertimbangan2 seperti disebutkan diatas telah pula diperhatikan. Rentjana pengeluaran pembangunan 1971/1972 haruslah sedemikian rupa tingkat dan luasnya sehingga aktivitas2 yang hendak dilaksanakan tidak sadja merupakan usaha2 untuk merampungkan dan menundjang kegiatan2 yang telah dilakukan didalam masa2 sebelumnya, tetapi djuga meliputi aktivitas2 lainnya yang direntjanakan merupakan dasar atau permulaan bagi aktivitas2 lainnya dimasa-masa berikutnya; ataupun djuga

merupakan...

merupakan pendorong serta penarik bagi aktivitas2 lainnya dimasa-masa selanjutnya.

Perencanaan pembangunan seperti demikian itu sudah barang tentu dilakukan didalam batasan2 tertentu yang berlaku dan yang memang ada setjara objektif: pertama, prioritas dan strategi pembangunan seperti yang telah disusun didalam REPELITA I; dan kedua, dana2 pembangunan yang tersedia dan dapat dipergunakan didalam tahun anggaran 1971/1972.

Mengenai yang pertama, tentunya telah tjukup diketahui oleh semua pihak. Pada pokoknya prioritas dan strategi pembangunan dipusatkan pada sektor pertanian dan sektor2 lainnya yang mendukung pertanian. Hal ini bukanlah berarti bahwa sektor2 lainnya diabaikan, melainkan tetap turut dibangun sesuai dengan rencana pembangunan setjara keseluruhannya.

Dengan demikian batasan yang lebih menentukan didalam perencanaan pengeluaran pembangunan 1971/1972 adalah besarnya dana pembangunan yang tersedia dan dapat dipergunakan didalam tahun tersebut.

Mengenai dana pembangunan ini, sedjaah yang sifatnya budgeter, penjadiannya datang dari dua sumber: pertama, yang berasal dari tabungan Pemerintah; dan kedua, yang berasal dari penerimaan pembangunan. Dalam tahun 1971/1972 dari kedua sumber tersebut diperkirakan dapat dikerahkan dana pembangunan sebesar Rp. 154,9 milyar.

Tugas yang dipikul Pemerintah untuk dapat menghasilkan dana pembangunan sebesar jumlah tersebut adalah sangat berat. Djelas sudah bahwa untuk menghasilkan tabungan Pemerintah sebesar mungkin, haruslah penerimaan routine dapat ditingkatkan setinggi mungkin pula sementara

tetap ...

tetap menjaga pengeluaran routine pada tingkatnya yang wajar. Demikian pula, penerimaan pembangunan haruslah dapat ditingkatkan realisasinya didalam batas2 persetujuan yang telah disepakati semula.

Dari kedua matjam sumber dana pembangunan tersebut, tabungan Pemerintah adalah yang terpenting terutama untuk kelanjutan usaha2 pembangunan dimasa-masa yang akan datang. Sebab itu adalah pada tempatnya bila seluruh bangsa Indonesia dapat memberikan perhatian dan pengertian yang sungguh2 terhadap usaha2 Pemerintah untuk meningkatkan penerimaan routine, yaitu penerimaan yang berasal dari sumber2 dalam negeri sendiri.

3.2. Peningkatan penerimaan dalam negeri

Penerimaan dalam negeri adalah penerimaan yang berasal dari hasil pemungutan berbagai djenis pajak, bea masuk, tjukai, penerimaan minjak dan penerimaan non-tax. Dimasa yang lampau boleh dikatakan sangat kurang diperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan. Pada waktu itu sumber2 pembiayaan untuk berbagai aktivitas Pemerintah terutama didasarkan pada tjara2 yang sifatnya inflator, baik yang melalui budget maupun yang melalui perbankan. Tjara2 seperti itu memang lebih mudah, tetapi telah menimbulkan suatu keadaan ekonomi seperti yang telah dialami pada waktu itu.

Barulah sedjak tahun 1966 diadakan usaha2 untuk mulai membina sumber2 penerimaan negara dari sektor perpajakan setjara sungguh2. Perpajakan yang selama ini agak dilupakan mulailah diusahakan untuk dapat diletakkan pada proporsinya yang wajar. Dengan tidak memperke-

tjil ...

tiil pengaruh inflasi atas penerimaan, dapat dilihat ketjepatan meningkatnja penerimaan dalam negeri. (lihat Tabel III.1. dan Grafik III.1.).

T a b e l III.1.

PERKEMBANGAN PENERIMAAN DALAM NEGERI, 1966-1971/1972

(dalam milyar rupiah)

<u>Tahun</u>	<u>Djumlah</u>	<u>Kenaikan (%)</u>
1966	13,1	-
1967	60,2	+ 359,5
1968	119,7	+ 118,7
1969/1970	213,7	+ 62,8
1970/1971	320,6 */	+ 31,6
1971/1972	115,9 */	+ 29,7

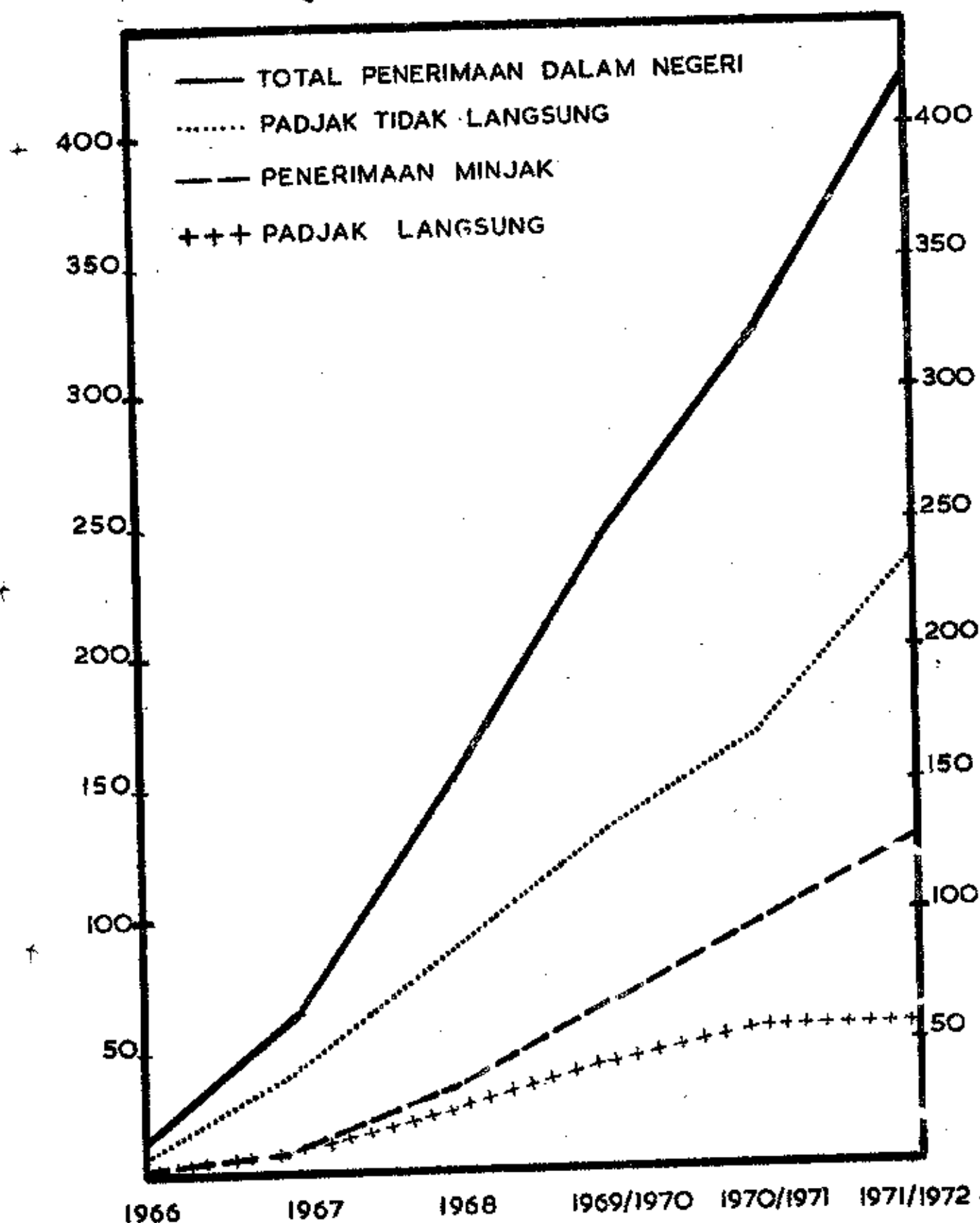
*/ Angka A.P.B.N.

Dengan menghilangnja pengaruh inflasi sedjak tahun 1969/1970 jang lalu, terlihat pula berkurangnja tingkat kenaikan penerimaan dalam negeri. Didalam tahun anggaran 1971/1972 diperkirakan tingkat kenaikan itu hanya mantjapai + 29,7 % djika dibandingkan dengan penerimaan A.P.B.N. 1970/1971. Sebagaimana nanti akan mendjadi djelas didalam pembahasan selandjutnja, berkurangnja tingkat kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh semakin beratnja pemasukan penerimaan baik jeng berasal dari perpajakan, bea masuk, tjukai maupun jeng berasal dari penerimaan lainnja.

Sementara itu bila diingat bahwa pengeluaran akan tetap meningkat terus mengikuti gerak perkembangan aktivitas2 Pemerintah didalam masa

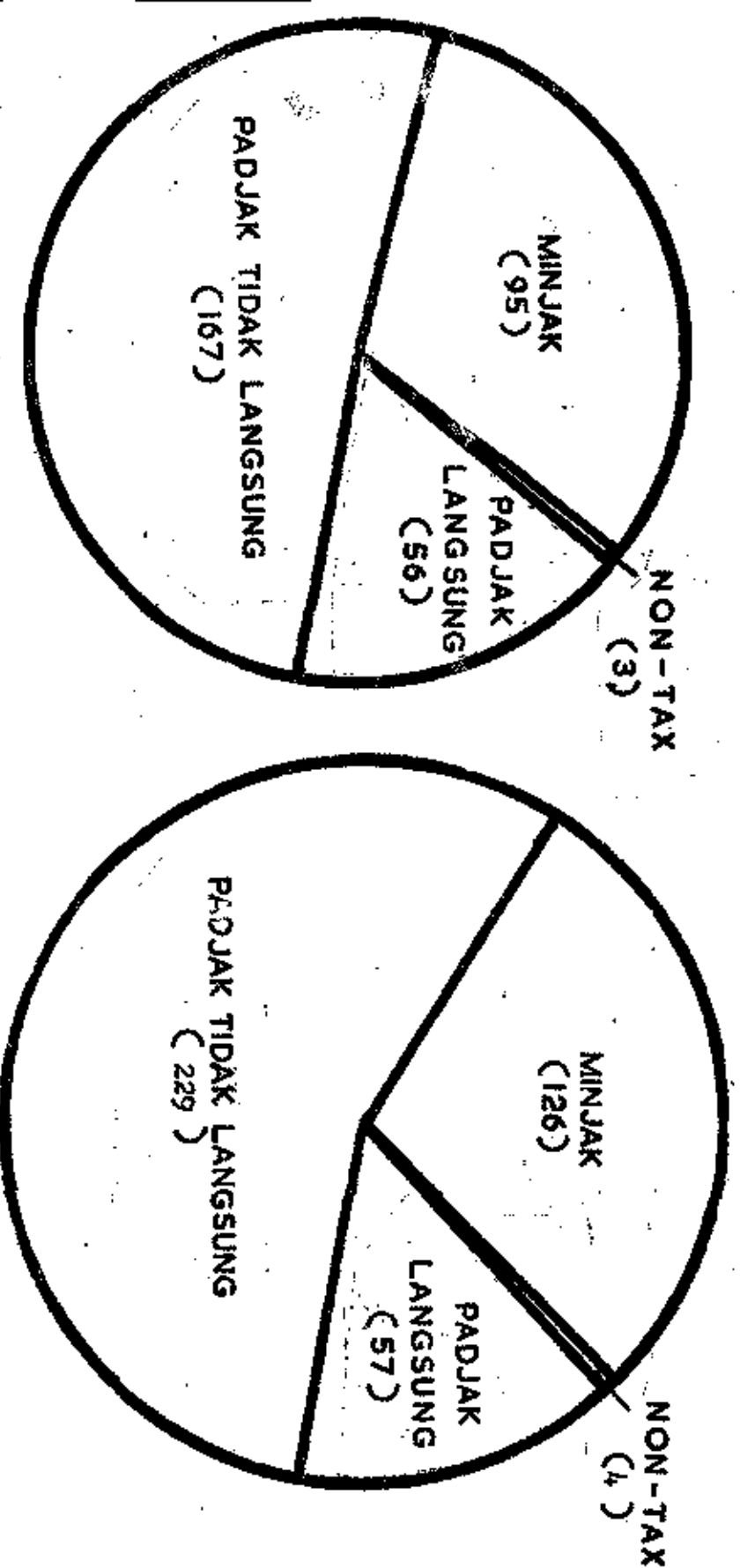
pembangunan ...

PENERIMAAN DALAM NEGERI 1966 - 1971/1972 (DALAM MILJAR RUPIAH)



GAMBAR III.1.

PENERIMAAN DALAM NEGERI 1970/1971-1971/1972
(DALAM MILJAR RUPIAH)



1970 / 1971

(321)

1971 / 1972

(416)

pembangunan ini (lihat Tabel III.8. dan Grafik III.3.), maka tidak dapat lain harus disimpulkan bahwa telah tiba waktunya untuk sepenuhnya memberikan pengertian dan dorongan bagi usaha2 yang dijalankan untuk dapat meningkatkan penerimaan dalam negeri. Apalagi seperti telah digariskan didalam REPELITA I dalam jangka panjang pembiayaan2 pembangunan akan terutama disandarkan kepada tabungan Pemerintah.

3.2.1. Penggiatan pemasukan pajak langsung

Sesuai dengan sifat2 yang inherent pada jenis2 pajak langsung, maka penerimaan dari sumber ini merupakan yang paling berat pemasukannya. Hal ini disebabkan oleh keadaan2 yang objektif seperti antara lain tingkat pendapatan per capita yang masih rendah, disiplin dan kondisi aparat Pemerintah pada umumnya dan aparat perpajakan pada khususnya yang masih harus diperbaiki terus menerus, tingkat pengertian dan kesadaran rakyat akan perpajakan yang pada umumnya juga masih rendah seperti juga halnya dengan tingkat pengertian dan kesadaran akan adanya beban langsung antara jumlah pemasukan pajak dan besarnya pembangunan.

Betapa sukarnya pemasukan pajak langsung ini dapat diketahui dari angka2 yang tertera didalam Tabel III.2. Terutama kelihatan sekali sedjak tahun 1969/1970, yaitu sedjak tingkat kenaikan inflasi juga sudah sangat menurun.

Selainnya kesukaran2 yang sifatnya objektif seperti telah disebutkan diatas, yang memang harus dihadapi dan diatasi untuk dapat

meningkatkan ...

T a b e l III.2.

PERKEMBANGAN PEMASUKAN PAJAK LANGSUNG, 1966-1971/1972
(dalam miliar rupiah)

<u>Tahun</u>	<u>Djumlah</u>	<u>Kenaikan (%)</u>
1966	1,2 ^{1/}	-
1967	9,4 ^{1/}	+ 683,3
1968	25,5	+ 171,3
1969/1970	43,2	+ 69,4
1970/1971	55,6 ^{2/}	+ 28,7
1971/1972	56,8 ^{2/}	+ 2,2

^{1/} Termasuk penerimaan IPEDA.

^{2/} Angka A.P.B.N.

meningkatkan pemasukan pajak langsung dalam jangka waktu panjang, masih harus dijaga agar penggiatan pemasukan pajak langsung itu tidak terlalu menekan kepada para wajib pajak dari golongan pendapatan rendah. Dengan perkataan lain, segi keadilan harus tetap diperhatikan. Itulah sebabnya maka telah beberapa kali batas pendapatan bebas pajak dinaikkan dan tarif serta laisan pendapatan kena pajak disesuaikan; yang terakhir telah diadakan perubahan² didalam tahun 1970 (selanjutnya lihat keterangan² didalam Bab II).

Selain daripada itu, penggiatan pemasukan pajak langsung tidak pula boleh menghalangi ataupun memperketijil keinginan masyarakat terutama para wajib pajak pada umumnya dan perusahaan² pada khususnya untuk melakukan investasi² yang berguna untuk pembangunan. Untuk itu

telah ...

telah diberikan tjukup fasilitas2 perpajakan bagi para tjalon penanam modal (selandjutnja djuga lihat keterangan2 didalam Bab II).

Dalam kondisi serta rangka pemikiran seperti disebutkan diatas aparat perpajakan harus mendjalankan tugasnja. Dengan demikian dapatlah dipahami betapa sukarnja usaha2 untuk menggiatkan pemasukan pajak langsung tersebut.

Namun demikian harus disadari pula bahwa didalam djangka panjang, dari sekian banjak djenis2 pajak, maka djenis2 pajak langsung kelak harus merupakan bagian dari penerimaan negara jang penting. Perkembangan seperti ini dapat dilihat dari pengalaman negara2 lain. Ada hubungan timbal-balik antara kemampuan pemasukan pajak langsung dengan tingkat pembangunan serta kemadjuan sesuatu negara. Oleh sebab itu usaha2 untuk meningkatkan kesadaran-pajak masyarakat tidak boleh ditunda-tunda.

Berdasarkan pengalaman2 jang diperoleh ditahun-tahun jang lampau serta dengan bermodalkan undang-undang dan ketentuan2 lainnja jang berlaku untuk pajak langsung, didalam tahun anggaran 1971/1972 Pemerintah bermaksud mendjalankan usaha2 sebagai berikut :

- (1) Sebagai kelanjutan dari usaha2 jang telah dilakukan ditahun-tahun jang lalu, didalam tahun anggaran 1971/1972 penggiatan pemasukan pajak2 langsung akan lebih ditingkatkan lagi. Untuk menghemat biaya dan tenaga usaha2 penggiatan ini akan dilaksanakan dengan lebih terarah.
- (2) Dapat dipahami bahwa penggiatan jang efektif dan efisien meng-

haruskan ...

haruskan agar aparat perpajakan sendiri haruslah terlebih dahulu ditingkatkan kemampuannya. Sebab itu usaha2 untuk memperbaiki kemampuan teknis, administratif dan management dari aparat perpajakan akan lebih digiatkan lagi. Dalam batas2 kemampuan yang ada, modernisasi aparat akan terus ditingkatkan.

(3) Demikian pula terhadap personalia perpajakan sendiri akan diambil tindakan2 untuk lebih mempertinggi daya-djuang dan daya-tahan mereka didalam melaksanakan tugas2nya. Setiap prestasi yang lebih baik tentulah akan lebih dihargai, sebaliknya setiap kemerosotan prestasi haruslah ditjari sebabnya dan diperbaiki menurut ketentuan2 yang berlaku.

(4) Tidak kalah pentingnya adalah usaha2 untuk membangkitkan perhatian dan kesadaran masyarakat, terutama para wadji pajak, agar memenuhi kewajiban2nya membayar pajak. Akan diusahakan untuk meningkatkan pembinaan kearah ini dengan setjara berangsur-angsur menanamkan pengertian kepada masyarakat bahwa persoalan pajak bukanlah hanya merupakan persoalan Pemerintah atau aparat perpajakan saja, tetapi haruslah dipandang sebagai merupakan persoalan masyarakat seluruhnya. Pembangunan yang berdjalan lantjar dan tjepat memerlukan tersedianya dana yang tjukup pula, termasuk yang berasal dari pajak langsung.

Usaha2 seperti disebutkan diatas itu telah disadari tidak akan segera menghasilkan buahnya. Diperlukan waktu agar hasil2 yang diharapkan dapat diwujudkan. Walaupun demikian, berdasarkan hal2 tersebut

didas ...

diatas serta menjadari bahwa memasukkan penerimaan didalam tahun anggaran 1971/1972 adalah djauh lebih berat dibandingkan dengan tahun2 sebelumnya, diperkirakan bahwa didalam tahun anggaran 1971/1972 akan dapat dimasukkan penerimaan pajak langsung, diluar pajak perseroan minjak, sebesar Rp. 56,8 milyar.

Perintjian lebih landjut dari perkiraan penerimaan pajak langsung tersebut dapat dilihat dalam Lampiran 1 dari Nota Keuangan ini.

3.2.2. Penggiatan penerimaan pajak tidak langsung

Hingga dewasa ini pajak tidak langsung merupakan penerimaan negara jang terbesar. Hal tersebut dapat dimengerti mengingat setjara relatif persjaraan2 untuk dapat memungut pajak tidak langsung adalah tidak seberat halnja dengan pajak langsung. Namun demikian hal tersebut bukanlah berarti bahwa tidak didjumpai kesukaran2 didalam pemungutannja.

Sebagian besar dari penerimaan pajak tidak langsung ini masih sangat tergantung kepada bahan2 ataupun barang2 jang diimpor. Meskipun demikian peningkatan daripada sumber penerimaan ini harus pula mempertimbangkan kepentingan industri dalam negeri. Selain daripada itu harus dipertimbangkan pula suatu tingkat tarif dan penggolongan barang2 jang ditunjukkan kepada kepentingan konsumen pada umumnja, chususnja dalam rangka mendjaga kepentingan stabilisasi.

Pertimbangan2 jang sama juga berlaku bagi djenis2 pajak tidak langsung lainnja, seperti: pajak penjualan impor,

Tabel III.3. ...

T a b e l III.3.

PERKEMBANGAN PENERIMAAN PADJAK TIDAK LANGSUNG, 1966-1971/1972

(dalam milyar rupiah)

<u>Tahun</u>	<u>Djumlah</u>	<u>Kenaikan (%)</u>
1966	10,5	-
1967	40,5	+ 285,7
1968	86,3	+ 113,1
1969/1970	131,6	+ 52,5
1970/1971	167,2	+ 27,1
1971/1972	228,6	+ 36,7

Angka A.P.B.N.

padjak pendjualan dalam negeri, tjukai dan padjak devisa ekspor. Dengan perkataan lain, harus selalu didjaga keseimbangan jang wadjar antara kepentingan penerimaan, kepentingan produksi dan industri dalam negeri, kepentingan konsumen pada umumnya dan kepentingan stabilisasi.

Dari Tabel III.3. terlihat bahwa sedjak meredanja angin inflasi dalam tahun 1969/1970 penerimaan padjak tidak langsung mengalami pula tingkat kenaikan jang berkurang. Namun demikian, Pemerintah memperkirakan bahwa sebenarnya dasar-padjak atau "tax base" dari padjak tidak langsung tersebut masih tjukup besar. Sedjak tahun 1969/1970 tersebut telah dimulai usaha memperluas dasar-padjak melalui berbagai kebijaksanaan dan tindakan dibidang bea masuk, tjukai, padjak pendjualan impor dan padjak pendjualan dalam negeri sehingga penerimaan dapat ditingkatkan.

Didalam ...

Didalam tahun anggaran 1971/1972, kebijaksanaan untuk memperluas "tax base" dari pajak tidak langsung akan terus dilandjutkan bahkan akan semakin ditingkatkan. Dengan semakin mantapnya kestabilan ekonomi, maka selain usaha2 untuk memperbaiki effektivitas dan efisiensi aparat pemungutan, usaha2 untuk meningkatkan penerimaan pajak tidak langsung akan diarahkan terutama kepada pemugaran "tax base" dari pajak2 tersebut. Usaha2 tersebut didalam tahun anggaran 1971/1972 antara lain akan mengambil bentuk sebagai berikut :

(1) Didalam bidang bea masuk, kebijaksanaan penyesuaian dan penjederhanaan tarif yang telah mulai dijalankan sedjak tahun anggaran 1969/1970 akan terus dilandjutkan. Dengan semakin mantapnya kestabilan ekonomi dalam negeri, dimana diperkirakan alat2 kebijaksanaan lainnja akan lebih berperan untuk menjaga kestabilan tersebut, maka kebijaksanaan di bidang bea masuk akan lebih terutama diarahkan kepada usaha2 untuk lebih mendorong lajunja pembangunan. Perekonomian yang lebih maju dan berkembang diharapkan akan lebih memperluas pula "tax base" dari djenis2 pajak lainnja selain memperluas volume impor itu sendiri.

(2) Mengenai tjukai, berbagai usaha untuk lebih memperluas dasar-pengenaan serta penertiban tjukai akan terus dijalankan. Prinsip bahwa kewajaran dalam penetapan harga yang dikenakan tjukai akan lebih berhasil untuk memperluas dasar-pengenaan tjukai akan dipengang terus. Didalam suasana ekonomi yang semakin stabil prinsip demikian itu diperkirakan akan lebih effektiv.

(3) Prinsip ...

(3) Prinsip kewajaran tersebut juga akan dipergunakan didalam hal pajak penjualan dan pajak penjualan impor. Sementara itu Pemerintah akan berusaha terus untuk mendapatkan lokasi yang sebaik-baiknya dari titik-pungut atau "point of collection" dari pajak penjualan yang dikenakan atas berbagai jenis barang dan jasa itu. Pengalaman menunjukkan bahwa bila dapat diketemukan titik-pungut yang tepat, penerimaan dapat ditingkatkan setjara cukup meyakinkan.

(4) Akhirnya, sebagaimana juga halnya dengan pajak langsung, maka usaha untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi aparat pemungutan pajak tidak langsung juga akan terus dilandjutkan. Begitu juga dengan usaha untuk lebih membangkitkan kesadaran masyarakat pada umumnya dan para wadajib pajak pada khususnya, untuk memenuhi kewadjabannya dibidang pajak tidak langsung.

Dengan memperhatikan hal2 tersebut diperkirakan bahwa dalam tahun anggaran 1971/1972 penerimaan yang berasal dari pajak tidak langsung, diluar penerimaan minjak, akan dapat mentjapai jumlah sebesar Rp. 229,8 milyar. Jumlah ini berada sekitar + 36,7 % diatas jumlah penerimaan pajak tidak langsung dalam A.P.R.N. 1970/1971.

Perintjian lebih lanjut dari perkiraan pajak tidak langsung tersebut dapat dilihat dalam Lampiran 1 dari Nota Keuangan ini.

3.2.3. Peningkatan penerimaan minjak

Penerimaan negara yang berasal dari minjak terdiri dari pajak perseroan minjak dan penerimaan minjak lainnya.

Tabel III.4. ...

T a b e l I I I . 4 .

PERKEMBANGAN PENERIMAAN MINJAK, 1966-1971/1972

(dalam milyar rupiah)

<u>Tahun</u>	<u>Djumlah</u>	<u>Kenaikan (%)</u>
1966	0,7	-
1967	9,0	+ 1.185,7
1968	33,2	+ 268,9
1969/1970	65,8	+ 98,2
1970/1971	95,2 */	+ 44,5
1971/1972	126,3 */	+ 32,8

*/ Angka A.P.B.N.

Penerimaan yang berasal dari minyak ini sangat tergantung kepada volume produksinya.

Untuk tahun anggaran 1971/1972 penerimaan dari sektor minyak ini diperkirakan akan berdjumlah Rp. 126,3 milyar, yaitu +32,8 % diatas perkiraannya untuk A.P.B.N. 1970/1971.

Melihat perkembangan penerimaan dari sektor minyak ini, maka diperkirakan akan merupakan sumber yang terpenting didalam jangka pandjang.

Perintjian selanjutnya dari perkiraan tersebut dapat dilihat didalam Lampiran 1 dari Nota Keuangan ini.

3.2.h. Penertiban penerimaan non-tax

Penerimaan non-tax terdiri dari penerimaan yang diperoleh

departemen2 ...

departemen² karena memberikan belajanan kepada masyarakat dan juga yang diperoleh Pemerintah karena turut mengambill bagian didalam aktivitas dunia usaha. Djenis yang pertama misalnja adalah berbagai retribusi, denda², biaya nikah, talak dan rujuk, hasil lelang dsb. Sedangkan djenis yang kedua terdiri dari bagian Pemerintah dari laba perusahaan² negara termasuk bank² Pemerintah sesudah dipotong pajak perseroan. Untuk Perdjan Pegadaian dan Perdjan Pelabuan-Pelabuhan dalam tahun anggaran 1971/1972 diperkirakan dapat menutup sendiri pengeluarannya sehingga tidak mempengaruhi anggaran belandja negara.

Mengingat sifat penerimaan ini adalah tidak pasti, maka sukar untuk diperkirakan hasilnya dengan tepat.

T a b e l III.5.

PEMBERANGAN PENERIMAAN NON-TAX, 1966-1971/1972
(dalam milyar rupiah)

<u>Tahun</u>	<u>Djumlah</u>	<u>Kenaikan (%)</u>
1966	0,6	-
1967	1,3	+ 62,5
1968	4,7	+261,5
1969/1970	3,2	- 31,9
1970/1971	2,6 ^{*/}	- 18,7
1971/1972	4,2 ^{*/}	+ 61,5

^{*/} Angka A.P.B.N.

Untuk masa selanjutnya, maka penertiban dari penerimaan non-tax ini akan semakin ditingkatkan. Penerimaan non-tax untuk tahun anggaran 1971/1972 diperkirakan akan mencapai djumlah Rp. 4,2 milyar.

3.3. Peningkatan penerimaan pembangunan

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, disampingnya tabungan pemerintah maka penerimaan pembangunan merupakan pula dana pembangunan yang cukup penting. Sebab itu menjadi keharusan bagi Pemerintah agar realisasi dari bantuan² luar negeri yang telah disetujui dapat diperbesar dan dilaksanakan tepat pada waktunya.

Penerimaan bantuan² luar negeri ini sangat tergantung kepada besarnya subsidi yang diberikan kepada pupuk dan bantuan² pangan lainnya.

Untuk tahun anggaran 1971/1972 diharapkan dapat diterima US \$ 640 juta, terdiri dari US \$ 370 juta bantuan program dan US \$ 270 juta bantuan proyek.

3.3.1. Bantuan program

Bantuan program meliputi bantuan² yang berupa devisa kredit, barang² modal, pupuk, beras, tepung terigu, kapas kasar dan barang tenun. Dalam hal devisa kredit, penerimaan pembangunan itu merupakan nilai-lawan dalam rupiah dari devisa kredit tersebut; demikian pula halnya dengan bantuan yang berupa barang² modal. Sedangkan dalam hal bantuan² lainnya, penerimaan pembangunan itu merupakan selisih dari hasil dijualnya dengan subsidi yang diberikan Pemerintah.

Dalam tahun anggaran 1971/1972 diperkirakan seluruh bantuan program yang akan diterima berjumlah US \$ 370,0 juta. Jumlah tersebut terdiri dari US \$ 160,0 juta bantuan yang berupa devisa kredit, barang² modal dan pupuk; US \$ 50,0 juta yang berupa kapas

kasar ...

kasir dan benang tenun; serta US.\$ 160,0 djuta jang berupa bahan makanan. Penerimaan pembangunan jang dihasilkan oleh seluruh bantuan tersebut diperkirakan berjumlah Rp. 103,1 milyar, jang berarti meningkat +31,0 % diatas djumlah jang diperkirakan didalam A.P.B.N. 1970/1971.

Perintjian selanjutnja dari perkiraan penerimaan pembangunan 1971/1972 dapat dilihat dalam Lampiran 1 dari Nota Keuangan ini.

T a b e l III.6.

PERKEMBANGAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN, 1966-1971/1972 1/

(dalam milyar rupiah)

<u>Tahun</u>	<u>Djumlah</u>	<u>Kenaikan (%)</u>
1966	-	-
1967	24,7	-
1968	35,5	+ 43,7
1969/1970	65,8	+ 85,4
1970/1971	78,7 2/	+ 19,6
1971/1972	103,1 2/	+ 31,0

1/ Diluar bantuan proyek.

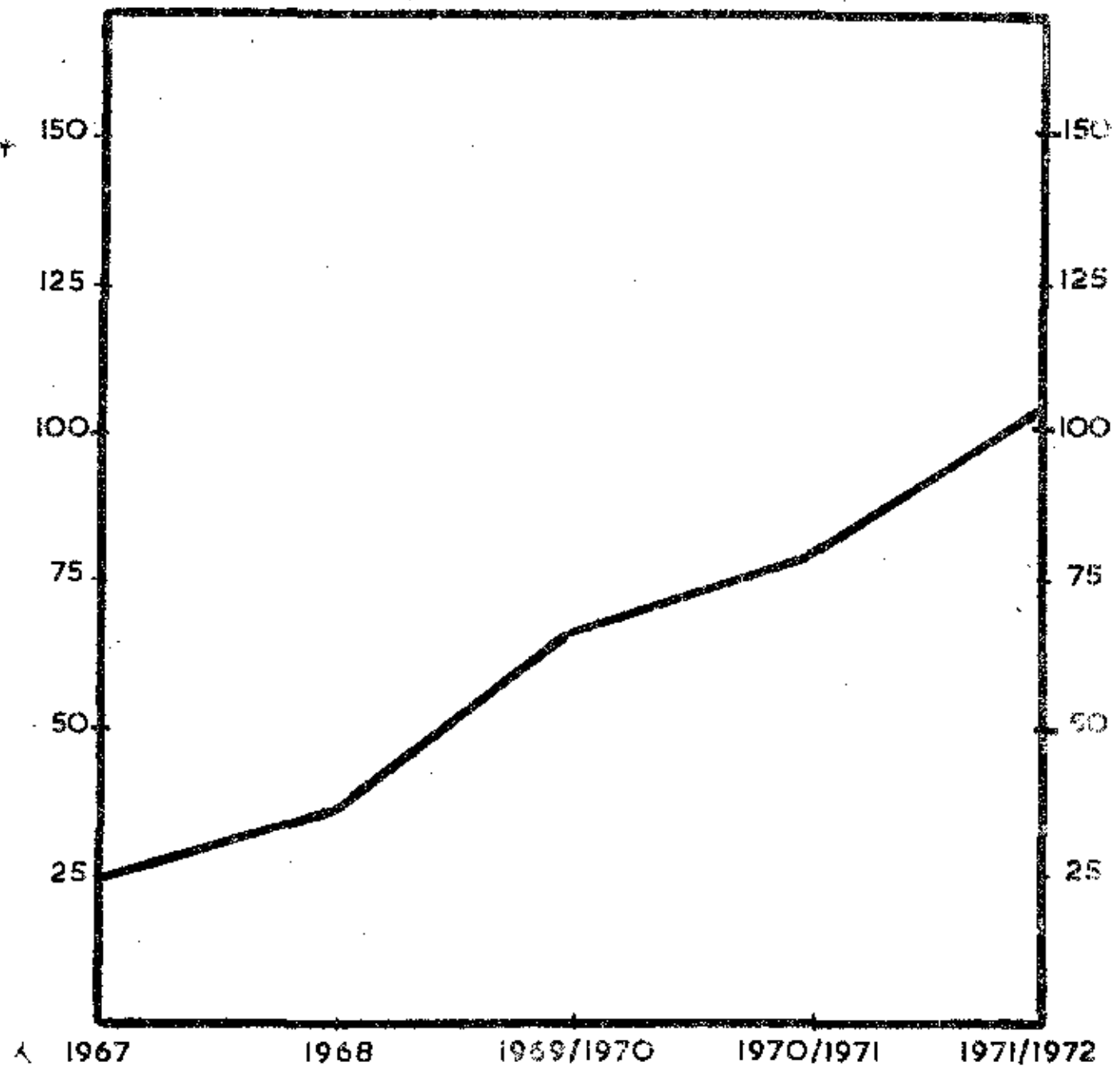
2/ Angka A.P.B.N.

3.3.2. Bantuan proyek

Seperti diketahui, bantuan proyek adalah bantuan jang langsung diterima dalam bentuk proyek. Dengan demikian didalam A.P.B.N. sebenarnya tidaklah ada penerimaan dalam bentuk nilai-lawan; pentjatatannya

nja didalam ...

PENERIMAAN PEMBANGUNAN 1967-1971/1972 * (DALAM MILJAR RUPIAH)



*) DILUAR BANTUAN PROJEK

nja didalam A.P.B.N. dimaksudkan untuk dapat mengetahui berapa nilai bantuan proyek tersebut bila dinilai dalam rupiah.

Mengenai bantuan proyek ini, sedjak tahun anggaran 1969/1970 jang lalu telah memundjukkan gedjala jang semakin meningkat atas dasar angka2 realisasi. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel III.7. Sedjak tahun anggaran 1969/1970 hingga tahun anggaran 1971/1972 penerimaan bantuan proyek rata2 naik sebesar Rp. 20,0 milyar setahunnja.

T a b e l III.7.

PERKEMBANGAN PENERIMAAN BANTUAN PROJEK, 1969/1970-1971/1972

(dalam milyar rupiah)

<u>Tahun</u>	<u>Djumlah</u>	<u>Kenaikan (%)</u>
1969/1970	25,3	-
1970/1971	45,6 ^{2/}	+ 80,2
1971/1972	66,1 ^{2/}	+ 45,0

1/ Sebelum 1969/1970 belum ada realisasi daripada bantuan proyek.

2/ Angka A.P.B.N.

3.h. Pengeluaran routine

Seperti telah didjelaskan sebelumnya, dengan semakin meningkat dan meluasnja aktivitas Pemerintah didalam masa pembangunan ini, dengan sendirinja pengeluaran routine-pun ikut meningkat pula dengan tjukup berarti. Pada dasarnya baik aktivitas pembangunan maupun aktivitas routine tidaklah dapat dipisahkan perkembangannya. Sebab aparat Pemerintahan jang melaksanakan aktivitas pembangunan itu

adalah ...

adalah aparat yang sama juga yang setjara budgeter diblajai melalui pengeluaran routine.

Dengan demikian menjadi semakin jelaslah mengapa usaha2 Pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri akan semakin berat. Sebab peningkatan penerimaan tersebut tidak saja dibutuhkan untuk membiayai aktivitas2 pembangunan yang semakin besar, tetapi juga diperlukan untuk menutupi pengeluaran2 routine yang juga menjadi semakin besar.

Peningkatan pengeluaran routine itu juga dapat terjadi karena adanya berbagai kebijaksanaan dan kewajiban yang dilaksanakan didalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti misalnya kewajiban untuk membiayai pemilihan umum, kewajiban untuk menyediakan subsidi daerah otonom, kebijaksanaan untuk memperbaiki tingkat kesedjahteraan pegawai dan pengelolaan keuangan negara, kewajiban untuk melunasi angsuran hutang dan bunga, dsb.

Didalam tahun anggaran 1971/1972 hal2 seperti disebutkan diatas juga direntjanakan akan dilaksanakan. Bertabung dengan itu diperkirakan bahwa seluruh ketatahan pengeluaran routine akan berjumlah Rp. 364,1 milyar. Jumlah ini berarti berada + 28,4 % diatas perkiraan untuk A.P.B.N. 1970/1971. Untuk mengikuti perkembangan pengeluaran routine sedjak tahun anggaran 1966 dapat dilihat Tabel III.8. serta Grafik III.3.

Tabel III.8. ...

T a b e l III.8.

PERSERANCAAN PENGELUARAN ROUTINE, 1966-1971/1972

(dalam miliar rupiah)

<u>Tahun</u>	<u>Djumlah</u>	<u>Kenaikan (%)</u>
1966	22,5	-
1967	70,0	+ 211,1
1968	109,7	+ 113,9
1969/1970	226,5	+ 100,6
1970/1971	283,5 */	+ 30,9
1971/1972	364,1 */	+ 28,4

*/ Angka A.P.B.N.

3.4.1. Perbaikan atas tingkat kesedjahteraan pegawai serta pemeliharaan atas
aparat Pemerintahan

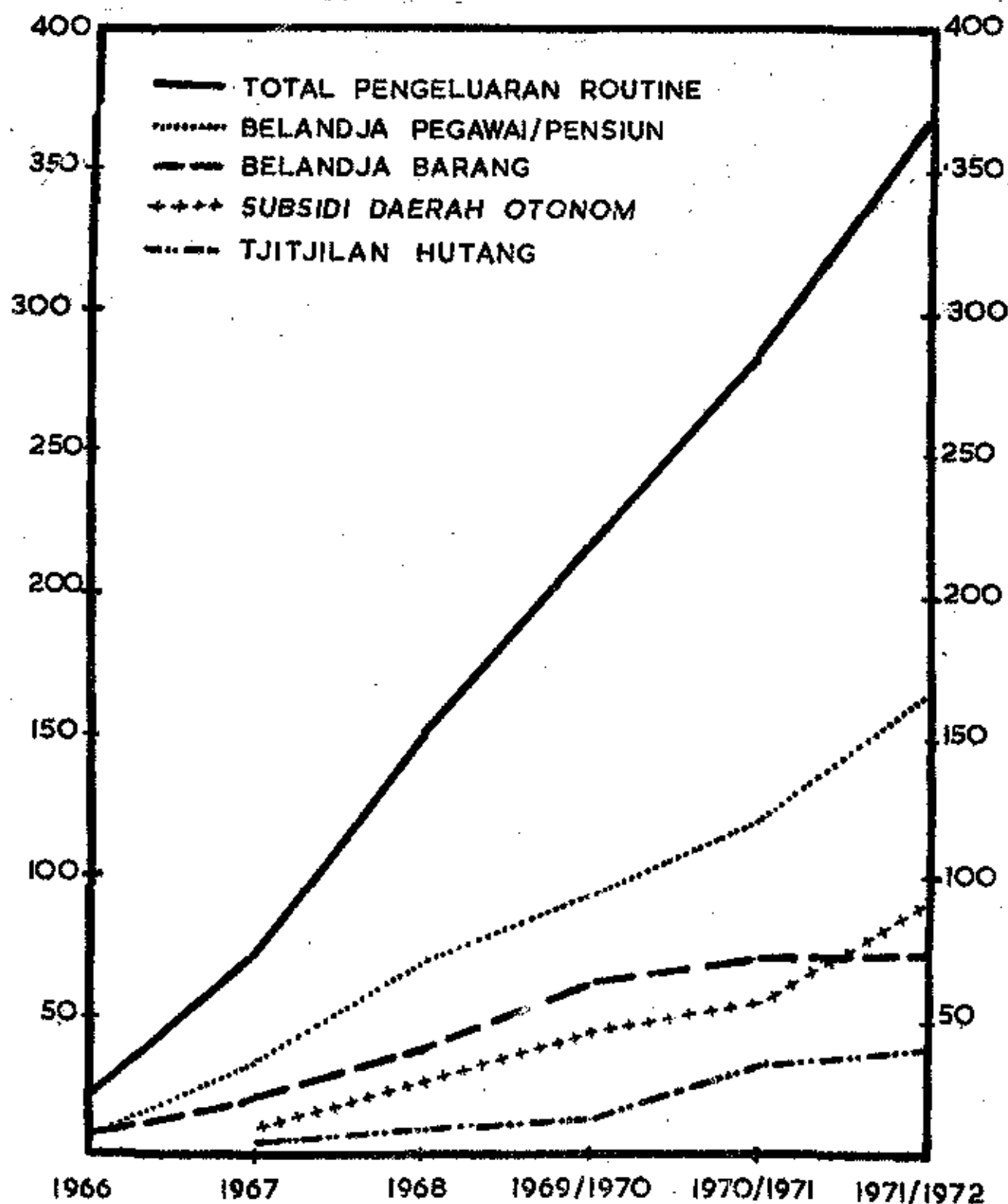
Dengan asumsi bahwa tingkat harga beras dalam tahun anggaran 1971/1972 tidak akan mengalami perubahan, yang berarti dibandingkan dengan tingkatnya dalam tahun anggaran 1970/1971, maka diperkirakan bahwa pengeluaran bagi tunjangan beras untuk tahun anggaran 1971/1972 juga tidak mengalami perubahan yang berarti bila dibandingkan dengan pengeluarannya untuk tahun anggaran 1970/1971.

Sebaliknya untuk pengeluaran gaji/upah/pensiun diperkirakan kebutuhan pembiayaan yang meningkat, yang disebabkan oleh rencana Pemerintah untuk menaikkan gaji pegawai negeri dan ABRI sebesar 33 1/3 % diatas gaji dalam tahun anggaran 1970/1971 atau sebesar 100,0 % dibandingkan dengan gaji dalam tahun anggaran 1969/1970.

Mengenai ...

PENGELUARAN ROUTINE 1966-1971/1972

(DALAM MILJAR RUPIAH)

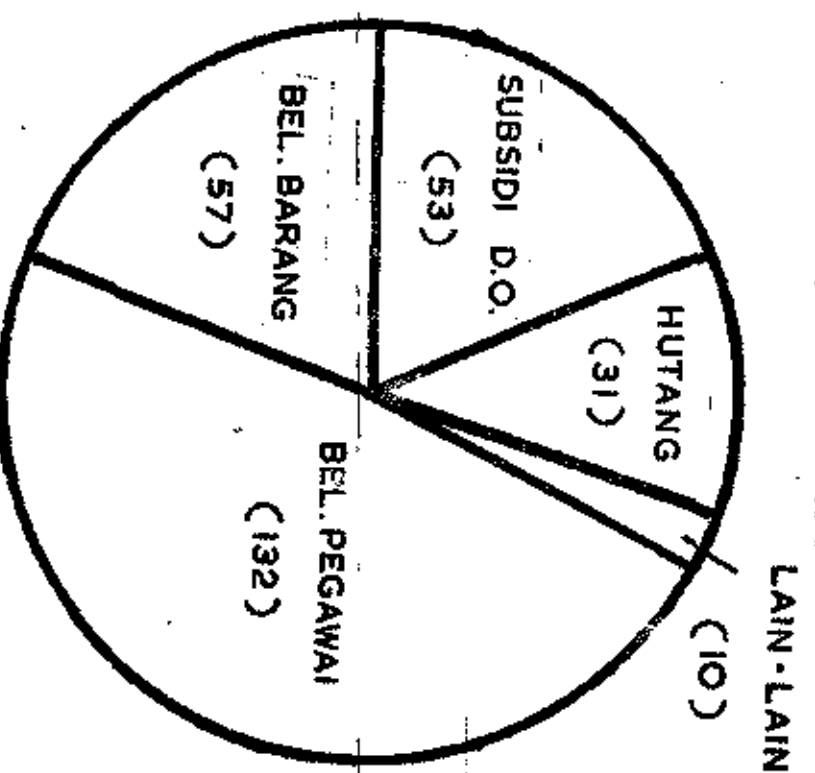


GAMBAR III.2.

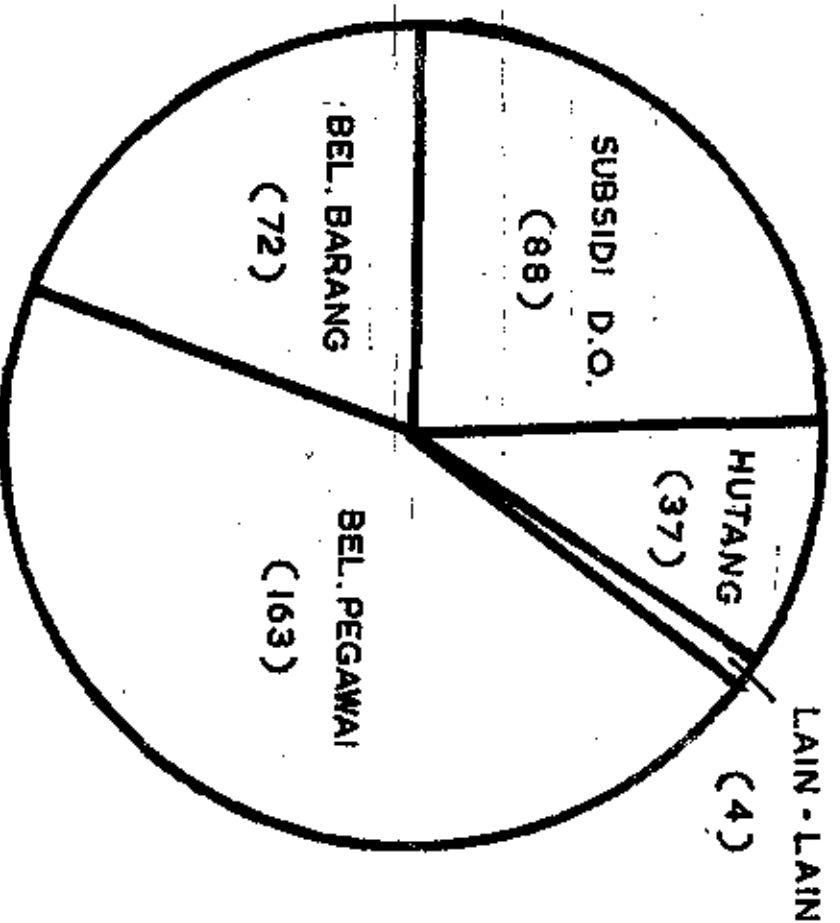
117

PENGELUARAN ROUTINE 1970/1971-1971/1972

(DALAM MILJAR RUPIAH)



1970/1971
(283)



1971/1972
(364)

Mengenai pengeluaran untuk belandja lauk pauk, lain2 belandja pegawai dalam negeri serta belandja pegawai luar negeri boleh dikatakan tidak banyak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan keadaannya didalam tahun anggaran 1970/1971.

Dengan demikian perintjian pengeluaran untuk belandja pegawai dan pensiun adalah sebagai berikut :

T a b e l III.9.

PERINTJIAN BELANJA PEGAWAI/PENSIUN, 1970/1972

(dalam milyar rupiah)

<u>Perintjian</u>	<u>Djumlah</u>
1. Tundjangan beras	33,0
2. Gadja/upah/pensiun	101,6
3. Lain2 belandja pegawai dalam negeri	14,2
4. Belandja pegawai negeri	5,0

D j u m l a h :	153,8

Disamping belandja pegawai/pensiun terdapat pula belandja lauk pauk yang untuk tahun anggaran 1971/1972 diperkirakan berdjumlah Rp.12,1 milyar.

Mengenai belandja barang dirasakan bahwa didalam tahun anggaran 1970/1971 anggaran yang disediakan masih belum gantjukupi terutama untuk mengganti peralatan yang sudah tua. Pemeliharaan peralatan yang sedang dipergunakan serta memenuhi keperluan akan peralatan2 baru dalam rangka pelaksanaan tugas.

Dalam rangka melaksanakan tugas2 pengawasan serta dalam rangka pembiajaan pemindahan pejabat2 yang memang harus dilakukan setiap

tahun ...

tahun, maka perlu disediakan pembiayaan untuk hal2 tersebut.

Berhubung dengan itu dalam tahun anggaran 1971/1972 diperkirakan pengeluaran untuk balandja barang perlu ditingkatkan menjadi sebesar Rp. 67,2 milyar.

3.4.2. Subsidi daerah otonom dan pembayaran kembali hutang beserta bunga

Pengeluaran untuk subsidi daerah otonom mengalami kenaikan berhubung gaji pegawai daerah otonom juga direntjanakan untuk dinaikan sebesar 33 1/3 % diatas gaji tahun anggaran 1970/1971.

Mengenai pengganti ADO yang diberikan kepada daerah2 diperkirakan jumlahnya sama dengan pengganti ADO yang ditetapkan didalam tahun anggaran 1970/1971. Tentang subsidi untuk Irian Barat, diperkirakan akan mengalami kenaikan dibandingkan A.P.B.N. 1970/1971.

Dengan demikian untuk seluruh pengeluaran subsidi daerah otonom dalam tahun anggaran 1971/1972 diperkirakan akan meningkat menjadi Rp. 87,6 milyar, didalam jumlah mana sudah termasuk pengganti ADO.

Pengeluaran untuk melunasi hutang luar negeri beserta bunga sangat tergantung kepada jumlahnya yang sudah jatuh-tempo didalam tahun anggaran 1971/1972 serta persetujuan2 lainnya yang mengatur perumusan pembayarannya. Mengingat kemampuan keuangan negara serta kebutuhan yang semakin besar akan dana pembangunan, maka Pemerintah berusaha untuk menunda pembayarannya kembali guna meringankan tekanan pada neratja pembayaran dewasa ini. Mengenai hal ini telah ditjapai sesuatu kemajuan yang besar dengan adanya persetujuan dengan negara2 kreditor untuk menunda pembayaran hutang2 sebelum 1966 selama jangka

waktu ...

waktu 30 tahun.

Dalam tahun anggaran 1971/1972 pembajaran kembali hutang luar negeri beserta bunganja diperkirakan berdjumlah Rp. 28,8 milyar.

T a b e l III.10.

PEMBAJARAN KEMBALI HUTANG2 LUAR NEGERI, 1971/1972

<u>Matjam hutang</u>	<u>Djuta US \$</u>	<u>Miljar Rp</u>
1. Hutang lama (sebelum 1966)	37,0	14,0
2. Hutang baru (sesudah 1966)	35,2	13,3
3. Lain-lain	4,2	1,5
D j u m l a h :	76,4 =====	28,8 =====

Hutang2 dalam negeri adalah dalam bentuk hutang2 Pemerintah baik kepada perusahaan2 negara maupun kepada pihak ketiga.

Dalam tahun anggaran 1971/1972 pembajaran kembali hutang2 dalam negeri diperkirakan berdjumlah Rp. 8,4 milyar. Dengan demikian djumlah seluruhnja pembajaran kembali hutang2 beserta bunganja diperkirakan mentjapai djumlah Rp. 37,2 milyar.

3.4.3. Pengeluaran untuk pemilihan umum dan lain2 pengeluaran routine

Untuk keperluan pembiajaan pemilihan umum, dalam tahun anggaran 1971/1972 diperkirakan masih diperlukan djumlah sebesar Rp. 4,7 milyar.

Sedangkan ...

Sedangkan untuk menampung pengeluaran2 routine dari tahun anggaran yang lalu diperkirakan masih harus disediakan Rp. 1,5 miliar.

Demikianlah keseluruhan pengeluaran routine yang diperkirakan untuk tahun anggaran 1971/1972. Perintjian selanjutnya dari perkiraan2 tersebut dapat dibuat dalam Lampiran 2 dari Nota Keuangan ini.

3.5. Peningkatan tabungan pemerintah

Dengan perkiraan penerimaan dalam negeri sebesar Rp. 415,9 miliar dan perkiraan pengeluaran routine sebesar Rp. 364,1 miliar, tabungan Pemerintah dalam tahun anggaran 1971/1972 diperkirakan akan mencapai jumlah Rp. 51,8 miliar.

Perkembangan hasil tabungan Pemerintah sejak tahun anggaran 1969/1970 dapat dilihat dalam Tabel III.11. Perkembangan tersebut menunjukkan usaha yang sungguh2 untuk dapat meningkatkan tabungan pemerintah setcepat mungkin. Hal ini perlu dilakukan mengingat betapa pentingnya peranan tabungan pemerintah untuk membiayai pembangunan yang semakin meningkat itu.

T a b e l III.11.

PERKEMBANGAN TABUNGAN PEMERINTAH, 1969/1970-1971/1972

(dalam miliar rupiah)

<u>Tahun</u>	<u>Jumlah</u>	<u>Perubahan (%)</u>
1969/1970	27,2	-
1970/1971	37,1 */	+ 36,4
1971/1972	51,8 */	+ 39,6

*/ Angka A.P.B.N.

Bila ...

Bila tabungan Pemerintah diperkirakan dapat mentjapai djumlah Rp. 51,8 milyar sedangkan penerimaan pembangunan, diluar bantuan projek, diperkirakan dapat menghasilkan Rp. 103,1 milyar, maka pengeluaran pembangunan, diluar bantuan projek, akan mentjapai djumlah sebesar Rp. 154,9 milyar.

3.6. Pengeluaran pembangunan

Rentjana pengeluaran pembangunan sebesar Rp. 154,9 milyar di dalam tahun anggaran 1971/1972 berarti peningkatan sebesar +33,8 % diatas djumlah yang direntjanakan untuk A.P.B.N. 1970/1971. Seperti telah didjelaskan sebelumnya, peningkatan tersebut memang diperlukan demi berhasilnya tujuan2 pembangunan itu sendiri.

T a b e l III.12.

PERKEMBANGAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN, 1969/1970-1971/1972 ^{1/}

(dalam milyar rupiah)

<u>Tahun</u>	<u>Djumlah</u>	<u>Kenaikan (%)</u>
1969/1970	92,8	-
1970/1971	115,8 ^{2/}	+ 24,8
1971/1972	154,9 ^{2/}	+ 33,8

1/ Diluar bantuan projek.

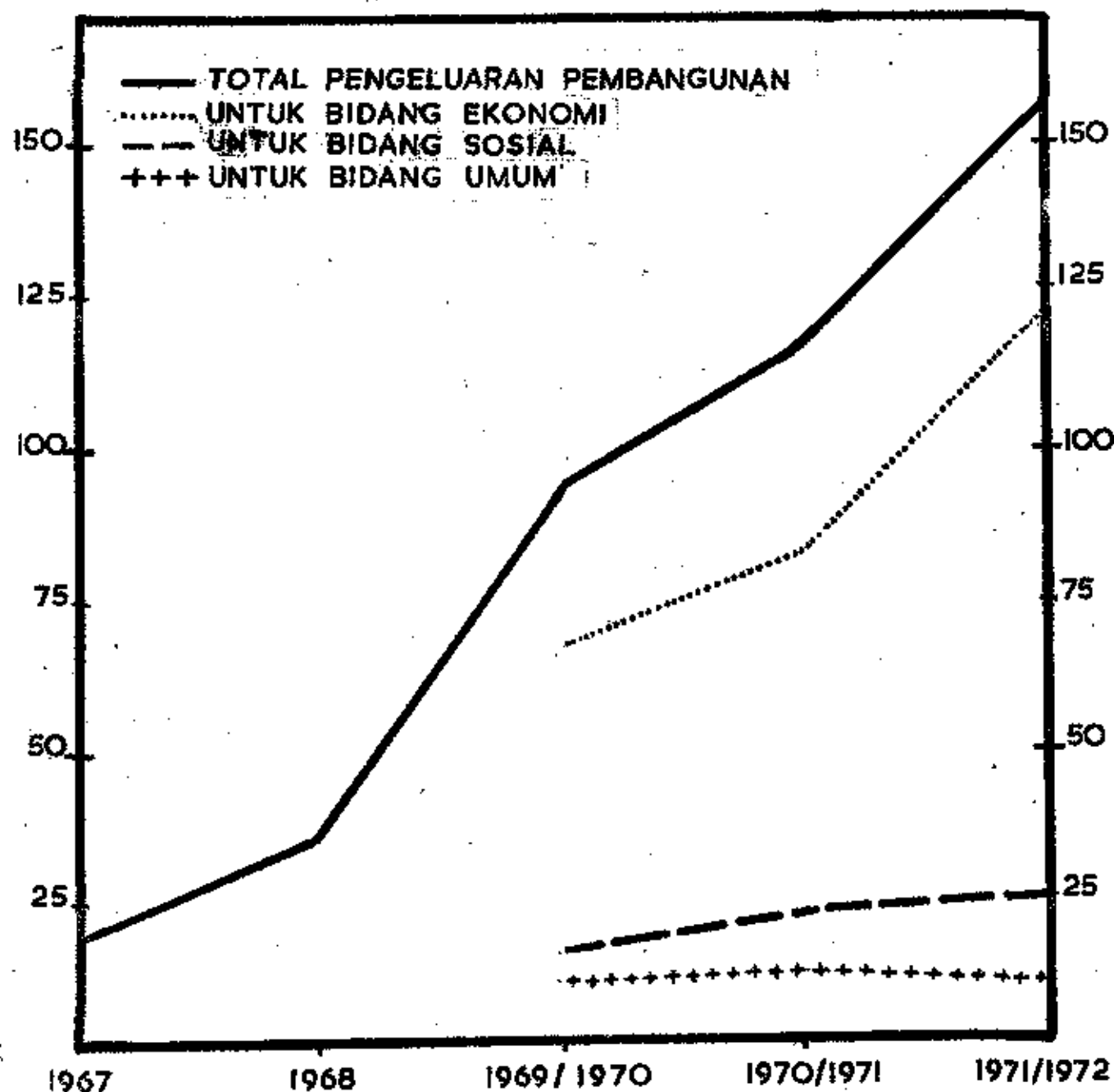
2/ Angka A.P.B.N.

Peningkatan pengeluaran pembangunan dalam tahun anggaran 1971/1972 tersebut akan diberikan pengarahannya secara selektif

kepada: ...

GRAFIK III.4.

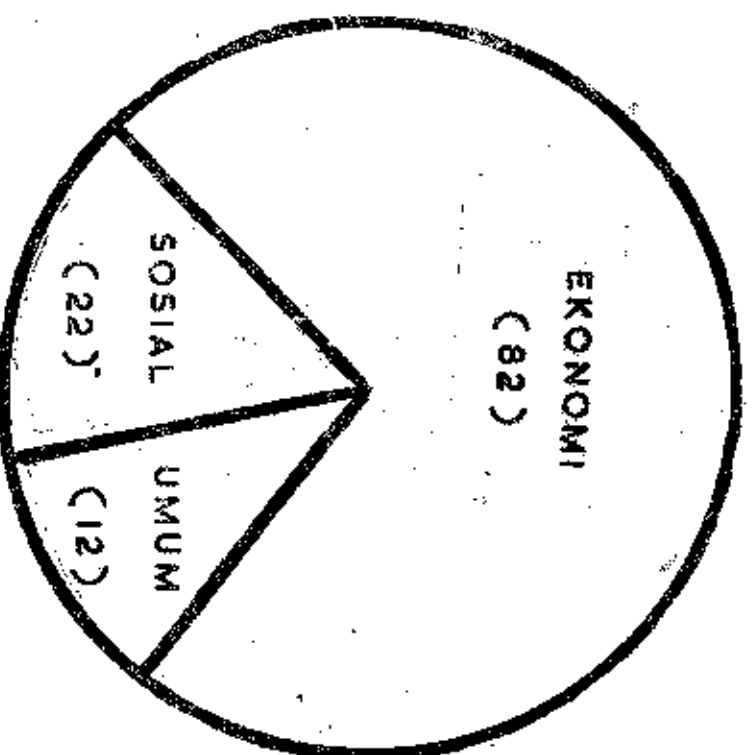
PENGELUARAN PEMBANGUNAN 1967-1971/1972 *)
(DALAM MILJAR RUPIAH)



*) DILUAR BANTUAN PROJEK

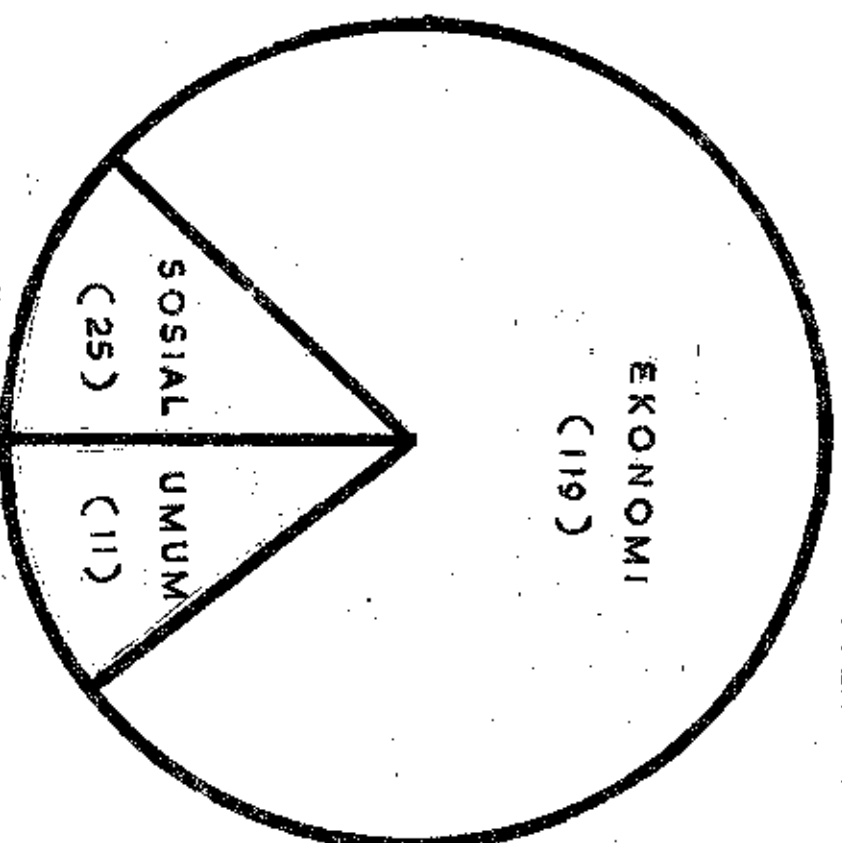
GAMBAR III.3.

PENGELUARAN PEMBANGUNAN 1970/1971 - 1971/1972
(DALAM MILJAR RUPIAH)



1970/1971

C116)



1971/1972

C155)

kepada :

- (1) Peningkatan produksi bahan pangan (antara lain BIMAS dan irigasi).
- (2) Peningkatan rehabilitasi dan pembangunan prasarana (antara lain djalan, perhubungan laut, telekomunikasi, listrik dan kereta api).
- (3) Peningkatan lapangan kerdja (antara lain bantuan kabupaten, bantuan desa dan padat karya), jang sekaligus menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- (4) Peningkatan pembangunan sosial (antara lain pendidikan tinggi, pendidikan teknik, pemberantasan penyakit menular, usaha2 preventif dibidang kesehatan dan keluarga berentjana).

Didalam menjusun rentjana pembiajaan jang effisien, harus pula ditentukan prioritas pembiajaan. Hal ini perlu untuk mendjaga keserasian perkembangan diantara projek2 pembangunan tersebut. Urutan prioritas itu adalah sebagai berikut :

- (a) Kebutuhan pembiajaan untuk projek2 landjutan dari tahun anggaran 1970/1971.
- (b) Kebutuhan pembiajaan untuk projek2 jang mendapatkan bantuan projek.
- (c) Kebutuhan pembiajaan untuk projek2 baru jang pelaksanaannya baru dimulai dalam tahun anggaran 1971/1972 dan biaya pemeliharaan.

Bila ...

Bila jumlah pengeluaran itu dibagi berdasarkan bidang pembangunan, maka pembagiannya adalah sebagai berikut :

- (1) Bidang ekonomi : Rp. 119,5 miliar (77,1 %)
- (2) Bidang sosial : Rp. 24,6 miliar (15,9 %)
- (3) Bidang umum : Rp. 10,8 miliar (7,0 %)

D j u m l a h : Rp. 154,9 miliar

Seperti diketahui tiap bidang dibagi lagi dalam sektor2, tiap sektor dalam berbagai sub-sektor, tiap sub-sektor dalam program2 dan setiap program dalam projek2.

3.6.1. Bidang ekonomi

Bidang ekonomi dibagi dalam enam sektor :

- | | |
|--|-----------------|
| (1) Sektor pertanian dan irigasi | Rp. 45,6 miliar |
| (2) Sektor industri dan pertambangan | Rp. 2,7 miliar |
| (3) Sektor tenaga listrik | Rp. 10,2 miliar |
| (4) Sektor perhubungan dan pariwisata | Rp. 31,5 miliar |
| (5) Sektor pembangunan daerah dan desa | Rp. 18,0 miliar |
| (6) Sektor penjaminan Pemerintah
(dana anggaran untuk kredit investasi) | Rp. 11,5 miliar |

D j u m l a h : Rp. 119,5 miliar

3.6.2. Bidang sosial ...

3.6.2. Bidang sosial

Bidang sosial dibagi dalam tujuh sektor :

(1) Sektor agama	Rp. 0,7 miliar
(2) Sektor pendidikan dan kebudayaan	Rp. 11,8 miliar
(3) Sektor tenaga kerja dan penduduk	Rp. 1,0 miliar
(4) Sektor kesehatan dan keluarga berencana	Rp. 5,8 miliar
(5) Sektor perumahan, kesedjahteraan sosial dan penyediaan air minum	Rp. 3,2 miliar
(6) Sektor penerangan	Rp. 0,9 miliar
(7) Sektor tertib hukum	Rp. 1,3 miliar

D j u m l a h : Rp. 24,6 miliar
=====

(Tjataan: Pembulatan2 menjebatkan perbedaan jumlah)

3.6.3. Bidang umum

Bidang umum dibagi dalam empat sektor :

(1) Sektor pemerintahan umum	Rp. 3,5 miliar
(2) Sektor pertahanan dan keamanan	Rp. 5,0 miliar
(3) Sektor badan2 perwakilan	Rp. 0,7 miliar
(4) Sektor pengurusan keuangan negara	Rp. 1,6 miliar

D j u m l a h : Rp. 10,8 miliar
=====

Perintjian lebih lanjut dari rencana pengeluaran pembangunan ini dapat dibuat dalam Lampiran 3 dari Nota Keuangan ini.

3.6.4. Bantuan ...

3.6.4. Bantuan proyek

Seperti telah dijelaskan dalam sub-bagian 3.3.2 dari Bab III ini, besarnya bantuan proyek diperkirakan akan berjumlah Rp. 66,1 miliar, atau US \$ 175,0 juta.

Realisasi daripada bantuan proyek pada umumnya memerlukan jangka waktu yang lama, meskipun commitment sudah diberikan. Realisasi daripada bantuan proyek memerlukan penelitian, survey, feasibility study dan lain-lain persyaratan administratif sebelum dilaksanakan.

Mengenai perintjiaan selanjutnya dari bantuan proyek ini dapat dilihat dalam Lampiran 4 dari Nota Keuangan ini.

3.7. Perbandingan R.A.P.B.N. 1971/1972 dengan REPELITA I

Bila dibandingkan angka2 R.A.P.B.N. 1971/1972 dengan angka2 REPELITA I, maka gambarnya adalah seperti terdapat dalam Tabel III.

13. Dari angka2 tersebut, maka terlihat bahwa :

- (1) Angka penerimaan dalam negeri untuk tahun anggaran 1971/1972 sudah memasuki angka penerimaan dalam negeri tahun terakhir REPELITA I.
- (2) Angka pengeluaran routine untuk tahun anggaran 1971/1972 telah melampaui angka pengeluaran routine tahun terakhir REPELITA I.
- (3) Tabungan Pemerintah 1971/1972 telah melampaui angka tahun ketiga dan memasuki angka tahun keempat REPELITA I.

(4) Djumlah ...

- (4) Jumlah pembiajaan pembangunan dalam rupiah untuk tahun anggaran 1971/1972 sudah hampir sama dengan jumlah pembiajaan pembangunan dalam rupiah tahun kelima REPELITA I.
- (5) Nilai-lawan bantuan program 1971/1972 telah jauh melampaui jumlah yang diperkirakan didalam tahun ketiga, keempat dan kelima REPELITA I.
- (6) Rontjana realisasi bantuan proyek untuk tahun anggaran 1971/1972 ternyata belum dapat mentjapai angka yang diperkirakan didalam REPELITA I. Tetapi atas dasar angka commitment jumlah bantuan proyek telah melampaui angka REPELITA I.

Dengan demikian maka dibidang anggaran pendapatan dan belanja negara telah dapat diusahakan peningkatan kegiatan melebihi rontjana yang diperkirakan didalam REPELITA I.

T a b e l III.13.

PERBANDINGAN R.A.P.B.N. 1971/1972 DENGAN REPETITA I

(dalam milyar rupiah)

	1969/1970	1970/1971	1971/1972	1972/1973	1973/1974			
	REPETITA A.F.B.N.	REPETITA A.F.B.N.	REPETITA A.F.B.N.	REPETITA A.F.B.N.	REPETITA A.F.B.N.			
1. Penerimaan dalam negeri	228,0	243,7	276,0	320,6	326,0	405,9	374,0	428,0
2. Pengeluaran routine	204,0	216,5	243,0	283,5	281,0	364,1	319,0	357,0
3. Pengeluaran pembangunan	123,0	218,3	153,0	161,4	223,0	221,0	264,0	296,0
(Pembayaran rupiah)	(37,0)	(93,0)	(108,0)	(115,8)	(128,0)	(151,9)	(110,0)	(156,0)
(Bantuan proyek)	(36,0)	(25,1)	(15,0)	(15,6)	(95,0)	(66,2)	(224,0)	(140,0)
4. Nilai-lawan bantuan program	63,0	65,8	75,0	76,7	85,0	103,2	85,0	85,0
5. Tabungan pemerintah	24,0	27,2	33,0	37,2	43,0	51,3	55,0	72,0

S u m b e r : Departemen Keuangan R.I.

T a b e l III.24.

RENTJANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, 1971/1972

(dalam milyar rupiah)

Penerimaan	Djumlah	Pengeluaran	Djumlah
A. Penerimaan dalam negeri	415,9	A. Pengeluaran routine	364,1
I. Pajak langsung	144,0	I. Belanja pegawai/pensiun	153,8
1. Pajak pendapatan	15,7	1. Tunjangan beras	33,0
2. Pajak perseroan	21,6	2. Gadjil/upah/pensiun	101,6
3. Pajak perseroan minyak	87,2	3. Lain2 belanja pegawai dalam negeri	14,2
4. M. P. O.	19,1	4. Belanja pegawai luar negeri	5,0
5. Lain - lain	0,4		
II. Pajak tidak langsung	267,7	II. Belanja lain pauk	12,1
1. Pajak penjualan	20,7	III. Belanja barang	67,2
2. Pajak penjualan impor	29,6	1. Belanja barang dalam negeri	59,0
3. T j u k a i	45,6	2. Belanja barang luar negeri	8,2
4. Bea masuk	98,6	IV. Subsidi daerah otonom	87,6
5. Pajak atas ekspor	28,7	1. Subsidi Irian Barat	10,6
6. Penerimaan minyak lainnya	39,1	2. Subsidi daerah lainnya	77,0
7. Lain - lain	5,4	V. Bunga/tjittjil hutang	37,2
III. Penerimaan non-tax	4,2	1. Hutang2 dalam negeri	8,4
		2. Hutang2 luar negeri	28,8
		VI. Lain - lain	6,2
		1. PEMILU	4,7
		2. Pengeluaran tahun lang lalu	1,5
B. Penerimaan pembangunan	169,2	B. Pengeluaran pembangunan	221,0
1. Bantuan program	103,1	1. Bidang ekonomi	119,5
2. Bantuan proyek	66,1	2. Bidang sosial	24,6
		3. Bidang umum	10,8
			154,9
		4. Bantuan proyek	66,1

D J U M L A H 585,1 ✓

D J U M L A H 585,1 ✓

Sumber : Departemen Keuangan R.I.

Bab IV. ...

PERKEMBANGAN MONETER DAN PERKREDITAN 1970/19714.1. Perkembangan jumlah uang beredar dan sebab2 perubahannya

Sampai dengan akhir Oktober 1970, uang yang beredar mentjapai jumlah Rp.231,1 miliar. Seperti diketahui jumlah uang yang beredar terdiri dari uang kartal dan uang giral. Dari jumlah tersebut diatas, sebesar Rp.140,1 miliar adalah uang kartal (61%) dan selebihnya Rp.91,0 miliar (39%) adalah uang giral. Jika dibandingkan dengan posisi jumlah uang beredar pada akhir Maret 1970, maka selama tahun anggaran 1970/1971 sampai dengan bulan Oktober 1970 terjadi kenaikan sebesar Rp.20,1 miliar atau 9,5%. Kenaikan terbesar dalam periode ini terjadi pada bulan Mei 1970 dan bulan Juli 1970 yaitu masing2 sejumlah Rp.5,2 miliar (25,9% dari seluruh kenaikan) dan Rp.8,6 miliar (42,5% dari seluruh kenaikan). Hal ini sebagian besar disebabkan karena bertambahnya sektor luar negeri sebesar + Rp.21,8 miliar dan sektor perusahaan + Rp.13,5 miliar. Satu dan lain hal, keadaan ini disebabkan karena keluarnya P.P. No.16 tahun 1970. Perkembangan setjara keseluruhan dari jumlah uang yang beredar dan sebab2 perubahannya dapat diikuti pada Tabel IV.1, Tabel IV.2 dan Tabel IV.3.

Selama tahun anggaran 1969/1970 jumlah uang yang beredar bertambah dengan Rp.80,1 miliar atau kenaikan sebesar 61,2%. Kenaikan yang terjadi pada tiga triwulanan yang pertama yaitu dari posisi Rp.130,9 miliar pada akhir Maret 1969 menjadi Rp.179,9 miliar pada akhir Desember 1969 atau kenaikan sebesar Rp.49,0 miliar (62% dari seluruh kenaikan). Kenaikan ini terutama sekali disebabkan oleh kegiatan sektor perusahaan sebesar + Rp.80,5 miliar, sedangkan peranan sektor pemerintah

dan ...

dan luar negeri masing2 sebesar -Rp.11,7 miliar dan -Rp.29,9 miliar. Untuk triwulan yang terakhir dalam tahun anggaran 1969/1970, jumlah uang yang beredar bertambah dengan Rp. 31,1 miliar. Perubahan ini sebagian besar adalah disebabkan oleh peranan dari sektor perusahaan (+ Rp.33,5 miliar). Batjara keseluruhan dalam periode ini peranan perusahaanlah yang lebih menonjol, sedangkan peranan sektor Pemerintah didalam menambah jumlah uang yang beredar kelihatan-nya semakin kurang berarti.

Dalam arti riil selama tahun anggaran 1969/1970, jumlah uang yang beredar bertambah sedjumlah Rp. 56,1 miliar atau suatu kenaikan sebesar 45,6%. Kenaikan yang terjadi pada tiga triwulan yang pertama adalah sebesar Rp.40,1 miliar atau 71,5% dari seluruh kenaikan. Dilain pihak nilai riil dari uang beredar dan deposito selama tahun anggaran 1969/1970 bertambah sebesar Rp. 75,7 miliar (+ 50,5%). Kenaikan yang terbesar terjadi juga pada tiga triwulan yang pertama yaitu Rp. 59,7 miliar (78,9% dari seluruh kenaikan).

Sampai dengan akhir Oktober 1970 jumlah uang yang beredar dalam arti riil mentjapai posisi Rp. 201,0 miliar. Diperkirakan sampai dengan akhir Maret 1971, posisi uang yang beredar dan posisi deposito dalam arti nominal mentjapai jumlah masing-masing Rp. 290,7 miliar dan Rp. 69,1 miliar, yang berarti selama tahun anggaran 1970/1971 jumlah uang yang beredar akan bertambah sebesar Rp. 48,0 miliar (+ 22,7%) dan deposito bertambah dengan Rp. 14,0 miliar.

Dengan demikian nilai riil uang yang beredar pada akhir Maret 1971 diperkirakan menjadi Rp. 218,1 miliar, sedangkan nilai riil deposito menjadi Rp. 51,8 miliar.

4.2. Perkembangan ...

T a b e l IV.1.

PERKEMBANGAN DJUMLAH UANG JANG BEREDAR

(dalam milyar rupiah)

Achir Periode	Uang Kerta	%	Uang Giral	%	Djumlah	Mutasi	Prosentase Kenaikan
1966	14,4	65	7,9	35	22,3	+ 19,6	763,5
1967	34,1	66	17,4	34	51,5	+ 29,2	131,8
1968	74,7	66	39,2	34	113,9	+ 62,4	121,3
1969 Maret	80,9	62	50,0	38	130,9	+ 17,0	14,9
Djuni	88,6	60	57,8	40	146,4	+ 15,5	11,9
September	101,9	60	61,6	40	169,5	+ 23,1	15,7
Desember	114,2	63	61,7	37	179,9	+ 10,4	6,5
Komulatip	-	-	-	-	-	+ 66,0	57,9
1970 Djanuari	113,4	62	70,2	38	183,6	+ 3,7	2,0
Februari	118,1	62	73,2	38	191,3	+ 7,7	4,1
M a r e t	126,7	60	84,3	40	211,0	+ 19,7	10,2
Komulatip I	-	-	-	-	-	+ 31,1	17,2
A p r i l	126,0	60	93,0	40	209,0	- 2,0	- 0,9
M e i	130,2	60	81,0	39	214,2	+ 5,2	2,5
D j u n i	132,3	62	82,7	38	215,0	+ 0,8	0,4
Komulatip II	-	-	-	-	-	+ 4,0	1,8
D j u l i	132,5	59	91,1	41	223,6	+ 8,6	4,0
Agustus	133,4	60	90,4	40	223,8	+ 0,2	0,1
September	136,9	60	89,8	40	226,7	+ 2,9	1,3
Komulatip III	-	-	-	-	-	+ 11,7	5,4
O k t o b e r	140,1	61	91,0	39	231,1	+ 4,4	2,0

Sumber : Bank Indonesia.

Angka2 sementara.

T a b e l IV.2.

SEBARA PEDUBAHAN JUMLAH UANG YANG BEREDAR
(dalam milyar rupiah)

Akhir Periode	Pemerintah	Perusahaan	Luar Negeri	Lain2	Mutasi
1966	+ 12,6	+ 5,6	- 0,2	+ 1,7	+ 19,6
1967	+ 11,7	+ 22,2	- 0,3	- 4,4	+ 29,2
1968	+ 2,9	+ 48,3	- 26,8	+ 38,1	+ 62,4
1969 M a r e t	+ 2,1	+ 0,2	+ 26,8	- 12,1	+ 17,0
D j u n i	- 7,5	+ 18,2	+ 10,3	- 5,5	+ 15,5
September	- 16,4	+ 34,5	- 11,0	+ 16,0	+ 23,1
Desember	+ 12,2	+ 27,8	- 29,2	- 0,4	+ 10,4
Kumulatip	- 9,6	+ 80,7	- 3,1	- 2,0	+ 66,0
1970 Djanuari	+ 6,5	+ 4,6	- 7,4	-	+ 3,7
Februari	+ 4,5	+ 2,3	+ 14,3	- 13,4	+ 7,7
M a r e t	- 3,4	+ 26,6	+ 7,4	- 10,9	+ 19,7
Kumulatip I	+ 7,6	+ 33,5	+ 14,3	- 24,3	+ 31,1
A p r i l	- 1,5	+ 10,1	- 6,7	- 4,1	- 2,0
M e i	- 0,1	- 0,1	+ 21,8	- 16,4	+ 5,2
D j u n i	- 17,7	+ 9,2	- 2,2	+ 11,5	+ 0,8
Kumulatip II	- 19,1	+ 19,2	+ 12,9	- 9,0	+ 4,0
D j u l i	+ 1,0	+ 13,5	+ 3,2	- 9,1	+ 8,6
Agustus	- 0,7	+ 6,1	- 4,7	- 1,1	+ 0,2
September	- 8,4	+ 4,6	- 1,5	+ 8,3	+ 2,9
Kumulatip III	- 8,1	+ 24,7	- 3,0	- 1,9	+ 11,7
Oktober	- 15,3	+ 14,7	+ 2,6	+ 1,2	+ 4,4

Sumber : Bank Indonesia.

Angka2 sementara.

T a b e l. IV. 3.

PERKEMBANGAN JUMLAH UANG YANG BEREDAR DANDEPOSITO DALAM ASET LILL
(dalam miliar rupiah)

Aktor Periode	Angka Indeks 62 mutjam ba- rang di dja- karta djuni 1969 = 100	Djumlah uang jang beredar	Deposito	Nominal uang beredar dan deposito			Nil uang beredar dan deposito		Nil uang jang beredar
				beredar dan deposito	beredar dan deposito	beredar dan deposito	beredar dan deposito	beredar dan deposito	
1966	25,5	22,3	0,4	22,7	89,0	87,5			
1967	54,3	51,5	2,4	53,9	99,3	94,8			
1968	100,4	113,9	12,5	126,4	125,9	113,4			
1969	105,5	130,9	28,9	159,8	150,0	122,9			
M a r e t	100	146,4	39,6	186,0	186,0	146,4			
J u n i	104,6	149,5	47,2	216,7	207,2	162,0			
S e p t e m b e r	110,4	179,9	51,6	231,5	209,7	163,0			
D e s e m b e r									
1970	117,9	211,0	55,1	266,1	225,7	179,0			
M a r e t	117,3	215,0	59,5	274,5	234,0	183,3			
J u n i	115,3	226,7	64,7	291,4	253,0	196,8			
S e p t e m b e r									
O k t o o b e r	115,0	231,1				201,0			

Sumber : Bank Indonesia, diolah kembali oleh Departemen Keuangan Nef-

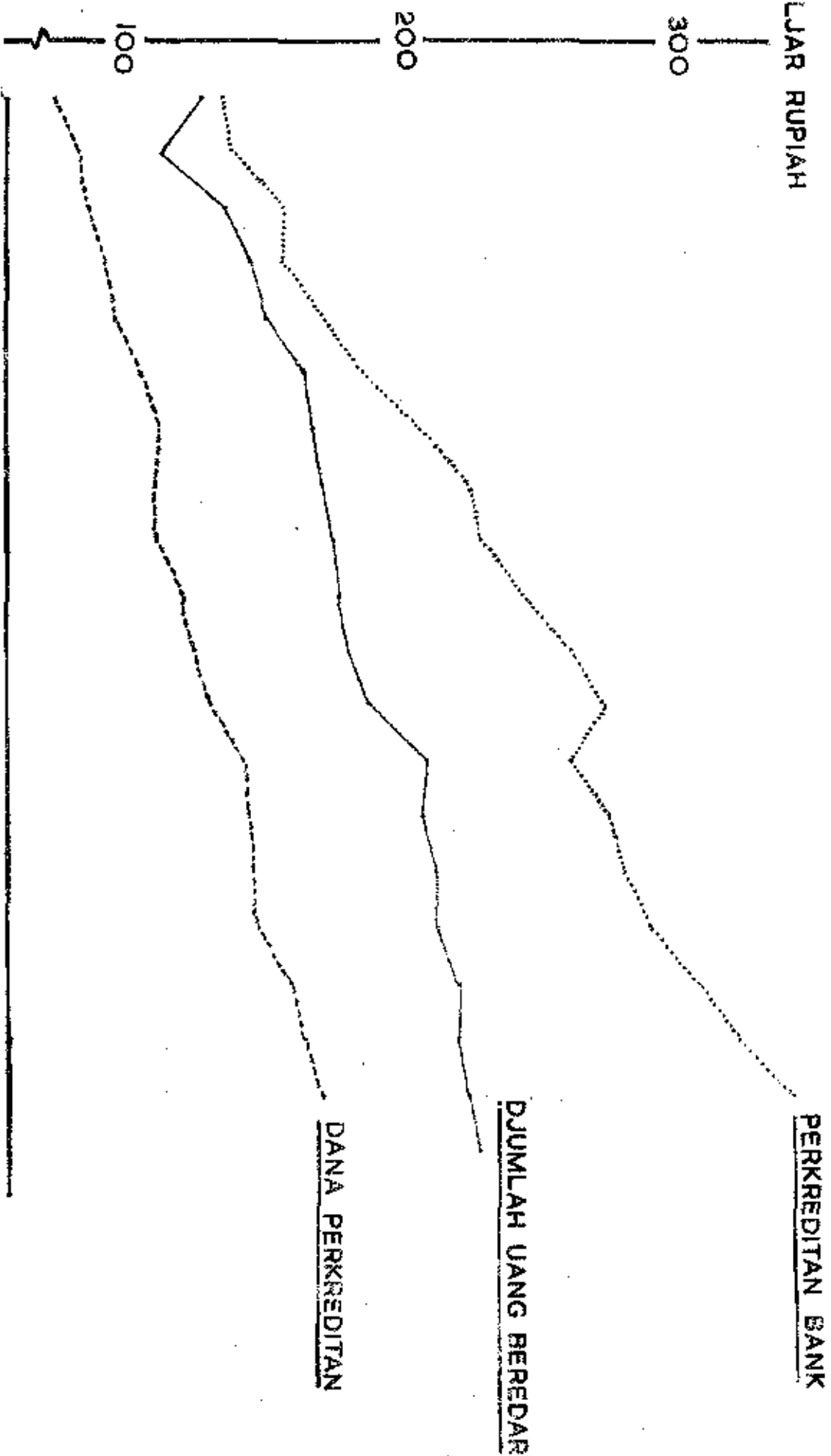
Angka2 Sementara

GRAFIK: IV.1.

127

PERKREDITAN BANK JUMLAH UANG BEREDAR & DANA PERKREDITAN

MILYAR RUPIAH



1969/1970

1970/1971

4.2. Perkembangan dana perkreditan

Selama tahun anggaran 1969/1970 dana perkreditan bank seluruhnya bertambah dengan Rp.71,2 miliar atau suatu kenaikan 95,8%, yaitu dari posisi Rp.74,3 miliar pada akhir Maret 1969 menjadi Rp.145,5 miliar pada akhir Maret 1970. Kenaikan yang terjadi pada tiga triwulan pertama sebesar Rp.48,7 miliar atau 68,4% dari seluruh kenaikan, sedangkan satu triwulan terakhir dana perkreditan bank bertambah dengan Rp.22,5 miliar. Sebagian besar dari kenaikan pada tiga triwulan pertama berasal dari bank-bank pemerintah yaitu sebesar Rp.34,8 miliar sedangkan sisanya Rp.13,9 miliar berasal dari bank-bank swasta nasional dan cabang bank-bank asing. Kenaikan dana perkreditan bank-bank pemerintah pada masa tiga triwulan pertama itu adalah berasal dari kenaikan deposito berjangka (+ Rp.17,3 miliar), sedangkan giro untuk masa tersebut bertambah dengan Rp.17,4 miliar. Kenaikan yang terjadi pada satu triwulan yang terakhir antara lain disebabkan oleh kurang bertambahnya deposito berjangka bank-bank pemerintah. Hal ini antara lain diakibatkan oleh penurunan suku bunga deposito berjangka yang terjadi pada bulan Januari 1970.

Dengan tujuan untuk lebih memanfaatkan perkreditan serta dana dari kalangan masyarakat guna mensukseskan stabilisasi dan pembangunan ekonomi maka berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1966, Pemerintah mengadakan kebijaksanaan deposito berjangka melalui bank-bank pemerintah. Kebijaksanaan ini dimulai sejak bulan Oktober 1966 dengan suku bunga 1½% untuk deposito berjangka yang

kurang ...

kurang dari 3 bulan; 4% untuk deposito berjangka 3 bulan atau lebih; 5% dan 6% untuk deposito berjangka 6 bulan dan satu tahun lebih. Satu bunga ini telah mengalami penurunan sebanyak lima kali dan dewasa ini suku bunga deposito berjangka adalah sebagai berikut: 1% untuk jangka waktu kurang dari 3 bulan; 1,5% untuk jangka waktu 3 bulan atau lebih; 1½% dan 2%, masing-masing untuk jangka waktu 6 bulan atau lebih dan 1 tahun atau lebih. Perkembangan deposito berjangka bank-bank pemerintah dapat dilihat pada Tabel IV.5.

Selama tahun anggaran 1969/1970 deposito berjangka meningkat dengan Rp.16,5 miliar (113,5%). Kenaikan yang pesat terjadi pada tiga triwulan pertama yaitu sebesar Rp.17,3 miliar atau 93,5% dari seluruh kenaikan. Kenaikan yang terjadi pada masa ini terutama terjadi pada deposito yang berjangka waktu 12 bulan yaitu sebesar Rp.10,3 miliar atau 82,6% dari seluruh kenaikan dimasa itu. Dalam satu triwulan yang terakhir dari tahun anggaran 1969/1970 deposito berjangka bank-bank pemerintah memperlihatkan kenaikan yang tidak begitu berarti. Hal ini antara lain disebabkan oleh penurunan suku bunga yang terjadi pada tanggal 1 Januari 1970 dengan akibat deposito berjangka waktu setahun hanya bertambah sebesar Rp.4,5 miliar, sedangkan deposito yang berjangka waktu 6 bulan dan 3 bulan masing-masing berkurang dengan Rp.3,1 miliar dan Rp.0,1 miliar.

Pelain pihak dalam rangka pengerahan dana masyarakat, berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No.1/1-Kep.Dir. sejak 1 Februari 1969 diadakan pula gerakan tabungan berhadiah 1969. Sebagai permulaan, gerakan ini dijalankan di Jakarta Raya dan sekitarnya. Terjata gerakan ini memperlihatkan hasil-hasil yang menjanjikan, sehingga mulai bulan Juni 1969 gerakan ini diperluas kepada daerah Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar dan

sekitarnya ...

PERKEMBANGAN DANA PERKREDITAN BANK

(dalam miliar rupiah)

	1966	1967	1968	1 9 6 9			1 9 7 0									
	Des.	Des.	Des.	Mar.	Duni	Sept.	Des.	Dian.	Petr.	Mar.	April	Mei	Duni	Juli	Agust.	Sept.
I. Bankbank Pemerintah																
G i r o	(4,8)	(14,0)	(29,1)	(35,9)	(42,7)	(52,1)	(54,1)	(56,5)	(60,3)	(69,2)	(69,0)	(69,8)	(72,0)	(77,4)	(80,8)	(82,5)
Deposito	-	(0,4)	(4,7)	(17,0)	(24,5)	(29,9)	(33,5)	(34,1)	(34,4)	(34,0)	(34,8)	(35,2)	(37,1)	(38,1)	(39,0)	(40,4)
Lain-lain	(0,3)	(0,5)	(0,9)	(1,0)	(1,7)	(3,5)	(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,7)	(2,8)	(3,1)	(3,5)	(4,8)	(7,1)	(7,7)
II. Bankbank swasta																
G i r o	(1,3)	(4,1)	(7,8)	(7,3)	(8,9)	(8,8)	(13,7)	(14,2)	(14,2)	(15,1)	(15,2)	(15,8)	(15,0)	(17,1)	(15,5)	(16,0)
Deposito	(0,3)	(2,3)	(6,0)	(8,6)	(11,9)	(13,5)	(13,0)	(13,4)	(14,1)	(14,8)	(15,2)	(15,5)	(15,4)	(16,0)	(15,5)	(16,2)
Lain-lain	-	(0,3)	(0,4)	(0,6)	(0,6)	(0,6)	(0,4)	(0,4)	(0,4)	(0,5)	(0,6)	(0,6)	(0,6)	(0,5)	(0,5)	(0,6)
III. Tabung bank asing																
G i r o	-	-	(1,5)	(1,9)	(2,5)	(3,5)	(4,2)	(4,8)	(4,9)	(6,5)	(6,0)	(5,8)	(5,6)	(6,0)	(6,7)	(6,9)
Deposito	-	-	(0,4)	(0,9)	(1,3)	(2,1)	(2,0)	(2,3)	(2,7)	(2,7)	(3,0)	(3,1)	(3,0)	(2,9)	(3,2)	(3,8)
Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total I + III																
G i r o	(1,3)	(4,1)	(9,3)	(9,1)	(11,4)	(12,3)	(17,9)	(19,1)	(19,1)	(21,5)	(21,2)	(21,6)	(20,6)	(23,1)	(22,2)	(22,9)
Deposito	(0,3)	(2,3)	(6,4)	(9,6)	(13,1)	(15,7)	(15,0)	(15,7)	(16,8)	(17,5)	(18,2)	(18,6)	(18,4)	(18,9)	(18,7)	(20,0)
Lain-lain	-	(0,2)	(0,4)	(0,7)	(0,5)	(0,6)	(0,4)	(0,4)	(0,4)	(0,5)	(0,6)	(0,6)	(0,6)	(0,5)	(0,5)	(0,6)
DANA BESAR																
G i r o	(6,1)	(18,1)	(38,4)	(46,0)	(54,1)	(64,4)	(72,0)	(75,6)	(79,4)	(90,8)	(90,2)	(91,4)	(92,7)	(100,5)	(103,0)	(105,4)
Deposito	(0,4)	(2,7)	(11,1)	(26,8)	(37,8)	(45,6)	(48,5)	(49,8)	(51,2)	(51,5)	(51,0)	(51,8)	(55,5)	(57,0)	(57,7)	(60,4)
Lain-lain	(0,2)	(0,7)	(1,3)	(1,7)	(2,2)	(4,1)	(2,5)	(2,6)	(2,7)	(3,2)	(3,4)	(3,7)	(4,0)	(5,3)	(7,6)	(8,3)

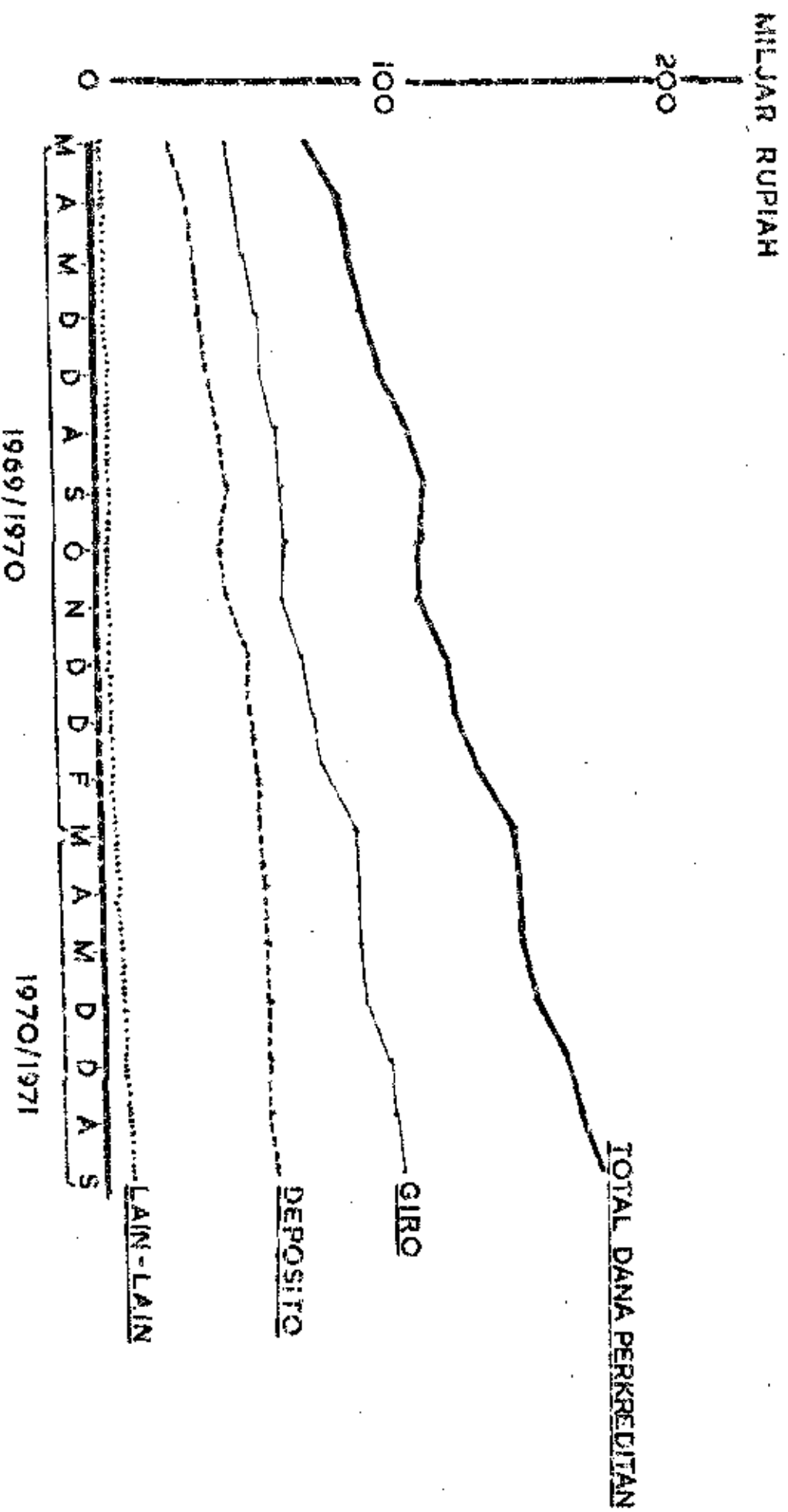
Sumber : Bank Indonesia

Angka2 sementara.

GRAFIK IV.2.

141

DANA PERKREDITAN MENURUT SUMBER



sekitarnya. Perkembangan tabungan berhadiah 1969 ini dapat diikuti pada Tabel IV.5. Sampai akhir Maret 1969 posisi tabungan berhadiah 1969 menjapai jumlah Rp. 904,0 djuta, dengan demikian selama tahun anggaran 1969/1970 terdapat kenaikan sebesar Rp. 869,8 djuta atau 2.422,8%. Kenaikan yang begitu pesat ini disebabkan oleh adanya hadiah yang menarik dan tingkat bunga yang cukup tinggi, disamping itu membuktikan pula bahwa masyarakat semakin lebih gemar menabungkan uangnya. Perlu pula diketahui bahwa gerakan tabungan berhadiah ini, disamping dilaksanakan oleh bank2 pemerintah, juga dilaksanakan oleh bank2 swasta yang ditundjuk oleh Bank Indonesia.

Dalam rangka usaha2 untuk mengintensifkan mobilisasi dana2 dari masyarakat, maka bank Indonesia telah mulai mengeluarkan Sertifikat Bank Indonesia (S.B.I.) pada tanggal 1 April 1970. Hal ini merupakan usaha pendahuluan guna melatih masyarakat untuk memegang surat2 berharga. Diharapkan kemudian usaha2 sedemikian itu akan diikuti pula oleh bank2 Pemerintah lainnya. Dengan berkembangnya usaha2 sedemikian itu maka terbukalah djalan kearah pembentukan pasar uang dan pasar modal sehingga memperlantjar penyaluran dana2 ke sektor2 bidang usaha yang membutuhkannya. Bila kebiasaan masyarakat untuk memegang surat2 berharga itu telah berkembang maka Pemerintah bermaksud pula untuk mengeluarkan surat2 berharga dalam bentuk surat2 perbendaharaan negara.

Pada bulan pertama emisi SBI yang berjangka waktu 3 bulan terdjumlah Rp. 1.125,- djuta. SBI-2 yang habis waktu akan didjual kembali dengan nilai nominalnya kepada bank2 Pemerintah.

Perkembangan sirkulasi SBI itu dapat diikuti pada Tabel yang berikut :

Tabel IV.4b. ...

T a b e l IV.4a.

PERKEMBANGAN SIKULASI G.B.I.

(dalam djutaan rupiah).

B u l a n	Nilai jang dikeluarkan
A p r i l	Rp. 1.135,-
M e i	Rp. 1.200,-
D j u n i	Rp. 910,-
D j u l i	Rp. 1.589,-
Agustus	Rp. 1.341,-
September	Rp. 1.212,-

Sumber : Bank Indonesia.

Sampai dengan bulan September 1970 posisi dana perkreditan bank seluruhnya mentjapai djumlah Rp. 174,1 milyar, posisi deposito berdjangka Rp. 40,7 milyar, posisi tabungan berhadiah 1969 Rp. 1.089,3 djuta, dimana dua besaren jang terachir ini sesungguhnya adalah merupakan bagian2 dari dana perkreditan bank keseluruhannya. Keadaan ini berarti selama satu semester dalam tahun anggaran 1970/1971 telah terdjadi kenaikan dana perkreditan bank seluruhnya sebesar Rp. 28,6 milyar, sedangkan tabungan berhadiah sebesar Rp. 185,3 djuta. Kenaikan jang berarti dari dana perkreditan bank seluruhnya dalam periode ini terdjadi pada bulan Djuli 1970 jaitu Rp. 13,9 milyar, jang ini sebahagian besar disebabkan oleh kenaikan dana perkreditan seluruhnya bank-bank Pemerintah sebesar Rp. 7,7 milyar. Diperkirakan pada achir Maret 1971 dana perkreditan bank seluruhnya dan deposito berdjangka masing2 akan mentjapai posisi Rp. 182,5 milyar dan Rp. 45,5 milyar. Hal ini berarti selama tahun anggaran 1970/1971 kenaikan dalam dana perkreditan bank dan deposito berdjangka masing2 diperkirakan

mendekati ...

PERKEMBANGAN DEPOSITO BERDILAKUKA BANK2 PENERIMA DAN TABUNGAN BERHADIAH 1969

	1968				1969				1970						
	Oktober	Desember	Maret	Juni	Sept.	Desember	Januari	Pebr.	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust.	Sept.
Deposito berjangka bank2 pemerintah (allier rupiah)	1,8	4,6	16,3	24,6	29,7	33,6	34,2	34,6	34,8	34,3	34,6	36,5	36,5	38,2	40,7
12 bulan	(0,9)	(2,8)	(10,8)	(17,6)	(22,1)	(25,1)	(27,2)	(28,9)	(29,5)	(28,5)	(28,5)	(30,3)	(30,4)	(32,2)	(33,1)
6 bulan	(0,1)	(0,9)	(3,7)	(5,3)	(6,1)	(6,7)	(5,4)	(4,3)	(3,6)	(3,8)	(3,9)	(3,8)	(3,8)	(3,6)	(4,0)
3 bulan ke bawah	(0,8)	(0,9)	(1,8)	(1,7)	(1,5)	(1,8)	(1,6)	(1,4)	(1,7)	(2,0)	(2,2)	(2,4)	(2,3)	(2,6)	(3,6)
Tabungan berhadiah 1969 (dalam jutaan rupiah)	-	-	35,9	74,8	223,4	395,4	615,9	748,9	904,0	938,8	1.013,2	1.063,4	1.054,9	1.061,8	1.089,8
12 bulan	-	-	(26,9)	(55,2)	(173,7)	(311,8)	(467,7)	(586,6)	(725,4)	(823,4)	(885,9)	(944,5)	(948,2)	(925,9)	(956,5)
6 bulan	-	-	(7,0)	(16,2)	(34,0)	(50,4)	(59,5)	(74,8)	(84,9)	(89,1)	(91,9)	(97,9)	(83,6)	(85,7)	(84,1)
3 bulan	-	-	(2,0)	(3,4)	(15,7)	(33,2)	(88,7)	(88,5)	(83,9)	(26,3)	(25,4)	(21,0)	(23,1)	(50,2)	(48,7)

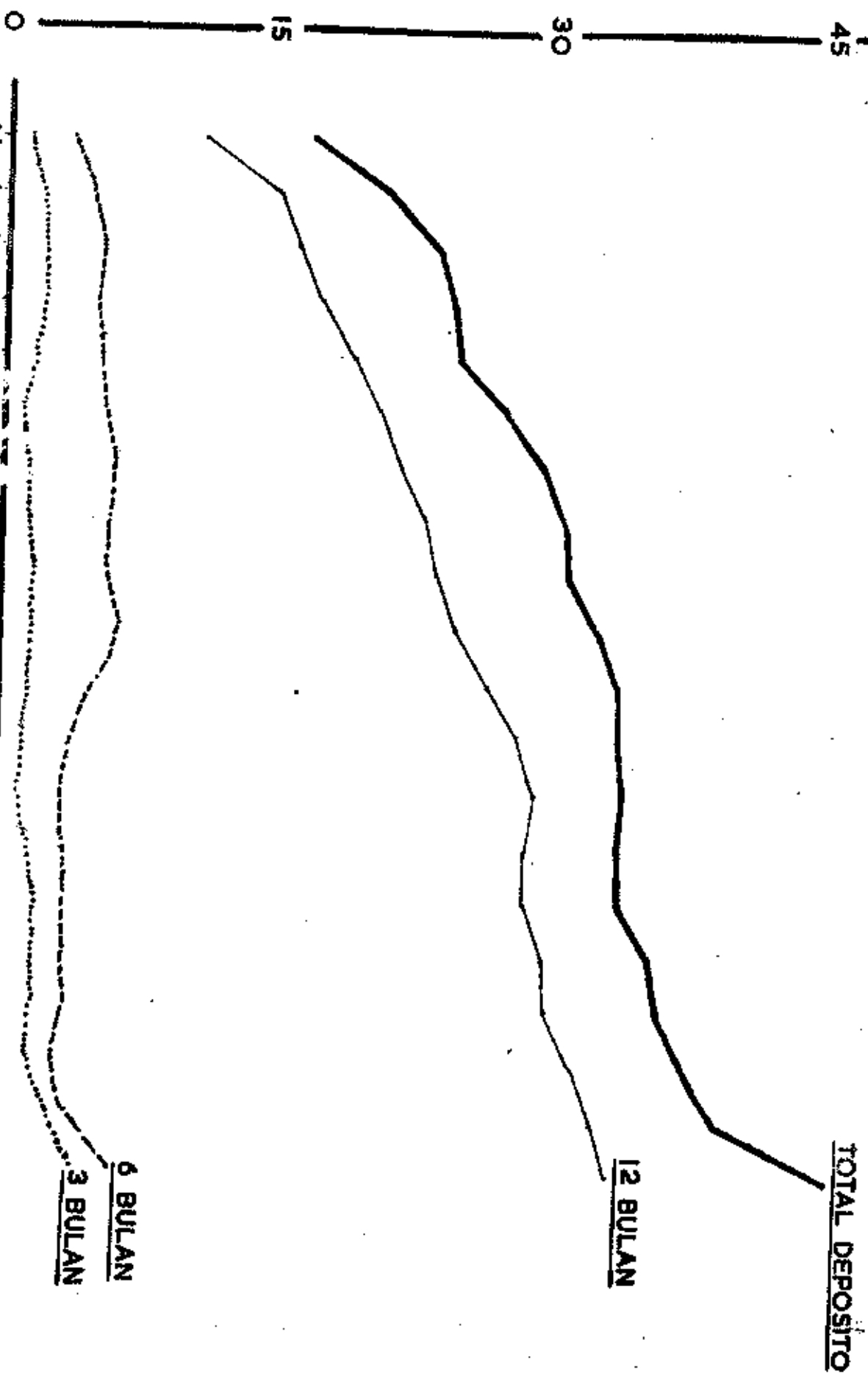
Sumber : Bank Indonesia
angka2 sementara.

GRAFIK IV.3.

MILYAR RUPIAH

DEPOSITO BERDANGKA MENURUT WAKTU

144



1965(1971)

1970/1971

mendekati jumlah Rp.37,0 miliar dan Rp.24,0 miliar.

4.3. Perkembangan perkreditan bank

4.3.1. Perkembangan perkreditan bank menurut sektor perbankan

Disini ini ada 4 kelompok lembaga perbankan yang merupakan sumber perkreditan bank di Indonesia, yaitu Bank Indonesia melalui kredit langsung dan kredit likwiditasnya, bank-bank umum pemerintah, bank-bank umum swasta termasuk didalamnya bank-bank pembangunan daerah dan yang terakhir cabang bank-bank asing. Perkembangan perkreditan bank menurut sektor perbankan dapat diikuti pada tabel IV.6.

Pada akhir Maret 1970 posisi total perkreditan bank mencapai jumlah Rp.262,1 miliar, yang berarti selama tahun anggaran 1969/1970 telah terjadi kenaikan sebesar Rp.125,3 miliar atau 93,7%. Kenaikan yang berarti terjadi pada tiga triwulan yang pertama, yaitu masing-masing Rp.22,9 miliar untuk triwulan I, Rp.49,9 miliar untuk triwulan II, dan Rp.35,8 miliar untuk triwulan III, sedangkan untuk triwulan IV, kenaikan tersebut hanya sebesar Rp.16,7 miliar. Satu dan lain hal, kenaikan perkreditan bank yang terjadi pada tiga triwulan yang pertama adalah disebabkan dikeluarkannya sebanyak tiga kali kebijaksanaan suku bunga pinjaman yaitu pada tanggal 1 Mei 1969, 10 Juli 1969 dan 15 September 1969. Sehubungan dengan itu suku bunga pinjaman untuk masing2 golongan mengalami tiga kali penurunan pula yaitu dari 3% perbulan untuk golongan I; 4% perbulan untuk golongan II; 5% untuk golongan III; 5 - 7% perbulan untuk golongan IV; pada 1 Oktober 1968, akhirnya menjadi 1% perbulan untuk

golongan ...

golongan I; 2½% untuk golongan II perbulan; 2½% perbulan untuk golongan III dan 3% perbulan untuk golongan IV, serta ditambah lagi dengan golongan pinjaman yang baru yaitu golongan V dengan bunga 3 - 5% perbulannya; pada 15 September 1969.

Dari posisi kredit sejumlah Rp.262,1 miliar pada akhir Maret 1970, sebahagian besar berasal dari kredit Bank Indonesia yaitu sebesar Rp.167,5 miliar atau 63,9% dari seluruh perkreditan bank, dimana sebesar Rp.71,8 miliar merupakan kredit langsung dan Rp.95,7 miliar merupakan kredit likwiditas. Selanjutnya posisi perkreditan bank-bank pemerintah dengan likwiditas sendiri pada saat tersebut adalah Rp.70,3 miliar, sedangkan bank-bank swasta dan cabang bank-bank asing, masing-masing menjabai jumlah Rp.20,7 miliar dan Rp.3,5 miliar. Demikian juga dari jumlah kenaikan perkreditan bank sebesar Rp.125,3 miliar selama tahun anggaran 1969/1970 sebahagian berasal dari kenaikan volume perkreditan Bank Indonesia yaitu sejumlah Rp.75,1 miliar atau 59,9% dari seluruh kenaikan, kemudian menyusul kenaikan kredit bank pemerintah dengan likwiditas sendiri sebesar Rp.36,9 miliar, kredit bank-bank swasta dan cabang bank-bank asing, masing-masing dengan kenaikan Rp.10,8 miliar dan Rp.2,5 miliar.

Perkembangan perkreditan Bank Indonesia selama tahun 1969/1970 adalah sebagai berikut: Kenaikan yang berarti terjadi pada tiga triwulan yang pertama, dimana kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan dalam kredit langsung, masing-masing Rp.3,9 miliar pada triwulan I, Rp.21,5 miliar pada triwulan II dan Rp.17,4 miliar dalam triwulan-III. Kenaikan volume kredit langsung selama periode tersebut, terutama dalam rangka program pengadaan pangan. Tetapi dalam triwulan IV-1969/1970 terjadi penurunan volume kredit

langsung ...

langsung, sehingga mentjapai posisi Rp.71,8 miliar pada akhir Maret 1970. Penurunan ini disebabkan adanya pembajaran kembali dari kredit² dalam rangka pengadaan pangan. Perkembangan kredit likwiditas Bank Indonesia menunjukkan kenaikan yang terus menerus yaitu dengan kenaikan² sebesar + Rp.4,9 miliar, + Rp.10,3 miliar, + Rp.16,4 miliar dan + Rp.16,2 miliar, masing-masing untuk triwulan I, II, III dan IV-1969/1970.

Perkembangan perkreditan bank-bank umum pemerintah dengan likwiditas sendiri selama tahun anggaran 1969/1970 memperlihatkan trend yang menaik. Kenaikan yang berarti djustru terdjadi dalam triwulan IV-1969/1970 yaitu sebesar Rp.11,4 miliar dan dalam triwulan II - 1969/1970 sebesar Rp.15,3 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya kegiatan sektor swasta terutama disektor produksi. Selanjutnya perkembangan perkreditan bank-bank swasta dan tjabang bank-bank asing selama tahun anggaran 1969/1970 umumnya memperlihatkan keadaan yang menggenhirakan. Namun demikian mengingat kemampuan yang mereka miliki adalah relatif ketjil dibandingkan dengan kemampuan dari lembaga perbankan lainnya, maka peranan kredit yang mereka berikan belumlah merupakan faktor yang menentukan dalam memperbesar volume perkreditan bank di Indonesia.

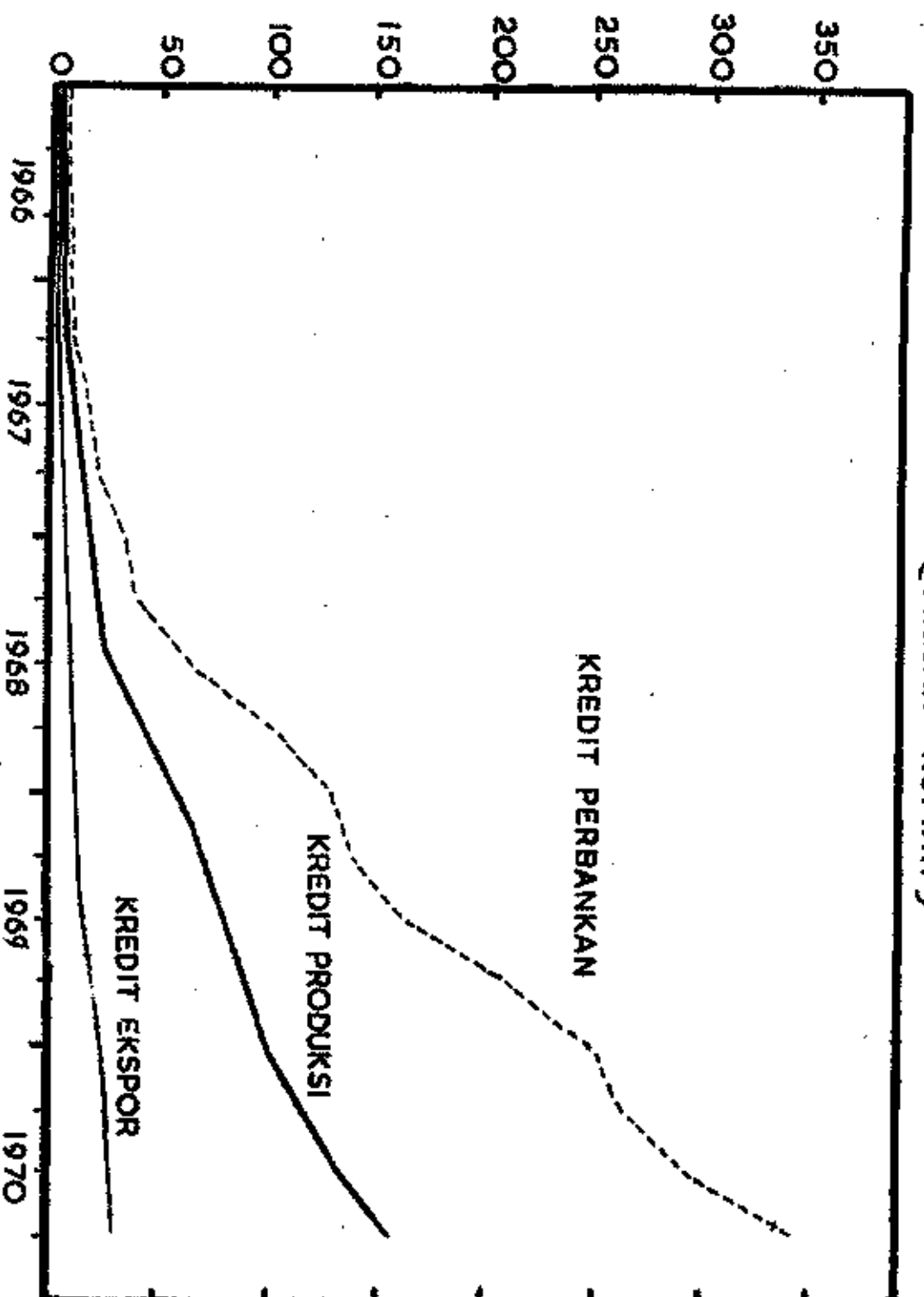
Selama tahun 1970/1971 sampai akhir bulan September 1970 posisi perkreditan bank seluruhnya mentjapai djumlah Rp.342,5 miliar. Sebahagian besar dari volume perkreditan bank ini berasal dari Bank Indonesia sebesar Rp.202,9 miliar, dari bank-bank pemerintah dengan likwiditas sendiri sedjumlah Rp.109,0 miliar dan dari bank-bank swasta serta tjabang bank-bank asing, masing-masing sebesar Rp.23,8 miliar dan Rp.6,8 miliar. Kenaikan yang berarti dalam periode ini terdjadi pada bulan Agustus 1970 dan September 1970 yaitu masing-masing Rp.16,8 miliar dan Rp.16,7 miliar. Kenaikan ini terutama berasal dari

kenaikan ...

GRAFIK IV.4.

PERKEMBANGAN KREDIT PERBANKAN, KREDIT PRODUKSI DAN KREDIT EKSPOR

(MILJAR RUPIAH)



kenaikan kredit bank-bank pemerintah dengan likwiditas sendiri masing2 Rp.10,5 miliar untuk bulan Agustus 1970 dan Rp.4,5 miliar untuk bulan September 1970, yang terutama ditujukan untuk sektor produksi dan sektor lain2. Kemudian dari jumlah pertambahan perkreditan bank seluruhnya sebesar Rp.30,4 miliar dalam tahun 1970/1971 sampai dengan bulan September 1970, sebesar Rp.35,4 miliar berupa kenaikan kredit Bank Indonesia, sebesar Rp.38,7 miliar berupa kenaikan kredit bank-bank pemerintah dengan likwiditas sendiri dan sisanya adalah kenaikan kredit dari bank-bank swasta serta cabang bank-bank asing.

Pada akhir Maret 1971 posisi perkreditan bank seluruhnya diperkirakan sedjumlah Rp.363,3 miliar. Dengan demikian selama tahun 1970/1971 diperkirakan volume perkreditan bank seluruhnya bertambah dengan Rp.101,2 miliar.

4.3.2. Perkembangan perkreditan bank menurut sektor kegiatan usaha pemerintah dan swasta

Posisi kredit sedjumlah Rp.268,4 miliar pada akhir Maret 1970, lebih banyak diarahkan kepada kegiatan sektor usaha swasta yaitu Rp.134,2 miliar (51,2%) dan selebihnya Rp.127,9 miliar adalah untuk usaha-usaha sektor pemerintah (48,8%). Demikian juga dari jumlah kenaikan perkreditan bank sebesar Rp.125,3 miliar dalam tahun 1969/1970, sebahagian besar diarahkan kepada kegiatan sektor usaha swasta yaitu Rp.78,9 miliar atau 62,9% dari seluruh kenaikan. Keadaan ini membuktikan bahwa selama tahun 1969/1970 kebijaksanaan perkreditan bank yang dijalankan oleh pemerintah adalah lebih menundjang dan membina sektor swasta terutama dalam rangka mensukseskan pembangunan lima tahun yang pertama.

Kenaikan ...

Kenaikan perkreditan bank sebesar Rp.78,9 miliar kesektor usaha swasta dalam tahun 1969/1970 berasal dari kenaikan kredit likwiditas Bank Indonesia sedjumlah Rp.35,8 miliar, kenaikan kredit bank-bank pemerintah dengan likwiditas sendiri sebesar Rp.31,9 miliar, kenaikan kredit bank-bank swasta dan tjabang bank-bank asing kesektor ini masing-masing Rp.10,6 miliar dan Rp.2,5 miliar, dilain pihak kredit langsung Bank Indonesia kesektor ini menunjukkan penurunan sebesar Rp.2,2 miliar.

Kenaikan yang terjdjadi disektor kegiatan usaha pemerintah sebesar Rp.46,4 miliar selama tahun 1969/1970 adalah berasal dari kenaikan kredit langsung dan kredit likwiditas Bank Indonesia, masing-masing Rp.12,0 miliar dan Rp.29,5 miliar dan kenaikan kredit bank-bank pemerintah kesektor ini dengan likwiditas sendiri sebesar Rp.5,0 miliar. Sedangkan bank-bank swasta dan tjabang bank-bank asing tidak memberikan kreditnya kesektor kegiatan usaha pemerintah.

Kemudian dari djumlah kenaikan perkreditan bank sebesar Rp.80,4 miliar dalam tahun anggaran 1970/1971 sampai dengan bulan September 1970, sebahagian besar djuga ditunjukkan kepada sektor usaha swasta yaitu Rp.45,4 miliar atau 56,5% dari seluruh kenaikan. Kenaikan yang berarti kesektor ini adalah terjdjadi pada bulan Juni 1970 dan Agustus 1970 yaitu masing2 sebesar Rp.10,0 miliar dan Rp.9,5 miliar. Kenaikan sebesar Rp.45,4 miliar dari kredit perbankan kesektor swasta selama periode tersebut, adalah berasal dari : kenaikan2 kredit likwiditas dan kredit langsung Bank Indonesia kesektor itu masing-masing Rp.6,6 miliar dan Rp.0,6 miliar, kenaikan kredit bank-bank pemerintah dengan likwiditas sendiri Rp.31,6 miliar dan selebihnya, merupakan kenaikan kredit bank-bank swasta dan tjabang bank-bank asing kesektor itu.

Kenaikan ...

Kenaikan kredit perbankan kesektor pemerintah sebesar Rp.35,0 miliar selama periode tersebut adalah berasal dari kenaikan kredit langsung Bank Indonesia dan kredit bank-bank pemerintah dengan likuiditas sendiri, masing-masing Rp.28,3 miliar dan Rp.7,1 miliar, sedangkan selebihnya adalah berupa penurunan dalam kredit likuiditas Bank Indonesia kesektor ini. Posisi perkreditan bank kesektor swasta dan kesektor pemerintah pada akhir September 1970 masing-masing Rp.179,6 miliar dan Rp.162,9 miliar.

4.3.3. Perkembangan perkreditan bank menurut sektor ekonomi

Posisi perkreditan bank sebesar Rp.262,1 miliar diakhir Maret 1970 diarahkan kesektor produksi sebesar Rp.114,0 miliar atau 43,4%, kesektor lain-lain sebesar Rp.125,5 miliar atau 47,9% dan terakhir sektor ekspor sebesar Rp.22,6 miliar atau 8,7%. Demikian juga dari pertambahan kredit sebesar Rp.125,3 miliar selama tahun anggaran 1969/1970 berasal dari kenaikan yang terjadi disektor produksi sebesar Rp.48,0 miliar (38,3%), kemudian dari kenaikan disektor lain-lain sebesar Rp.65,8 miliar (52,5%) dan terakhir dari kenaikan disektor ekspor sebesar Rp.11,5 miliar (3,2%). Perkembangan seluruhnya dapat dilihat pada Tabel IV.6.

Kenaikan kredit selama tahun 1969/1970 sejumlah Rp.48,0 miliar disektor produksi sebahagian besar berasal dari kenaikan kredit bank-bank pemerintah dengan likuiditas sendiri dan dengan likuiditas bank sentral masing-masing Rp.23,6 miliar dan Rp.16,4 miliar. Demikian pula kenaikan kredit selama periode tersebut kesektor lain-lain sebesar Rp.65,8 miliar, sebahagian besar adalah disebabkan kenaikan kredit langsung Bank Indonesia dan kenaikan kredit bank-bank pemerintah

dengan ...

dengan likuiditas bank sentral ke sektor tersebut, masing-masing Rp.25,4 miliar dan Rp.24,7 miliar. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan ke sektor lain-lain dalam masa tersebut, terutama dalam rangka pembiayaan program pengadaan pangan.

Pada akhir September 1970 posisi perkreditan bank menjapai jumlah Rp.342,5 miliar. Dari jumlah ini sebesar Rp.157,5 miliar atau 44,5% dari posisi seluruhnya diarahkan ke sektor produksi, ke sektor lain-lain sebesar Rp.162,9 miliar atau 47,6% dari posisi seluruhnya dan ke sektor ekspor sebesar Rp.27,1 miliar atau 7,9% dari posisi seluruhnya. Demikian pula dari kenaikan kredit perbankan sedjumlah Rp.80,4 miliar selama tahun 1970/1971 sampai dengan bulan September 1970, sebahagian besar berasal dari kenaikan kredit di sektor produksi sedjumlah Rp.38,5 miliar dan kenaikan di sektor lain-lain sebesar Rp.37,4 miliar, sedang sisanya adalah berasal dari kenaikan yang terjadi di sektor ekspor.

Kenaikan kredit di sektor produksi sedjumlah Rp.38,5 miliar pada masa tersebut adalah berasal dari kenaikan kredit bank-bank pemerintah baik dengan likuiditas sendiri maupun dengan likuiditas bank sentral masing-masing Rp.11,4 miliar dan Rp.14,9 miliar. Demikian pula kenaikan kredit ke sektor lain-lain sebesar Rp.37,4 miliar sebahagian besar berasal dari kenaikan kredit bank-bank pemerintah dengan likuiditas sendiri dan kredit langsung Bank Indonesia masing-masing Rp.22,0 miliar dan Rp.18,6 miliar.

4.3.4. Perkembangan pemberian kredit menurut Paswati I

Setjara keseluruhan pemberian kredit ini ditunjukkan kepada

24 Deswati, belum termasuk Irian Barat.

Sampai dengan akhir Maret 1970 posisi pemberian kredit menurut Deswati I ini, mantjapai djumlah Rp.166.115,37 djuta, berarti telah terdjadi kenaikan sebesar Rp.82.305,02 djuta atau 98,2% dibandingkan dengan posisi akhir April 1969. Kenaikan jang terdjadi dalam periode April 1969 - Dj Januari 1970 adalah sebesar Rp.65.637,75 djuta, sedangkan kenaikan untuk periode Dj Januari 1970 - Maret 1970 adalah Rp.16.668,29 djuta.

Posisi kredit tersebut diatas sebesar Rp.166.115,37 djuta pada akhir Maret 1970, sebesar Rp.99.020,60 djuta (59,6%) ditudjukan kesektor produksi, sebesar Rp.46.719,55 djuta (28,1%) ditudjukan kesektor lain-lain dan sisanja sebesar Rp.20.375,22 djuta (12,3%) ditudjukan kesektor ekspor. Besarnya volume kredit kesektor lain-lain disebabkan terutama oleh kredit dalam rangka pengadaan pangan dan kredit perdagangan dalam negeri. Namun demikian dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah dalam kebijaksanaan kreditnja selalu memperhatikan sektor produksi.

Demikian pula dari kenaikan sebesar Rp.82.305,02 djuta selama periode April 1969 - Maret 1970, sebahagian besar berasal dari kenaikan kredit tersebut disektor produksi sebesar Rp.37.631,31 djuta, kemudian menjusul kenaikan disektor lain-lain sebesar Rp.34.859,49 djuta, dan akhirnya kenaikan disektor ekspor sebesar Rp.9.815,22 djuta. Kenaikan disektor produksi selama periode tersebut diatas, terutama dalam rangka pembiayaan produksi bahan pangan, sandang, perindustrian dan produksi barang ekspor. Kenaikan kredit untuk pembiayaan produksi bahan sandang, bahan pangan dan perindustrian selama periode itu, terutama terdjadi didaerah khusus Djakarta Raya, sedangkan kenaikan kredit tersebut untuk pembiayaan produksi barang ekspor terutama terdjadi didaerah Sumatera Utara.

Sampai...

Sampai dengan akhir Djuni 1970 perkembangan pemberian kredit menurut daswati telah menjapai posisi Rp. 185.626,26 djuta. Dari djumlah ini sebahagian besar diarahkan kesektor produksi sebesar Rp. 114.264,18 djuta, kemudian menjusul sektor lain-lain dan sektor ekspor masing2 sedjumlah Rp. 51.100,- djuta dan Rp. 20.264,08 djuta.

Perkembangan kredit tersebut diatas menurut masing-masing Daswati I dapat diikuti pada uraian dibawah ini :

a. Djakarta Raya

Pada akhir Maret 1970 posisi kredit jang disalurkan kedaerah khusus Djakarta adalah Rp. 88.680,46 djuta atau 53,4% dari seluruh posisi kredit pada waktu tersebut. Dengan demikian selama periode April 1969-Maret 1970 terdjadi kenaikan kredit didaerah ini sebesar Rp. 46.680,26 djuta (+ 111,1%). Kenaikan jang terbesar selama periode tersebut, terutama terdjadi disektor lain2 sebesar Rp. 26.694,32 djuta kemudian menjusul sektor produksi sebesar Rp. 16.578,52 djuta dan sisanya berupa kenaikan disektor ekspor. Kenaikan jang besar disektor lain2 terutama merupakan pembiayaan dalam rangka program pengadaan pangan. Sedangkan kenaikan jang terdjadi disektor produksi terutama berupa pembiayaan produksi bahan pangan, sandang, produksi barang ekspor dan perindustrian.

Dari posisi sedjumlah Rp. 88.680,46 djuta akhir Maret 1970, sebesar Rp. 50.382,86 djuta diarahkan kesektor produksi, kemudian Rp. 33.908,90 djuta kesektor lain-lain dan Rp. 4.388,70 djuta untuk sektor ekspor. Selandjutnja pada akhir Djuni 1971 posisi kredit jang disalurkan ke Djakarta Raya sedjumlah Rp. 91.001,94 djuta jang sebahagian besar djuga disalurkan kesektor produksi.

Perlu ...

PEREMBANGAN PELAYANAN KREDIT MENURUT DASAR 1 TIDAK TERMASUK KREDIT LANGSUNG B.

(d) *Just as I see*

DAFTAR I	Bahan Pangan	Barang Ekspor	Sandang	Perindustrian	Pertanian	Presena	OJIMAH I	OJIMAH II	Pengeluaran dan lain-lain	L			Lain2	OJIMAH III	OJIMAH I + II + III
										A	B	C			
April 1969															
Djakarta Raya	14.599,31	1.813,57	13.179,80	4.362,28	-	248,99	33.604,04	982,19	1.472,15	1.574,98	411,56	3.955,78	7.213,97	42.070,20	
Djatim	5.946,51	1.022,19	138,22	321,45	0,37	18,37	7.439,11	1.125,82	520,19	-	-	105,98	626,17	9.491,00	
Djateng	3.921,32	533,37	480,61	175,15	-	29,26	5.739,71	454,74	474,12	-	-	84,34	558,46	6.957,91	
Djabar	3.401,75	167,43	701,56	286,64	-	12,48	4.580,86	76,58	580,53	-	-	139,49	730,02	5.876,46	
Samarat	591,99	2.742,81	15,43	566,72	-	11,76	3.928,71	1.123,11	373,00	-	-	24,19	387,10	5.440,01	
Gesvati I	2.240,08	2.558,81	181,98	488,80	0,91	318,28	5.907,86	6.797,56	2.062,12	2,35	-	289,88	2.324,35	15.040,20	
Iainja	30.700,96	8.338,18	14.887,69	6.899,04	1,28	631,14	61.388,29	18.560,00	5.492,11	1.577,33	411,56	4.379,06	11.860,06	83.809,78	
Juni 1969															
Djakarta Raya	16.795,53	1.043,71	13.004,62	4.998,64	-	218,36	36.568,86	1.375,36	2.248,06	1.550,42	-	1.377,11	5.175,59	43.111,91	
Djatim	5.766,12	1.512,50	138,78	626,87	-	10,18	8.052,46	1.340,93	817,40	-	-	951,98	1.769,38	11.162,77	
Djateng	3.483,37	828,30	584,49	680,17	-	32,87	5.619,20	486,35	718,93	-	-	820,75	1.548,88	7.654,23	
Djabar	2.830,97	363,20	952,97	503,06	-	6,68	4.156,88	111,26	661,17	-	-	888,46	1.480,63	5.757,77	
Samarat	470,47	3.224,98	23,83	530,50	-	54,98	4.314,76	1.006,62	417,88	-	-	510,73	928,01	6.249,59	
Gesvati I	3.310,69	3.968,76	176,91	1.031,52	-	104,39	8.728,50	6.734,84	2.790,49	-	-	3.915,73	6.206,22	21.689,84	
Iainja	32.167,06	10.981,45	15.484,60	8.370,76	1,82	427,47	67.432,66	11.055,36	7.653,93	1.550,42	-	8.313,76	17.118,11	95.806,41	
Sept. 1969															
Djakarta Raya	21.497,78	457,90	7.635,35	7.344,89	-	1.458,77	38.394,89	3.380,48	5.784,44	6.874,93	-	7.980,99	20.620,26	62.375,43	
Djatim	7.534,46	1.194,27	242,46	1.281,98	1,91	10,71	18.065,79	1.752,04	1.216,89	-	-	571,08	1.800,77	13.617,30	
Djateng	8.863,77	722,98	642,93	616,06	-	35,85	5.981,37	632,41	1.011,29	-	-	167,92	1.181,60	7.795,46	
Djabar	2.808,19	279,76	1.488,49	543,50	-	175,50	5.285,44	215,31	1.188,08	1,88	-	124,18	974,15	6.824,97	
Samarat	779,96	3.261,73	393,60	630,34	-	55,65	5.101,28	1.183,28	583,85	-	-	81,93	884,85	6.889,91	
Gesvati I	4.043,15	5.033,08	302,80	1.452,79	3,21	304,47	11.180,04	8.212,52	3.969,32	16,43	22,99	645,05	1.651,38	24.020,45	
Iainja	40.227,31	10.949,70	10.705,63	11.870,10	5,12	2.040,75	75.998,61	15.275,12	13.753,87	6.887,15	67,24	9.561,76	40.780,02	121.533,75	

Sumber : Bank Indonesia,

PEREMBANGAN PEREMBAHAN KREDIT MENURUT DASAR : JUDAK TERASUK KREDIT-LANGSUNG BANK INDONESIA
(dalam jutaan rupiah)

Kategori	Bahan	Barang	Sediaan	P R O D U K S I		Ekspor	L A I N L A I N		Jumlah	0,001.00
				Persediaan	Pertanian		Perdagangan	Industri, B. & K. & S.		
	Pangan	Elaport	Elaport	Elaport	Elaport	Elaport	Elaport	Elaport	Elaport	Elaport

1970	23.769,38	563,25	13.202,32	8.177,48	-	332,60	46.135,53	3.573,14	3.529,38	3.820,00	1.612,29	19.640,72	28.712,08	78.410,76
1971	6.228,44	1.339,56	1.562,74	1.686,28	0,43	3,68	10.321,13	1.563,56	1.573,21	-	5,00	514,40	1895,51	14.198,10
1972	4.075,66	464,30	979,39	888,97	-	46,20	6.465,82	677,09	1.272,29	32,02	1,80	199,94	1.506,05	8.648,95
1973	3.056,11	231,36	2.094,60	696,11	-	10,21	6.088,89	180,62	1.301,37	5,48	-	181,08	1.487,91	7.757,42
1974	1.479,60	4.028,98	41,07	1.370,70	-	64,87	6.926,22	1.137,90	411,94	-	0,80	100,08	912,63	8.973,03
1975	4.765,41	5.584,35	219,77	1.919,06	-	475,09	12.970,42	12.419,57	4.844,33	5,30	-	1.219,20	6.068,83	31.458,82
1976	43.875,10	12.243,40	17.589,69	14.758,54	0,43	952,65	88.908,01	19.958,05	13.132,52	3.962,80	1.019,89	21.655,41	40.573,02	149.447,08

Sumber : Bank Indonesia

PERKEMBANGAN PEMBERIAN KREDIT MENURUT DASAR I I TIDAK TERMASUK KREDIT LANGSUNG 8.1.

(dalam jutaan rupiah)

DASAR I															P R O D U K S I															L A I N - L A I N														

Sumber : Bank Indonesia.

Perlu pula diketahui bahwa volume kredit yang disalurkan di daerah Djakarta, antara lain disebabkan pula banyaknya kredit yang sesungguhnya dipergunakan untuk Daswati I lainnya tapi pengambilannya dilakukan melalui Djakarta.

- b. Untuk Daswati I lainnya, kredit yang disalurkan ke daerah-daerah ini yang besarnya agak berarti ialah daerah Djatin, Djateng, Djabar dan Sumatera Utara. Umumnya kredit yang disalurkan ke daerah tersebut diatas terutama dalam rangka pembiayaan sektor produksi, dalam hal ini produksi bahan pangan, sandang, barang ekspor dan perindustrian.
- c. Untuk Daswati I selain yang disebut diatas umumnya dalam periode tersebut, memperlihatkan perkembangan dan pembagian yang agak merata.

4.3.5. Kebijakan suku bunga perkreditan bank

Selama tahun anggaran 1969/1970 telah terjadi lima kali penurunan suku bunga perkreditan bank. Penurunan yang pertama terjadi pada tanggal 1 Mei 1969 disamping itu diadakan perubahan pula dalam pembagian golongan barang yaitu dengan menambah golongan V yang terdiri dari perdagangan/distribusi diluar 9 bahan pokok dan jasa2 lainnya yang tidak disebut dalam golongan I, II, III dan IV.

Penurunan suku bunga yang terakhir dalam tahun anggaran ini terjadi pada tanggal 15 Januari 1970. Pada setiap penurunan suku bunga kredit diadakan pula penggeseran daripada penggolongan dari barang2, misalnya ada barang yang sebelumnya masuk golongan II, dengan keluarnya peraturan baru digeser menjadi golongan III dan seterusnya.

Dewasa ini suku bunga yang berlaku adalah suku bunga yang didasarkan kepada peraturan yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 1970, yaitu masing-masing sebesar 1% untuk golongan I, antara 2% dan 2½% untuk golongan II, antara 2½% - 2¾% untuk golongan III, 2¾% untuk golongan IV dan 2¾% - 4% untuk golongan V.

Alokasi kredit berdasarkan ketentuan ini adalah 65% untuk golongan I sampai dengan golongan IV, sedang sisanya 35% adalah untuk golongan V. Perlu juga diketahui bahwa peraturan ini khusus ditujukan kepada bank-bank pemerintah, namun demikian biasanya bank-bank swasta menyesuaikan suku bunga kreditnya dengan peraturan ini. Disamping itu dalam rangka pemberian kreditnya, bank-bank pemerintah dapat juga meminta kredit likuiditas dari bank sentral dimana bank-bank tersebut adalah terpisah dari bunga yang berlaku pada tiap golongan barang. Susunan suku bunga kredit bank-bank pemerintah sedjak 1 Juni 1970 dapat digambarkan sebagai berikut :

Golongan I, 1% perbulan untuk keperluan-keperluan :

- Impor pupuk, impor PL 480 (untuk pangan hanya ½% perbulan), kredit dengan jaminan anggaran;
- Kredit untuk pemerintah daerah dengan jaminan ADO;
- Produksi gula (PNP);

Golongan II, 2% - 2½% perbulan untuk keperluan-keperluan :

- Produksi 9 bahan pokok;
- Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
- Produksi pertekstilan;
- Produksi barang-barang ekspor;

Golongan III ...

Golongan III, $2\frac{1}{4}\%$ - $2\frac{1}{2}\%$ perbulan untuk keperluan-keperluan :

- Pengumpulan barang2 ekspor;
- Pengangkutan umum, produksi obat2an dan ekspor;
- Produksi kertas, kerajinan, pertambangan dan bahan2 bangunan;
- Industri pariwisata;

Golongan IV, $2\frac{1}{2}\%$ perbulan untuk keperluan-keperluan :

produksi dan industri lainnya yang tidak termasuk dalam golongan I, II dan III.

Golongan V, $2\frac{1}{2}\%$ - 1% perbulan untuk keperluan-keperluan :

- Untuk perdagangan/distribusi diluar 9 bahan pokok dan jasa2 lainnya yang tidak termasuk dalam golongan I, II, III dan IV.

4.4. Perkembangan kredit investasi

Sampai dengan akhir Djuni 1970, program kredit investasi sudah memasuki bulan yang kelima belas. Program ini dimulai sedjak tanggal 1 April 1969, dimana bank-bank pemerintah termasuk Bank Pembangunan Indonesia dapat mempertimbangkan kredit investasi jangka menengah/panjang bagi perusahaan2, guna keperluan rehabilitasi/modernisasi dan ekspansi maupun untuk pembangunan proyek-proyek baru yang tjepat menghasilkan. Perkembangan kredit investasi dapat diikuti pada Tabel IV.9.

Selama tahun anggaran 1969/1970 kredit investasi sudah mentjapai batas penjadiaan sedjumlah Rp.31,6 milyar diakhir Maret 1970.

Dari ...

PERKEMBANGAN KREDIT INVESTASI
(dalam miliar rupiah)

Achir Periode	KINERJADIAN (PLANED)				REALISASI				TOTAL	
	Pertanian	Industri	Pertam- bangan & Perminyaka	Pertumbuhan Lain2	Pertanian	Industri	Pertam- bangan & Perminyaka	Pertumbuhan Lain2		
1969 April	1,9	0,4	-	2,3	0,1	1,2	0,2	1,5	4,8	2,8
M e i	2,2	0,5	-	2,3	0,1	2,0	0,2	1,3	5,1	3,5
Juni	2,5	0,5	-	2,3	0,1	2,0	0,2	1,4	5,4	3,6
Juli	2,7	1,8	0,7	2,4	0,1	2,0	0,4	1,3	7,6	3,8
Agustus	3,4	3,0	0,7	2,4	0,1	2,1	0,4	1,4	9,6	4,2
September	4,2	3,6	0,7	6,6	0,1	2,2	0,5	1,5	11,3	4,6
Oktober	4,6	3,8	0,7	4,3	0,2	2,5	1,2	2,1	13,6	6,2
November	5,8	8,3	0,7	6,7	0,3	3,1	2,0	2,4	21,7	8,0
Desember	6,6	8,5	1,5	10,4	0,6	5,6	2,5	2,7	27,2	9,2
1970 Januari	6,7	9,0	0,9	10,6	0,2	4,2	3,1	3,4	27,3	11,3
Februari	7,6	9,4	0,9	10,9	0,2	5,0	3,9	3,7	28,9	13,1
Maret	8,1	10,8	0,9	11,4	0,4	5,6	4,9	5,4	31,6	16,6
April	8,5	12,1	0,9	12,8	0,4	6,4	6,3	6,5	34,8	20,3
M e i	9,3	14,0	0,9	13,1	0,4	6,9	7,2	7,1	37,7	22,0
Juni	11,0	14,6	0,9	14,5	0,7	7,8	7,8	8,5	41,8	24,3
Juli	13,4	15,2	0,2	15,1	0,8	8,9	8,6	10,2	43,7	26,0
Agustus	12,2	17,0	0,2	16,0	0,3	7,3	9,7	10,6	46,2	28,3
September	12,5	18,9	0,3	17,7	0,8	10,7	10,7	10,9	50,2	33,1

Sumber : Bank Indonesia.

Dari jumlah ini sebesar Rp.16,6 miliar sudah direalisasi berarti Rp.3,6 miliar diatas target yang telah ditentukan oleh REPELITA. Penjadian sedjumlah Rp.31,6 miliar diakhir Maret 1970 sebahagian besar terarahkan kesektor-sektor perhubungan dan pariwisata, industri dan pertanian masing-masing Rp.13,4 miliar, Rp.10,8 miliar dan Rp.8,1 miliar. Demikian pula pada hal realisasinya dari jumlah Rp.16,6 miliar, sebahagian besar terjadi disektor-sektor perhubungan dan pariwisata, industri, dan pertanian masing2 sedjumlah Rp.5,4 miliar, Rp.4,9 miliar dan Rp.5,6 miliar. Hal ini membuktikan bahwa dalam program kredit investasi selama tahun 1969/1970 Pemerintah lebih memperhatikan sektor2 prasarana, industri dan pertanian dimana ketiga sektor ini adalah pendukung utama dari perekonomian Indonesia.

Pola yang sama kelihatannya terjadi pada tahun 1970/1971, dimana sampai dengan bulan September 1970 batas penjadian kredit investasi mentjapai jumlah Rp.50,2 miliar, sedangkan realisasinya adalah Rp.23,1 miliar. Baik dalam batas penjadian maupun pada realisasi sektor-sektor yang memegang peranan adalah ketiga sektor perhubungan dan pariwisata, industri dan pertanian, seperti halnya dalam tahun 1969/1970.

h.5. Perkiraan jumlah uang yang beredar dan perkreditan 1971/1972

Perkiraan jumlah uang yang beredar dan perkreditan bank seluruhnya untuk tahun anggaran 1971/1972 dibuat berdasarkan anggapan-anggapan sebagai berikut :

1. Berdasarkan ...

1. Berdasarkan kepada perkembangan dari data-data jumlah uang yang beredar dan perkreditan bank sebelumnya.
2. Untuk tahun 1971/1972 diperkirakan tingkat kenaikan harga adalah lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kenaikan harga yang terjadi pada tahun 1970/1971.
3. Pada akhir Maret 1971 posisi uang yang beredar diperkirakan mentjapai jumlah Rp.259,0 miliar, sedangkan posisi perkreditan bank seluruhnya pada masa itu diperkirakan mentjapai jumlah Rp.363,3 miliar.

Selama tahun anggaran 1970/1971 jumlah uang yang beredar diperkirakan bertambah dengan Rp.48,0 miliar atau + 22,7%, ini berarti posisi uang yang beredar pada akhir Maret 1971 menjadi Rp.259,0 miliar. Dengan begitu berdasarkan prognosa ini, diperkirakan posisi tersebut pada akhir Maret 1972 menjadi Rp.334,0 miliar. Dengan perkataan lain selama tahun anggaran 1971/1972 jumlah uang yang beredar diperkirakan meningkat dengan Rp. 75,0 miliar.

Dilain pihak posisi perkreditan bank seluruhnya pada akhir Maret 1971 diperkirakan mentjapai jumlah Rp.363,3 miliar, berarti selama tahun anggaran 1970/1971 volume perkreditan bank seluruhnya diperkirakan naik dengan Rp.101,3 miliar. Posisi ini pada akhir Maret 1972 diperkirakan menjadi Rp.468,0 miliar. Dengan demikian berdasarkan prognosa ini volume perkreditan bank seluruhnya selama tahun anggaran 1971/1972 diperkirakan bertambah dengan Rp. 104,7 miliar.

Prognosa seluruhnya dapat diikuti pada Tabel IV.10.

Tabel IV.10. ...

T a b e l IV.10.

PROGNOSA JUMLAH UANG YANG BEREDAR DAN
PERKREDITAN BANK SELURUHNYA
 (dalam miliar rupiah)

<u>Achir Masa</u>	<u>Jumlah uang yang beredar</u>	<u>Perkreditan bank seluruhnya</u>
1969 M a r e t	130,9	136,8
D j u n i	146,4	159,7
S e p t e m b e r	169,5	209,6
D e s e m b e r	179,9	245,4
1970 M a r e t	211,0	262,0
D j u n i	215,0	292,7
S e p t e m b e r	226,7	342,6
1971 M a r e t	259,0	363,3
1972 M a r e t	334,0	468,0

Sumber : Departemen Keuangan.

PERKEMBANGAN NERATJA PEMBAJARAN
DAN LAIN LINTAS DEvisa

5.1. Pendahuluan

Sebagai pelaksanaan dari peraturan pemerintah no. 16 tahun 1970 tentang penjemputan pelaksanaan impor, ekspor dan lalu lintas devisa, maka telah diambil beberapa kebijaksanaan didalam bidang ekspor dan impor.

Kebijaksanaan ekspor

Usaha kesarah peningkatan kegiatan ekspor adalah penting sekali djustru dalam tahun perekonomian kita sekarang ini, dimana tudjuan2 dari pada usaha ini adalah agar dapat :

1. Ditingkatkannya pendapatan devisa, dengan djalan meningkatkan atau setidaknya mempertahankan ekspor barang2 tradisionil, seperti karet, kopra, kopi, lada dsb. dan maksimal menggali sumber-sumber baru seperti barang2 kerajinan rakjat, perikanan dan sebagainya.
2. Mendjalin kontinuitas produksi serta peningkatan mutu dan kepastian pendapatan jang lajak bagi para petani produsen.
3. Mendjamin kepastian berusaha bagi para pedagang, importir, eksportir dan sebagainya, serta kelantjaran perdagangan.

Untuk mentjapai tudjuan2 tersebut, maka pelaksanaannya antara lain dituangkan dalam bentuk2 pengaturan tata niaga dalam bidang perdagangan ekspor dan impor.

Tudjuan dari pengaturan tata niaga tersebut adalah antara lain dapat dikerukakan :

1. Mendjamin ...

1. Mendjamin pendapatan devisa bagi Pemerintah dan pendapatan bagi produsen dimana Pemerintah dapat menetapkan jumlah devisa hasil ekspor yang minimum dapat diterima Pemerintah dan harga minimum bagi petani produsen.
2. Didalam rangka meningkatkan ekspor kopra, telah dibentuk Badan Pengurusan Kopra. Untuk mendjamin pendapatan petani produsen, maka telah ditetapkan harga minimum. Disamping itu untuk melanjutkan ekspor kopra maka diusahakan pengapalan dan pendjualan diluar negeri dengan membentuk agen diluar negeri dan menetapkan syarat pendjualan berdasarkan CIF.
3. Didalam menanggulangi masalah surplus kopi, diusahakan peningkatan ekspor kenegara non quota.
4. Dibidang ekspor lada, telah dibentuk Badan Pemasaran Lada Indonesia. Untuk meningkatkan ekspornja, telah diadakan perdjandjian antara Pemerintah (cc. Departemen Perdagangan) dengan beberapa pedagang besar yang menguasai sampai 60% dari pasaran lada Indonesia.
5. Kebidjaksanaan dalam usaha meningkatkan ekspor karet dilakukan dengan djalan pemakaian tehnologi baru, jaitu crumb-rubber. Dalam hal ini telah disediakan devisa dan fasilitas2 kredit untuk pendirian crumb-rubber ini dan diadakan pelarangan ekspor karet dengan mutu rendah.
6. Peningkatan penerimaan devisa ekspor djuga diusahakan melalui penggalian sumber2 baru atau hasil ekspor non-tradisionil. Pada dewasa ini sedang diadakan penjelidikan dan persiapan untuk memperbesar kegiatan industri ekspor

Kebidjaksanaan impor

Kebidjaksanaan impor didalam proses pembangunan ekonomi merupakan salah satu faktor utama untuk mensikkan produksi.

Dalam ...

Dalam tahap perkembangan ekonomi yang defensip, impor terutama digunakan sebagai alat untuk mencapai stabilitas, sebagai prasyarat untuk meningkatkan produksi.

Pada tahap ofensif, yaitu keadaan dimana kita sekarang berada, kebijaksanaan impor lebih ditekankan untuk meniadakan produksi agar dapat semakin memantapkan stabilitas yang sudah tercapai. Maka komposisi impor harus mempertimbangkan keseimbangan antara barang konsumsi yang diperlukan untuk mempertahankan stabilitas, dan barang2 modal, bahan baku dan spare-parts untuk mendukung produksi.

Untuk menjamin terlaksananya kebijaksanaan tersebut didalam tahap perekonomian sekarang ini diperlukan alat2 yang konvensional seperti kebijaksanaan perpajakan, kebijaksanaan moneter, dan penggolongan impor kedalam golongan A, B, C dan D yang senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan tahap2 pembangunan.

Pengaturan impor untuk mendorong produksi didalam negeri pada prinsipnya adalah usaha untuk mendorong para produsen agar mengembangkan produksinya.

Dimasa yang lalu proteksi sifatnya sangat statis, dalam arti bahwa proteksi didasarkan kepada perhitungan ongkos produksi, dimana ongkos sosialpun diperhitungkan atas perhitungan keuntungan. Dalam hal ini produsen dalam negeri sering-sering mendesak kepala pemerintah untuk melarang impor terhadap barang2 yang sedang dibuat didalam negeri. Tapi sebenarnya perlindungan semacam ini sering tidak mengenai sasaran, karena hanya menambah jumlah perusahaan2 yang tidak efisien. Proteksi yang demikian akan mengakibatkan bahwa konsumen terpaksa membayar hasil produksi dengan harga yang jauh lebih tinggi. Keseimbangan antara kepentingan konsumen yang menginginkan harga yang rendah dan kepentingan produsen yang menginginkan proteksi harus dapat

ditjaga ...

didjaga keselarasannya.

Masalah pokok dalam kebidjaksanaan impor sebagai pendorong produksi dan kesempatan kerdja adalah mengalihkan impor dari barang2 djadi keimpor barang setengah djadi dan atau bahan baku untuk mengembangkan perusahaan2 assembling, parts manufacturing dan seterusnya full-manufacturing.

5.2. Perkembangan neratja pembayaran

Transaksi berdjalan dalam tahun anggaran 1970/1971 diperkirakan akan mengalami defisit sebesar US \$ 477 djuta. Bila dibandingkan dengan tahun anggaran 1969/1970 dimana transaksi berdjalan pada periode tersebut mengalami defisit sebesar US \$ 449 djuta, maka tahun anggaran 1970/1971 ini defisit transaksi berdjalan diperkirakan US \$ 28 djuta atau 6,2% diatas defisit tahun 1969/1970. Defisit jang lebih besar ini terutama disebabkan karena meningkatnja impor tanpa minjak pada tahun anggaran 1970/1971 ini.

Defisit transaksi berdjalan pada tahun anggaran 1970/1971 ini ditutup dengan pemasukan modal netto jang diperkirakan akan mentjapai jumlah US \$ 529 djuta. Dengan memperhatikan pos selisih jang tak dapat diperhitungkan pada tahun 1970/1971 dan tahun 1969/1970 jang masing2 besarnya US \$ 37 djuta dan US \$ 39 djuta, maka neratja pembayaran tahun 1970/1971 diperkirakan akan surplus sebesar US \$ 15 djuta. Sedang dalam tahun 1969/1970 pemasukan modal netto sebesar US \$ 367 djuta (termasuk SDK), sehingga dalam tahun ini neratja pembayaran mengalami defisit sebesar US \$ 43 djuta.

A. Transaksi berdjalan

Ekspor

Ekspor tanpa minjak dalam tahun anggaran 1970/1971 dan 1969/1970

masing2 ...

masing2 menundukkan US \$ 720 djuta dan US \$ 659 djuta. Hal ini berarti bahwa dalam tahun anggaran 1970/1971 ini ekspor tanpa minyak menundukkan kenaikan sebesar US \$ 61 djuta, atau 9,3%. Kenaikan ini pada umumnya disebabkan karena makin meningkatnja ekspor dari beberapa barang golongan A dan B.

Ekspor minyak dalam tahun anggaran 1970/1971 dan 1969/1970 masing-masing menundukkan US \$ 440 djuta dan US \$ 380 djuta. Dengan demikian ekspor minyak dalam tahun anggaran 1970/1971 ini mengalami kenaikan sebesar US \$ 60 djuta atau 15,8%.

Djumlah ekspor (termasuk minyak) dalam tahun anggaran 1970/1971 dan 1969/1970 masing2 berdjumlah US \$ 1.160 djuta dan US \$ 1.039 djuta. Dengan demikian, nilai ekspor dalam tahun anggaran 1970/1971 ini menundukkan US \$ 121 djuta atau 11,6% lebih besar bila dibandingkan dengan tahun 1969/1970.

Import

Import tanpa minyak dalam tahun anggaran 1970/1971 dan 1969/1970, masing-masing menundukkan djumlah US \$ 1.064 djuta dan US \$ 980 djuta.

Dengan demikian dalam tahun anggaran 1970/1971 ini impor tanpa minyak diperkirakan menundukkan kenaikan sebesar US \$ 104 djuta atau 10,6%. Kenaikan ini terutama disebabkan karena semakin meningkatnja project aid import, impor tepung terigu, kapas kasar dan benang tawar, impor modal swasta, impor pemerintah, impor barang modal dan lain2 impor.

Impor minyak dalam tahun anggaran 1970/1971 dan tahun 1969/1970 masing2 berdjumlah US \$ 100 djuta dan US \$ 91 djuta, berarti bahwa impor minyak pada tahun anggaran 1970/1971 ini menundukkan US \$ 9 djuta atau 9,8% lebih besar dari pada tahun 1969/1970.

Import ...

Impor keseluruhan (minjak dan tanpa minjak) dalam tahun anggaran 1970/1971 dan 1969/1970 masing2 berdjumlah US \$ 1.184 djuta dan US \$ 1.071 djuta, sehingga dengan demikian dalam tahun anggaran 1970/1971 ini, impor menunjukkan kenaikan sebesar US \$ 113 djuta atau 10,5% diatas impor 1969/1970.

Neratja perdagangan didalam tahun anggaran 1970/1971 dan 1969/1970 masing2 menunjukkan defisit sebesar US \$ 24 djuta dan defisit US \$ 32 djuta. Dengan demikian maka defisit neratja perdagangan pada tahun anggaran 1970/1971 ini menunjukkan US \$ 8 djuta atau 25% diatas defisit neratja perdagangan tahun anggaran 1969/1970.

Djasa-2

Pengeluaran djasa2 netto (minjak dan tanpa minjak) pada tahun anggaran 1970/1971 dan 1969/1970 masing2 menunjukkan US \$ 453 djuta dan US \$ 417 djuta. Dengan demikian pengeluaran djasa2 pada tahun anggaran 1970/1971 ini diperkirakan menunjukkan US \$ 36 djuta atau 8,6% diatas pengeluaran djasa2 tahun 1969/1970. Kenaikan pengeluaran djasa2 ini sesuai dengan meningkatnja impor pada tahun anggaran 1970/1971.

Transaksi berdjalan dalam tahun anggaran 1970/1971 dan 1969/1970 masing2 menunjukkan defisit sebesar US \$ 477 djuta dan US \$ 449 djuta, yang berarti bahwa defisit transaksi berdjalan dalam tahun anggaran 1970/1971 ini US \$ 28 djuta atau 6,2% lebih besar dibandingkan dengan defisit tahun 1969/1970.

B. Alu lintas modal dan transfer

Pemasukan modal dalam tahun anggaran 1970/1971 dan 1969/1970 masing2 sebesar US \$ 610 djuta dan US \$ 411 djuta, yang masing2 terdiri dari pemasukan modal sektor swasta dan sektor pemerintah.

Pemasukan ...

Pemasukan modal sektor swasta dan pemerintah dalam tahun anggaran 1970/1971 dan 1969/1970 masing-masing sebesar US \$ 116 djuta, US \$ 494 djuta dan US \$ 17 djuta, US \$ 359 djuta.

Djumlah pemasukan modal sektor swasta dan pemerintah dalam tahun anggaran 1970/1971 dan 1969/1970 tersebut masih harus dikurangi dengan pembayaran hutang2, dimana untuk tahun anggaran 1970/1971 dan 1969/1970 tersebut masing2 sebesar US \$ 81 djuta dan US \$ 44 djuta, sehingga didapat djumlah pemasukan modal netto jaita masing2 US \$ 529 djuta dan US \$ 367 djuta.

Pemasukan modal netto ini digunakan untuk menutupi defisit pada transaksi berdjalan, dimana untuk tahun 1969/1970 sebesar US \$ 449 djuta, sedangkan untuk tahun 1970/1971 sebesar US \$ 477 djuta. Dengan demikian dalam tahun 1969/1970 terdjadi defisit pada neratja pembayaran sebesar US \$ 43 djuta, sedang dalam tahun 1970/1971 terdjadi surplus sebesar US \$ 15 djuta.

5.3. Realisasi perkembangan ekspor

Perkembangan ekspor barang2 golongan A dan golongan B dalam tahun 1970/1971 dapat didjelaskan dengan membandingkan perkembangan ekspor barang2 tersebut diatas dalam tahun 1970/1971 dengan golongan barang2 jang sama dalam tahun 1969/1970 (lihat Tabel V.2.).

Realisasi ekspor barang2 golongan A dalam tahun 1970/1971 dan tahun 1969/1970 masing2 sampai dengan bulan Agustus tahun anggaran jang bersangkutan berdjumlah US \$ 181,3 djuta dan US \$ 160,1 djuta. Dengan demikian maka ekspor barang2 golongan A dalam tahun 1970/1971 sampai

dengan ...

T a b e l V.1.

PERKEMBANGAN NERATJA PEMBAJARAN

(dalam djutaan US \$)

	1969/1970 (realisasi)	1970/1971 (perkiraan)
I. E k s p o r, fob.	<u>1039</u>	<u>1160</u>
Minjak	380	440
Tanpa minjak	659	720
I m p o r, fob.	- <u>1071</u>	- <u>1184</u>
Minjak	- 91	- 100
Tanpa minjak	- 980	- 1084
Neratja perdagangan	- <u>32</u>	- <u>24</u>
Djasa-djasa	- <u>417</u>	- <u>453</u>
Minjak	- 202	- 218
Tanpa minjak	- 215	- 235
Transaksi berdjalan	- <u>442</u>	- <u>477</u>
II. Lalu lintas modal & transfer		
Swasta	17	116
Pemerintah	359	494
S D R	35	PM
Pembayaran kembali hutang	- <u>44</u>	- <u>81</u>
Pemasukan modal netto	+ 367	+ 529
D J U M L A H :	- <u>82</u>	+ <u>52</u>
III. Lalu lintas moneter	+ 43	- 15
IMF. position	-	-
Kewadajiban djangka pendek		
Tjadangan devisa	-	-
IV. Kesalahan jang tak diper- hitungkan	+ 39	- 37

Sumber : Bank Indonesia.

dengan periode tersebut mengalami kenaikan sebesar US \$ 13,2 djuta atau 7,8%. Kenaikan ekspor barang2 golongan A ini terjadi dalam masa triwulan I - 1970/1971, dimana menjapai jumlah US \$111,0 djuta. Bila dibandingkan dengan triwulan yang sama dalam tahun 1969/1970 dimana besarnya adalah US \$ 97,9 djuta, maka dalam triwulan I - 1970/1971 menunjukkan kenaikan sejumlah US \$ 16,1 djuta atau 16,4%. Kenaikan ekspor ini disebabkan karena harga beberapa barang ekspor golongan A dipasar internasional dalam periode tersebut meningkat.

Dalam pada itu realisasi ekspor barang2 golongan A dalam bulan Juli - Agustus 1970/1971 dan periode yang sama tahun 1969/1970 masing2 berjumlah US \$ 66,3 djuta dan US \$ 70,2 djuta. Ini berarti bahwa ekspor barang2 golongan A dalam bulan Juli - Agustus 1970/1971 mengalami penurunan sebesar US \$ 3,9 djuta atau 5,6%. Turunnja ekspor ini disebabkan karena turunja ekspor karet dalam periode tersebut sebagai akibat dilepaskannya stock pile karet oleh Amerika Serikat sehingga harga karet menurun. Walaupun demikian penurunan nilai ekspor karet ini diimbangi dengan kenaikan ekspor beberapa barang golongan A lainnya, sehingga setjara keseluruhan terdapat kenaikan ekspor golongan A sebesar 7,8%.

Realisasi ekspor barang2 golongan B dalam tahun 1970/1971 dan tahun 1969/1970 masing2 sampai dengan bulan Agustus tahun anggaran yang bersangkutan berjumlah US \$ 69,4 djuta dan US \$ 29,2 djuta. Dengan demikian maka ekspor barang2 golongan B dalam tahun 1970/1971 sampai dengan periode tersebut mengalami kenaikan sebesar US \$ 40,2 djuta atau 137,7%. Kenaikan ekspor barang2 golongan B ini terjadi dalam masa lima bulan pertama tahun 1970/1971. Kenaikan ekspor ini terutama disebabkan karena meningkatnja produksi kaju dan meningkatnja harga beberapa barang2 golongan B diluar kaju

dipasaran ...

dipasarkan internasional.

Realisasi ekspor barang2 golongan A

1. K a r e t

Realisasi ekspor karet dalam tahun 1970/1971 dan tahun 1969/1970 masing2 sampai dengan bulan Agustus tahun anggaran yang bersangkutan, berjumlah US \$ 101,0 djuta dan US \$ 97,8 djuta. Dengan demikian maka realisasi ekspor karet dalam tahun 1970/1971 sampai dengan periode tersebut mengalami kenaikan sebesar US \$ 3,2 djuta atau 3,3%. Kenaikan ekspor karet ini terjadi dalam masa triwulan I - 1970/1971, dimana mentjapai jumlah US \$ 66,5 djuta. Bila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 1969/1970 dimana jumlahnya adalah US \$ 55,1 djuta, maka dalam triwulan I - 1970/1971 mengalami kenaikan sebesar US \$ 11,4 djuta atau 20,7%.

Dalam pada itu realisasi ekspor karet dalam bulan Djuli - Agustus 1970/1971 dan periode yang sama tahun 1969/1970 masing2 berjumlah US \$ 34,5 djuta dan US \$ 42,7 djuta. Ini berarti bahwa ekspor karet dalam bulan Djuli - Agustus 1970/1971 mengalami penurunan sebesar US \$ 8,2 djuta atau 19,2%. Turunnja ekspor karet ini disebabkan karena harga karet dalam periode tersebut turun, sebagai akibat dilepaskannya stock pile karet oleh Amerika Serikat.

2. K o p r a

Realisasi ekspor kopra dalam tahun 1970/1971 dan tahun 1969/1970 masing2 sampai dengan bulan Agustus tahun anggaran yang bersangkutan, berjumlah US \$ 11,4 djuta dan US \$ 5,6 djuta.

Dengan ...

Dengan demikian maka realisasi ekspor kopra dalam tahun 1970/1971 sampai dengan periode tersebut mengalami kenaikan sebesar US \$ 5,8 djuta atau 96,8%. Kenaikan ekspor kopra ini terjadi dalam masa lima bulan pertama tahun 1970/1971, dimana dalam triwulan I-1970/1971 dan bulan Djuli - Agustus 1970/1971 masing2 sebesar US \$ 6,5 djuta dan US \$ 4,9 djuta. Bila dibandingkan dengan tahun 1969/1970 masing2 dalam periode yang sama, dimana dalam triwulan I - 1969/1970 dan bulan Djuli - Agustus 1969/1970 berdjumlah US \$ 4,5 djuta dan US \$ 1,1 djuta, maka dalam triwulan I-1970/1971 dan bulan Djuli - Agustus 1970/1971 menunjukkan kenaikan masing2 sebesar US \$ 2,0 djuta atau 44,4% dan US \$ 3,8 djuta atau 345,4%. Kenaikan ini disebabkan karena kenaikan harga kopra dipasar internasional. Dalam pada itu, Pemerintah dalam rangka meningkatkan devisa dari kopra ini telah membentuk Badan Pengurusan Kopra, yang tujuannya disamping untuk melantjarkan ekspor kopra, juga untuk menjamin pendapatan petani produsen, dimana untuk ini telah ditetapkan harga minimum.

3. K o p i

Realisasi ekspor kopi dalam tahun 1970/1971 dan tahun 1969/1970 masing-masing sampai dengan bulan Agustus tahun anggaran yang bersangkutan, berdjumlah US \$ 22,8 djuta dan US \$ 17,7 djuta. Dengan demikian maka realisasi ekspor kopi dalam tahun 1970/1971 sampai dengan periode tersebut mengalami kenaikan sebesar US \$ 5,1 djuta atau 28,8%. Kenaikan ekspor kopi ini terjadi dalam masa lima bulan pertama tahun 1970/1971 dimana dalam triwulan I - 1970/1971 dan bulan Djuli - Agustus 1970/1971 masing-masing sebesar US \$ 13,7 djuta dan US \$ 9,1 djuta. Bila dibandingkan dengan

tahun...

tahun 1969/1970 masing2 untuk periode yang sama, dimana dalam triwulan I-1969/1970 dan bulan Djuli - Agustus 1969/1970 yang berdjumlah US \$ 8,9 djuta dan US \$ 8,8 djuta, maka dalam triwulan I - 1970/1971 dan bulan Djuli - Agustus 1970/1971 masing2 menunjukkan kenaikan sebesar US \$ 1,8 djuta atau 53,9% dan US \$ 0,3 djuta atau 3,4%. Kenaikan ini disebabkan antara lain karena harga kopi dipasar internasional naik.

4. Tembakau

Realisasi ekspor tembakau dalam tahun 1970/1971 dan tahun 1969/1970 masing2 sampai dengan bulan Agustus tahun anggaran yang bersangkutan berdjumlah US \$ 5,3 djuta dan US \$ 10,1 djuta. Ini berarti bahwa realisasi ekspor tembakau dalam tahun 1970/1971 sampai dengan bulan Agustus mengalami penurunan sebesar US \$ 4,8 djuta atau 47,6%. Turunnya ekspor tembakau ini terjadi dalam masa lima bulan pertama tahun 1970/1971, dimana dalam triwulan I - 1970/1971 dan bulan Djuli - Agustus 1970/1971 masing2 sebesar US \$ 3,4 djuta dan US \$ 1,9 djuta. Bila dibandingkan dengan tahun 1969/1970 untuk periode yang sama, dimana dalam triwulan I - 1969/1970 dan bulan Djuli - Agustus 1969/1970 berdjumlah US \$ 6,8 djuta dan US \$ 3,3 djuta, maka dalam triwulan I-1970/1971 dan bulan Djuli - Agustus 1970/1971 masing2 mengalami penurunan sebesar US \$ 3,4 djuta atau 50,0% dan US \$ 1,4 djuta atau 57,5%. Turunnya ekspor tembakau ini disebabkan karena pemasaran tembakau dalam periode tersebut mengalami kesulitan.

5. Minyak sawit

Realisasi ekspor minyak sawit dalam tahun 1970/1971 dan tahun 1969/-1970 masing2 sampai dengan bulan Agustus tahun yang bersangkutan

berdjumlah ...

berjumlah US \$ 11,0 djuta dan US \$ 9,0 djuta. Dengan demikian maka realisasi ekspor minyak sawit sampai dengan bulan Agustus 1970/1971 dimana mentjapai jumlah US \$ 6,9 djuta. Bila dibandingkan dengan triwulan I - 1969/1970 yang berjumlah US \$ 4,9 djuta maka dalam triwulan I - 1970/1971 mengalami kenaikan sebesar US \$ 2,0 djuta atau 40,8%. Kenaikan ekspor ini disebabkan karena harga minyak sawit dipasar internasional meningkat.

Dalam pada itu realisasi ekspor minyak sawit dalam bulan Djuli - Agustus 1970/1971 dan periode yang sama tahun 1969/1970 menunjukkan jumlah yang sama.

6. Bidji sawit

Realisasi ekspor bidji sawit dalam tahun 1970/1971 dan tahun 1969/1970 masing2 sampai dengan bulan Agustus tahun anggaran yang bersangkutan berjumlah US \$ 1,1 djuta dan US \$ 1,6 djuta. Ini berarti bahwa realisasi ekspor bidji sawit sampai dengan bulan Agustus tahun 1970/1971 mengalami penurunan sebesar US \$ 0,5 djuta atau 31,3%. Turunnja ekspor bidji sawit ini terjdjadi dalam masa lima bulan pertama tahun 1970/1971, dimana dalam triwulan I - 1970/1971 dan bulan Djuli - Agustus 1970/1971 masing2 berjumlah US \$ 0,7 djuta dan US \$ 0,4 djuta. Bila dibandingkan dengan triwulan I - 1969/1970 dan bulan Djuli - Agustus 1969/1970 dimana masing2 berjumlah US \$ 0,8 djuta dan US \$ 0,8 djuta, maka dalam triwulan I - 1970/1971 dan bulan Djuli - Agustus 1970/1971 maka ekspor bidji sawit mengalami penurunan masing2 sebesar US \$ 0,1 djuta atau 12,5% dan US \$ 0,4 djuta atau 50,0%. Turunnja ekspor bidji sawit dalam periode tersebut disebabkan karena harga bidji sawit dipasar internasional turun.

7. Lada

Nilai ekspor lada dalam triwulan I - 1970/1971 dan triwulan I - 1969/1970 masing2 berdjumlah US \$ 1,2 djuta dan US \$ 2,5 djuta, yang berarti bahwa dalam triwulan I - 1970/1971 ekspor lada mengalami penurunan sebesar US \$ 1,4 djuta atau 46,1%. Turunnja ekspor lada ini karena produksi lada mengalami penurunan sebagai akibat dari terdjangkitnja hama lada yang kronis sedjak tahun 1968.

Ekspor lada dalam bulan Djuli - Agustus 1969/1970 berdjumlah US \$ 1,4 djuta, sedang untuk bulan Djuli - Agustus 1970/1971 data ekspor barang tersebut belum tersedia.

8. Timah

Realisasi ekspor timah dalam tahun 1970/1971 dan tahun 1969/1970 masing2 sampai dengan bulan Agustus tahun anggaran yang bersangkutan berdjumlah US \$ 27,7 djuta dan US \$ 21,3 djuta. Dengan demikian maka realisasi ekspor timah sampai dengan bulan Agustus 1970/1971 mengalami kenaikan sebesar US \$ 5,9 djuta atau 27,0%. Kenaikan ekspor timah ini terdjadi dalam masa lima bulan pertama tahun 1970/1971, dimana dalam triwulan I - 1970/1971 dan bulan Djuli - Agustus 1970/1971 masing2 berdjumlah US \$ 16,3 djuta dan US \$ 11,4 djuta. Bila dibandingkan dengan tahun 1969/1970 masing2 untuk periode yang sama, dimana dalam triwulan I - 1969/1970 dan bulan Djuli - Agustus 1969/1970 ekspor timah ini berdjumlah US \$ 14,3 djuta dan US \$ 8,0 djuta, maka dalam triwulan I - 1970/1971 dan bulan Djuli - Agustus 1970/1971 mengalami kenaikan masing2 sebesar US \$ 2,0 djuta atau 13,9% dan US \$ 3,4 djuta atau 42,5%.

Malaka ...

Naiknya ekspor timah ini disebabkan karena harga timah dipasar internasional meningkat.

Ekspor barang2 golongan B

1. K a j u

Realisasi ekspor kayu dalam tahun 1970/1971 dan tahun 1969/1970 masing2 sampai dengan bulan Agustus tahun anggaran yang bersangkutan berdjumlah US \$ 34,7 djuta dan US \$ 11,0 djuta. Ini berarti bahwa realisasi ekspor kayu sampai dengan bulan Agustus 1970/1971 mengalami kenaikan sebesar US \$ 23,7 djuta atau 215,4%. Kenaikan ekspor kayu ini terjadi dalam masa lima bulan pertama tahun 1970/1971, dimana dalam triwulan I - 1970/1971 dan bulan Djuli - Agustus 1970/1971 masing2 berdjumlah US \$ 19,5 djuta dan US \$ 15,2 djuta.

Bila dibandingkan dengan tahun 1969/1970 masing2 untuk periode yang sama, dimana dalam triwulan I - 1969/1970 dan bulan Djuli - Agustus 1969/1970 berdjumlah US \$ 6,4 djuta dan US \$ 4,6 djuta, maka dalam triwulan I - 1970/1971 dan bulan Djuli - Agustus 1970/1971 mengalami kenaikan masing2 sebesar US \$ 13,1 djuta atau 204,6% dan US \$ 10,6 djuta atau 230,4%. Kenaikan ekspor kayu ini disebabkan karena produksi kayu meningkat dengan sangat pesat.

2. Ekspor barang2 golongan B diluar kayu

Realisasi ekspor barang2 golongan B diluar kayu dalam tahun 1970/1971 dan tahun 1969/1970 masing2 sampai dengan bulan Agustus tahun anggaran yang bersangkutan berdjumlah US \$ 34,7 djuta dan US \$ 16,2 djuta.

Dengan ...

Dengan demikian maka realisasi ekspor barang2 golongan B diluar kaju mengalami kenaikan sebesar US \$ 16,5 djuta atau 90,6%. Kenaikan ekspor barang2 ini terjadi dalam masa lima bulan pertama tahun 1970/1971, dimana dalam triwulan I - 1970/1971 dan bulan Djuli - Agustus 1970/1971, masing2 berdjumlah US \$ 14,9 djuta dan US \$ 15,8 djuta.

Bila dibandingkan dengan tahun 1969/1970 masing2 dalam periode yang sama dimana dalam triwulan I - 1969/1970 dan bulan Djuli - Agustus 1969/1970 berdjumlah US \$ 11,4 djuta dan US \$ 6,8 djuta, maka dalam triwulan I - 1970/1971 dan bulan Djuli - Agustus 1970/1971 mengalami kenaikan masing2 sebesar US \$ 7,5 djuta atau 65,7% dan US \$ 9,0 djuta atau 132,3%. Kenaikan ekspor barang2 golongan B diluar kaju ini disebabkan antara lain karena harga beberapa barang ekspor tersebut dipasar internasional meningkat.

5.4. Realisasi perkembangan impor

Perintjilan dan perkembangan impor dalam tahun 1969/1970 dan tahun 1970/1971 dapat dilihat dalam Tabel V.3. Dalam tahun 1969/1970 djumlah nilai impor adalah sebesar US \$ 1,686 djuta, dimana dalam periode tersebut impor barang2 konsumsi dan bahan baku merupakan bagian yang besar dari impor, yaitu masing2 sebesar 34,4% dan 36,2% dari seluruh djumlah impor sedang yang 29,5% merupakan impor barang2 modal.

Bila dibandingkan antara realisasi impor tahun 1969/1970 dengan realisasi impor tahun 1970/1971 sampai dengan bulan Agustus, maka terjadi pergeseran ke impor barang2 modal, yaitu sebesar 37,1% dari

seluruh...

T a b e l V.2.

REALISASI PERREKENAN NILAI EKSPOR
BARANG UTAMA DAN BARANG LAINNYA
 (dalam jutaan US \$)

	1969/1970			1970/1971					
	Triw.I Djuli	Agustus	Djumlah s/d Agustus seluruhnya	Triw.I Djuli	Agustus	Djumlah s/d Agustus			
I. Barang Gol. A (utama)	97,2	35,6	24,5	168,1	408,5	114,0	35,8	20,5	181,3
1. K a r s t	55,1	22,8	19,9	97,8	232,3	66,5	19,3	15,2	101,0
2. Kopra	4,5	0,5	0,6	5,6	13,8	6,5	1,9	3,0	11,4
3. Kopi	8,9	3,5	5,3	17,7	53,7	13,7	3,6	5,5	22,8
4. Tembakan	6,8	2,2	1,1	10,1	15,4	3,4	1,1	0,8	5,3
5. Minyak sawit	4,9	2,0	2,1	9,0	23,9	6,9	3,0	1,1	11,0
6. Biji sawit	0,8	0,4	0,4	1,6	4,1	0,7	0,2	0,2	1,1
7. L a d a	2,6	0,7	0,7	4,0	9,6	1,2	-	-	1,2
8. Gineh	14,3	3,5	4,5	21,8	55,7	16,3	6,7	4,7	27,7
II. Barang Gol. B (lainnya)	17,6	6,0	5,4	29,2	75,4	38,4	16,8	14,2	59,4
1. K a f u	6,4	2,5	2,1	11,0	33,3	19,5	8,5	6,7	34,7
2. Lainnya	11,4	3,5	3,3	18,2	42,1	18,9	8,3	7,5	34,7
DJUALAH I + II	115,7	41,6	40,0	197,3	483,9	152,4	52,6	44,7	249,7

Sumber : Bank Indonesia.

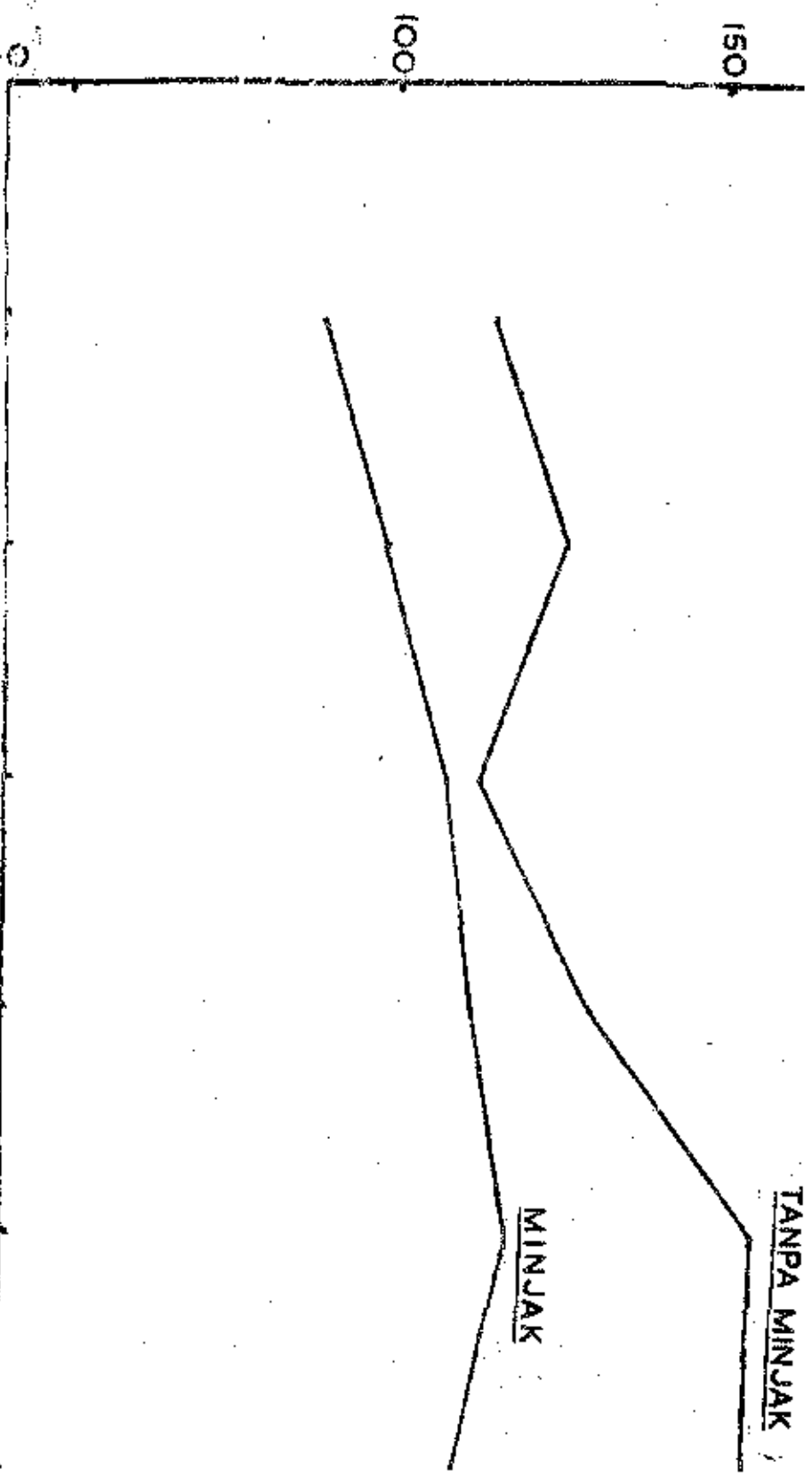
GRAFIK V.1.

EKSPOR TANPA MINJAK DAN MINJAK

DJUTA US DOLLAR

TANPA MINJAK

MINJAK



1969/1970

1970/1971

seluruh djumlah impor dalam periode tersebut diatas. Hal ini disebabkan karena kegiatan pembangunan nampak semakin ditingkatkan dalam rangka pelaksanaan PELITA tahun kedua ini.

Adapun impor jang lebih besar daripada barang2 konsumsi dalam tahun 1969/1970 tersebut jang terdiri dari, impor beras, tepung terigu dan tekstil djadi akan lebih memantapkan lagi stabilisasi jang telah ditjapai. Impor bahan2 baku jang merupakan bagian jang besar dari seluruh impor dalam tahun 1969/1970 komposisinya terdiri dari impor bahan kimia 11,8%, pupuk 4,2%, kertas 5,5%, benang tenun 16,8%, hasil2 dari besi dan badja 8,4% dari total impor bahan baku dalam tahun jang bersangkutan. Dalam pada itu impor barang2 modal dalam tahun 1969/1970 komposisinya terdiri dari pipa besi sebesar 2,8%, mesin2 dan pesawat sebesar 8,4%, bis dan mobil barang sebesar 5,9%, sedang impor modal jang lain adalah sebesar 73,2% dari seluruh djumlah impor barang modal dalam tahun 1969/1970.

Menurunnja impor barang2 konsumsi dalam tahun 1970/1971 s/d bulan Agustus dimana berdjumlah 26,9% sadja dari seluruh djumlah impor, disebabkan karena sebagian dari barang2 konsumsi jang dibutuhkan didalam negeri sudah dapat ditjukupi dengan persediaan dan produksi didalam negeri sendiri. Sedangkan untuk impor bahan baku/penolong dan impor barang2 modal, dimana dalam tahun 1970/1971 merupakan bagian jang terbesar daripada seluruh impor dalam periode tersebut, disebabkan karena semakin meningkatnja pembangunan ekonomi dalam pelaksanaan PELITA tahun kedua.

5.5. Perkembangan ...

T a b e l . V.3.
IMPOR MENURUT GOLONGAN EKONOMI
 (dalam djutaan US \$)

C & F

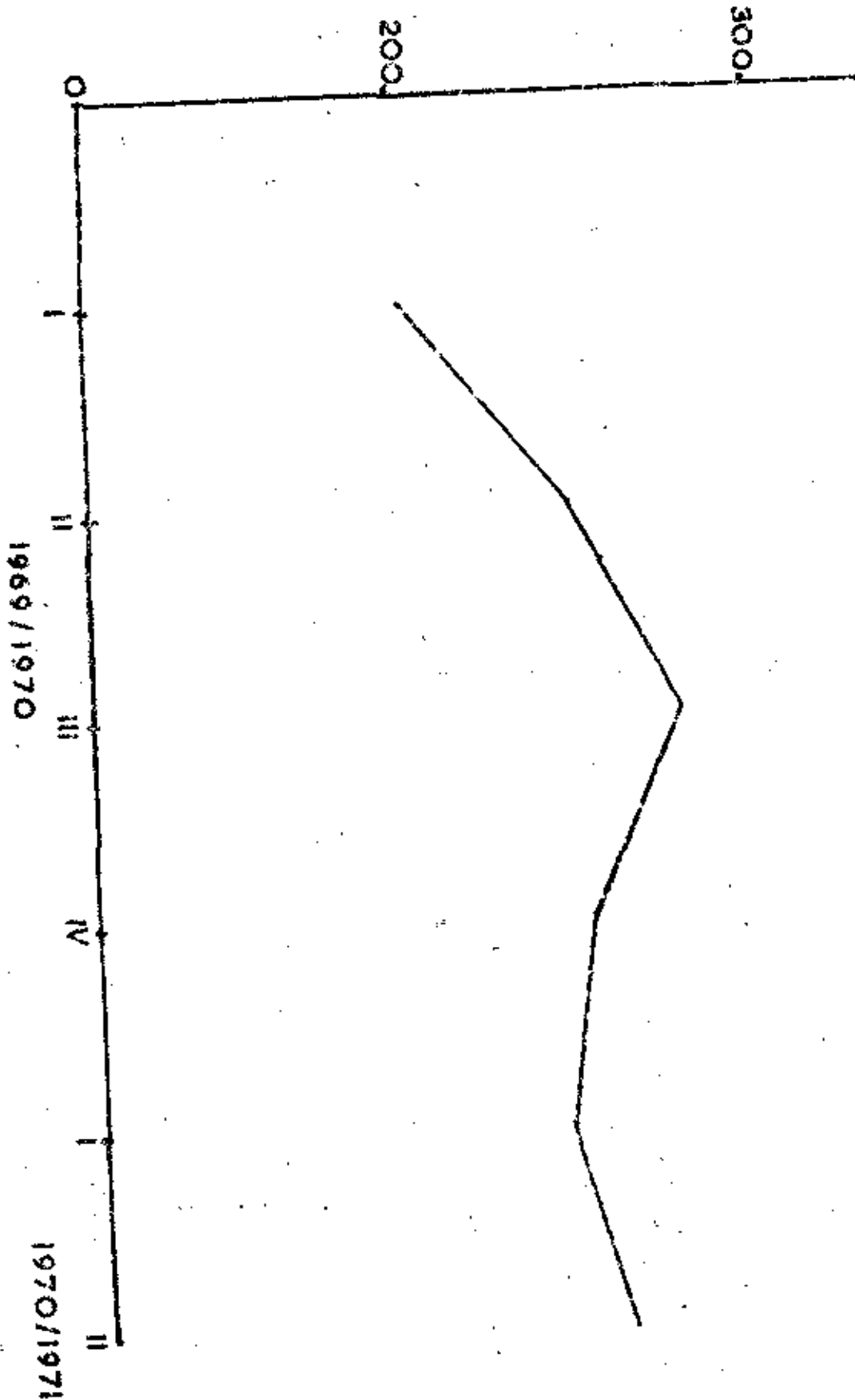
	1969 / 1970		1970/1971 (s/d Agustus 1970)	
	Nilai	% dari djumlah	Nilai	% dari djumlah
I. <u>Barang2 konsumsi</u>	<u>373,2</u>	<u>34,4</u>	<u>117,2</u>	<u>26,9</u>
1. B e r a s	146,0		23,0	
2. Tepung terigu	33,3		29,1	
3. Tekstil djadi	22,4		13,2	
4. Barang konsumsi lain	171,5		51,9	
II. <u>Bahan baku/penolong</u>	<u>393,3</u>	<u>36,2</u>	<u>156,1</u>	<u>36,0</u>
1. Tjengkeh	10,0		7,1	
2. Bahan kimia	46,7		19,8	
3. Hasil preparat kimia	10,5		3,6	
4. Bahan tjet	11,3		4,6	
5. P u p u k	17,0		8,4	
6. K e r t a s	22,0		10,1	
7. Barang tenun	66,3		12,2	
8. Cambrie dan shirting	10,3		1,5	
9. S e m e n	9,5		3,8	
10. Hasil dari besi & badja	33,2		13,0	
11. Bahan baku & penolong lainnja	157,5		70,0	
III. <u>Barang2 modal</u>	<u>320,0</u>	<u>29,5</u>	<u>161,4</u>	<u>37,1</u>
1. Pipa besi	9,2		2,5	
2. Mesin2 & pesawat	27,0		15,1	
3. Mobil biasa	9,7		2,6	
4. Bis & mobil barang	19,0		8,1	
5. Barang modal lainnja	234,5		133,1	
DJUMLAH : I + II + III	1086,-	100	434,8	100

Sumber : Bank Indonesia, diolah kembali oleh Departemen Keuangan.

GRAFIK V.2.

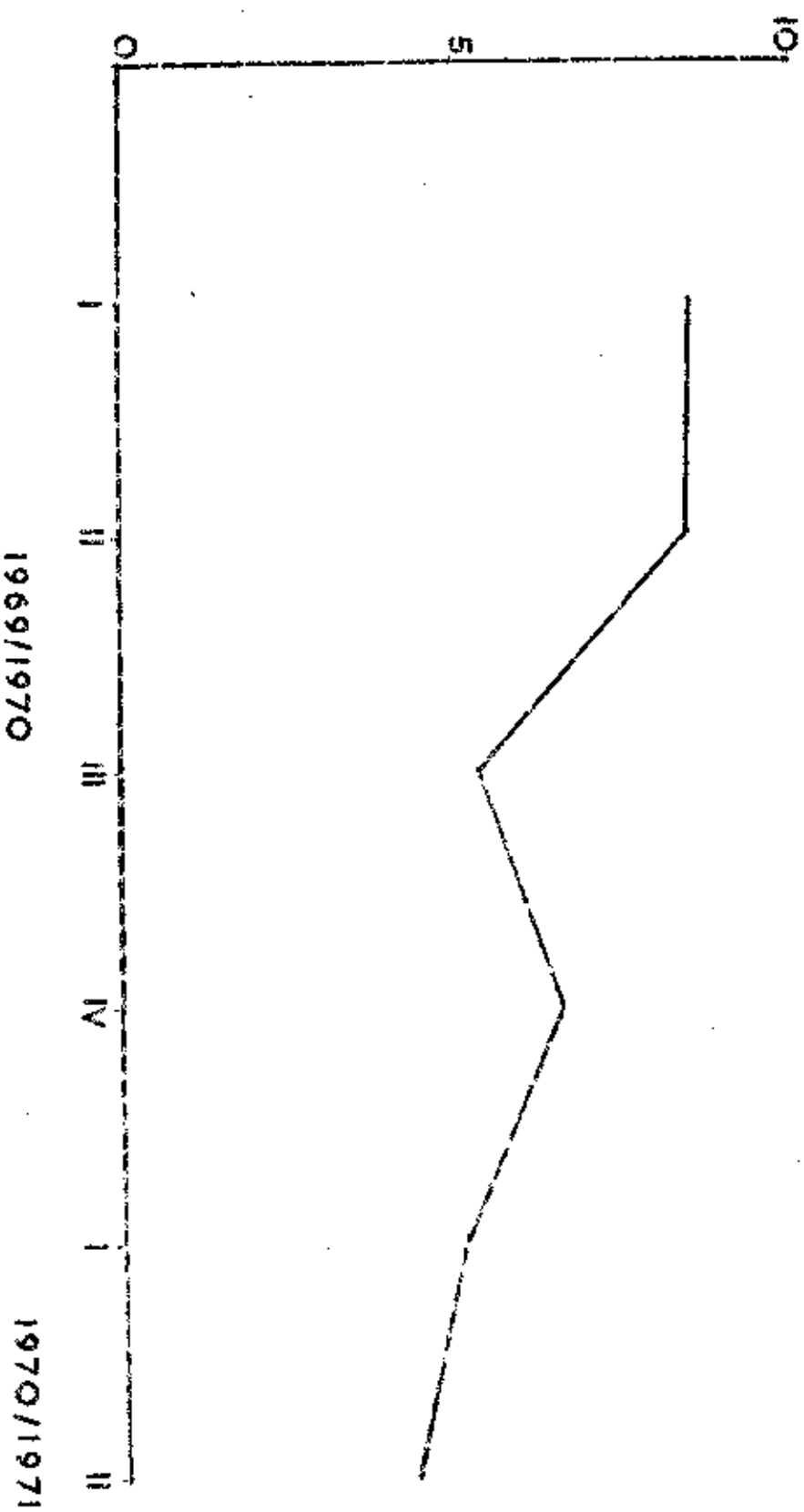
IMPOR TANPA MINJAK

DJUTA US DOLLAR, c & r.



GRAFIK V.3.IMPOR MINJAK

JUUTA US DOLLAR, C & F.



1969/1970

1970/1971

5.5. Perkembangan bantuan luar negeri

Agar lebih jelas, mengenai perkembangan bantuan luar negeri ini, maka diadakan sesuatu perbandingan antara penerimaan bantuan Luar negeri dalam tahun 1970 dengan tahun 1969, masing2 sampai dengan bulan Oktober.

Dalam Tabel V.4. dapat dilihat bahwa dalam tahun 1970 ini, jumlah commitment yang diadakan sampai dengan bulan Oktober 1970 adalah sebesar US \$ 488,3 djuta. Dalam pada itu dari jumlah tersebut yang telah disetujui berdjumlah US \$ 433,3 djuta atau 88,7%, sedang dari jumlah yang telah disetujui ini, maka yang tersedia untuk digunakan adalah sebesar US \$ 387,7 djuta atau 89,4%.

Sedang dalam tahun 1969 maka jumlah commitment sampai dengan bulan Oktober 1969 sebesar US \$ 548,0 djuta. Dalam pada itu yang telah disetujui berdjumlah US \$ 537,1 djuta atau 98,0%, sedang dari jumlah yang telah disetujui ini, maka yang tersedia untuk digunakan adalah sebesar US \$ 478,6 djuta atau 88,1%.

Adapun perintjian dari bantuan luar negeri adalah sebagai berikut:

1. Levisa Kredit

Djumlah commitment dalam tahun 1970 adalah sebesar US \$ 135,7 djuta. Dari jumlah ini yang telah disetujui berdjumlah US \$ 118,4 djuta atau 87,2%. Dalam pada itu jumlah yang telah ditanda tangani yang berdjumlah US \$ 118,4 djuta digunakan pada akhir Oktober 1970 telah tersedia seluruhnya untuk digunakan.

Sedang ...

Sedang dalam tahun 1969, maka commitment berdjumlah US \$ 148,6 djuta. Dari djumlah ini jang telah disetujui sebesar US \$ 148,6 djuta. Dalam pada itu djumlah jang tersedia untuk digunakan adalah sebesar US \$ 145,3 djuta atau 97,9% dari djumlah jang telah disetujui.

2. Bantuan projek

Mengensi bantuan projek maka djumlah commitment dalam tahun 1970 sebesar US \$ 231,0 djuta. Dari djumlah ini jang telah disetujui sebesar US \$ 196,8 djuta atau 85,2%. Sedang dalam tahun 1970 sampai akhir Oktober bantuan projek jang tersedia untuk digunakan adalah sebesar US \$ 151,2 djuta atau 76,8%.

Dalam tahun 1969 maka commitment dari bantuan projek berdjumlah US \$ 214,5 djuta, sedang jang tersedia untuk digunakan dalam tahun 1969 berdjumlah US \$ 159,3 djuta atau 74,2%.

3. PL. 480

Commitment daripada PL. 480 dalam tahun 1970 berdjumlah US \$ 80,1 djuta, dimana djumlah ini telah disetujui dan tersedia untuk digunakan seluruhnya sampai akhir Oktober 1970. Disamping itu Djepang telah pula memberikan kredit guna pembelian beras sebesar US \$ 14,4 djuta.

Dalam tahun 1969 commitment PL. 480 berdjumlah US \$ 144,8 djuta, sedang jang telah disetujui dan tersedia untuk digunakan berdjumlah US \$ 133,6 djuta atau 95,3%.

4. Bantuan pangan/Kennedy Round

Commitment bantuan pangan dalam tahun 1970 adalah sebesar US \$ 27,1

djuta ...

BANTUAN LUAR NEGERI 1970

PER : 31 OKTOBER 1970

(dalam ribuan US\$)

No. N E G A R A	Commitment				Persetujuan telah ditandatangani				Tersedia untuk didisjinal/dilaksanakan						
	Projek	D.K.	Pl 480	K.R.	Dijualah	Projek	D.K.	Pl 480	K.R.	Dijualah	Projek	D.K.	Pl 480	K.R.	Dijualah
1. Australia	5.560	8.000	-	5.300	18.800	-	3.640	-	83.000	6.640	-	3.640	-	3.000	6.640
2. Belgia	800	1.700	-	1.148	3.648	8.800	1.700	-	1.148	3.648	800	1.700	-	1.148	3.648
3. Perancis	-	-	-	1.995	1.995	-	-	-	795	795	-	-	-	795	795
4. Jerman Barat	18.770	15.027	-	1.687	35.484	18.770	15.027	-	1.687	35.484	18.770	15.027	-	1.687	35.484
5. Amerika Serikat	31.400	30.000	80.100	-	141.500	31.400	30.000	80.100	-	141.500	31.400	30.000	80.100	-	141.500
6. Kanada	-	2.000	-	3.000	5.000	-	-	-	3.000	3.000	-	-	-	3.000	3.000
7. Inggris	2.760	7.200	-	1.440	11.400	2.760	3.600	-	1.440	7.200	2.760	3.600	-	1.440	7.200
8. Belanda	16.666	16.250	-	1.666	34.582	16.666	8.889	-	1.666	27.221	16.666	8.889	-	1.666	27.221
9. Jepang	60.600	55.000	14.400	10.000	140.000	60.600	55.000	14.400	10.000	140.000	15.000	55.000	14.400	10.000	94.400
10. Denmark	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Italia	-	-	-	894	894	-	-	-	894	894	-	-	-	-	-
12. New Zealand	-	560	-	-	560	-	560	-	-	560	-	560	-	-	560
13. I.O.A.	74.900	-	-	-	74.900	55.800	-	-	-	55.800	55.800	-	-	-	55.800
14. A.O.E.	19.560	-	-	-	19.560	10.000	-	-	-	10.000	10.000	-	-	-	10.000
DJUALAH	230.956	155.737	94.500	27.130	488.327	196.796	118.416	94.500	23.630	433.342	151.196	118.416	94.500	23.630	387.742

Sumber : Bank Indonesia.

Berdasarkan kurs : US\$ 1 = Rp. 326,-

T a b e l V.5.

BANTUAN LUAR NEGARI, 1969-1970 *)

(dalam ribuan US \$)

	Commitment		Persetujuan telah ditanda tangani		Tersedia untuk dilak- sanakan	
	1 9 6 9	1 9 7 0	1 9 6 9	1 9 7 0	1 9 6 9	1 9 7 0
I. 1. Devisa Kredit	148.564	135.737	148.564	118.416	145.287	118.416
2. Pi. 480	144.800	94.500	133.550	94.500	133.550	94.500
3. Bantuan Pangan	40.121	27.130	40.482	23.630	40.482	23.630
DJumlah I :	<u>333.485</u>	<u>257.367</u>	<u>322.596</u>	<u>236.546</u>	<u>319.319</u>	<u>236.546</u>
II. Bantuan Proyek	214.466	230.956	214.466	196.796	159.302	151.196
DJumlah I + II :	<u>547.951</u>	<u>488.323</u>	<u>537.062</u>	<u>433.342</u>	<u>478.621</u>	<u>387.742</u>

Sumber : Bank Indonesia.

*) masing2 s/d 31 Oktober.

djuta, sedang jang telah disetujui dan tersedia untuk digunakan djumlahnja sama jaitu US \$ 23,6 djuta atau 87,0%.

Sedang dalam tahun 1969 bantuan pangan commitmentnja berdjumlah US \$ 40,1 djuta. Dari djumlah ini jang telah disetujui dan telah tersedia untuk digunakan sampai bulan Oktober 1969 sebesar US \$ 40,5 djuta atau 100% dari djumlah jang disetujui.

5.6. Pembayaran kembali hutang

Dalam tahun 1969/1970 pembayaran kembali hutang2 berdjumlah US \$ 44 djuta, sedang untuk tahun 1970/1971 diperkirakan sebesar US \$ 81 djuta. Oleh karena pembayaran kembali hutang2 merupakan tekanan jang berat bagi neratja pembayaran, maka selalu diusahakan oleh Pemerintah agar untuk hutang2 jang timbul sebelum 1966 dapat diperoleh jadwal pembayaran kembali jang lebih menguntungkan dengan memunda pembayarannya. Disamping itu untuk hutang2 setelah 1966 diusahakan persjajaran selengkap mungkin.

Sedjalan dengan ini maka sedjak 1966 diadakanlah perundingan dengan negara2 jang pernah memberi hutang pada Indonesia. Dengan negara2 Eropa Timur telah terdapat persetujuan bahwa hutang2 jang terdjadi sebelum bulan Djuni 1966 dapat ditunda pembayarannya. Begitu pula dengan Uni Sovjet telah diadakan perundingan jang tujuannya sama jaitu agar pembayaran kembali hutang-hutang ini dapat ditunda.

Sedang dengan negara2 Amerika Serikat, Eropa Barat dan Djepang pada akhir tahun 1966 diperoleh persetujuan dimana hutang2 jang djatuh waktunya dalam tahun 1967 serta tunggakan2nja akan dibayar kembali

mulai ...

mulai tahun 1971 sampai tahun 1978.

Kemudian dalam tahun 1968 dan 1969 diadakan kembali perundingan2 dengan negara2 donor, karena akibat dari pembajaran hutang ini dirasa akan mengantjam stabilisasi yang sedang dilaksanakan dan dapat menghentikan usaha2 pembangunan, apalagi PELITA tahun pertama mulai dilaksanakan tahun 1969/1970 tersebut.

Perundingan2 dengan negara2 Eropa Timur dan Uni Sovjet yang diadakan pada waktu itu belum menghasilkan suatu yang konkrit. Dalam bulan April 1970 diadakan perundingan dengan negara2 yang tergabung dalam Paris Club yaitu negara-negara Eropa Barat, Amerika Serikat dan Jepang berdasarkan saran2 dari Abs. Perundingan ini merupakan pertemuan landjutan dari pertemuan2 yang diadakan pada bulan2 Oktober dan Desember 1969, tapi belum mentjapai suatu persetujuan.

Adapun persetujuan yang ditjapai dalam bulan April 1970 telah menghasilkan perjanjian penundaan pembajaran hutang setjara menjeluruh. Dalam pelaksanaannya persetujuan tersebut harus disusul dengan perjanjian setjara bilateral. Untuk itu dalam tahap permulaan telah ditandatangani dengan Negeri Belanda dan Perancis. Selain dari pada itu pada bulan Agustus telah diadakan penundaan pembajaran hutang dengan Uni Sovjet.

5.7. Perkiraan neraca pembajaran tahun 1971/1972

5.7.1. Perkiraan ekspor

Perkiraan mengenai nilai ekspor tanpa minyak untuk tahun

1971/1972 ...

1971/1972 akan dibuat berdasarkan perkembangan trend dari penerimaan ekspor tahun2 yang lalu. Untuk tahun 1969/1970 maka nilai ekspor tanpa minyak ber-
jumlah US \$ 659 djuta, sedang untuk tahun 1970/1971 sebesar US \$ 720 djuta.
Ini berarti suatu kenaikan sebesar 9%. Perkiraan sebesar US \$ 720 djuta ini
terupakan perkiraan yang tinggi. Apabila angka ini digunakan maka sampai de-
ngan triwulan akhir 1970/1971 perkiraan ekspor diharapkan dapat mentjapai
US \$ 720 djuta.

Untuk menentukan besarnya nilai ekspor tanpa minyak untuk tahun 1971/-
1972 diperkirakan terdapat kenaikan sebesar 11% dari tahun sebelumnya atau
US \$ 800 djuta. Kenaikan 11% dari tahun sebelumnya ini dianggap sesuai de-
ngan trend walaupun pada bulan Mei 1970 Amerika Serikat mulai melepaskan
stock pile karetja. Akibat dari kebijaksanaan yang dijalankan oleh Ame-
rika Serikat ini maka harga karet dipasaran internasional menurun, hingga
mempunyai efek juga terhadap penerimaan ekspor dari karet di Indonesia.
Padi pelembaran stock pile karet ini untuk sementara dihentikan pada bulan
September dan Oktober 1970. Akibat dari turunja penerimaan dari karet, ma-
ka untuk tahun 1970/1971 nilai ekspor tanpa minyak ditaksir akan naik sebe-
sar 9% atau menjadi US \$ 720 djuta dari tahun sebelumnya. Penurunan harga
karet ini diharapkan akan diimbangi oleh kenaikan penerimaan hasil bumi la-
inja. Maka untuk tahun 1971/1972 nilai ekspor sebesar US \$ 800 djuta di-
perkirakan akan tertjapai mengingat efek dari pelembaran stock pile diha-
rapkan sudah hilang, sehingga penerimaan dari karet bisa meningkat.

Mengenai penerimaan bersih dari minyak, maka untuk tahun 1969/1970
berjumlah US \$ 107 djuta, sedang untuk 1970/1971 ditaksir sebesar US \$ 139

djuta ...

dijuta atau naik dengan 30%. Berdasarkan perkiraan perkembangan produksi, maka dalam tahun 1971/1972 penerimaan minyak bersih diperkirakan mentjapai kenaikan 8% yaitu US \$ 11,5 djuta.

5.7.2. Perkiraan impor

Untuk tahun 1969/1970 maka nilai impor tanpa minyak adalah sebesar US \$ 1.086 djuta. Untuk tahun 1970/1971 maka nilai impor diperkirakan sebesar US \$ 1.209 djuta atau naik dengan 11,3%. Dari seluruh djumlah impor tahun 1970/1971 maka diperkirakan untuk barang konsumsi sebesar US \$ 326,43 djuta, bahan baku/penolong sebesar US \$ 435,24 djuta, dan barang modal sebesar US \$ 447,33 djuta, atau masing2 27%, 36% dan 37% dari nilai impor seluruhnya.

Sedang untuk tahun 1971/1972 maka nilai impor ditaksir sebesar US \$ 1.370 djuta atau lebih besar 13,3% dari tahun sebelumnya. Dari seluruh djumlah impor ini diperkirakan akan difungsikan untuk barang konsumsi sebesar US \$ 274 djuta, bahan baku/penolong sebesar US \$ 712,4 djuta, dan barang modal sebesar US \$ 383,6 djuta, atau masing2 20%, 52%, 28% dari djumlah nilai impor seluruhnya.

Kalau dibandingkan antara komposisi impor dari tahun 1970/1971 dengan tahun 1971/1972 maka terdapat penggeseran dari barang konsumsi ke bahan baku/penolong dan barang modal. Hal ini disebabkan karena diharapkan bahwa industri2 dalam negeri dan hasil pertanian (terutama beras) sudah mentjukupi kebutuhan dalam negeri, hingga dapat menutupi sebagian besar kebutuhan2 konsumsi. Tambahan pula mengingat tahun 1971/1972 merupakan tahun ketiga dari PELITA, dimana gerak daripada

pembangunan ...

pembangunan makin ditingkatkan dan ini berarti kebutuhan yang makin banyak akan bahan baku/penolong dan barang modal.

Atas dasar angka-angka diatas maka dapat disusun mengenai perkiraan neraca pembayaran untuk tahun 1971/1972 seperti yang tertjantun dalam Tabel V.6.

algebra algebra

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

T a b e l V.6.

PERKIRAAN NERACA PEMBAYARAN INDONESIA1971/1972

(dalam jutaan US \$)

I. Ekspor. fob	<u>1.300</u>
M i n j a k	500
Tanpa Minjak	800
Impor. fob	-- <u>1.365</u>
M i n j a k	- 130
Tanpa Minjak	- 1.235
Neraca Perdagangan	-- 65
D j a r a-2	- <u>495</u>
M i n j a k	- 225
Tanpa Minjak	270
Transaksi berdjalan	- 560
II. Lalu Lintas Modal & Transfer	
S w a s t a	126
Pemerintah	545
S D R	p.m.
Pembayaran Kembali Hutang	- 95
Modal Netto	576
D J U M L A H (I + II)	16
III. Lalu Lintas Moneter	- 16
IV. Kesalahan jang tak terduga	-

Sumber : Bank Indonesia.

PERKEMBANGAN PRODUKSI

Perkembangan produksi dalam satu setengah tahun dari PELITA I telah menunjukkan kenaikan, bahkan ada beberapa diantaranya yang berhasil melewati target yang ditentukan.

Gambaran umum tentang perkembangan produksi terlihat dari angka realisasi sementara yang tersedia.

6.1. Perkembangan pendapatan nasional

Perkiraan pendapatan nasional mempunyai peranan penting dalam mengetahui pembangunan ekonomi yang berlangsung pada suatu negara. Tetapi di Indonesia masih dijumpai kesukaran untuk memperoleh data yang lengkap dan hanya tersedia data sampai dengan tahun 1969.

Salah satu ciri dari pada pendapatan nasional Indonesia adalah bahwa sektor pertanian, perikanan dan kehutanan merupakan sektor terpenting yang memberikan sumbangan terbesar yaitu lebih dari 50%. Dari jumlah tersebut kira-kira 60% berasal dari tanaman bahan makanan sehingga bila data sektor ini dapat diperoleh segera lengkap maka perkiraan pendapatan nasional segera keseluruhan dapat diperhitungkan dengan tepat pula. Pada umumnya pengumpulan data ini menunjukkan keterlambatan lebih dari setengah tahun sehingga dengan demikian pada akhir tahun baru dapat terkumpul 70 - 75% dari data yang bersangkutan. Untuk melihat perkembangan pendapatan nasional sejak 1960 dapat dilihat pada Tabel VI. 14 dan VI. 13. terlampir.

Setjara singkat terlihat perkembangan pendapatan nasional Indonesia sebagai berikut :

Dalam masa tahun 1960 sampai dengan 1967 terlihat perkembangan yang sangat lambat. Selama masa ini Gross Domestic Product (GDP)

yang ...

PENGELUARAN ATAS PRODUK DALAM NEGARA BRUTO MENURUT

HARGA PASAR

(dalam miliar rupiah)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966 ^{2/}	1967 ^{2/}	1968 ^{2/}	1969 ^{2/}
1. Pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga ^{1/}	311.4	385.6	1.180.0	2.726.5	5.821.3	20.902.5	303.3	786.0	1.771.2	2.531.3
2. Pengeluaran konsumsi Pemerintah	45.1	55.4	83.3	228.3	508.2	1.329.8	27.8	62.5	143.5	179.0
3. Penentuan modal dalam negeri	30.7	46.1	74.8	263.0	662.0	1.586.7	14.3	67.9	177.9	268.1
4. Ekspor barang dan jasa	52.0	45.0	69.0	291.0	874.0	1.251.0	40.3	74.4	277.9	245.2
5. Dikurangi : impor barang dan jasa bukan faktor produksi	49.0	23.0	72.0	300.0	932.0	1.360.0	69.8	143.0	325.6	354.7
6. Produksi dalam negeri bruto dengan harga pasar	390.2	470.1	1.533.1	3.208.8	7.133.5	23.710.0	315.9	847.8	1.993.9	2.868.9
7. Pendapatan investasi netto dari luar negeri	- 3.2	- 5.0	- 9.0	- 40.0	- 120.0	- 173.0	- 4.9	- 9.6	- 28.8	- 34.9
8. Produk Nasional Bruto menurut harga pasar yang berlaku	387.0	465.1	1.326.1	3.168.0	7.013.5	23.537.0	311.0	838.2	1.965.1	2.834.0
9. Kurang : Pajak tidak langsung bersih	23.8	24.0	34.0	111.0	175.0	567.0	7.6	31.0	94.0	134.8
10. Kurang : Penghasilan	23.0	21.0	89.0	190.0	476.0	1.408.0	17.2	54.7	124.6	174.4
11. Pendapatan Nasional	340.2	410.1	1.204.1	2.867.0	6.362.5	21.566.0	286.2	752.5	1.746.5	2.524.8

Sumber : Biro Pusat Statistik.

^{1/} Sisa.^{2/} Dikatakan dengan rupiah baru.

PENGELOARAN ATAS PRODUK NASIONAL BRUTO DENGAN HARGA PASAR

1960

(dalam miliar rupiah)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969
1. Pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga 1/	311.4	335.8	359.2	345.0	347.7	356.0	360.8	367.2	396.9	421.1
2. Pengeluaran untuk konsumsi Pemerintah	45.1	42.0	33.8	34.0	40.0	28.0	40.8	35.8	37.2	38.9
3. Pembentukan modal tetap negeri	30.7	44.1	40.1	30.6	34.8	38.2	40.7	33.2	46.3	54.0
4. Ekspor barang dan jasa	52.0	55.7	51.8	48.7	54.5	58.2	55.8	55.5	61.3	63.4
5. <u>Kurang</u> : Import barang dan jasa bukan faktor produksi	48.8	68.0	64.7	47.5	51.7	47.5	45.5	58.3	62.9	66.7
6. <u>Produk dalam negeri Bruto (GDP)</u>	390.2	412.6	420.2	410.8	425.3	420.9	441.9	448.0	478.6	508.7
7. <u>Pendapatan investasi</u> Netto dari luar negeri	- 3.2	+ 3.6	+ 3.4	- 3.5	+ 3.5	+ 3.8	- 3.8	+ 3.8	+ 4.3	-
8. <u>Produk Nasional Bruto 2/</u>	387.0	409.3	416.8	407.5	421.8	426.5	438.1	444.3	474.8	504.6
9. <u>Kurang</u> : <u>Produk tidak langsung 2/</u>	23.8	25.1	25.6	25.1	25.9	26.2	26.9	27.4	30.0	-
10. <u>Kurang penjumlahan 2/</u>	23.0	24.3	24.8	24.2	25.1	25.4	26.1	26.4	28.0	-
11. <u>Pendapatan Nasional</u>	364.2	385.6	396.4	388.2	370.8	374.8	385.1	390.6	417.4	443.6

Sumber : Biro Pusat Statistik.

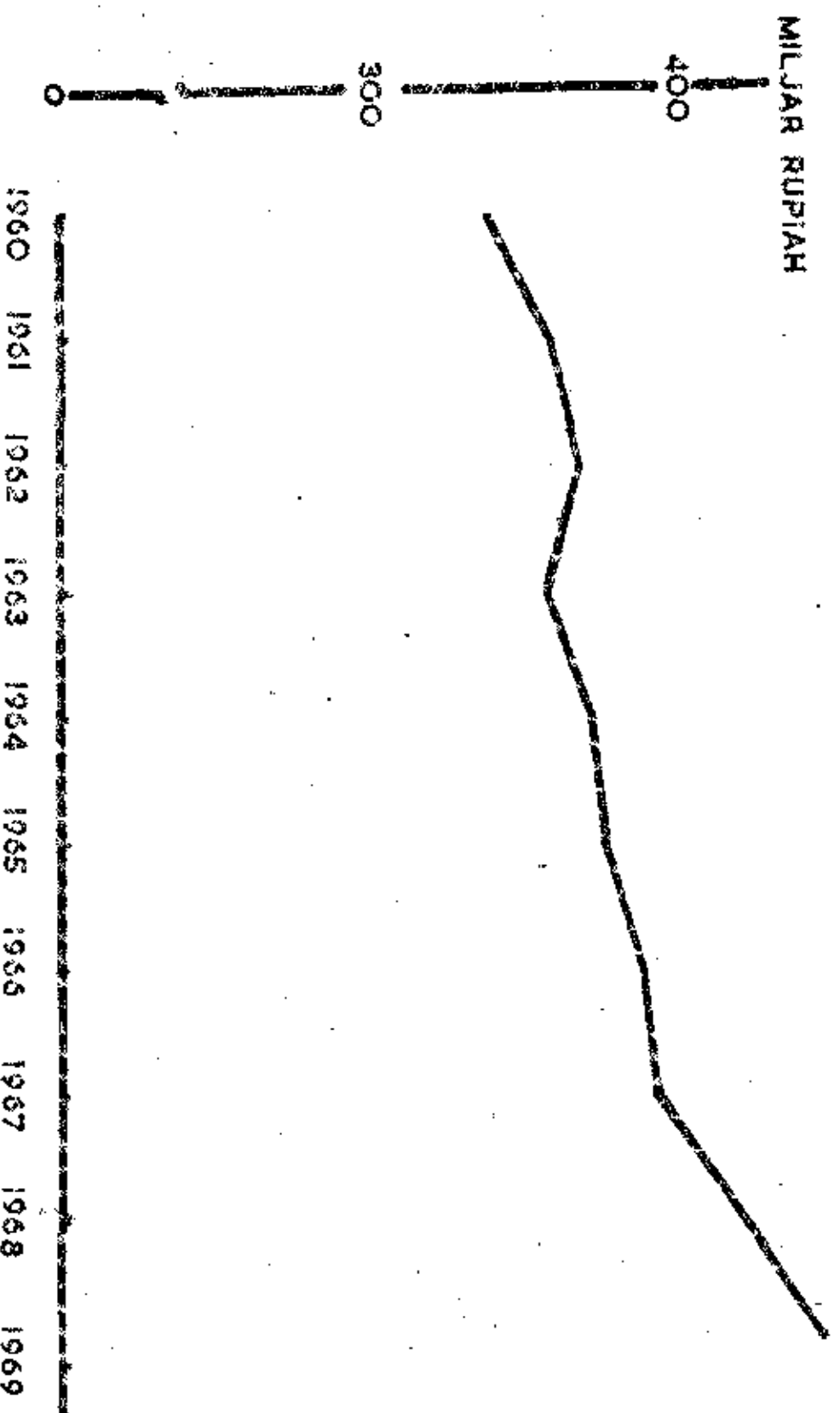
1/. Sisa

2/. Ekstrapolasi dengan Indeks GDP pada harga pasar 1960.

GRAFIK IV.1.

202

PENDAPATAN NASIONAL INDONESIA



D DENGAN HARGA TH. 1960

jang dinjatakan dalam nilai riil hanya menunjukkan rata2 kenaikan setahunnja sekitar 2%. Kenaikan tersebut agak ketjil karena tingkat kenaikan produktivitas dalam arti riil bergerak lambat dalam periode tersebut. Mulai dengan tahun 1968 baru terlihat adanya kemadjuan2 di semua sektor.

G.D.P. jang dinjatakan dalam nilai riil, dalam tahun 1968 menunjukkan kenaikan sebesar 6,8% djika dibandingkan dengan tahun 1967 jang hanya mentjapai sebesar 1,1% djika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan sebesar 6,8% ini merupakan kenaikan tertinggi jang dapat ditjasai selama periode 1960 - 1968.

Kal ini disebabkan oleh kenaikan2 jang terdjadi di-sektor2 jang tersebut dibawah ini :

Tanaman bahan makanan	9,1%
Perikanan	7,8%
Pertambangan	17,9%
Industri	8,6%
Bangunan	26,1%
Perdagangan	7,5%

Kenaikan GDP tahun 1969 dalam nilai riil adalah sebesar 6,2% terhadap 1968.

6.2. Produksi sektor pangan

Pertanian merupakan sasaran pokok dari PELITA jang sedang kita laksanakan dewasa ini. Perkembangan produksi pertanian dalam tahun 1969/1970 terlihat pada Tabel VI.2. Produksi beras mentjapai djumlah 10,8 djuta ton dalam tahun 1969. Sebaliknya produksi djagung mengalami penurunan dari 3,2 djuta ton menjadi 2,3 djuta ton.

Danjikian ...

T a b e l VI.2.
PRODUKSI PERTANIAN, 1957-1969
 (dalam ribuan ton)

	1967	1968	1969
BAHAN MAKANAN			
B e r a s	9.320	10.166	10.798
D jagung	2.369	3.165	2.286
Ubi kaju	10.747	11.379	11.140
Ubi djalar	2.144	2.361	3.979
K e d e l e	416	419	416
Katjang tanah	242	256	257
PERIKANAN LAUT	720	638	752
PERIKANAN DARAT	481	480	447
PERKEBUNAN BESAR :			
K a r e t	201	206	227
Kelapa Sawit/Minjak	174	180	189
T e h	33	41	40
G u l a	626	526	624
K o p i	19	13	14
PERKEBUNAN RAKJAT :			
K a r e t	538	529	545
T e h	47	61	62
G u l a	271	203	270
K o p i	143	143	143
Tembakau	100	68	66
K o p r a	1.248	1.275	1.220

Sumber : Departemen Pertanian.

Demikian juga produksi ubi kayu menurun dari 11,3 djuta ton menjadi 11,1 djuta ton.

Perkembangan dari produksi bahan makanan lainnya pada umumnya juga menunjukkan kenaikan (selanjutnya lihat Tabel VI.2.).

Perkembangan dari bahan makanan utama dalam Tabel VI.2. perlu dilengkapi dengan angka prognosa produksi 1970 seperti dibawah ini :

T a b e l VI.3.

PROGNOSA PRODUKSI BAHAN PAKAN PENTING, 1970 *)
(dalam ribuan ton)

D j e n i s	1 9 7 0	Target Pelita
1. B e r a s	11.752	11.400
2. D jagung	2.433 (pipil kering)	3.510
3. Ketela pohon	10.101	12.655
4. Ketela rambat	1.930	3.345
5. Katjang tanah	310	268
6. K e d e l a i	378	483

Sumber : Departemen Pertanian.

*) Sampai dengan permulaan bulan September.

Produksi beras untuk tahun 1970 ditaksir sebesar 11,7 djuta ton yakni 103% dari target sebesar 11,4 djuta ton.

Prognosa ...

Prognosa 1970 dari produksi jagung menunjukkan kenaikan sebesar 6,4% bila dibandingkan dengan tahun 1969 yakni dari 2.286 (1969) menjadi 2.433 (1970). Hal ini kemungkinan sekali disebabkan iklim yang memuaskn dan keadaan harga yang baik.

Dalam hal ubi2an kelihatan penurunan dalam prognosa 1970 yang biasanya sangat erat hubungannya dengan masalah pemasaran.

Chususnja mengenai beras perlu dilihat perkembangan usaha Pemerintah dalam rangka menaikkan produksi beras. Dengan memperhatikan ketjepatan pertumbuhan penduduk dan peranan beras dalam stabilisasi maka Pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan produksi beras ini, yang dikenal sebagai usaha intensifikasi dengan pantja usaha yakni :

- pengaturan pengairan yang baik
- penggunaan benih djenis unggul
- penggunaan pupuk
- pemberantasan hama/penjakit
- penggunaan tjara berujungok tanam yang baik

Dalam rangka menjampaikekan pengertian pantja usaha ini kepada para petani maka dibentuklah suatu program penjuluhan yang disebut BIMAS (Bimbingan Massa).

Sedjak musim tanam 1968 berkembang pula suatu projek yang bernama Intensifikasi Massa (INMAS) yang merupakan bentuk landjutan dari projek BIMAS. Dasar pertimbangannya adalah bahwa petani2 dianggap telah mampu melaksanakan sendiri usaha2 intensifikasi tanpa pimpinan langsung aparat Pemerintah. Setjara bertahap program BIMAS akan digantikan dengan program INMAS.

Suatu ...

T a b e l VI.A.

RENTJANA, REALISASI LUAS PERTANAHAN, HASIL PAOK DAN KENAIKAN HASIL

PAOK PERKHENTAR DINAS & INMAS, 1965 - 1970.

No. Unit.	Musim Tanam	Program	Luas (Ha)		Hasil (Kwt/Ha) padi kering giling		
			Rentjana	Realisasi	Rata2 hasil	Rata2 1954-1963	Kenaikan %
1.	H.T. 1965/1966	BINAS	150.000	172.488	52,3	24,3	117,2
2.	H.T. 1966	BINAS	200.000	168.120	45,3	24,3	45
3.	H.T. 1966/1967	BINAS	485.000	516.076	48,9	24,3	100,2
4.	H.T. 1967	BINAS	15.000	31.286	-	24,3	-
5.	H.T. 1967/1968	BINAS	560.600	489.319	49,6	24,3	104,1
		INMAS	500.000	625.653	-	24,3	-
6.	H.T. 1968	BINAS	473.500	250.220	37,4	24,3	53,9
		BINAS BARU	26.000	17.031	58,7	24,3	141,5
		INMAS	200.000	207.520	35,5	24,3	46,0
		INMAS BARU	-	-	-	24,3	-
7.	H.T. 1968/1969	BINAS	270.000	331.480	31,55	24,3	30,0
		BINAS BARU	380.000	85.374	36,4	24,3	49,7
		BINAS G.R.	225.000	243.060	28,02	24,3	17,6
		BINAS BARU G.R.	25.000	48.053	35,54	24,3	46,0
		INMAS	630.000	551.218	30,-	24,3	23,4
		INMAS BARU	10.000	45.602	35,-	24,3	44,0
8.	H.T. 1969	BINAS	45.050	83.290	31,24	24,3	28,3
		BINAS BARU	52.450	18.334	41,50	24,3	70,7
		BINAS G.R.	205.000	272.883	31,24	24,3	28,3
		BINAS BARU G.R.	285.000	222.730	41,50	24,3	70,7
		INMAS	100.500	280.717	31,24	24,3	28,3
		INMAS BARU	40.400	63.299	41,50	24,3	70,7
9.	H.T. 1969/1970	BINAS	237.000	104.520	40,50	24,3	66,6
		BINAS BARU	102.500	58.375	57,31	24,3	135,-
		BINAS G.R.	540.250	492.100	39,2	24,3	60,9
		BINAS BARU G.R.	563.250	279.416	52,0	24,3	113,4
		INMAS	545.000	417.473	33,52	24,3	79,0
		INMAS BARU	251.520	101.782	44,65	24,3	83,9
10.	H.T. 1970	BINAS	79.300	43.584	-	24,3	-
		BINAS BARU	66.575	27.814	-	24,3	-
		BINAS G.R.	205.300	88.146	-	24,3	-
		BINAS BARU G.R.	205.000	40.230	-	24,3	-
		INMAS	100.500	136.231	-	24,3	-
		INMAS BARU	40.400	53.164	-	24,3	-

Sumber : Departemen Pertanian.

Suatu bentuk khusus dari BIMAS adalah BIMAS Gotong Royong dimana kepada para petani disediakan sarana2 produksi dan djasa2 lainnja jang diperlukan dalam penyelenggaraan BIMAS

Pada pertengahan tahun 1970 ditetapkan bahwa BIMAS Gotong Royong di-tiadakan dan digantikan dengan BIMAS jang diperbaiki, dimana pada wilajah kerdja ditingkat desa dinamakan wilajah unit desa jang mentjakup kegiatan perkreditan, penjediaan sarana, pemberian djasa (penjualan) dan prosesing dari hasil produksi. Untuk djelasnja dapat dilihat perkembangan BIMAS dan INMAS pada Tabel VI.4. Setelah ada BIMAS dan INMAS dapat dilihat kenaikan produksi jang meyakinkan bila dibandingkan dengan hasil rata2 9 tahun sebelum adanya program intensifikasi.

6.3. Produksi sektor pertanian lainnja

6.3.1. Perkebunan

Realisasi produksi beberapa budidaja terpenting dari Perusahaan Negara Perkebunan dapat dilihat dalam Tabel VI.5.

Dapat disimpulkan bahwa pada umumnya target sampai dengan bulan Agustus 1970 dapat dilewati dan besar harapan bahwa target 1970/1971 djuga dapat dilewati.

Angka2 realisasi produksi dalam Tabel VI.5. adalah hasil produksi perkebunan2 negara, sedang hasil produksi perkebunan swasta nasional belum terkumpulkan data2nja. Demikian pula produksi perkebunan rakyat lainnja sangat sukar untuk mengumpulkannya. Namun demikian perlu diketahui djuga keadaan hasil produksi perkebunan rakyat tahun 1969 seperti terlihat dalam Tabel VI.6.

Tabel VI.5. ...

T a b e l VI.5.

PRODUKSI BEBERAPA BUDIDAJA PERTANI PNP, 1970

Budidaja	Satuan	Perkiraan		Realisasi	%
		1 9 7 0	s/d Agust'70	s/d Agust'70	
1. Karet	ribu ton	110,5	70,9	75,7	106,7
2. Kelapa sawit:					
a. Manjak	ribu ton	142,5	83,1	88,9	106,9
b. Inti	ribu ton	31,1	18,2	20,0	110,3
3. T e h	ribu ton	33,7	21,6	21,2	98,-
4. K o p i :					
a. Arabica	ribu ton	1,3	0,8	1,3	149,7
b. Robusta	ribu ton	6,6	5,5	4,5	82,2
5. Kelapa :					
a. Butiran	djuta btr	1,3	0,8	1,2	138,1
b. K o p r a	ribu ton	0,191	0,148	0,156	105,1
6. G u l a	ribu ton	667,7	597,1	460,2	77,-

Sumber : Departemen Pertanian.

Uraian :

1. Karet : Realisasi PNP VIII s/d Djuni, PNP XIII s/d Djuli dan PNP lainnya s/d Agustus.
2. T e h : Realisasi PNP XIII s/d Djuli dan PNP lainnya s/d Agustus.
3. K o p i : I d e m .
4. Kelapa : I d e m .
5. G u l a : Realisasi PNP XIV s/d 31 Djuli, PNP XV-XVI s/d 15 Agustus dan PNP lainnya s/d 31 Agustus.

Tabel VI.6. ...

T a b e l VI.6.

PRODUKSI PERKEPUNAN RAKJAT, 1969

<u>Djenis produksi</u>	<u>Target 1969 (ton)</u>	<u>Produksi realisasi 1969 (ton)</u>	<u>% dari target</u>
1. K a r e t	510.000	558.178	109,4
2. K o p i	120.000	161.548	134,6
3. L a d a	45.000	16.668	37,0
4. T e h h i d j a u	40.000	21.017	52,5
5. K o p r a	1.200.000	1.200.000	100,-
6. K a p o k	20.000	23.070	115,3
7. T e m b a k a u Virginia	17.500	25.700	146,8

Sumber : Departemen Pertanian.

6.3.2. Kehutanan

Potensi hutan Indonesia sangat besar yaitu kurang lebih 2/3 dari luas seluruh wilayah Indonesia (+ 120 djuta ha) yang sebagian besar berada diluar pulau Djawa. Disamping usaha2 peningkatan produksi hasil hutan, djuga diadakn rentjana2 pembangunan dan rehabilitasi prasarana kehutanan (reboisasi) untuk mencegah kerusakan dan penurunan hasil produksi. Hasil produksi yang penting dalam bidang kehutanan antara lain adalah kayu djati, kayu rimba, kayu bakar, arang, rotan, damar, gondorkem, kayu bitum dan tjendana. Sebagian dari hasil produksi tersebut digunakan didalam negeri dan sebagian lagi diekspor. Angka2 produksi dilihat pada Tabel VI.7.

Tabel VI.7. ...

Tabel VI.7.

PRODUKSI HASIL HUTAN
(x 1.000)

D j e n i s	Satuan	1 9 6 7	1 9 6 8	1 9 6 9
1. Kayu pertukangan	m3	2.953	3.828	6.206
2. Kayu bakar	sm	1.363	1.665	1.009
3. A r a n g	ton	100	646	120
4. S i r a p	keping	8.726	8.583	16.225
5. Bantalan kreta api	potong	12	205	5
6. R o t a n	kg.	9.500	15.057	58.214
7. B a m b u	batang	6.798	6.227	3.609
8. D a m a r	kg.	525	1.618	1.154
9. Kulit kayu	kg.	2.562	3.006	1.251
10. Terpentin	liter	30	...	1
11. Gondorukem	kg.	284	8.856	1.050
12. Kayu hitam	kg.	9.954	7.011	6.739

Sumber : Departemen Pertanian.

Produksi kayu pertukangan, sirap, rotan dan damar menunjukkan kenaikan yang meyakinkan. Perkembangan produksi kayu juga mengalami peningkatan sebagaimana terlihat dalam Tabel VI.8. dibawah ini :

Tabel VI.8.

PERKEMBANGAN PRODUKSI KAYU SEMESTER I-1967 s/d SEMESTER I-1969
(dalam ribuan m3)

Djenis kayu	Semester I-1967	Semester I-1968	Semester I-1969
1. Kayu pertukangan	1.426	1.914	2.400
2. Kayu bakar	566	572	...
3. A r a n g	182	184	...

Sumber : Departemen Pertanian.

Faktor2 yang ...

Faktor2 jang memungkinkan perkembangan tersebut adalah antara lain situasi pasar kaju internasional jang menguntungkan dan fasilitas pe-
ngangkutan laut jang bertambah baik.

6.3.3. Perikanan

Potensi perikanan laut dan perikanan darat diperkirakan dapat menghasilkan 7,6 djuta ton ikan setiap tahun. Produksi dalam tahun 1969 baru mantjapai 1,2 djuta ton jang terdiri dari hasil perikanan laut sebesar 0,8 djuta ton dan perikanan darat 0,4 djuta ton atau lebih kurang 15% dari potensi jang ada. Peningkatan produksi ikan laut dapat dilaksanakan dengan usaha2 intensifikasi antara lain beru-
pa perbaikan alat2 dan tjara2 penangkapannja; sedang untuk perikanan darat perlu ditingkatkan tehnik pemeliharaan dan penjediaan benih.

Perkembangan produksi sampai dengan 1970 masing2 untuk semester I menunjukkan kenaikan2 jang berarti seperti terlihat pada Tabel VI.9.

T a b e l VI.9.

PERKEMBANGAN PRODUKSI PERIKANAN, 1968-1970

D j e n i s	Sem.I -68 (ribu ton)	Sem.I-69 (ribu ton)	% kenaikan	Sem.I-70 (ribu ton)	% kenaikan
1. Ikan darat	225	250	11.1	260	4,0
2. Ikan laut	280	304	8.7	320	5,2

Sumber : Departemen Pertanian.

6.3.4. Peternakan ...

6.3.4. Peternakan

Produksi hasil2 ternak yang penting adalah daging, susu dan telur. Angka2 produksi untuk ketiga jenis hasil ini biasanya tidak menunjukkan banjak perubahan karena perkembangan ternak memerlukan jangka waktu yang cukup panjang.

Perbandingan angka2 perkiraan produksi dari tahun 1967, 1968 dan 1969 adalah sebagai berikut :

T a b e l VI.10.

PERKEMBANGAN PRODUKSI HASIL TERNAK

1967 - 1969

T a h u n	Daging (ton)	S u s u (m3)	T e l u r (ribuan)
1 9 6 7	278.400	46.693	1.617.200
1 9 6 8	283.200	64.660	1.599.411
1 9 6 9	321.700	68.000	1.673.334
1 9 7 0	396.250	84.330	1.971.692 *)

Sumber : Departemen Pertanian.

*) Perkiraan.

Usaha mempertinggi produksi peternakan yang dijalankan dewasa ini didasarkan pada pemberantasan penyakit dan meningkatkan mutu bibit ternak.

6.4. Produksi sektor industri dan pertambangan

6.4.1. Industri

Dengan telah tertjapainja stabilisasi harga jang semakin mantap disatu pihak dan dengan lebih banjaknja perbaikan sarana2 produksi dilain pihak, maka sektor perindustrian mulailah menunjukkan gerak perkembangan kearah jang memuaskan. Kestabilan harga ini mempunyai pengaruh positif terhadap produksi dalam arti bahwa kini perhitungan2 biaya produksi dapat lebih tepat, sehingga resiko dari sudut gerak biaya dapat lebih diperketjil. Selanjutnja keadaan perkembangan dari beberapa hasil produksi industri dapat digambarkan seperti pada Tabel VI.11.

a. Sandang

Benang tenun produksi dalam negeri selama semester I-1970 diperkirakan ada sebesar 95.269 bales, jang berarti + 130% dari produksi semester I-1969 (73.689 bales). Untuk dapat menaikkan produksi pada masa2 jang akan datang telah diadakan penambahan mata pintal pada beberapa pabrik pemintalan dan djuga penambahan hari kerdja. Produksi tekstil dalam negeri selama semester I-1970 diperkirakan mentjapai 217,3 djuta meter jang berarti + 145% dari produksi semester I-1969, jang berdjumlah + 150 djuta meter. Kebutuhan dalam negeri dipenuhi selain dari produksi nasional djuga dengan tekstil asal impor. Terpenuhija kebutuhan dapat dilihat pada stabilnja harga tekstil dipasaran (Tabel VI.12.).

Tabel VI.12. ...

PRODUKSI PRODUKSI BERAPA PAJIT INDUSTRI, 1968 - 1970

Nomor	Jenis produksi	Sasaran		1968	1969	1969		1970	
		Volume	Value			Semester I	Semester II	Triwulan III	Triwulan III
1.	Tekstil	djuta meter	316	415	150	217,3	108,8		
2.	Benang tenun	ribu Bal	129,7	160,0	73,6	95,2	52,3		
3.	Pupuk/Urea	ribu ton	95,5	84,1	37,9	46,1	25,2		
4.	Semen	ribu ton	411,0	534,0	249,8	264,3	147,2		
5.	Kertas	ribu ton	11,2	15,8	6,7	7,5	5,6		
6.	Gelas	ribu ton	5,7	10,6	3,9	4,5	3,1		
7.	Acou	ribu buah	28,6	32,0	-	17,250	...		
8.	Radio	ribu buah	391,7	363,5	-	187,211	...		
9.	Televisi	ribu buah	1,2	4,5	-	2,093	...		
10.	Plast seny	ribu ton	8,1	8,5	-	12,3	...		
11.	Assembling mobil	ribu buah	2,4	5,0	-	0,539 *)	0,895		
12.	Assembling sepeda motor	ribu buah	6,2	21,3	-	12,3	...		
13.	Kinjak kelapa	ribu ton	208,0	250,0	124,8	126,9	56,2		
14.	Kinjak goreng	ribu ton	23,0	28,0	14,0	12,7	6,6		
15.	Sabuun	ribu ton	130,0	134,0	66,8	63,4	24,8		
16.	Rokok putih	djuta batang	14.760	10.910	5.455	7.170	4.134		
17.	Rokok kretek	djuta batang	24.000	18.044	9.422	10.340	5.532		
18.	Korek api	djuta kotak	238	263	131	140	73		
19.	Tapal gigi	djuta tube	13	16	8	10,6	5,1		

Sumber : Departemen Perindustrian.

*) Assembling mobil selama Triwulan I, II dan III tahun 1970 belum dapat bekerja sempurna disebabkan terlambatnya impor oleh para agen tunggal.-

T a b e l VI.12.

INDEKS HARGA PASAR BEBAS DI DJAKARTA DJANUARI S/D SEPTEMBER 1970

Bulan/Minggu	Benang tenun 20/s	Tekstil kasar	Tekstil kasar/ halus.
Djanuari	393	494	418
Februari	380	484	525
Maret	380	472	474
April	380	484	485
M e i	385	488	503
Djuni	385	496	508
Djuli	385	493	494
Agustus	385	498	499
September I	385	494	513

Sumber: Departemen Perindustrian

Tjatatatan: Angka indeks 100 adalah harga terendah dipasaran bebas Djakarta Oktober 1966.

b. Pupuk

Dalam hal pupuk hingga sekarang Indonesia masih tergantung pada produksi satu perusahaan yaitu P.T. Pupuk Sriwidjaja (PT. PUSRI) yang memproduksi pupuk urea (N). Dalam tahun I REPELITA telah dapat ditjapai 85% dari sasaran (85.445 ton) dan produksi pupuk dalam semester I-1970 adalah sebesar 46.198 ton yang berarti menunjukkan kenaikan bila dibandingkan dengan produksi dalam semester I-1969 sebesar 37.955 ton.

Direntjanakan ...

Direntjanakan dalam waktu jang singkat P.T.PUSRI mengadakan perluasan dari kapasitas produksi 100.000 ton menjadi kapasitas produksi 480.000 ton/tahun. Diharapkan usaha pembangunan dapat segera dimulai dan akan selesai dalam tahun 1973/1974.

Sementara itu suatu proyek petrokimia di Gresik sedang dalam pelaksanaan dan diharapkan dapat melakukan " trial operation " dalam tahun 1972. Proyek tersebut direntjanakan akan dapat menghasilkan 65.000 ton pupuk urea dan 110.000 ton pupuk Z.A.

c. Semen

Produksi semen Padang pada semester I-1970 adalah sebesar 67.788 ton jang menunjukkan peningkatan (3,3%) bila dibandingkan dengan semester I-1969 sebesar 67.555 ton.

Produksi P.K. Semen Gresik dalam semester I-1970 adalah sebesar 159.472 ton dan jika dibandingkan dengan produksi semester I-1969 sebesar 138.229 ton terdapat kenaikan sebesar 14,7%

d. Produksi industri kimia lainnya

Produksi dari beberapa produksi industri lainnya adalah sebagai berikut (angka2 berasal dari Departemen Perindustrian) :

	<u>Semester I-1969 (ton)</u>	<u>Semester I-1970 (ton)</u>
1. Gelas	2.628 ^{x)}	4.595
2. Zat asam	1.030.417 ^{m3}	1.104.206 ^{m3}
3. Asam arang	248	257

x). Produksi hanya meliputi bulan Januari - April.

Terlihat dari angka2 diatas bahwa produksi semester I-1970 umumnya mengalami peningkatan daripada tahun jang lalu dalam periode jang sama.

e. Produksi ...

investasi, karena tidak dapat memenuhi syarat2 bank yang berlaku. Hal ini terbukti pula dari realisasi kredit melalui bank, yang baru terlaksana $\pm 50\%$ dari jumlah yang disediakan. Industri rokok sekarang ini berada dalam keadaan peningkatan kualitas produksi dan telah ada beberapa jenis yang diekspor. Akan tetapi masalah bahan baku tjangkeh masih sangat mempengaruhi industri rokok kretek.

Dibidang kerajinan rakjat, pembinaan dilakukan dengan menggunakan anggaran belanja pembangunan Pemerintah melalui projek2 : induk, bantuan mekanisasi, projek daerah minus, dan lain-lain. Usaha2 tersebut dalam tahun mendatang, akan ditingkatkan.

g. Industri logam, alat2 listrik/elektronik dan alat angkutan

Dibidang industri logam tampak adanya peningkatan kegiatan dengan adanya projek2 baru yang menghasilkan besi beton, besi konstruksi, pipa2, dan lain2. Dalam produksi plat seng tampak kenaikan yang menonjol, yaitu sebanyak 12.300 ton dalam semester I-1970, dibandingkan dengan 8.500 ton dalam seluruh tahun 1969.

Produksi alat2 listrik dan elektronik seperti lampu pijar, radio dan televisi menunjukkan pula adanya kenaikan2.

Dibidang assembling mobil tampak adanya penurunan dalam produksi, yaitu produksi dalam semester I-1970, hanya mentjapai $\pm 10\%$ dari produksi tahun 1969. Hal ini disebabkan karena perusahaan2 tersebut belum dapat bekerja dengan sempurna, berhubung terlambatnya impor parts dan components oleh para agen tunggal.

Dalam rangka penertiban perusahaan2 assembling telah ditetapkan 6 perusahaan general assembler dan 5 perusahaan local assembler, yang keseluruhannya mempunyai kapasitas assembling ± 12.000 kendaraan bermotor setahun.

Assembling ...

Assembling sepeda motor menunjukkan gejala kenaikan produksi, yaitu 12.365 buah dalam semester I-1970, dibandingkan dengan 21.388 buah dalam seluruh tahun 1969. Di bidang ini telah pula ada usaha untuk meningkatkan tahap produksi, yaitu dari assembling menuju kepada manufacturing, yang akan dilakukan setjara bertahap dalam waktu ± 5 tahun.

6.4.2. Pertambangan

Angka2 produksi pertambangan dalam semester I-1970 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 1969 menunjukkan kenaikan; hal ini dapat dilihat pada Tabel VI.13.

T a b e l VI.13.

PERKEMBANGAN PRODUKSI BEBERAPA HASIL PERTAMBANGAN,

1968/1969 - 1970/1971

Djenis produksi	Satuan berat	Sem. I- 1968/69	Sem. I- 1969/70	Sem. I- 1970/71	% kenaikan
1. T i m a h	ribu t o n	8,3	9,3	10,2	+ 10,2
2. E m a s	t o n	0,090	0,131	0,127	- 3,02
3. P e r a k	t o n	5,114	4,872	4,599	- 7,5
4. N i k e l	ribu ton	134,6	119,8	262,6	+119,2
5. Bauksit	ribu ton	445,0	356,6	633,3	+ 75,6
6. Batu bara	ribu ton	90,3	111,5	79,1	- 29,0

Sumber : Departemen Pertambangan.

Terlihat ...

Terlihat bahwa perkembangan produksi selama periode yang sama pada tiga tahun terakhir memperlihatkan kenaikan yang terus menerus. Akan tetapi beberapa produksi bahan tambang misalnya nikel dan bauksit harus disesuaikan dengan pasaran.

Pada sektor pertambangan ini Pemerintah juga selalu mempergiat usaha dalam eksplorasi dan peningkatan usaha; misalnya antara lain usaha eksplorasi timah dan tembaga.

T a b e l VI.14.

REKAPITULASI PRODUKSI PERTAMBANGAN

1968/1969-1969/1970

	Satuan	1968/1969	1969/1970	% kenaikan
a). Minyak bumi	djuta barrel	225	284	+ 24,01
b). Timah	ribuan ton	16,9	17,8	+ 5,3
c). Bauksit	ribuan ton	836	901	+ 7,7
d). Nikel	ribuan ton	268	310	+ 15,5
e). Emas	kg	199	261	+ 30,7
f). Perak	ton	11,0	9,6	- 12,15
g). Batu bara	ribuan ton	176	190,1	+ 7,69

Sumber : Departemen Pertambangan.

Dengan ...

Dengan memperhatikan angka2 realisasi tahun 1968/1969 dan 1969/1970 diatas terlihat adanya kenaikan hasil produksi pada beberapa djenis bahan tambang ketjuali produksi parak.

Chusus mengenai hasil produksi minyak dapat digambarkan perkembangannya sebagai berikut :

T a b e l . VI.15.

PERKEMBANGAN PRODUKSI MINYAK MENTAH INDONESIA, 1967-1970

(dalam djuta barrels)

	1967	1968	1969	1970
Triwulan I	44,4	47,4	61,7	76,0
Triwulan II	45,1	53,5	65,1	76,8
Triwulan III	46,7	55,7	68,5	78,6
Triwulan IV	49,9	63,0	75,4	-

Sumber : Departemen Pertambangan.

Serupa halnya dengan bahan2 tambang lainnya, pada sektor perminjakan tetap didjalankan usaha2 eksplorasi lepas pantai.

6.5. Produksi ...

6.5. Produksi sektor prasaarana

6.5.1. Irigasi

Perkembangan irigasi sangat erat hubungannya dengan peningkatan produksi pertanian. Dewasa ini irigasi kita berada dalam keadaan yang kurang menjenangkan sehingga pembangunan irigasi ditekankan beratkan pada program rehabilitasi dan ekstensifikasi dengan memberikan prioritas pertama kepada program rehabilitasi. Pada tahun 1969/1970 telah dapat direhabilitir bangunan2 air, bendungan2, saluran2 dan lain2 sehingga lebih dari 200.000 ha areal persawahan bisa mendapatkan air setjara lebih teratur. Disamping proyek rehabilitasi irigasi yang tersebar diseluruh Indonesia, terdapat pula proyek2 rehabilitasi irigasi yang bersifat khusus antara lain proyek rehabilitasi Djatiluhur, proyek rehabilitasi Karanganyar dan proyek rehabilitasi irigasi Gambarsari/Pasanggrahan di Djawa Tengah.

6.5.2. Perhubungan

Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan membentang sangat luas memerlukan sekali sarana2 perhubungan yang efektif dan efisien. Pembangunan dalam bidang ekonomi mempunyai kaitan yang sangat erat dengan pembangunan dan pertumbuhan jasa2 perhubungan.

Sarana2 perhubungan yang meliputi alat2 angkut, djalur2 lalu lintas darat, laut dan udara, dan terminal2 seperti pelabuhan2 laut dan udara sedang direhabilitir setjara besar2an. Disamping rehabilitasi fisik daripada sarana perhubungan ini, sudah pula

dimulai ...

dimulai dengan langkah2 penjemputan aparaturnya dan sistim2 pengaturan, suatu aspek yang tidak kalah pentingnya didalam peningkatan manfaat parawisata dari pada sarana perhubungan itu didalam perkembangan ekonomi nasional setjara keseluruhannya.

Rehabilitasi yang dimaksudkan diatas itu merupakan suatu prasyarat bagi peningkatan (take off) dalam pembinaan sarana2 perhubungan yang dalam hari2 yang akan datang diharapkan sudah bisa diperkembangkan untuk mengimbangi kebutuhan akan jasa2 perhubungan sebagai akibat dari peningkatan produksi dalam sektor2 ekonomi lainnya.

Perbaikan djalan2 dan djembatan, pada tahap sekarang ini, masih dipusatkan pada djaringan-djalan yang strategis, dan khususnya di pulau Djawa, ditutamakan up-grading daripada djalan2 utama.

Dari Tabel VI.16. dapat kita lihat angka2 perkembangan angkutan darat yang beroperasi selama tahun2 terakhir ini.

T a b e l VI.16.

PERKEMBANGAN ALAT2 ANGKUTAN DJALAN RAJA

1965 - 1969

Tahun	B n s	% Tambahan	Mobil barang	% Tambahan	Mobil penumpang	% Tambahan
1 9 6 5	18.914	-	84.654	-	166.854	-
1 9 6 6	19.584	6	92.891	9	179.494	7
1 9 6 7	18.840	3	94.892	2	184.954	3
1 9 6 8	19.510	4	93.417	- 1	201.123	9
1 9 6 9	20.497	4	95.660	2	212.123	3
Kenaikan rata2		2,75		3		3

Sumber : Departemen Perhubungan.

Disamping ...

Disamping angkutan djalan raja, maka angkutan sungai mulai diintensifika- sikan pembinaannya untuk menampung perkembangan ekonomi dan sosial jang makin meningkat didaerah-daerah jang bersangkutan. Program perbaikan dan peningkatan angkutan kereta api, antara lain meliputi rehabilitasi djalan-lintas, rehabi- litasi djembatan dan peningkatan bakal-pelanting, peningkatan perbaikan sinjal dan telekomunikasi, serta perbaikan dan penjemputan penediaan logistik. Kesemua ini diarahkan untuk meningkatkan kelantjaraan dan kesamanan angkutan ke- reta api. Tabel VI.17. memperlihatkan angka2 operasi perkereta apian :

T a b e l VI.17.

PERKEMBANGAN ANGKUTAN PENUMPANG KERETA API SELURUH
INDONESIA, 1965 - 1969

T a h u n	Produksi Km - Seat (djuta)
1 9 6 5	4.000
1 9 6 6	4.300
1 9 6 7	4.000
1 9 6 8	5.000
1 9 6 9	5.500

Sumber : Departemen Perhubungan.

Peranan dan kedudukan perhubungan laut dalam masa pembangunan adalah se- bagi sarana bagi kelantjaraan arus barang dan penumpang jang diperlukan untuk pertumbuhan dan pengembangan ekonomi dan kehidupan masyarakat Indonesia.

Unsur2 perhubungan laut jang mendapat perhatian didalam proses pembangunan sekarang ini meliputi reparasi dan dokking daripada armada niaga, perbaikan-perbaikan fisik dan peningkatan efisiensi daripada terminal2 atau pelabuhan-pelabuhan laut dan pengerukan2 serta rehabilitasi alat2 keamanan pada djalur2 pelajaran untuk meningkatkan keselamatan pelajaran.

Pada dasarnya, kebidjaksanaan pembangunan sarana perhubungan laut dititik-beratkan pada peningkatan produktivitas armada nasional, dan menghilangkan hambatan2 struktural, fungsional dan operasional, dengan titik sentral pada pelaksanaan "Regular Liner Service" kesemua pendjuru nusantara setjara bertahap. Selama dua tahun terakhir ini, penyelenggaraan Regular Liner Service telah memperlihatkan pertumbuhan jang sangat memberikan harapan jang baik. Kalau dalam tahun 1969 djumlah muatan jang diangkut dalam Regular Liner Service itu berdjumlah 1.022.666 ton maka dalam tahun 1970, hanya sampai bulan Oktober, total volume jang telah diangkut sudah mentjapai 1.417.997 ton.

Tabel dibawah ini meliputi angka produksi dari tiga perusahaan pelajaran jang dimiliki Negara (P.N. Pelni, P.N. Djakarta Lloyd, dan P.N. Bachtera Adhiguna); dari data ketiga perusahaan ini bisa dilihat bahwa volume jang diangkut oleh dunia perkapalan memperlihatkan gedjala2 jang tjenderung menaik.

T a b e l VI.18.

VOLUME JANG DIANGKUT OLEH P.N. PELNI, P.N. DJAKARTA LLOYD
DAN P.N. ADHIGUNA, 1968 - 1970
 (dalam ton)

1 9 6 8	1.335.606	+	-
1 9 6 9	1.591.990	+	12%
1 9 7 0	1.650.000	+	10,4%

Sumber : Departemen Perhubungan.

Dalam ...

Dalam memberikan penundjangan kepada unsur pengangkutan laut, produksi dan djasa maritim telah pula berhasil mengikuti perkembangan2 jang dapat dilihat dari indikator seperti dibawah ini.

T a b e l VI.19.

PRODUKSI DAN DJASA MARITIM, 1968 - 1970

T a h u n	Pembuatan Baru		Reparasi B.R.T.
	Djumlah kapal	D.W.T.	
1968	58	2.574	229.500
1969	59	5.000	221.000
1970 *)	69	8.400	

Sumber : Departemen Perhubungan.

*) Sampai dengan kwartal ke III.

Perbaikan dan peningkatan lapangan terbang dan fasilitas lainnya sedjak 1969 hingga pertengahan 1970 telah memungkinkan perkembangan angkutan udara sebagai berikut :

T a b e l VI.20.

PERKEMBANGAN PRODUKSI ANGKUTAN UDARA, 1967-SEMESTER I-1970

Produksi	1967	1968	1969	Smt. I-70	Projeksi 1970
1. Ton-km produksi	42,5	46,4	52,9	18,6	74,3
2. Ton-km terdjual	29,2	27,2	34,7	11,9	47,6
3. Djumlah penumpang	361.869	382.285	530.894	185.534	742.138
4. Djarak jang ditem- puh	9,4	11,3	12,2	4,2	16,2
5. Djam terbang	27.294	34.231	43.300	19.102	76.408
6. Load - factor	68,8%	59,9%	66,2%	62,9%	...

Sumber : Departemen Perhubungan.

Angkutan ...

Angkutan udara merupakan unsur yang menghadapi perkembangan permintaan (demand) yang sangat pesat. Kenyataan menunjukkan angka kenaikan dari tahun ketahun yang meliputi sampai sekitar 30%. Peningkatan fasilitas dalam jaringan-djaringan penerbangan tertentu yang dirasakan masih kurang terus diusahakan, 38 lapangan terbang yang sedang ditingkatkan itu diharapkan dapat mengatasi kenaikan kebutuhan dalam waktu dekat ini.

Kalaupun perkembangan armada niaga udara tidak begitu merupakan beban bagi anggaran pemerintah, maka dalam perbaikan dan penjemputan fasilitas seperti lapangan2 terbang, terminals, telekomunikasi dan navigasi udara, instalasi2 listrik dan air di-lapangan2 terbang, meteorologi dan perlengkapan2 lainnya memerlukan biaya2 yang harus ditanggung oleh pemerintah.

Pos Giro dan telekomunikasi telah pula memperlihatkan gambaran2 yang meningkat. Pelayanan hubungan dengan luar negeri, melalui station satelit Djatiluhur, telah dapat ditingkatkan. Peningkatan pelayanan telepon dengan mengotomatisasi telepon2 kota sudah makin bertambah. Djangkauan jaringan telepon, telegram dan telex sudah bertambah meluas yang akan lebih berkembang lagi apabila jaringan microwave Nusantara yang sedang dibangun dewasa ini sudah selesai.

Perkembangan telekomunikasi di Indonesia dapat dilihat dari angka-angka dalam Tabel VI.21.

Perkembangan Pos dan Giro mengalami proses intensifikasi dalam bentuk penambahan/penjelasaan fasilitas2 fisik tambahan, baik dalam bentuk gedung/kantor maupun alat2 angkutan pos maupun proses ekstensifikasi dalam bentuk perluasan jaringan pos kilat di Sulawesi Selatan dan Kalimantan,

Tabel VI.21 ...

T a b e l VI.21.

PERKEMBANGAN TELEKOMUNIKASI, 1968-1970

	1 9 6 8	1 9 6 9	1 9 7 0 *)
Telepon Otomat (buah)	79.434	90.635	94.222
Telepon Manual (buah)	91.976	92.163	101.727
Kantor Telegrap (Unit)	530	530	536
Kantor Telegrap (Unit)	453	657	658
Telegrap Dalam Negeri (puls)	2.140.605	1.992.568	1.371.251
Telegram Luar Negeri (puls)	882.000	964.270	872.878
Telex Dalam Negeri (puls)	2.218.362	3.645.320	3.922.822
Telex Luar Negeri (puls)	25.747	45.134	27.996

Sumber : Departemen Perhubungan.

*) Tidak penuh setahun.

penjelenggaraan pos keliling di beberapa kota besar di Jawa dan penambahan 14 buah kantor2 pos pembantu yang tersebar diseluruh Indonesia. Hasilnya dapat dilihat dalam peningkatan jumlah surat2 pos biasa maupun tertjatut/terdaftar didalam maupun keluar negeri. Sementara itu terus ditingkatkan kegiatan keamanan dan ketepatan dan ketepatan datangnja pos. Perkembangan weselpos dan dinas giro dan check pos dapat dilihat dalam kenaikan dari omset dinas2 tersebut yang berarti makin intensip dan ekstensip, jasa2nja dipergunakan oleh masyarakat.

Perkembangan pariwisata menunjukkan tanda2 kemajuan yang pesat sehingga memerlukan tjara pembinaan yang mantap, terarah dan berentjana. Kegiatan2 meliputi kegiatan2 survey, pengembangan dan penelitian, pendidikan, promosi dan pembinaan/pengamanan objek2 pariwisata.

Perkembangan ...

Perkembangan2 yang dapat ditatat adalah sebagai berikut :

- Arus wisatawan luar negeri ke Indonesia :

1958	-	51.315	orang
1969	-	86.067	orang
1970	-	105.000	orang

Negara asal mereka adalah Amerika Serikat, Eropa, Jepang, Australia dan negara2 Asia/Asean.

- Arus wisatawan domestik diperkirakan :

untuk tahun 1968	-	1.000.000	orang
1969	-	1.200.000	orang
1970	-	1.500.000	orang

Adapun perkembangan sarana2 kepariwisataan adalah sebagai berikut :

- Perhotelan :

djumlah kamar tersedia :

1966	-	2.471
1967	-	2.471
1968	-	2.618
1969	-	2.772
1970	-	3.390

- Travel Bureau :

djumlah2	1966	-	34
	1967	-	139
	1968	-	216
	1969	-	271
	1970	-	359

Walaupun perkembangan sarana2 tersebut menggenbirkan namun harus terus-menerus ditingkatkan untuk dapat menanggung kepesatan peningkatan arus wisatawan internasional maupun domestik tersebut diatas, khususnya dalam bidang akomodasi.

6.6. Penanaman modal

Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi usaha yang perlu didjalkan adalah : pertama, mengadakan penggalian kekayaan alam yang potensial menjadi kekayaan yang riil, dan kedua, mengadakan peningkatan efisiensi/kapasitas dari pada alat2 produksi yang sudah ada disamping modernisasi, perluasan dan rehabilitasi terhadap projek2 yang produktivitasnya menurun.

Usaha2 tersebut semuanya memerlukan penanaman modal yang sangat besar, sehingga diperlukan pengerahan dana2 yang ada pada masyarakat sendiri maupun dana2 yang dapat ditarik dari luar negeri.

6.6.1. Perkembangan penanaman modal dalam negeri

Penanaman modal dalam negeri ini bergerak dalam 12 bidang usaha. Permohonan penanaman modal sedjak 1968 s/d Agustus 1970 ada sebanyak 546 projek dengan modal senilai Rp.203,2 miliar. Dari djumlah tersebut yang telah direkomendasikan oleh Sub- Panitia Penanaman Modal Dalam Negeri adalah sebanyak 369 projek dengan modal senilai Rp.110,6 miliar untuk dapat diberikan fasilitas2 yang diminta.

Dari djumlah yang direkomendasi oleh Sub - Panitia Penanaman Modal Dalam Negeri tersebut diatas ternyata fasilitas2 pajak yang diberikan sampai dengan bulan Agustus telah mentjapai 230 projek dengan djumlah modal ditanam sebesar Rp.58,4 miliar. Demikian djuga fasilitas bea masuk yang telah diberikan sampai dengan bulan Djanuari 1970 menurut peraturan yang berlaku telah

T a b e l VI.22.

AGKAPITULASI PERKEMBANGAN PROJEK
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI 1968 s/d AGUSTUS 1970
 (dalam djuta , rupiah)

Bidang usaha	Perencanaan		Rekomendasi		Realisasi	
	Djumlah projek	Rp.	Djumlah projek	Rp.	Djumlah projek	Rp.
1. Pertanian	15	1.505,1	9	699,2	2	95,0
2. Perkebunan	72	23.091,7	52	18.118,7	12	3.299,3
3. Kehutanan	46	30.501,8	28	10.963,6	4	2.780,5
4. Perikanan	5	1.300,0	5	1.298,4	5	1.298,4
5. Peternakan	3	160,0	3	70,5	3	160,5
6. Pertambangan	2	1.517,7	2	1.394,6	2	1.394,6
7. Perindustrian	329	106.824,5	225	56.864,7	48	13.024,1
8. Pengangkutan	34	18.074,3	21	11.979,4	13	6.196,0
9. Perumahan rakyat	3	1.274,5	1	30,0	-	-
10. Kepariwisata	32	16.552,6	20	7.874,5	2	288,1
11. Prasarana	4	2.163,7	3	1.347,5	1	137,7
12. Usaha produksi lain	1	155,0	-	-	-	-
	516	203.201,3	369	110.641,5	90	28.674,5

Fasilitas pajak s/d Agustus 1970 230 projek Rp.58.411 dju-
ta

Fasilitas bea masuk s/d Juni 1970 230 projek Us : 87.697 ri-
bu

Sumber : Departemen Keuangan.

mentiapai ...

mentjapai 230 projek senilai US \$ 87.697.000,-. Dalam pada itu diantara projek2 jang telah diberikan fasilitas2 tadi menurut laporan jang masuk 90 projek senilai Rp.23,6 milyar jang beroperasi (lihat Tabel VI.22.).

Dengan memperhatikan tabel diatas, maka tampaklah bahwa kira2 67,58% permohonan jang masuk telah direkomendasikan oleh Sub - Panitia Penanaman Modal Dalam Negeri dan dari djumlah tersebut 62,33% telah diberikan fasilitas pajak dan bea masuk. Proses tersebut sangat dipengaruhi oleh lengkap tidaknja bahan2 jang disadjikan oleh pihak pemohon. Dapat dilihat bahwa minat penanaman modal dalam negeri kebanyakan ditudjukan pada bidang usaha perindustrian dan kemudian baru pada bidang usaha pertanian.

6.6.2. Perkembangan penanaman modal asing

Disamping penanaman modal dalam negeri terdapat pula penanaman modal asing jang dapat dibagi dalam bentuk penanaman langsung dan penanaman joint.

Dalam penanaman langsung para investor dengan langsung menanamkan modalnja pada bidang usaha tertentu dengan meminta fasilitas penanaman modal asing sesuai dengan peraturan jang berlaku (Undang2 No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing beserta tambahan dan perubahanja), sedangkan dalam bentuk joint modal dari swasta nasional atau Pemerintah bergabung dengan modal asing dan meminta fasilitas penanaman modal asing.

Perkembangan penanaman modal asing ini dapat dilihat pada Tabel VI.23.

Tabel VI.23. ...

Tabel diatas menunjukkan bahwa sedjak mulai berlakunya Undang2 No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing telah ada 281 project proposal yang masuk dengan djumlah modal yang akan ditanam sebesar US \$ 1,2 miliar yang terdiri dari : 71 project proposal langsung dengan djumlah modal yang akan ditanam sebesar US \$ 0,9 miliar dan 210 project proposal dalam bentuk joint antara modal asing dengan modal nasional dengan djumlah modal yang akan ditanam sebesar US \$ 0,3 miliar.

Dengan tjara lain djuga dapat diperintji bahwa djumlah modal asing yang akan masuk ada sebesar US \$ 1,1 miliar (82,79%) dan modal nasional sebesar US \$ 0,1 miliar. Berdasarkan tjatatan yang diperoleh telah direalisasikan sebesar US \$ 55 djuta (4,6%). Untuk dapat melihat perkembangan projek penanaman modal asing yang telah disetujui Pemerintah mulai dari bulan Djanuari s/d Agustus 1970 dapat dilihat Tabel VI.24.

Menurut Tabel VI.19. ternyata realisasi penanaman modal asing mulai Djanuari s/d Agustus 1970 ada sebesar 22,043 yakni US \$ 21.061.000 dari sedjumlah project yang masuk sebesar US \$ 95.536.000,-

Dalam pada itu komposisi dari pada negara2 investor dapat dilihat pada Tabel VI.25.

Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa negara investor yang terbesar adalah Amerika Serikat, Djepang yang kemudian disusul oleh Hongkong.

T a b e l VI.24.

PROJEK PEMANAHAN MODAL ASING JANG TELAH DISETUPUTIPEMERINTAH, DIANGKART S/D AGUSTUS 1970

(modal dalam ribuan US \$)

Sektor Usaha	L a n g s u n g		J o l n t		S e l u r u n g		Realisasi
	Ujuntah	Modal	Ujuntah	Asing Nasional	Ujuntah	Asing Total	
1. Perindustrian	1	5.000	23	20.188	11.203	24	25.186 36.769 11.936
2. Pertikanan	-	-	3	4.405	951	3	4.405 5.356 610
3. Pertambangan	3	5.755	-	-	-	3	5.755 5.755 483
4. Kehutanan	4	10.000	5	5.875	1.925	9	15.875 17.800 4.194
5. Perhubungan/Pelaris.	-	-	1	1.200	600	1	1.200 1.800 817
6. Phatmasi	-	2.500	5	3.113	790	7	5.163 6.403 1.252
7. Perdagangan	-	-	7	5.900	3.423	7	5.000 9.323 571
8. Pertanian/Perkeb.	1	4.800	1	240	80	2	5.040 5.100 200
9. Djasa2 & lain2	1	500	9	4.686	1.944	10	5.186 7.139 929
10. Peternakan	-	-	1	90	13	1	90 100 -
11. Perusahaan di kembalikan	-	-	-	-	-	-	- - -
J U M L A H :	12	28.555	55	45.995	20.936	67	74.560 95.536 21.061

Sumber : Departemen Keuangan.

T a b e l VI.25.

PROJEK2 PENANAMAN MODAL ASING JANG TELAH DISETUJUI PEMERINTAH
 BERTASARAKAN NEGARA INVESTOR, 1967 S/D BULAN AGUSTUS 1970
 (dalam djuta US \$)

Negara	Djumlah	M o d a l		Realisasi
		Asing	Nasional	
1. U. S. A.	50	367,9	19,0	9.577
2. Australia	7	2,5	0,4	1.505
3. B e l g i a	3	0,5	0,2	731
4. C a n a d a	3	83,3	0,07	459
5. Denmark	4	3,6	0,8	1.135
6. Inggris	8	6,1	2,0	667
7. Perantjis	8	12,8	2,5	3.249
8. Djerman Barat	16	12,1	6,0	5.213
9. Hongkong	36	37,05	5,4	947
10. D j e p a n g	49	136,0	15,0	9.803
11. Korea Selatan	3	49,21	0,5	1.638
12. L i b e r i a	1	2,2	0,2	50
13. Malaysia	18	21,21	6,0	129
14. Belanda	19	53,0	9,0	8.953
15. Norwegia	3	3,6	1,3	24
16. Panama	3	8,7	4,0	30
17. Philipina	12	259,1	5,0	1.832
18. Singapura	24	32,72	6,6	1.337
19. S w e d i a	2	0,6	0,6	-
20. S w i s s	7	9,2	0,3	104
21. Thailand	6	4,8	1,2	115
	281	1.106,19	86,07	46.838

Sumber : Departemen Keuangan.

e. Produksi industri kertas

Produksi kertas dalam semester I-1970 adalah 6.856 ton yang berarti 28,8% lebih tinggi dari pada produksi semester I-1969 (angka2 berasal dari Departemen Perindustrian) :

	<u>Semester I-1969</u>	<u>Semester I-1970</u>
1. PN. Padalarang	1.745	1.876
2. PK. Letjes	1.709	3.156
3. PN. Blabak	1.865	1.824
	<u>5.319</u>	<u>6.856</u>

Mengensi industri kertas dapat ditjatat pula bahwa unit pabrik Letjes dewasa ini sudah dalam taraf peningkatan kualitas kertas sedangkan dalam hal pemasaran tidak mengalami kesulitan. Pabrik tersebut telah mengadakan modernisasi berupa penggantian unit2 tua dengan mesin2 baru yang didatangkan dari Djerman yang dalam waktu singkat telah dapat berproduksi sehingga untuk tahun 1971/1972 diharapkan produksi akan meningkat lagi.

f. Industri ringan dan kerajinan rakyat

Angka2 produksi industri ringan dalam semester I-1970 pada umumnya menunjukkan kenaikan bila dibandingkan dengan angka2 produksi semester I-1969. Tampak pula usaha2 peningkatan mutu dalam berbagai jenis produksi, terutama jenis produksi yang dihadapkan kepada persaingan barang impor seperti batu-baterai kering, rokok, korek api, sabun, dan lain-lain, disamping adanya usaha2 diversifikasi produksi, baik untuk konsumsi dalam negeri, maupun untuk ekspor.

Masalah yang masih harus diatasi adalah rehabilitasi dan peningkatan kapasitas produksi industri2 kecil, yang belum dapat memanfaatkan kredit

investasi ...

E R R A T A

NOTA KEUANGAN DAN RANTJANGAN UNDANG UNDANG TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1970/1971.

B a b I.

Halaman 8 : T a b e l 1.3.

Harga dan indeks 9 bahan pokok

Kenaikan indeks (%) : Januari 1971 : 4,79

Pebruari 1971 : 1,98

B a b II.

Halaman 30 baris ke 6

seharusnja Rp. 262,05 milyar

Halaman 30 baris ke 7

seharusnja Rp. 362,28 milyar

B a b III.

Halaman 51 alinea 1 US \$ 486,0

seharusnja US \$ 485,2

Halaman 51 alinea 1 US \$ 76,8

seharusnja US \$ 76,0

T a b e l 3.1.

Halaman 52

76,8

seharusnja

76,0

486,0

seharusnja

485,2

B a b IV.

Halaman 63 : T a b e l 4.1.

II.1. Pembiajaan departemen2/lembaga :

Perubahan : - 14,303

seharusnja - 14.303

Halaman 72 : T a b e l 4.2.

A. Pajak Langsung Trimulan II : 27.883 seharusnja 27.883

Halaman 77 :

Alinea ke II : Hal itu disebabkan karena lebih rendahnja realisasi
pembiajaan departemen2/lembaga sebesar Rp. 13.303
djuta, dst.

Seharusnja : Hal itu disebabkan karena lebih rendahnja realisasi
pembiajaan departemen2/lembaga sebesar Rp. 14.303
djuta, dst.

Halaman 79 : T a b e l 4.3.

II.1. Pembiajaan departemen2/lembaga : Pertambahan : + 14.313

seharusnja : Pertambahan : - 14.303

II.9. Bimas Gotong Rojong

Pertambahan : 8.200

seharusnja : Pertambahan : + 8.200

Letaknja	Tertjetak	Seharusnja dibatja
10. Halaman 129, baris ke-2 dari atas	hampir sama dengan	melampaui
11. Halaman 130, Tabel III. 13.	2. Pengeluaran routine 364,1 3. Pengeluaran pembangunan 221,0 (Pembiajaan rupiah) (154,9) 5. Tabungan pemerintah 51,8	2. Pengeluaran routine 343,3 3. Pengeluaran pembangunan 241,8 (Pembiajaan rupiah) (175,7) 5. Tabungan pemerintah 72,6
12. Halaman 131, Tabel III.14	A. <u>Pengeluaran routine</u> <u>364,1</u> IV. <u>Subsidi daerah otonom</u> <u>87,6</u> 2. Subsidi daerah lainnja 77,0 B. <u>Pengeluaran pembangunan</u> <u>221,0</u> 1. Bidang ekonomi 119,5 154,9	A. <u>Pengeluaran routine</u> <u>343,3</u> IV. <u>Subsidi daerah otonom</u> <u>66,8</u> 2. Subsidi daerah lainnja 56,2 B. <u>Pengeluaran pembangunan</u> <u>241,8</u> 1. Bidang ekonomi 140,3 175,7
13. <u>Lampiran: 2.</u> Angka2 pada Bagian Anggaran IX A dan pada Jumlah	167.193.821,7 87.600.000,0 364.342.885,5 87.600.000,0	146.393.821,7 66.800.000,0 343.342.885,5 66.800.000,0
14. <u>Lampiran : 3a,</u> Angka2 didalam kolom Bag.Fem./Perhitungan dan kolom jumlah	36.518.000,- 17.573.000 39.360.000 119.466.800 17.982.000 154.917.500	57.318.000 38.373.000 60.160.000 140.266.800 38.782.000 175.717.500
15. <u>Lampiran : 3b-2</u> Angka2 tentang <u>Sektor Desa dan Daerah,</u>	17.573.000 17.982.000	38.373.000 ; 38.782.000

PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA

TAHUN ANGGARAN 1971/1972

(dalam djuta rupiah)

Djenis penerimaan		D j u m l a h
<u>A. Penerimaan dalam negeri</u>		<u>415.900</u>
<u>I. Pajak langsung</u>		<u>144.000</u>
1. <u>Pajak pendapatan</u>	15.700	
1.1. Buruh	8.500	
1.1.1. Dalam rupiah	5.500	
1.1.2. Valuta asing	3.000	
1.2. Usahawan	7.200	
1.2.1. Kohir	1.500	
1.2.2. M.P.S.	5.700	
2. <u>Pajak perseroan</u>	21.600	
2.1. Perusahaan negara	14.600	
2.1.1. Kohir	2.000	
2.1.2. M.P.S.	12.600	
2.2. Perusahaan swasta	7.000	
2.2.1. Kohir	2.000	
2.2.2. M.P.S.	5.000	
3. <u>Pajak perseroan minyak</u>	87.200	
4. <u>M. P. O.</u>	19.100	
5. <u>Lain - lain</u>	400	
<u>II. Pajak tidak langsung</u>		<u>267.700</u>
1. <u>Pajak penjualan</u>	20.700	
2. <u>Pajak penjualan impor</u>	29.600	
3. <u>Tjukai</u>	45.600	
3.1. Tjukai tembakau	42.400	
3.2. Tjukai lainnya	3.200	
4. <u>Bea masuk</u>	98.600	
5. <u>Pajak devisa ekspor</u>	28.700	
6. <u>Penerimaan minyak lainnya</u>	39.100	
7. <u>Lain - lain</u>	5.400	
<u>III. Penerimaan non - tax</u>		<u>4.200</u>
<u>B. Penerimaan pembangunan</u>		<u>169.200</u>
1. <u>Bantuan program</u>	103.100	
2. <u>Bantuan proyek</u>	66.100	
<u>D J U M L A H</u>		<u>585.100</u>

DASAR PERHITUNGAN UNTUK PERKATAAN PENGEMERAN NEGARA

R.A.P.B.N. 1971/1972

(dalam djuta rupiah)

A. Pengeluaran dalam negeri 215.900

I. Pajak langsung 114.000

1. Pajak pendapatan 15.700

1.1. Pajak pendapatan buruh 8.500

Terdiri dari dua bagian :

1.1.1. Dalam rupiah : 5.500

1.1.2. Dalam valuta asing : 3.000

1.2. Pajak pendapatan usahawan 7.200

Terdiri juga dari dua bagian :

1.2.1. Melalui kahir : 1.500

1.2.2. Melalui M.P.S. : 5.700

ad. 1.1.1. buruh-muriah

Faktor2 yang mempengaruhi :

(1) Ditinggikannya batas minimum beban pajak diperhitungkan akan mengurangi jumlah wadjiat pajak yang telah di-daftar dan membayar pajak estjara efektif.

(2) Sebaliknya ...

- (2) Sebaliknya usaha2 ekstensifikasi jumlah wadajib pajak yang baru serta usaha2 intensifikasi pemungutan diperkirakan akan dapat meningkatkan penerimaan.
- (3) Penurunan serta penjederhanaan tarif diperkirakan juga akan dapat menimbulkan akibat2 yang positif bagi pemasukan penerimaan.
- (4) Dengan semakin baiknja keadaan ekonomi diperkirakan tingkat upah dan gaji juga akan meningkat, sehingga penerimaan dapat diperbesar.

Berdasarkan hal. tersebut, maka diperkirakan penerimaan yang berasal dari pajak pendapatan buruh dalam rupiah dapat mentjapai Rp. 5.500 djuta.

ad. 1.1.2. Buruh-valuta asing

Faktor2 yang diperhitungkan :

- (1) Batas minimum bebas pajak yang ditinggikan diperkirakan tidak akan besar pengaruhnja atas pemasukan penerimaan sebab pada umumnja gaji dan upah dalam valuta asing sudah tinggi.

(2) Usaha2 ...

- (2) Usaha2 ekstensifikasi djumlah wadjib
pajak buruh serta wadjikan2 asing serta
usaha2 intensifikasi pemungutan diperki-
rakan dapat meningkatkan pemasukan pene-
rimaan.
- (3) Penurunan serta penjederhanaan tarif
djuga dapat melantjarkan penerimaan.
- (4) Keadaan ekonomi jang makin mantap kesta-
bilannya serta volume realisasi penanam-
an modal asing jang semakin meningkat
diperkirakan pula dapat menggiatkan pe-
nasukan penerimaan.

Berhubung dengan hal2 diatas diperkira-
kan pemasukan penerimaan pajak pendapatan
valuta asing dapat mentjapai djumlah
Rp.3.000 djuta.

ad. 1.2.1. Usahawan-kohir

Harus diperhitungkan hal2 sebagai berikut:

- (1) Usaha2 untuk meningkatkan pentjairan
tunggakan tahun 1967 dan sebelumnya
akan terus dilandjutkan.
- (2) Mempertjepat perampungan verifikasi
M.P.S. tahun2 1968, 1969 dan 1970 serta
intensifikasi pemungutannya dengan kohir.

Dengan ...

Dengan usaha2 tersebut diperkirakan dapat dipungut pajak pendapatan usahawan melalui kohir sebesar Rp. 1.500 djuta.

ad. 1.2.2. Usahawan-M.P.S.

Hal2 yang turut diperhitungkan adalah :

- (1) Usaha2 ekstensifikasi djumlah wadajib pajak semakin digiatkan.
- (2) Usaha2 intensifikasi pemungutan djuga makin ditingkatkan antara lain dengan tjara pembayaran dimuka setjara "lumpsum" yang dipergunakan setjara lebih luas lagi dari tahun sebelumnya; djuga pelajanan kepada wadajib pajak berupa "return guidance" didalam pengisian2 formulir pajak akan semakin ditingkatkan.
- (3) Diperkirakan masih ada penjeteran tambahan MPS-akhir tahun 1972 yang masuk dalam tahun anggaran 1971/1972.

Berdasarkan hal2 diatas, maka diperkirakan dapat dipungut pajak pendapatan usahawan melalui sistim M.P.S. sebesar Rp. 5.700 djuta.

2. Pajak perseroan

21.600

2.1. Pajak perseroan perusahaan negara

12.600

Terdiri dari dua bagian :

2.1.1. Melalui kohir : 2.000

2.1.2. Melalui M.P.S. : 12.600

2.2. Pajak perseroan perusahaan swasta

7.000

Terdiri juga dari dua bagian :

2.2.1. Melalui kohir : 2.000

2.2.2. Melalui M.P.S. : 5.000

ad. 2.1.1. Perusahaan negara - kohir

Faktor2 yang diperhitungkan:

(1) Usaha2 untuk meningkatkan pertjairan
tunggakan tahun 1967 dan sebelumnya
akan terus dilandjutkan.

(2) Mempertjepat perampungan verifikasi
M.P.S. tahun2 1968, 1969 dan 1970
serta intensifikasi pemungutannya
dengan kohir.

Dengan usaha2 seperti tersebut diatas,
diperkirakan dapat dipungut penerimaan
sebesar Rp. 2.000 djuta.

ad. 2.1.2. Perusahaan negara - M.P.S.

Hal2 yang diperhitungkan adalah:

(1) Perubahan ...

- (1) Perubahan bentuk P.M. menjadi PERSERO2 dengan disertai penilaian kembali atas aktiva dan passivanya, yang dapat mengakibatkan pula potensi penghapusan akan menjadi lebih besar serta laba kena pajak menjadi berkurang, dapat mempunyai pengaruh atas pemasukan penerimaan.
- (2) Demikian pula kemungkinan P.M. melakukan penanaman modal dengan menggunakan fasilitas undang2 penanaman modal dalam negeri dapat mempengaruhi pemasukan penerimaan.
- (3) Sebaliknya perkiraan akan perkembangan ekonomi dan produksi yang semakin baik dalam tahun anggaran 1971/1972 akan dapat meningkatkan penerimaan.
- (4) Demikian pula usaha2 intensifikasi pemungutan dapat meningkatkan pemasukan penerimaan (antara lain penggunaan tjara pembayaran di muka setjara "lump sum" dan "return guidance" dalam pengisian formulir).

Berdasarkan hal2 tersebut diatas diperkirakan bahwa pemasukan penerimaan dari pajak perseoran perusahaan negara melalui sistim M.P.S. dapat meningkat Rp. 12.600 djuta.

ad. 2.2.1. Perusahaan swasta-kohir

Usaha2 jang akan didjalkan adalah:

- (1) Meningkatkan pentjairan tunggakan tahun 1967 dan sebelumnya setjara lebih intensif.
- (2) Mempertjepat perampungan verifikasi M.P.S. tahun2 1968, 1969 dan 1970 serta intensifikasi pemungutannya dengan kohir.

Dengan usaha2 sedemikian itu, diperkirakan dapat dipungut penerimaan sebesar Rp. 2.000 djuta.

ad. 2.2.2. Perusahaan swasta - MPS

Faktor2 jang harus diperhitungkan adalah:

- (1) Fasilitas2 perpajakan jang berlaku menurut ketentuan2 didalam undang-undang penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing mempunyai pengaruh atas pemasukan penerimaan.
- (2) Sebaliknya dengan selesainya masa bebas-pajak bagi beberapa perusahaan asing besar mulai tahun 1971 dapat meningkatkan pemasukan penerimaan.

(3) Bagitu ...

(3) Begitu pula perkembangan ekonomi dan produksi yang diperkirakan akan menjadi semakin baik dalam tahun anggaran 1971/1972 akan dapat meningkatkan penerimaan.

(4) Usaha2 intensifikasi pemungutan akan terus ditingkatkan (antara lain tjara pembayaran "lump sum" dan "return guidance" dalam pengisian formulir pajak).

Berdasarkan hal2 tersebut, diperkirakan penerimaan pajak perseroan swasta melalui sistim MFS dapat mentjapai Rp. 5.000 djuta.

3. Pajak perseroan minyak

87.200

Perhitungannya didasarkan pada hal2 sebagai berikut:

- (1) Penerimaan negara dari perusahaan2 minyak asing diperkirakan berdjumlah US \$ 230,7 djuta.
- (2) Kurs konversi dan kurs nilai-lawan minyak kedua-duanya adalah : Rp.378,- per US \$.

Penerimaan:

230,7 djuta x Rp.378,- = Rp. 87.200 djuta.

4. M.P.O. ...

- (b) pajak dividen
- (c) lain2 hasil pajak yang tidak dapat
dipesifikasikan

Faktor2 yang diperhitungkan adalah :

- (1) Usaha2 untuk lebih mengintensifkan
pemungutan pajak kekayaan terus
dilanjutkan dan ditingkatkan.
- (2) Perluasan objek pajak dividen
menurut Undang-Undang No.10 tahun
1970 diperkirakan dapat meningkat-
kan penerimaan pajak dividen.
- (3) Demikian pula karena berakhirnya
masa bebas-pajak bagi beberapa
perusahaan asing besar dalam tahun
1971, diharapkan adanya peningkatan
penerimaan.

Berdasarkan hal2 tersebut diatas
diperkirakan penerimaan yang berasal
dari lain2 pajak langsung akan berdjum-
lah Rp. 400 djuta.

II. Pajak tidak langsung

267.700

1. Pajak penjualan

20.700

Perhitungannya didasarkan pada hal2
sebagai berikut :

(1) Pemeranan ...

- (1) Penurunan berbagai tarif pajak penjualan pada taraf pertama dapat mengurangi penerimaan; tetapi hal tersebut juga mempunyai pengaruh positif bagi perluasan produksi dan bagi kerelaan wajib-pajak untuk memenuhi kewajiban²-nya. Dengan demikian diharapkan sebagai hasil keseluruhannya suatu peningkatan dalam pemasukan penerimaan.
- (2) Diperkirakan adanya kenaikan² produksi didalam berbagai sektor ekonomi sesuai dengan perkembangan ekonomi pada umumnya.
- (3) Kestabilan harga yang semakin mantap.
- (4) Usaha² ekstensifikasi pengenaan serta intensifikasi pemungutan terus ditingkatkan.

Berdasarkan pengamatan² seperti tersebut diatas, diperkirakan penerimaan pajak penjualan sebesar Rp. 20.700 djuta.

2. Pajak penjualan impor

29.600

Perkiraan penerimaan pajak penjualan impor erat hubungannya dengan perkiraan penerimaan bea masuk. Berdasarkan pengalaman

ada ...

ada perbandingan atau "ratio" tertentu antara penerimaan pajak penjualan impor dengan penerimaan bea masuk.

Untuk tahun anggaran 1971/1972 angka perbandingan tersebut diperkirakan besarnya pada tingkat 30%. Dengan demikian bila penerimaan bea masuk diperkirakan besarnya Rp. 98.600 djuta, maka penerimaan pajak penjualan impor besarnya diperkirakan dapat mentjapai Rp. 29.600 djuta.

3. <u>T j u k a i</u>	<u>45.600</u>
3.1. Tjukai tembakau	42.400
3.2. Tjukai lainnya	3.200

ad. 3.1. Tjukai tembakau

Hal2 jang didjadikan dasar perhitungan:

- (1) Usaha2 untuk dapat mendjamin peningkatan produksi hasil2 tembakau tetap dilandjutkan dan ditingkatkan, termasuk kebidjaksanaan harga dibidang tjukai sedemikian rupa sehingga tjukup wadjar dan dapat merangsang produksi.

(2) Penertiban...

(2) Penertiban merek dan kualitas hasil2

tembakau sehingga sesuai dengan

harga pita tjukainja.

(3) Perbaikan keadaan ekonomi pada umum-

nja dapat meningkatkan konsumsi ma-

sjarakat atas hasil2 tembakau.

Berdasarkan hal2 tersebut diperkira-
kan penerimaan tjukai tembakau dapat men-
tjapai Rp. 42.400 djuta.

ad. 3.2. Tjukai lainnja

Unsur-unsurnja :

(a) tjukai gula

(b) tjukai bir

(c) tjukai alkohol sulingan

Berdasarkan hal2 bahwa :

(1) Usaha2 untuk dapat mendjamin pe-
ningkatan produksi tetap dilandjut-
kan dan ditingkatkan, termasuk ke-
bidjaksanaan penetapan harga jang
dikenakan tjukai.

(2) Perbaikan keadaan ekonomi akan dapat
memperbesar pula volume pemakaian
masjarakat atas hasil2 gula, bir
serta alkohol sulingan.

Berdasarkan ...

Berdasarkan hal2 tersebut, diperkirakan penerimaan yang berasal dari ketiga djenis tjukad tersebut dapat mentjapai Rp.3.200 djuta.

4. Bea masuk

98.600

Perkiraan penerimaan bea masuk didasarkan pada hal2 sebagai berikut :

- (1) Djumlah impor yang dapat dikenakan bea masuk diperkirakan sebesar US \$ 811,5 djuta.
- (2) Tarif rata2 bea masuk adalah 31 %.
- (3) Nilai dasar perhitungan bea masuk adalah Rp.378,- per US \$.

Dengan demikian penerimaan bea masuk diperkirakan besarnya sejumlah :

$811,5 \text{ djuta} \times 31\% \times \text{Rp.378,-} = \text{Rp.99.607 djuta};$ atau dibulatkan: Rp.98.600,- djuta.

5. Padjak atas ekspor

28.700

Dasar perhitungan adalah :

- (1) Djumlah ekspor diperkirakan berjumlah US \$ 800 djuta.

(2) Deri ...

- (2) Dari jumlah tersebut ekspor barang2
jadi diperkirakan 5%.
- (3) Bagian Pemerintah dari ekspor yang
dikenakan pajak adalah 10 %.
- (4) Kurs devisa adalah Rp.378,- per
US \$.

Penerimaan dari pajak atas ekspor
diperkirakan berjumlah (800 djuta -
5% x 800 djuta) x 10% x Rp.378,- =
Rp.28.728 djuta; atau dibulatkan Rp.28.700
djuta.

6. Penerimaan minyak lainnya

39.100

Perkiraan penerimaan didasarkan pada
hal2 sebagai berikut :

- (1) Karena perbaikan keadaan ekonomi, maka
pemakaian masyarakat atas hasil2 minyak
akan meningkat.
- (2) Sementara itu ongkos produksi minyak
akan diusahakan untuk ditekan pada
tingkat yang wajar.

Atas dasar hal2 tersebut, diperkirakan
penerimaan dapat mencapai Rp. 39.100 djuta.

7. Lain-lain ...

7. Lain-lain pajak tidak langsung

5.400

Unsur-unsurnja :

- (a) bea meterai
- (b) bea lelang
- (c) lain2 penerimaan pajak

Ferkiraan pemasukan penerimaan didasarkan pada hal2 sebagai berikut :

- (1) Perbaikan keadaan ekonomi pada umumnya diperkirakan dapat meningkatkan penerimaan pajak termasuk jang berasal dari bea meterai.
- (2) Intensifikasi penungutan akan ditingkatkan dengan berbagai tjara termasuk pengketatan pengawasan dari pengenaannja.

Berdasarkan hal2 tersebut dapat diharapkan pemasukan sebesar Rp. 5.400 djuta.

III. Penerimaan non-tax

4.200

Baik terhadap penerimaan non-tax jang berasal dari departemen maupun jang berasal dari pengikut sertaan Pemerintah dalam aktivitas dunia usaha akan dilaksanakan penertiban2 jang lebih teratur dan terarah.

Perluang ...

Berhubung dengan itu diperhitungkan adanya peningkatan penerimaan non-tax sehingga untuk tahun anggaran 1971/1972 perkiraan penerimaannya adalah Rp.4.200 djuta.

B. Penerimaan pembangunan

169.200

1. Bantuan program

103.100

Perkiraan penerimaan yang berasal dari nilai-lawan bantuan program didasarkan pada hal2 sebagai berikut :

- (1) Jumlah bantuan program dalam tahun anggaran 1971/1972 diperkirakan besarnya US \$ 370 djuta.
- (2) Dari jumlah tersebut sebesar US \$ 160 djuta berupa devisa kredit, barang modal dan pupuk.
- (3) Sedjumlah US \$ 50 djuta merupakan bantuan kapas kasar dan benang tenun.
- (4) Sisa sedjumlah US \$ 160 djuta merupakan bantuan beras dan tegung terigu.
- (5) Kurs adalah Rp.378,- per US \$.

Berdasarkan hal2 tersebut penerimaan nilai-lawan diperkirakan berdjumlah Rp. 103.100 djuta dengan perintjian sebagai

berikut: ...

berikut:

- nilai-lawan dari devisa kredit dan

bantuan barang modal:

130 djuta x Rp.378,- = Rp. 49.140 djuta

- nilai-lawan bantuan pupuk:

30 djuta x Rp.378,- = Rp. 11.340 djuta

subsidi Rp. 3.133 djuta

Rp. 8.207 djuta

- nilai-lawan bantuan kapas kasar:

35 djuta x Rp. 378,- = Rp. 13.230 djuta

subsidi Rp. 5.705 djuta

Rp. 7.525 djuta

- nilai-lawan bantuan benang tenan:

15 djuta x Rp.378,- = Rp. 5.670 djuta

subsidi Rp. 3.420 djuta

Rp. 2.250 djuta

- nilai-lawan bantuan beras:

110 djuta x Rp.378,- = Rp. 41.580 djuta

subsidi Rp. 20.395 djuta

Rp. 21.185 djuta

- nilai-lawan ...

- nilai - lawan bantuan tepung terigu :

50 djuta x Rp. 378,- = Rp. 18.900 djuta

subsidi Rp. 4.107 djuta

Rp. 14.793 djuta

2. Bantuan projek

66.100

Dasar perhitungan :

- (1) " Commitment" bantuan projek dalam tahun anggaran 1971/1972 diperkirakan mentjapai djumlah US \$ 270 djuta.
- (2) Dari djumlah "Commitment" tersebut, maka djumlah realisasi atau "disbursement" dalam tahun anggaran 1971/1972 diperkirakan mentjapai US \$ 175 djuta.
- (3) Kurs penilaian adalah Rp. 378,- per US \$.

Dengan demikian nilai dalam rupiah dari bantuan projek adalah : Rp. 66.100 djuta.

RANTJANG ARESKAP BELANDA NEGARA - RUT 11
TAKUS 1971/1972

Calan ribwen repish.

Lampiran : 2

Angor Rut.	Region Angoran	DEPARTEMEN/LENGKA	Objek	Belanda Rasional	Belanda Barang	Subsidi/ Perish. Kew.	Barang/Il- titan. Hutan	Lampiran
1.	I A.	M.P.R.S.	175.622,0	36.586,8	135.935,2			
2.	B.	D.P.R.O.P.	831.795,7	264.083,4	567.712,3			
3.	C.	D. P. A.	68.322,1	17.225,9	51.115,2			
4.	H A.	B. P. K.	207.113,4	68.180,2	138.933,2			
5.	B.	Mekmah Agung	43.357,9	15.657,9	27.685,0			
6.	C.	Kedjaksan Agung	1.486.570,0	1.042.417,0	437.099,0			
7.	III A.	Kepresidenan	801.171,7	37.124,8	764.082,9			
8.	B.	Sekretariat Negara	1.045.732,3	224.181,7	821.550,6			
9.	C.	Badan/Lesaga. Ruz. Departemen	1.617.658,8	537.332,7	451.06,0			
10.	IV	Departemen Dalam Negeri	2.286.420,4	1.659.524,2	581.36,2			
11.	V	Departemen Luar Negeri	7.103.191,5	3.500.871,2	3.527.420,3			
12.	VI	Departemen KALAMAH	119.211.621,7	73.737.762,5	45.023.858,8			
13.	VII	Departemen Kehakiman	4.032.780,5	2.166.824,4	1.835.862,2			
14.	VIII	Departemen Perhubungan	2.634.810,8	1.448.352,3	1.247.958,5			
15.	IX	Departemen Keuangan	5.734.437,1	2.806.694,2	2.977.782,8			
16.	IX A	Bagian Pendidikan dan Penitlagaan	157.193.621,7	29.593.827,7	6.600.064,0	87.600.000,0	57.200.000,0	6.280.000,0
17.	X	Departemen Perdagangan	773.041,0	414.639,6	318.381,4			
18.	XI	Departemen Pertanian	1.472.856,0	830.039,5	599.019,5			
19.	XII	Departemen Perindustrian	868.663,6	462.704,3	403.959,3			
20.	XIII	Departemen Pertahanan	314.395,9	106.703,3	127.605,5			
21.	XIV	Departemen P.U. & T.L.	1.591.334,0	532.747,3	1.058.516,7			
22.	XV	Departemen Perhubungan	3.003.882,4	1.285.207,3	1.718.575,1			
23.	XVI	Departemen P. & K.	32.304.615,2	17.757.708,1	3.146.907,1			
24.	XVII	Departemen Kesehatan	5.210.638,4	2.640.374,5	2.579.464,0			
25.	XVIII	Departemen A g a s	11.357.394,2	10.512.073,5	825.320,8			
26.	XIX	Departemen Tenaga Kerja	906.635,9	381.159,9	515.485,9			
27.	XX	Departemen Sosial	1.290.246,5	725.321,9	573.526,7			
28.	XXI	Departemen Transportasi	875.387,9	341.705,4	233.822,5			
Jumlah :			364.142.885,5	153.775.133,7	79.367.751,8	87.600.000,0	57.200.000,0	6.280.000,0

Sumber : Departemen Keuangan R.L.

(Dalam ribuan rupiah)

Dap. Per- dagangan	Dap. Per- tanian	Dap. Per- industrian	Dap. Per- tambangan	Dap. P. & T. L.	Dap. Perhu- bungar.	Dap. P & K	Dap. Kese- hatan.	Dap. A & M	Dap. In- tel.	Dap. Sosial.	Dap. Koperasi	Dijumlah	Bidang / Sektor
-	15.918.000	1.463.800	999.000	491.000.000	13.965.000	-	-	-	280	-	1.094.000	119.466.800	1. BUNING EKONOMI
-	15.918.000	-	-	21.938.000	-	-	-	-	-	-	1.094.000	45.995.000	1.1. Sektor Pertanian dan Irigasi
-	-	1.463.800	999.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.662.800	1.2. Sektor Industri dan Pertambangan
-	-	-	-	10.250.000	-	-	-	-	-	-	-	10.250.000	1.3. Sektor Tenaga Listrik
-	-	-	-	17.412.000	13.965.000	-	-	-	-	-	-	31.477.000	1.4. Sektor Perhubungan dan Pariwisata
-	-	-	-	-	-	-	-	-	280	-	-	17.982.000	1.5. Sektor Pembangunan Daerah dan Desa,
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.900.000	1.6. Sektor Penjabatan Pemerintahan
286.500	566.000	409.500	5.000	2.442.500	140.000	6.450.000	4.611.500	1.014.000	230	312.900	427.500	24.649.600	2. BIDANG SOSIAL
-	-	-	-	-	-	-	-	387.000	-	-	-	667.000	2.1. Sektor Agama
386.500	566.000	409.500	5.000	585.500	140.000	6.450.000	268.793	627.000	100	23.800	427.500	11.825.529	2.2. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	970.700	2.3. Sektor Tenaga Kerja dan Pengaduk.
-	-	-	-	-	-	-	4.332.707	-	-	-	-	5.832.707	2.4. Sektor Kesehatan dan keluarga Barentjara.
-	-	-	-	2.864.000	-	-	10.000	-	-	280.100	-	3.163.100	2.5. Sektor Perumahan, Kesusilaan Sosial dan Kesehatan Air Bersih
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.064	2.6. Sektor Penerangan
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.270.500	2.7. Sektor Tertib Hukum
186.000	374.000	200.200	98.000	204.000	150.000	200.000	83.500	86.000	100	57.100	138.500	10.801.100	3. BIDANG URBAN
186.000	374.000	200.200	98.000	304.000	150.000	200.000	83.500	86.000	100	57.100	138.500	3.485.300	3.1. Sektor Pemerintahan Umum
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	3.2. Sektor Perumahan dan Kesehatan
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	667.000	3.3. Sektor Badan2 Berseksian
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.648.800	3.4. Sektor Pengawasan Kesehatan Negara
572.500	16.858.000	2.073.500	1.102.000	52.753.500	11.255.000	6.650.000	4.700.000	1.100.000	900	370.000	1.660.000	154.917.500	D j u m l a h

(dalam ribuan rupiah)
(dalam ribuan US. dollar)
1 US. \$ = Rp. 378,-

No. Code	Bidang / Sektor / Sub Sektor / Program	New Dep.		Pengeluaran dan Penerimaan		Dep. Pertanian		Dep. P.U.T.L.		Dep. Pertambangan		Dep. P. & K.		Dep. Kesehatan		Jumlah Nilai	
		U.S.\$.	Rp.	U.S.\$.	Rp.	U.S.\$.	Rp.	U.S.\$.	Rp.	U.S.\$.	Rp.	U.S.\$.	Rp.	U.S.\$.	Rp.	U.S.\$.	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.4.1.7.	Program Perbaikan Prasarana Perhubungan Udara									9.100	3.439.800					9.100	3.439.800
1.4.1.10.	Program Perbaikan dan Pening- katan Jasa Telekomu- kasi									22.135	8.367.030					22.135	8.367.030
1.4.2.	Sub Sektor : Pendidikan									200	75.600					200	75.600
1.4.2.1.	Program Pengembangan Paralel- ta.									200	75.600					200	75.600
2.	Bidang : S o s i a l	200	113.400	2.000	14134.000	200	75.600	2.824	1.067.472			1.000	378.000	1.200	453.600	8.524	3.232.072
2.2.	Sektor : Pendidikan dan Kebudayaan					200	75.600					1.000	378.000			4.000	1.512.000
2.2.1.	Sub Sektor : Pendidikan					200	75.600					1.000	378.000			1.200	453.600
2.2.1.3.	Program Peningkatan Pendidikan Teknik dan Kejuruan					200	75.600					1.000	378.000			1.200	453.600
2.2.3.	Sub Sektor : Pendidikan dan Pencapaian Internasional	200	113.400	2.500	945.000											2.800	1.058.400
2.2.3.1.	Program : Pendidikan dan La- tihan Internasional	200	113.400	2.500	945.000											2.800	1.058.400
2.4.	Sektor : Kesehatan dan Kese- jahteraan Masyarakat			200	198.000									1.200	453.600	1.700	642.600
2.4.1.	Sub Sektor : Kesehatan																
2.4.1.2.	Program : Pengembangan Infra- struktur Kesehatan													1.200	453.600	1.200	453.600
2.4.1.3.	Program : Pemberantasan Penye- kit Menular.													200	75.600	200	75.600
2.4.2.	Sub Sektor : Keluarga Berke- siaan			200	198.000									1.000	378.000	1.000	378.000
2.4.2.1.	Program : Pembinaan Keluarga Berencana			200	198.000											200	75.600
2.5.	Sektor : Perumahan, Kesejahter- aan Sosial dan Pening- katan Air Minum.							2.824	1.067.472							2.824	1.067.472
2.5.3.	Sub Sektor : Air Minum dan Kesejahteraan							2.824	1.067.472							2.824	1.067.472
2.5.3.1.	Program : Peningkatan Pening- katan Air Minum.							2.824	1.067.472							2.824	1.067.472
Jumlah		500	113.400	10.000	3.780.000	7.310	2.763.180	92.495	34.940.430	62.755	23.731.390	1.000	378.000	1.200	453.600	175.000	66.152.000

Departemen Perindustrian	Departemen Pertambangan	Departemen Pekerjaan Karya & Tenaga Listrik	Departemen Perhubungan	Dep. P. & K.	Dep. Kesehatan	Dep. Agama	Departemen Tenaga Kerja	Dep. Sosial	Departemen Transkrip	D u m l a	BIDANG/SEKTOR/SUB-SEKTOR/PROGRAM
											I. <u>ANGGARAN RISET</u>
											1.1. <u>Sektor Perikanan dan Irigasi</u>
											1.1.1. <u>Sub-Sektor Perikanan</u>
											1.1.1.1. Program Peningkatan Produksi Hasil Perikanan
											1.1.1.2. Program Peningkatan Produksi Hasil Perikanan
											1.1.1.3. Program Peningkatan Produksi Perikanan
											1.1.1.4. Program Peningkatan Produksi Hasil Perikanan dan Perikanan
											1.1.1.5. Program Peningkatan Produksi Hasil Perikanan
											1.1.2. <u>Sub - Sektor Irigasi</u>
											1.1.2.1. Program Penyaliran Tanah dan Air
											1.1.2.2. Program Perbaikan Irigasi
											1.1.2.3. Program Perbaikan Irigasi
											1.1.2.4. Program Perbaikan dan Pemeliharaan Sungai
											1.1.2.5. Program Pembangunan Irigasi Lainnya.
											1.2. <u>Sektor Industri dan Pertambangan</u>
											1.2.1. <u>Sub - Sektor Industri</u>
											1.2.1.1. Program Pemeliharaan Industri dengan C
											1.2.1.2. Program Pemeliharaan Industri dengan C
											1.2.1.3. Program Pengembangan Industri
											1.2.2. <u>Sub - Sektor Pertambangan</u>
											1.2.2.1. Program Penelitian Himpitan dan Gas Bumi
											1.2.2.2. Program Perbaikan Pertambangan Timah
											1.2.2.3. Program Pemeliharaan Tambang Batu Bara
											1.2.2.4. Program Peningkatan Kegiatan Geologi
											1.2.2.5. Program Perbaikan Fasilitas Pertambangan Pertambangan

M.P.R.S.		DPGR	D.P.A.	B.P.K.	Perkumh	Agrng	Kedjaksaan	Kepresid- danan	Sekretaris Negara	Bdn./Lemb.	Dep. Dalam Regeri	Dep. Luar Negari	Dep. Hankam	Dep. Keha- kiman	Dep. Pert- ahanan	Dep. Kew- angan	Bag. Pemb- erbitan	Dep. Per- dagangan	Dep. Per- kembangan
1.3. Sektor Tenaga Listrik																			
1.3.1. Sub-Sektor Tenaga Listrik																			
1.3.1.1. Progra, Peningkatan Tenaga Listrik																			
1.4. Sektor Perhubungan dan Parawisata																			
1.4.1. Sub-Sektor Perhubungan																			
1.4.1.1. Program Perbaikan Prasarana Perhubungan Darat (Jalan dan jembatan)																			
1.4.1.2. Program Peningkatan Fasilitas Angkutan Jalal																			
1.4.1.3. Program Peningkatan dan Perbaikan Angkutan Kereta Api																			
1.4.1.4. Program Perbaikan Prasarana Perhubungan Laut																			
1.4.1.5. Program Perbaikan Armada Naga																			
1.4.1.6. Program Perbaikan Angkutan Sungai																			
1.4.1.7. Program Perbaikan Prasarana Perhubungan Udara																			
1.4.1.8. Program Pembinaan Armada Udara Naga																			
1.4.1.9. Program Peningkatan Jasa Pos dan Giro																			
1.4.1.10. Program Perbaikan dan Peningkatan Jasa Telekomunikasi																			
1.4.1.11. Program Peningkatan Sarana Pembangunan																			
1.4.2. Sub-Sektor Parawisata																			
1.4.2.1. Program Pengembangan Parawisata																			
1.5. Sektor Desa dan Daerah																			
1.5.1. Sub-Sektor Desa																			
1.5.1.1. Program Pembangunan Desa																			
1.5.1.2. Program Tata Agraria																			
1.5.2. Sub-Sektor Daerah																			
1.5.2.1. Program Pembangunan Daerah Tingkat II																			
1.5.2.2. Program Pembangunan Daerah Trian Barat																			
1.6. Sektor Pantiartaan Pemandirian																			
1.6.1. Sub-Sektor Kredit Investasi																			
1.6.1.1. Program Kredit Investasi melalui Perbaikan																			

M.P.R.S.		DPGR	D.P.A.	B.P.K.	Perkumh	Agung	Kedjaksaan	Agung	Kepresid- danan	Setretaris Negeri	Bdn./Lemb.	Dep. Dalam Regeri	Dep. Luar Negeri	Dep. Hankam	Dep. Keha- kiman	Dep. Pert- rangan	Dep. Kew- angan	Bag. Pemb- Perhimpun- an	Dep. Per- dagangan	Dep. Per- tambak
1.3. Sektor Tenaga Listrik																				
1.3.1. Sub-Sektor Tenaga Listrik																				
1.3.1.1. Progra, Peningkatan Tenaga Listrik																				
1.4. Sektor Perhubungan dan Parawisata																				
1.4.1. Sub-Sektor Perhubungan																				
1.4.1.1. Program Perbaikan Prasarana Perhubungan Darat (Jalan dan jembatan)																				
1.4.1.2. Program Peningkatan Fasilitas Angkutan Jalal																				
1.4.1.3. Program Peningkatan dan Perbaikan Angkutan Kereta Api																				
1.4.1.4. Program Perbaikan Prasarana Perhubungan Laut																				
1.4.1.5. Program Perbaikan Armada Naga																				
1.4.1.6. Program Perbaikan Angkutan Sungai																				
1.4.1.7. Program Perbaikan Prasarana Perhubungan Udara																				
1.4.1.8. Program Pembinaan Armada Udara Naga																				
1.4.1.9. Program Peningkatan Jasa Pos dan Giro																				
1.4.1.10. Program Perbaikan dan Peningkatan Jasa Telekomunikasi																				
1.4.1.11. Program Peningkatan Sarana Pembangunan																				
1.4.2. Sub-Sektor Parawisata																				
1.4.2.1. Program Pengembangan Parawisata																				
1.5. Sektor Desa dan Daerah																				
1.5.1. Sub-Sektor Desa																				
1.5.1.1. Program Pembangunan Desa																				
1.5.1.2. Program Tata Agraria																				
1.5.2. Sub-Sektor Daerah																				
1.5.2.1. Program Pembangunan Daerah Tingkat II																				
1.5.2.2. Program Pembangunan Daerah Trian Barat																				
1.6. Sektor Pantiartaan Pemandirah																				
1.6.1. Sub-Sektor Kredit Investasi																				
1.6.1.1. Program Kredit Investasi melalui Perbaikan																				

Dep. Per- industrian	Dep. Per- tambangan	Dep. P. U. & T. L.	Dep. Per- mukiman	Dep. P & K	Dep. Kese- jahtera	Dep. Agri- kultura	Dep. Terna- per Kerdja	Dep. Sosial	Dep. Trans- por	Dijual	bidang/SEKTOR/SUB SEKTOR/PROGRAM
		10.250.000								10.250.000	1.3. Sektor Tenaga Listrik
		10.250.000								10.250.000	1.3.1. Sub-Sektor Tenaga Listrik
		10.250.000								10.250.000	1.3.1.1. Program Peningkatan Tenaga Listrik
		17.412.000	13.265.000							21.477.000	1.4. Sektor Perhubungan dan Perikanan
		17.412.000	13.690.000							21.202.000	1.4.1. Sub-Sektor Perhubungan
		17.006.000								17.006.000	1.4.1.1. Program Perbaikan Prasarana Perhubungan Darat (dijalan dan jembatan)
			90.000							90.000	1.4.1.2. Program Peningkatan Fasilitas Angkutan Jalan
			3.150.000							3.150.000	1.4.1.3. Program Peningkatan dan Perbaikan Angkutan Kereta Api
			4.350.000							4.350.000	1.4.1.4. Program Perbaikan Prasarana Perhubungan Laut
										-	1.4.1.5. Program Perbaikan Awada Waga
			120.000							120.000	1.4.1.6. Program Perbaikan Angkutan Sungai
			2.975.000							2.975.000	1.4.1.7. Program Perbaikan Prasarana Perhubungan Udara
										-	1.4.1.8. Program Perbaikan Armada Udara Waga
										230.000	1.4.1.9. Program Peningkatan Daya Per dan Gino
			230.000							2.550.000	1.4.1.10. Program Perbaikan dan Peningkatan Daya Telekomunikasi
			2.430.000							791.000	1.4.1.11. Program Peningkatan Sarana Pembangunan
		406.000	325.000							275.000	1.4.2. Sub Sektor Perikanan
			275.000							275.000	1.4.2.1. Program Pengembangan Perikanan
			275.000							17.982.000	1.5. Sektor Desa dan Daerah
							280.000			280.000	1.5.1. Sub-Sektor Desa
							280.000			5.574.000	1.5.1.1. Program Pembangunan Desa
							280.000			40.000	1.5.1.2. Program Tata Agraria
										12.365.000	1.5.2. Sub-Sektor Daerah
										8.868.000	1.5.2.1. Program Pembangunan Daerah Tingkat II.
										3.500.000	1.5.2.2. Program Pembangunan Daerah Tingkat I dan Barat
										11.500.000	1.6. Sektor Peningkatan Peningkatan
										14.500.000	1.6.1. Sub-Sektor Kredit Investasi
										11.500.000	1.6.1.2. Program Kredit Investasi melalui Perbaikan

ANGGARAN - PEMBANGUNAN

2. BIDANG SOSIAL

BIDANG / SEKTORAL / SUB SEKTOR / PROGRAM		M.P.R.S.	DFR - CR	D.P.A.	B.P.K.	Maklumi	Agung	Kedjajaan	Keprasi-	dena	Sekretari-	Kegara	Ban/Lembaga	Non Dep.	Departemen Dalam Negeri	Departemen Luar Negeri	Departemen Perikanan	Departemen Kehakiman	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	Departemen Kesehatan	Departemen Pekerjaan Umum	Departemen Perhubungan	Departemen Pertahanan	Departemen Kemanusiaan
2. ANGGARAN RUPIAH																								
2.1. Sektor Agama																								
2.1.1. Sub Sektor Agama																								
2.1.1.1. Program Penjadwalan Sarana Kehidupan Bangsa																								
2.1.1.2. Program Penerangan dan Pendidikan Agama																								
2.1.1.3. Program Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Masyarakat																								
2.1.1.4. Program Peningkatan dan Bantuan Lembaga Keagamaan Swasta																								
2.1.1.5. Program Pembangunan Masjid Istiqal																								
2.2. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan																								
2.2.1. Sub Sektor Pendidikan																								
2.2.1.1. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar																								
2.2.1.2. Program penambahan Pendidikan Kajian pada Sekolah Lanjutan Atas																								
2.2.1.3. Program Peningkatan Teknik dan Kajian																								
2.2.1.4. Program Peningkatan Pendidikan Guru																								
2.2.1.5. Program Pembinaan Perguruan Tinggi																								
2.2.1.6. Program Peningkatan Pendidikan Masyarakat dan Orang Dewasa																								
2.2.2. Sub Sektor Kebudayaan																								
2.2.2.1. Program Pengembangan Kebudayaan Nasional																								
2.2.2.2. Program Peningkatan Kegiatan Olahraga																								
2.2.3. Sub Sektor Pendidikan dan Penelitian Institusional																								
2.2.3.1. Program Pendidikan/Latihan Institusional																								
2.2.3.2. Program Peningkatan Penelitian/Sev																								

(Lampiran Anggaran Pembangunan Bidang Sosial)

7

Departemen Perencanaan	Departemen Pertahanan	Departemen Pertambangan	Departemen Perhubungan	Departemen P & K	Departemen Kesehatan	Departemen Agama	Departemen Kerdja	Departemen Sosial	Departemen Pemukiman	Jumlah	SIDANG/SEKTOR/SUB SEKTOR/PROGRAM
								289.100		289.100	2.5.2. Sub sektor kesedjitteran Sosial
								151.300		151.300	2.5.2.1. Program Pembinaan Perubahan Sosial
								137.800		137.800	2.5.2.2. Program Bantuan Sosial
					10.000					2.519.000	2.5.3. Sub sektor Air Minum dan Assesmering
					10.000					2.419.000	2.5.3.1. Program Peningkatan Persediaan Air Minum
								100.000		100.000	2.5.3.2. Program Peningkatan Assesmering
								900.064		900.064	2.6. Sektor Penerangan
								900.064		900.064	2.6.1. Sub Sektor Penerangan
								347.890		347.890	2.6.1.1. Program Peningkatan Penerangan Rakyat
								552.174		552.174	2.6.1.2. Program Pengembangan alat-alat mass media
								1.270.500		1.270.500	2.7. Sektor Tertib Rumah
								1.270.500		1.270.500	2.7.1. Sub sektor Tertib Rumah
								1.007.500		1.007.500	2.7.1.1. Program Pembinaan Tertib Rumah
								263.000		263.000	2.7.1.2. Program Pemasjarkatan/Kecelakaan
386.500	566.200	403.500	5.000	6.450.000	4.611.500	1.014.000	220.500	312.900	427.500	24.649.600	D J U M L A H

No. Code	Sektor/Sub-sektor/Program	M.P.R.S.	O.P.R.-G.R.	D.P.A.	S.P.K.	Belkambah	Agung	Kedjaksaan	Kepresidenan	Sekretariat Negara	Badan/Lemb. Non Dep.	Departemen Dalam Negeri	Departemen Luar Negeri	Departemen Hukum	Departemen Kehakiman	Departemen
3.1	Sektor Pemerintahan Umum	133.000	-	27.000	-	-	-	-	54.000	155.500	201.500	675.000	150.000	-	-	25.500
3.1.1	Sub Sektor Pemerintahan Umum	133.000	-	27.000	-	-	-	-	54.000	155.500	201.500	675.000	150.000	-	-	25.500
3.1.1.1	Program Peningk. Efisiensi Aparatur Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	" " Prasarana Fisik Pemerintahan	133.000	-	27.000	-	-	-	-	54.000	155.500	201.500	675.000	150.000	-	-	25.500
3.2	Sektor Pertahanan dan Keamanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1	Sub Sektor Pertahanan dan Keamanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Sektor Badan2 Perwakilan	-	667.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1	Sub Sektor Badan2 Perwakilan	-	667.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.1	Program Perir. Jktan Produk Legislatif	-	667.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Sektor Penguasaan Keuangan Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1	Sub Sektor Penguasaan Keuangan Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.1	Program Peningkatan Pendapatan Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	" " Efisiensi Pengeluaran Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	" " Tata Usaha Keuangan Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	" " Pengawasan Keuangan Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D O C M L A H	133.000	667.000	27.000	86.000	-	-	-	54.000	155.500	201.500	675.000	150.000	5.000.000	-	25.500

ANGGARAN PEMBANGUNAN

3. RUMAH UMUM

(dalam ribuan Rupiah).

Lampiran : 3d

Departemen Keuangan	Bag. Pembi- ayaan & Perhit.	Departemen Perdagangan	Departemen Pertanian	Departemen Perindust- rian	Departemen Pertambangan	Departemen P.U. & T.T.	Departemen Perhubungan	Departemen P. & K.	Departemen Kesehatan	Departemen Agama	Departemen Kerjasama	Departemen Sosial	Departemen	Jumlah	Sektor/Sub Sektor/Program
-	100.000	186.000	374.000	200.200	98.000	304.000	150.000	200.000	88.500	86.000	71.500	57.100	1380	3.485.900	3.1. Sektor Pemerintahan Umum
-	102.000	186.000	374.000	200.200	98.000	304.000	150.000	200.000	88.500	86.000	71.500	57.100	1380	2.485.300	3.1.1 Sub Sektor Pemerintahan Umum
-	-	-	-	-	-	100.000	-	-	21.460	34.000	10.000	4.700	-	186.660	3.1.1.1 Program Penjemp. Efisiensi Aparatur Pemerintahan
-	100.000	186.000	374.000	200.200	98.000	304.000	150.000	200.000	67.040	72.000	61.500	52.400	1380	3.288.640	2 " " Prakerana Fisik Pemerintahan
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	3.2 Sektor Pertahanan dan Keamanan
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	3.2.1 Sub Sektor Pertahanan dan Keamanan
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	667.000	3.3 Sektor Kodan2 Persekitaran
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	667.000	3.3.1 Sub Sektor Badan2 Persekitaran
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	667.000	3.3.1.1 Program Peningkatan Produk Legislatif
1.562.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.648.800	3.4 Sektor Peningkatan Keuangan Negara
1.562.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.648.800	3.4.1 Sub Sektor Peningkatan Keuangan Negara
1.091.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.091.800	3.4.1.1 Program Peningkatan Perencanaan Negara
339.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339.000	2 " " Efisiensi Pengeluaran Negara
32.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.400	3 " " Tata Usaha Keuangan Negara
99.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185.600	4 " " Pengawas Keuangan Negara
1.562.800	100.000	186.000	374.000	200.200	98.000	304.000	150.000	200.000	88.500	86.000	71.500	57.100	138.110.801.100		D J U N L A H

(Dalam ribuan rupiah)
(Dalam ribuan U.S. dollar)
1 US.\$ = Rp. 378,-

ANGGARAN PEMANGUNAN
BANTUAN PROJEK / BANTUAN TEKNIKIS
1971 / 72

No. Code	Bidang / Sektor / Sub Sektor / Program	Non Dep.		Bagian Pembinaan dan Perhitungan		Dep. Pertanian		Dep. P. U. T. L.		Dep. Perhubungan		Dep. P. & K.		Dep. Kesehatan		Djumlah Nilai	
		U.S.\$.	Rp.	U.S.\$.	Rp.	U.S.\$.	Rp.	U.S.\$.	Rp.	U.S.\$.	Rp.	U.S.\$.	Rp.	U.S.\$.	Rp.	U.S.\$.	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	Bidang Ekonomi			7.000	2.646.000	7.110	2.687.580	39.611	23.872.958	62.755	23.721.390					166.476	62.927.928
1.1.	Sektor Pertanian & Irigasi					7.110	2.687.580	18.623	7.089.494							25.733	9.727.074
1.1.1.	Sub Sektor Pertanian					7.110	2.687.580									7.110	2.687.580
1.1.1.1.	Program Peningkatan Produksi Makanan Pokok					2.920	1.107.540									2.920	1.107.540
1.1.1.2.	Program Peningkatan Produksi Pakan Ternak					1.330	502.740									1.330	502.740
1.1.1.3.	Program Peningkatan Hasil Produksi Binaan					400	151.200									400	151.200
1.1.1.4.	Program Peningkatan Produksi Perikanan					2.450	926.100									2.450	926.100
1.1.2.	Sub Sektor Irigasi							18.623	7.089.494							18.623	7.089.494
1.1.2.1.	Program Perbaikan Irigasi							6.809	2.573.802							6.809	2.573.802
1.1.2.2.	Program Perluasan Irigasi							5.000	1.890.000							5.000	1.890.000
1.1.2.3.	Program Pembangunan Irigasi Lainnya							6.814	2.575.692							6.814	2.575.692
1.3.	Sektor Tenaga Listrik							49.096	18.558.288							49.096	18.558.288
1.3.1.	Sub Sektor Tenaga Listrik							49.096	18.558.288							49.096	18.558.288
1.3.1.1.	Program Peningkatan Tenaga Listrik							49.096	18.558.288							49.096	18.558.288
1.4.	Sektor Perhubungan dan Perindustri			7.000	2.646.000			21.892	8.275.176	62.755	23.721.390					91.647	34.642.566
1.4.1.	Sub Sektor Perhubungan			7.000	2.646.000			21.892	8.275.176	62.755	23.721.390					91.647	34.642.566
1.4.1.1.	Program Perbaikan Prasarana Perhubungan Darat (Jalan dan Djembatan)							21.892	8.275.176							21.892	8.275.176
1.4.1.2.	Program Peningkatan Dan Per- baikan Angk. K.A.									6.090	3.058.000					6.090	3.058.000
1.4.1.3.	Program Perbaikan Prasarana Perhubungan Laut									23.230	8.780.940					23.230	8.780.940

LAMPIRAN 5.

R A N T J A N G A N

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NO.: TAHUN 1971

tentang

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 1971/1972

DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun anggaran 1971/1972 perlu ditetapkan dengan Undang-Undang;
- b. bahwa sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ketiga dalam rangka Rentjana Pembangunan Lima Tahun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1971/1972 tetap mengikuti skala prioritas Nasional sebagaimana yang tersurat dalam Ketetapan Majelis Permusjawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966 khususnya pasal 25;
- c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1971/1972 adalah manifestasi daripada rentjana kerja Pemerintah, khususnya pelaksanaan rentjana tahunan Pembangunan Lima Tahun I 1969/1970-1973/1974 sehingga bidang pertanian khususnya produksi pangan dan ekspor, tetap menjadi titik sentral pembangunan;
- d. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1971/1972 disamping memelihara dan meneruskan hasil-hasil yang telah ditjapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya, juga meletakkan

landasan ...

landasan-landasan baru bagi usaha-usaha pembangunan selanjutnya

- Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1) jo pasal 23 ayat (1);
2. Ketetapan Majelis Permusjawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966;
3. Ketetapan Majelis Permusjawaratan Rakyat Sementara No. XLI/MPRS/1968;
4. Indische Comptabiliteitswet sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 9 tahun 1963 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1966 No. 53).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1971/1972.

Pasal 1.

- (1) Pendapatan Negara tahun anggaran 1971/1972 diperoleh dari :
- a. Sumber-sumber Anggaran Rutin dan
- b. Sumber-sumber Anggaran Pembangunan.
- (2) Pendapatan Rutin dimaksud pada ayat (1) sub a menurut perkiraan berdjumlah Rp. 415.960.385.500.
- (3) Pendapatan Pembangunan dimaksud pada ayat (1) sub b menurut perkiraan berdjumlah Rp. 169.250.000.000.
- (4) Djumlah seluruh Pendapatan Negara 1971/1972 menurut perkiraan berdjumlah Rp. 585.210.385.500.

(5) Perintjian ...

- (5) Perintjian Pendapatan dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatas berturut-turut dimuat dalam Lampiran I dan II Undang-Undang ini.

Pasal 2.

- (1) Anggaran Belandja Negara tahun anggaran 1971/1972 terdiri atas :
- a. Anggaran Belandja Rutin dan
 - b. Anggaran Belandja Pembangunan.
- (2) Anggaran Belandja Rutin dimaksud pada ayat (1) sub a menurut perkiraan berdjumlah Rp. 364.142.885.500.
- (3) Anggaran Belandja Pembangunan dimaksud pada ayat (1) sub b menurut perkiraan berdjumlah Rp. 221.063.500.000.
- (4) Djumlah seluruh Anggaran belandja Negara tahun anggaran 1971/1972 menurut perkiraan Rp. 585.210.385.500.
- (5) Perintjian pengeluaran dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatas berturut-turut dimuat dalam Lampiran III dan IV Undang-Undang ini
- (6) Perintjian dalam Lampiran III dimaksud dalam ayat (5) pasal ini hanya sampai pada pos-posnja, sedang perintjian lebih lanjut sampai pada mata anggaran yang disalurkan untuk Lembaga-Lembaga Negara/Departemen-Departemen/Lembaga-Lembaga non Departemen ditentukan menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perbendaharaan (Indische Comptabiliteitswet).
- (7) Perintjian dalam Lampiran IV dimaksud dalam ayat (5) pasal ini adalah menurut bidang dan sektor, sedang perintjian lebih lanjut sampai pada projek-projek ditentukan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 3.

- (1) Pada pertengahan tahun dibuat laporan realisasi mengenai :
 - a. Anggaran Pendapatan Rutin,
 - b. Anggaran Pendapatan Pembangunan,
 - c. Anggaran Belanja Rutin,
 - d. Anggaran Belanja Pembangunan.
- (2) Pada pertengahan tahun dibuat laporan realisasi mengenai :
 - a. Kebidjaksanaan perkreditan,
 - b. Perkembangan lalu-lintas pembayaran luar negeri.
- (3) Dalam laporan dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, disusun pula prognosa untuk enam bulan berikutnya.
- (4) Laporan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dibahas bersama antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
- (5) Penjesuaian anggaran dengan perkembangan/perubahan keadaan, dibahas bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Pasal 4.

Selambat-lambatnja pada akhir tahun anggaran 1971/1972 oleh Pemerintah diajukan Rantjangan Undang-Undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 1971/1972 berdasarkan tambahan dan perubahan sebagai hasil penjesuaian dimaksud dalam pasal 3 ayat (5) untuk mendapatkan pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Pasal 5.

- (1) Setelah tahun anggaran 1971/1972 berakhir, dibuat Perhitungan Anggaran mengenai pelaksanaan anggaran.
- (2) Perhitungan Anggaran dimaksud dalam ayat (1) pasal ini setelah diteliti oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Pasal 6.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perbendaharaan (Indische Comptabiliteitswet) yang bertentangan dengan bentuk dan susunan Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1971.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di : Djakarta.

Pada tanggal:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O.

DJENDERAL T.N.T.

Diundangkan di : Djakarta

Pada tanggal :

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

A L A M S J A H

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

P E N D J E L A S A N

A T A S

UNDANG-UNDANG NOMOR TAHUN 1971

tentang

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 1971/1972

U M U M

Sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun ketiga dimana rentjana tahunan Pembangunan Lima Tahun I 1969/1970 - 1973/1974 mendapatkan manifestasinya dalam Anggaran Pembangunan yang sed jauh mungkin disusun berdasarkan prinsip "planning, programming dan budgeting", Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1971/1972 tetap mengikuti skala prioritas Nasional seperti yang tersurat dalam Ketetapan Majelis Permusjawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966. Sedjalan dengan itu bidang pertanian, khususnya sektor produksi pangan dan ekspor, tetap merupakan titik sentral kegiatan pembangunan. Dalam pada itu, setjara simultan diusahakan pula pembangunan dari pada kegiatan-kegiatan yang menundjang bidang pertanian tersebut sehingga dapatlah diharapkan bahwa proses pembangunan akan berkembang dengan lebih tjepat.

Sebagaimana diketahui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rentjana kerdja Pemerintah yang didjelmakan dalam angka-angka. Oleh sebab itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1971/1972 yang tetap berpegang pada kebidjaksanaan anggaran berimbang yang dinamis, mengambil sikap untuk mendahulukan pemeliharaan sambil merampungkan apa yang telah diusahakan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun-tahun sebelumnya, disamping menjediakan dana bagi bantuan projek dan pembangunan-pembangunan baru yang merupakan landasan bagi kelanjutan pembangunan dalam rangka Pembangunan Lima Tahun I dan seterusnya.

Dalam ...

Dalam hubungan ini, maka dana-dana yang telah disediakan untuk dimanfaatkan oleh kegiatan-kegiatan diatas, sejogianja terus diusahakan agar dapat dipergunakan sesuai rentjana dan dalam batas-batas daya absorosi aparaturne Negara.

Sementara itu, pembiayaan yang bertudjuan untuk mengurangi tekanan pengangguran serta mendorong kegiatan yang membuka kesempatan kerja sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi terus pula disediakan, antara lain melalui bantuan kepada desa dan kabupaten serta pembiayaan melalui perbankan.

Dengan semakin jelasnya prioritas dan arah didalam bidang pengeluaran, baik didalam anggaran routine maupun anggaran pembangunan, dan juga semakin dirasakannya kebutuhan pembiayaan yang bertambah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran tersebut, maka masalah peningkatan penerimaan dalam negeri menjadi masalah Nasional. Dengan terus mengusahakan peningkatan penerimaan negara untuk menutup pengeluaran sesuai kebutuhan diatas serta penghematan yang dilakukan pada anggaran rutin untuk memungkinkan terkumpulnya tabungan Pemerintah sebagai pendjelmaan daripada tekad untuk membiayai pembangunan dengan dana-dana dalam negeri sendiri, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1971/1972 disusun berdasarkan asumsi-asumsi umum sebagai berikut :

- a. Dipertahankannya kestabilan moneter yang telah tertjapai dalam tahun anggaran 1970/1971 serta terselenggaranya perkembangan harga kearah yang lebih mantap lagi dengan selalu diusahakan dalam djangkauan daya beli masyarakat.
- b. Dapat ditingkatkannya penerimaan Negara meskipun diberikan fasilitas-fasilitas dan perangsang-perangsang fiskal kepada industri-industri baik industri yang telah ada maupun industri baru dalam rangka penanaman modal.

c. Target...

- c. Target penerimaan Negara yang ditetapkan dari sektor perdagangan internasional dapat dipertahankan, meskipun adanya penyesuaian dalam kebijaksanaan disektor tersebut.
- d. Tidak terjadinya perubahan yang menjolok dalam situasi internasional yang dapat membawa pengaruh negatif dalam hubungan ekonomi internasional Republik Indonesia.

Agar biaya yang tersedia dapat dimanfaatkan setinggi mungkin bagi kemajuan dan perkembangan ekonomi, maka tanpa meninggalkan dasar pertanggungjawaban menurut ketentuan perbendaharaan yang berlaku - pergeseran antara mata anggaran, pasal dan pos dari sesuatu bagian anggaran dapat dilakukan. Untuk pergeseran mata anggaran harus dimintakan persetujuan Presiden sedangkan pergeseran antar pos adalah materi Undang-Undang.

Dalam pada itu apabila penerimaan negara meningkat sedemikian rupa sehingga terdapat kelebihan dalam target tabungan Pemerintah maka kelebihan tersebut hendaknya disalurkan kepada pembiayaan yang dapat menunjang pembangunan sesuai skala prioritas Rencana Pembangunan Lima Tahun.

Supaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat berfungsi sebagai alat pelaksana program Pemerintah dan penggerak kegiatan ekonomi dalam masyarakat, kiranya dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan sistim Planning - Programming - Budgeting (PPB) perlu lebih ditingkatkan.
- b. Adanya single management didalam pengelolaan keuangan Negara berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Disiplin didalam pelaksanaan anggaran sesuai dengan Undang-Undang ini serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- d. Peningkatan daya guna didalam Aparatur Negara yang menjangkut segi-segi

struktural, prosedural dan personal.

e. Administrasi Keuangan Negara termasuk prosedur pembelian agar diperbaiki dengan memperhatikan sistem tender dan standardisasi harga maupun standardisasi materiel.

PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Tjukup djelas.

Pasal 2

Tjukup djelas.

Pasal 3

Ajat (1). Tjukup djelas.

Ajat (2). Tjukup djelas.

Ajat (3). Tjukup djelas.

Ajat (4). Pembahasan dimaksudkan untuk menemukan prinsip-prinsip dalam menentukan Rantjangan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tahun berikutnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 5 ajat (1) jo pasal 23 ajat (1).

Ajat (5). Tjukup djelas.

Pasal 4

Tjukup djelas.

Pasal 5

Tjukup djelas.

Pasal 6

Tjukup djelas.

Pasal 7

Tjukup djelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO.